PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

ENERGIZING GROWTH, EMPOWERING SUSTAINABILITY

ANNUAL REPORT 2024



Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal

About the Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

Selamat datang di Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal selanjutnya disebut "Perseroan" dengan tema "*Energizing Growth, Empowering Sustainability*". Laporan Tahunan ini diterbitkan mengacu kepada kriteria pada Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyampaian laporan tahunan Perseroan mengelaborasi beberapa dokumen Perseroan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Keuangan *audited*, dan Laporan Manajemen. Penggunaan dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi Perseroan dalam menghadirkan informasi dan data yang valid. Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perseroan.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan "Dollar AS atau USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kantor Pusat
Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten 42446
Fax: (0254) 601148
Telp: (0254) 601146/601147

Kantor Bisnis
Jl. Yos Sudarso No. 205, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360.

Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: pet.pertamina
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Linkedin: Pertamina Energy Terminal
Website: https://pertamina-pet.com

Welcome to the Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal, hereinafter referred to as "the Company," adopting the theme "Energizing Growth, Empowering Sustainability". This Annual Report has been prepared in accordance with the provisions set forth in the Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

This Annual Report consolidates various corporate documents including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), audited Financial Statements, and Management Report. The inclusion of these documents is intended to provide a solid and substantiated foundation for presenting accurate and credible information and data. The Report contains statements regarding the Company's financial conditions, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives that constitute forward-looking statements pursuant to prevailing laws and regulations. Such statements are subject to inherent risks and uncertainties that may cause actual outcomes differ materially from anticipated. All forward-looking statements in this Report are based on current conditions and projections of future circumstances surrounding the Company's business environment.

All references to the monetary unit "Rupiah," "Rp," or "IDR" denote the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States of America. Unless otherwise stated, all financial information is presented in Indonesian Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

To accommodate a broader readership and in compliance with regulatory requirements, this report is presented in two languages: Indonesian and English.

For further information, please contact:

Head Office
Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Banten Province 42446
Fax: (0254) 601148
Phone: (0254) 601146/601147

Business Office
Jl. Yos Sudarso No. 205, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14360.

Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: pet.pertamina
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Linkedin: Pertamina Energy Terminal
Website: https://pertamina-pet.com

Penjelasan Tema 2024
Explanation of 2024 Theme



Energizing Growth, Empowering Sustainability

Komitmen Perseroan dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang tangguh (*growth*) sembari memperkuat fondasi keberlanjutan (*sustainability*) sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Kata *Energizing Growth* mencerminkan semangat Perseroan dalam mengakselerasi ekspansi usaha, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui optimalisasi aset, transformasi digital, serta peningkatan efisiensi dan tata kelola yang andal.

Sementara itu, *Empowering Sustainability* menegaskan dedikasi Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Ini diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), penerapan prinsip *Environmental*, *Social, and Governance* (ESG), serta integrasi keberlanjutan dalam seluruh rantai bisnis.

Tema ini menjadi kelanjutan dari upaya konsisten Perseroan dalam menjawab tantangan dan peluang di industri energi dan logistik maritim, sekaligus memperkuat peran sebagai bagian dari *Subholding Integrated Marine Logistic* yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab.

Energizing Growth, Empowering Sustainability

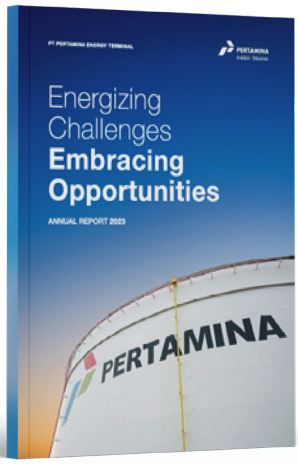
The theme reflects the Company's commitment to driving resilient business growth while reinforcing the foundation of sustainability as an integral part of its long-term strategy.

"Energizing Growth" captures the Company's determination to accelerate business expansion, enhance competitiveness, and generate sustainable economic value through asset optimization, digital transformation, and improvements in operational efficiency and sound governance.

Meanwhile, "Empowering Sustainability" underscores the Company's dedication to maintaining a balanced approach between economic advancement and social and environmental responsibilities. This commitment is manifested through the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs, adherence to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, and the integration of sustainability across the entire business value chain.

The theme serves as a continuation of the Company's consistent efforts to address the evolving challenges and opportunities in the energy and maritime logistics industry while strengthening its role as part of the Integrated Marine Logistics Subholding, an entity that is adaptive, innovative, and accountable.

Kesinambungan Tema
Continuity of Theme



2023

Energizing Challenges Embracing Opportunities

Tahun 2023 menjadi tahun yang *challenging* bagi Perseroan, setelah *rebranding* yang dilakukan oleh Perseroan.

Dengan semangat baru Perseroan terus mencari dan mengembangkan peluang yang ada dan berusaha untuk terus melaju menggapai target-target dengan tantangan yang ada.

Energizing Challenges Embracing Opportunities

The year 2023 has been a challenging year for the Company, following the rebranding by the Company.

With renewed spirit, the Company continues to seek and develop existing opportunities, striving to advance and achieve targets despite the occurring challenges.



2022

Energizing New Chapter, Level Up Challenge

Pada tahun 2022 menjadi titik berserajah bagi Perseroan, dimana pada tahun ini setelah Perseroan melakukan *rebranding* dari yang sebelumnya bernama PT Peteka Karya Tirta menjadi PT Pertamina Energy Terminal. Perubahan nama ini juga ditandai dengan berubahnya lini bisnis di Perseroan, yang semula hanya berfokus pada bisnis *fresh water*, kini melebarkan pasar dengan mengelola 6 terminal penyimpanan minyak dan gas.

Seiring dengan perubahan nama serta lini bisnis Perseroan, tentunya menjadi langkah baru khususnya dalam proses bisnis Perseroan menuju ke arah yang lebih baik. Diharapkan Perseroan lebih siap dan mampu menghadapi tantangan yang semakin besar.

Dengan terbukanya peluang-peluang baru bagi Perseroan serta dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya dukungan seluruh Pekerja Perseroan dengan semangat yang tinggi, dan rasa percaya diri dalam upaya menghadapi berbagai tantangan yang akan datang serta semangat untuk terus berinovasi untuk kemajuan Perseroan.

Energizing New Chapter, Level Up Challenge

In 2022, it was a milestone year for the Company, as the company underwent rebranding from its previous name, PT Peteka Karya Tirta to PT Pertamina Energy Terminal. This name change also marked a shift in the Company's business line, expanding beyond the fresh water business to managing 6 oil and gas terminal storages.

Along with the name change and the expansion of the Company's business line, it signifies a new chapter in the company's journey towards improvement. It is expected the company is better prepared and capable of facing greater challenges in line with the changes.

With the opening of new opportunities for the company and the realization of set targets, the support of all the Company employees is crucial. This support should be accompanied by high spirits, confidence, and a readiness to face upcoming challenges, as well as the drive to innovate continuously for the progress of the company.



2021

Transformasi Bisnis untuk Menjadi Terminal Terintegrasi Bertaraf Internasional

Tahun 2021 merupakan fase penting untuk PT Peteka Karya Tirta ("PKT") sebagai titik awal pertumbuhan bisnis yang lebih baik serta daya saingnya dengan menciptakan nilai tambah sebagai Perseroan bertaraf internasional. Penetapan PKT sebagai salah satu anak perusahaan PT Pertamina International Shipping ("PIS") dan penyerahan pengelolaan 6 terminal menjadikan PKT bertransformasi menjadi Perseroan yang lebih besar dan siap menghadapi tantangan dinamika bisnis yang terus berlanjut serta memiliki perencanaan untuk pengelolaan & pengembangan bisnis yang terintegrasi bagi *Subholding Integrated Marine Logistics* dengan tujuan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Transformasi ini merupakan langkah strategis PKT beradaptasi dengan perubahan bisnis ke depan, agar dapat bergerak lebih lincah dan lebih cepat, serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif.

Business Transformation to Become An Integrated International-Grade Terminal

The year 2021 was an important phase for PT Peteka Karya Tirta ("PKT") as a starting point for better business growth and improving its competitiveness by creating added value as an international-grade company. PKT's designation as one of PT Pertamina International Shipping's ("PIS") subsidiaries, with the transfer of management of six terminals, has transformed PKT into a greater company and prepared it to face the ongoing challenges of dynamic business and has a plan for integrated business management and development for Subholding Integrated Marine Logistics to increase company profitability.

This transformation is a strategic step for PKT to adapt to future business changes, move more agile and faster, and focus on wider and more aggressive business development.

Daftar Isi
Table of Contents

2 Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal
About the Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

3 Penjelasan Tema 2024
Explanation of 2024 Theme

4 Kesinambungan Tema
Continuity of Theme

6 Daftar Isi
Table of Contents

01 Ikhtisar Utama
Main Overview

10 Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Overview

12 Ikhtisar Kinerja Bisnis & Operasional
Business & Operational Performance Overview

15 Ikhtisar Saham & Obligasi
Stocks & Bonds Overview

15 Ikhtisar Dividen
Dividend Overview

15 Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Overview

02 Laporan Manajemen
Management Report

18 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

26 Laporan Direksi
Board of Directors Report

03 Profil Perusahaan
Company Profile

34 Identitas Perusahaan
Company Identity

35 Riwayat Singkat Perseroan
Company Brief History

36 Jejak Langkah Perseroan
Company Milestones

38 Visi dan Misi Perseroan
Company Vision and Mission

39 Tata Nilai Perseroan
Company Values

40 Bidang Usaha
Business Fields

41 Produk dan Jasa
Products and Services

41 Wilayah Operasional
Operational Areas

42 Kantor Cabang atau Perwakilan
Branch Offices or Representatives

44 Struktur Organisasi
Organizational Structure

45 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

49 Profil Direksi
Board of Directors Profile

52 Sumber Daya Manusia
Human Resources

55 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

56 Struktur Grup Perseroan
Company Group Structure

57 Anak Perusahaan & Afiliasi
Subsidiaries & Affiliates

57 Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

57 Kronologi Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

57 Efek Lainnya
Other Securities

58 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions

59 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Company Website Information

60 Peristiwa Penting Tahun 2024
Significant Events in 2024

62 Penghargaan & Sertifikasi Tahun 2024
Awards & Certifications in 2024

68 Sinergi Pertamina *Group*
Pertamina Group Synergy

04 Analisis & Diskusi Manajemen
Management Discussion & Analysis

72 Tinjauan Perekeonomian
Economic Review

76 Tinjauan Industri
Industry Review

81 Tinjauan Per Segmen Usaha
Business Segment Review

83 Pendapatan per Segmen
Revenue per Segment

85 Kinerja Keuangan Komrpehensif
Comprehensive Financial Review

91 Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debt

92 Tingkat Kolektibilitas Piutang
Accounts Receivable Collectibility Rate

92 Struktur Modal
Capital Structure

93 Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya
Comparison Between Target at the Beginning of the Year and Its Realization

94 Proyeksi Tahun 2025
2025 Projection

96 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure

96 Investasi Barang Modal
Capital Expenditure

96 Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Soundness Level

96 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Accountant's Report Date

96 Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi
Business Prospects, Industry Conditions, and Economic Conditions

100 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

101 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Employee Share Ownership Program and/or Management (ESOP/MSOP) Share Ownership by Directors and Commissioners

101 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Funds from Public Offerings

102 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information Involving Conflict of Interest or Transactions with Affiliated Parties

103 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perseroan
Changes in Legislation and Their Impact on Company Performance

104 Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perseroan
Changes in Accounting Policies, Reasons, and Their Impact on Company Financial Statements

104 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

05 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

109 Dasar Penerapan GCG
Basis for GCG Implementation

109 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

110 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

124 Direksi
Board of Directors

136 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

140 Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Prosedur dan Mekanisme Penilaian Kinerja
Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners Performance Assessment Procedure and Mechanism

146 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

148 Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Committee under the Board of Commissioners

149 Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
Nomination of Board of Commissioners and Directors

151 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration for Board of Commissioners and Directors

152 Komite Audit
Audit Committee

158 Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee

158 Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko
Investment Planning and Risk Management Committee

164 Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

169 Internal Audit
Internal Audit

179 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

181 Manajemen Risiko
Risk Management

186 Kantor Akuntan Publik
Public Accountant Office

187 Perkara Hukum Tahun 2024
Legal Cases in 2024

187 Sanksi Administratif 2024
Administrative Sanctions in 2024

187 Kode Etik Perseroan
Company Code of Conducts

189 Akses dan Transparansi Informasi
Access and Transparency of Information

190 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP)
Employee and/or Management Shares Ownership Prgoram (ESOP/MSOP)

190 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

194 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

194 Penilaian Penerapan GCG
Assessment of GCG Implementation

06 Tanggung Jawab Sosial Perseroan
Corporate Social Responsibility

214 Tanggung Jawab Sosial terkait Operasi yang Adil
Social Responsibility related to Fair Operations

216 Tanggung Jawab Sosial dalam Penerapan HAM
Social Responsibility in Human Rights Implementation

217 Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup
Social Responsibility towards the Environment

224 Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat
Social Responsibility towards the Community

227 Tanggung Jawab Sosial terhadap K3
Social Responsibility towards OHS

231 Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan
Social Responsibility towards Customers

232 Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris
Statement of Directors and Commissioners

Laporan Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Statements



Ikhtisar Utama

Main Overview



PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

01

Ikhtisar Utama
Main Overview

Ikhtisar Kinerja Keuangan — Financial Performance Overview

Laporan Laba Rugi
Profit and Loss Statement

Disajikan dalam Ribuan Rupiah
Presented in Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020*
Pendapatan Revenue	1.029.475.252	953.536.263	950.826.380	501.240.296	698.277.349
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(915.132.190)	(859.791.613)	(849.311.367)	(642.426.718)	(694.227.819)
Laba Bruto Gross Margin	114.343.062	93.744.650	101.515.013	(141.186.422)	4.049.530
Beban Umum Dan Administrasi General And Administrative Expenses	(124.198.762)	(76.759.071)	(76.329.330)	(14.436.526)	29.165.500
Pendapatan Keuangan Financial Revenue	20.877.227	5.738.039	1.280.154	186.217	790.810
Beban Keuangan Financial Expenses	(4.343.035)	(6.970.466)	(8.278.007)	(108.944)	(4.618)
Lain-Lain, (Bersih) Others (Net)	124.482.065	75.458.611	1.681.870	(2.050.689)	(21.883.260)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	131.160.557	91.211.763	19.869.700	(157.673.637)	(46.999.230)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(51.219.452)	(23.110.754)	(6.697.097)	5.771.917	(7.408.653)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Net Income/(Loss) For the Year	79.941.105	68.101.009	13.172.603	(151.901.720)	(54.407.883)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income For the Year	80.500.214	67.142.703	15.458.167	(19.273.579)	25.625.295

*Disajikan Kembali
*Restatement

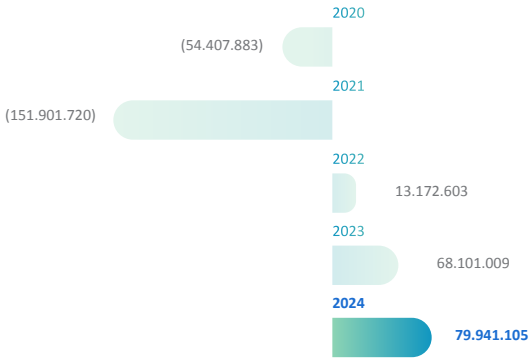
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan
Financial Position Overview

Disajikan dalam Ribuan Rupiah
Presented in Thousands Rupiah

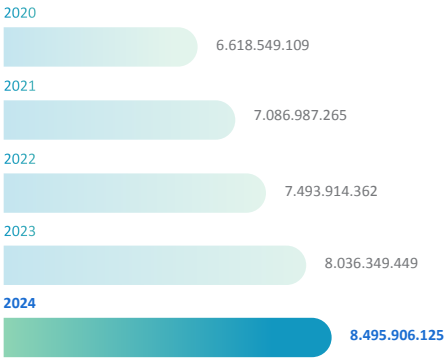
Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020*
Aset Lancar Current Assets	586.932.115	971.620.233	800.872.278	237.547.942	44.977.912
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	7.908.974.010	7.064.729.216	6.693.042.084	6.849.439.323	6.573.571.197
Jumlah Aset Total Assets	8.495.906.125	8.036.349.449	7.493.914.362	7.086.987.265	6.618.549.109
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.489.050.205	555.798.172	560.942.801	342.515.552	196.903.107
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	67.212.143	621.407.714	140.970.701	371.446.020	313.925.588
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.556.262.348	1.177.205.886	701.913.502	713.961.572	510.828.695
Ekuitas Equity	6.939.643.777	6.859.143.563	6.792.000.860	6.373.025.693	6.107.720.414
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	8.495.906.125	8.036.349.449	7.493.914.362	7.086.987.265	6.618.549.109

*Disajikan Kembali
* Restatement

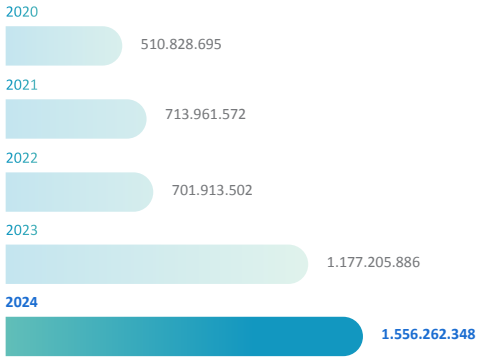
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan
Net Income / (Loss) For the Year



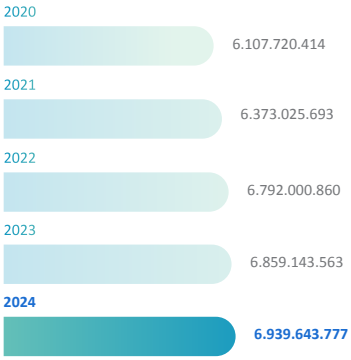
Jumlah Aset
Total Assets



Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



Ekuitas
Equity



Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement

Disajikan dalam Ribuan Rupiah
Presented in Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	558.353.489	106.717.645	579.529.442	(16.153.876)	(1.770.250)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment	(801.855.128)	(515.906.551)	(356.211.246)	(77.509.672)	(6.542.200)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing	(3.294.982)	541.588.115	295.450.212	97.658.000	(481.318)
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) of Cash and Cash Equivalent	(246.796.621)	132.399.209	518.768.408	3.994.452	(8.793.768)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year	664.535.031	532.135.822	13.367.414	9.372.962	18.166.730
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at the end of the year	417.738.410	664.535.031	532.135.822	13.367.414	9.372.962

*Disajikan Kembali
*Restatement

Rasio Keuangan (%)
Financial Ratio (%)

Rasio Ratio	2024	2023	2022	2021	2020*
Tingkat Pengembalian atas Aset Return on Assets	0,94	0,85	0,18	(2,14)	(0,82)
Tingkat Pengembalian atas Ekuitas Return on Equity	1,15	0,99	0,19	(2,38)	(0,89)
Margin Bersih atas Pendapatan Net Profit Margin	7,77	7,14	1,39	(30,31)	(7,79)
Rasio Utang atas Aset Debt to Asset Ratio	18,32	14,65	9,37	10,07	7,72
Rasio Liabilitas atas Ekuitas Debt to Equity Ratio	22,43	17,16	10,33	11,20	8,36

*Disajikan Kembali
*Restatement

Ikhtisar Kinerja Bisnis & Operasional
Operational & Business Performance Overview

Working Loss

Working Loss

Working Loss	RKAP 2024 (%)	2024 (%)	2023** (%)	2022* (%)
Fuel Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Fuel Terminal	(0,07)	(0,02)	(0,03)	(0,01)
Integrated Terminal Tanjung Uban (BBM) Tanjung Uban (Fuel) Integrated Terminal	(0,07)	(0,00)	(0,03)	(0,02)
Integrated Terminal Tanjung Uban (LPG) Tanjung Uban (LPG) Integrated Terminal	(0,20)	(0,42)	(0,13)	(0,54)
Terminal LPG Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	(0,06)	0,09	(0,13)	0,01
Fuel Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	(0,07)	(0,02)	(0,03)	0,01
Fuel Terminal Baubau Baubau Fuel Terminal	(0,07)	0,01	0,01	0,01

*Disajikan Kembali
*Restatement
**) Penyesuaian realisasi WL 2023 mengacu pembulatan nilai stock
**) Adjustment to the 2023 WL realization refers to the rounding of share values

Loading Loss (R1)

Loading Loss (R1)

Loading Loss (R1)	RKAP 2024 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2022* (%)
Fuel Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Fuel Terminal	(0,13)	0,00	0,09	(0,02)
Integrated Terminal Tanjung Uban (BBM) Tanjung Uban (Fuel) Integrated Terminal	(0,13)	0,05	0,06	(0,16)
Integrated Terminal Tanjung Uban (LPG) Tanjung Uban (LPG) Integrated Terminal	(0,13)	(0,03)	(0,11)	(0,09)
Terminal LPG Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	(0,13)	(0,11)	(0,04)	(0,01)

Loading Loss (R1)	RKAP 2024 (%)	2024 (%)	2023 (%)	2022* (%)
Fuel Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	(0,13)	0,01	0,03	0,06
Fuel Terminal Baubau Baubau Fuel Terminal	(0,13)	0,07	(0,02)	0,00

*Disajikan Kembali
*Restatement

Integrated Port Time (IPT)

Integrated Port Time (IPT)

Integrated Port Time (IPT)	RKAP 2024 (Jam)	2024 (Jam)	2023* (Jam)	2022* (Jam)
Fuel Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Fuel Terminal	-	4,32	30,64	37,61
Integrated Terminal Tanjung Uban Tanjung Uban Integrated Terminal	37,68	26,12	30,57	33,06
Terminal LPG Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	42,78	42,65	42,91	36,76
Fuel Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	33	27,9	26,63	18,29
Fuel Terminal Baubau Baubau Fuel Terminal	56	37,88	54,65	57,08

*Disajikan Kembali
*Restatement

Critical Equipment Availability (CEA)

Critical Equipment Availability (CEA)

Critical Equipment Availability (CEA)	RKAP 2024 (%)	2024 (%)	2023* (%)	2022* (%)
Fuel Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Fuel Terminal	95,00	95,83	91	100
Integrated Terminal Tanjung Uban Tanjung Uban Integrated Terminal	95,00	96,77	97	98,65
Terminal LPG Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	95,00	95,51	95	97,82
Fuel Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	95,00	98,56	96	98,87
Fuel Terminal Baubau Baubau Fuel Terminal	95,00	100	100	98,00

*Disajikan Kembali
*Restatement

Thruput Penyaluran

Throughput Distribution

Thruput Penyaluran Throughput Distribution	RKAP 2024 (KL atau MT) 2024 RKAP (KL or MT)	2024 (KL atau MT) (KL or MT)	2023 (KL atau MT) (KL or MT)	2022 (KL atau MT) (KL or MT)
Fuel Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Fuel Terminal	1.200.000	845	203.434	574.320
Integrated Terminal Tanjung Uban (BBM) Tanjung Uban (Fuel) Integrated Terminal	3.374.204	3.667.354	3.290.337	3.418.062
Integrated Terminal Tanjung Uban (LPG) Tanjung Uban (LPG) Integrated Terminal	69.300	260.857	702.703	998.295
Terminal LPG Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	2.880.429	2.972.711	3.008.417	2.743.265
Fuel Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	1.466.911	1.526.341	1.492.139	1.397.058
Fuel Terminal Baubau Baubau Fuel Terminal	2.465.970	2.869.741	2.575.040	2.279.972

Water Operation

Water Operation

No	Keterangan	Audited 2023	RKAP 2024	Audited 2024	% Realisasi *Audited* 2024 terhadap	
		A	B	C	*Audited* 2023 (C/A)	RKAP 2024 (C/B)
		Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)
1	Volume air di Ciwandan Water Volume at Ciwandan	1.869.104	2.169.988	1.204.311	64%	55%
2	Volume air di Cab. Batam & Pulau Sambu Water Volume at Batam & Sambu Island Branches	1.033.638	1.255.975	1.231.411	119%	98%
3	Volume air di Cab. Belawan Water Volume at Belawan Branch	1.610	1.771	1.814	113%	102%
4	Volume air di Cab. Dumai Water Volume at Dumai Branch	14.818	16.300	7.788	53%	48%
5	Volume air di Cab. Pekanbaru Water Volume at Pekanbaru Branch	4.405	4.846	4.030	92%	83%
6	Volume air di Cab. Teluk Kabung Water Volume at Teluk Kabung Branch	26.663	29.329	21.357	80%	73%
7	Volume air di Cab. Tanjung Uban Water Volume at Tanjung Uban Branch	34.089	37.498	35.597	104%	95%
8	Volume air di Cab. Panjang Water Volume at Panjang Branch	18.797	20.677	17.222	91%	83%
9	Volume air di Cab. Plaju & STS Muntok Water Volume at Plaju & STS Muntok Branches	31.086	34.195	27.367	88%	80%
10	Volume air di Cab. TG. Gerem & Tg. Sekong Water Volume at TG. Gerem & Tg. Sekong Branches	19.623	21.585	10.224	52%	47%
11	Volume air di Cab. Tg. Priok Water Volume at Tg. Priok Branch	27.341	30.075	18.756	68%	62%
12	Volume air di Cab. Balongan & Cirebon Water Volume at Balongan & Cirebon Branches	5.795	6.375	4.545	78%	71%
13	Volume air di Cab. Surabaya & Gresik Water Volume in Surabaya & Gresik Branches	22.557	24.813	23.903	106%	96%
14	Volume air di Cab. Tanjung Wangi Water Volume at Tanjung Wangi Branch	10.277	11.250	13.194	128%	117%
15	Volume air di Cab. Manggis Water Volume at Manggis Branch	22.067	24.274	23.647	107%	97%
16	Volume air di Cab. Maumere Water Volume at Maumere Branch	0	0	0	0%	0%
17	Volume air di Cab. Kupang Water Volume at Kupang Branch	8.289	9.712	11.350	137%	117%
18	Volume air di Cab. Pontianak Water Volume at Pontianak Branch	8.553	9.408	2.384	28%	25%
19	Volume air di Cab. Kotabaru Water Volume at Kotabaru Branch	22.402	24.642	21.139	94%	86%
20	Volume air di Cab. Semarang Water Volume at Semarang Branch	200	220	1.134	567%	515%
21	Volume air di Cab. Balikpapan & Lawe2 Water Volume at Balikpapan & Lawe2 Branches	71.812	78.993	59.614	83%	75%
22	Volume air di Cab. Wayame Water Volume at Wayame Branch	28.035	30.839	27.776	99%	90%
23	Volume air di Cab. Cilacap Water Volume at Cilacap Branch	30.163	33.179	33.367	111%	101%
24	Volume air di Cab. Tuban Water Volume at Tuban Branch	4.510	4.961	5.025	111%	101%
25	Volume air di Teluk Semangka Water Volume at Teluk Semangka	305	336	350	115%	104%
26	Volume air di Rembang Water Volume at Rembang	4.275	4.703	3.991	93%	85%
27	Volume air di Bima Water Volume at Bima	440	484	550	125%	114%

No	Keterangan	Audited 2023	RKAP 2024	Audited 2024	% Realisasi *Audited* 2024 terhadap	
		A	B	C	*Audited* 2023 (C/A)	RKAP 2024 (C/B)
		Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)
28	Distribusi AMDK Bottled Drinking Water Distribution	1.040	1.144	1.101	106%	96%
29	Volume air di Kasim & Sorong Water Volume at Kasim & Sorong	0	5.000	6.370	100%	127%
	Total Tonase Total Tonnage	3.321.894	3.892.569	2.819.316	85%	72%

Ikhtisar Saham & Obligasi
Stocks and Bonds Overview

Selama tahun 2024, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham umum maupun penerbitan efek lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki informasi terkait ikhtisar saham dan/atau efek lainnya.

Throughout 2024, The Company did not undertake any corporate actions related to public share offerings or the issuance of other securities. As such, the Company does not have any information on shares or other securities for the year.

Ikhtisar Dividen
Dividend Overview

Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan tahun 2024 untuk tahun buku 2023, Perseroan tidak memberikan dividen kepada pemegang saham

Based on the resolution of the GMS held in 2024 for the fiscal year 2023, the Company Terminal did not distribute any dividends to its shareholders.

Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Overview

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Pada tahun 2024, Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah 61,32 dengan katagori “Kurang Sehat-BBB”.

Assessment GCG
Pada tahun 2024, Perseroan melakukan assessment GCG dan meraih skor 70,56 dengan katagori “Cukup Baik”.

Company Soundness Level:
In 2024, the Company Soundness Level was at 61.32 categorized as “Less Sound BBB”.

GCG Assessment:
In 2024, the Company conducted GCG assessment and achieved a score of 70.56 with category of “Fairly Good”.



Laporan Manajemen

Management Report



PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report



Bambang Sujito

Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2024 dengan baik.

The Board of Commissioners values that the Board of Commissioners has performed well in carrying out the duties and responsibilites in 2024.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal ("Perseroan") secara intensif memberikan saran dan arahan kepada Direksi terutama dalam upaya memitigasi risiko yang disebabkan oleh kondisi perekonomian sepanjang tahun 2024. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris bangga dengan upaya yang dilakukan Direksi dalam melewati tahun yang cukup menantang ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2024, sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2024 dengan baik. Evaluasi Dewan Komisaris tahun 2024 menunjukan kinerja Direksi yang positif, ditunjukan dengan pencapaian target RKAP 2024 secara umum. Berdasarkan Laporan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) Nomor 00831/2.1457/AU.1/10/0243-1/1/IV/2025 tanggal 30 April 2025, pada tahun 2024, Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp79,94 miliar, meningkat sebesar Rp11,84 miliar atau 17,39% dibandingkan dengan laba di tahun 2023 yang sebesar Rp68,10 miliar.

Dari sisi Aset, Perseroan berhasil mencatatkan aset sebesar Rp8,50 triliun, meningkat sebesar Rp459,56 miliar atau 5,72% dibandingkan dengan laba di tahun 2023 yang sebesar Rp8,04 triliun. Sedangkan dari sisi pendapatan, Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,03 triliun atau tumbuh 7,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2024, the Board of Commissioners of PT Pertamina Energy Terminal ("the Company") actively provided advice and guidance to the Board of Directors, particularly in efforts to mitigate risks arising from economic conditions throughout the year. Despite the various challenges faced by the Company, the Board of Commissioners appreciates the efforts made by the Board of Directors in navigating what was a notably challenging year. On this occasion, the Board of Commissioners would like to present its supervisory report on the policies and management of the Company carried out by the Board of Directors during 2024, as part of the implementation of good corporate governance principles.

Assessment of the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has performed its duties and responsibilities well in 2024. The 2024 evaluation by the Board of Commissioners reflects positive performance by the Board of Directors, as indicated by the overall achievement of the 2024 RKAP targets. According to the Independent Auditor Report (Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto, & Partners) No. 00831/2.1457/AU.1/10/0243-1/1/IV/2025 dated April 30, 2025, in 2024, the Company successfully recorded a profit for the year of Rp79.94 billion, an increase of Rp11.84 billion or 17.39% compared to the profit in 2023 of Rp68.10 billion.

In terms of assets, the Company recorded total assets of Rp8.50 trillion, an increase of Rp459.56 billion or 5.72% compared to Rp8.04 trillion in 2023. On the revenue side, the Company posted revenue of Rp1.03 trillion, representing a growth of 7.96% compared to the previous year.

Dewan Komisaris menyadari bahwa kinerja finansial yang positif di tahun 2024 tersebut dapat tercapai tentu tidak terlepas dari perbaikan dan konsistensi dalam menjalankan inovasi. Di sisi *human capital*, Perseroan melakukan berbagai upaya dengan fokus utama pada peningkatan kapabilitas dan produktivitas.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Dewan Komisaris senantiasa melakukan fungsi pengawasan aktif terhadap strategi Perseroan yang berbasis risiko (*risk-based oversight*) sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris memberikan nasihat, arahan dan rekomendasi secara memadai kepada Manajemen atas dasar hasil pengawasan dimaksud, termasuk terhadap penerapan strategi, implementasi kebijakan Perseroan dan memberikan persetujuan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya. Adapun nasihat, arahan dan rekomendasi yang diberikan antara lain meliputi:

1. Direksi agar memastikan kembali perhitungan atas tarif baru yang disepakati apakah masih memberikan margin bagi Perseroan.
2. Direksi perlu melakukan upaya negosiasi kembali atas tarif yang lebih menguntungkan bagi Perseroan.
3. Direksi agar mengupayakan percepatan pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek *compliance* atas pembangunan tangki 5.000 KL di FT Kotabaru untuk memindahkan produk dari dua tangki yang akan diperbaiki dalam ruang lingkup Project Pengembangan FT Kotabaru.
4. Direksi perlu menyusun strategi untuk melakukan upaya peningkatan *supply fresh water* sehingga *thruput volume fresh water* bisa tercapai sesuai RKAP.
5. Direksi perlu memastikan apakah biaya TAD yang dimasukan ke BPP sudah tepat, karena biaya TAD yang bisa dimasukan dalam BPP apabila tenaga tersebut berkontribusi langsung (*Direct Labor*) terhadap proses produksi atau penyediaan barang/jasa yang dijual seperti operator, namun apabila TAD tersebut sebagai staf administrasi atau kantor, pekerja kebersihan atau keamanan di kantor maka tidak dapat dimasukan dalam BPP.
6. Direksi agar melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Terminal LPG Reff Jatim sehingga Proyek diharapkan dapat diselesaikan sesuai target waktu.
7. Direksi perlu memastikan penyebab terjadinya *losses*, dengan memperbaiki dan memutahirkan sarana *custody* transfer yang ada dan perhatian khusus terhadap aspek legal alat ukur yang digunakan.
8. Direksi agar memastikan saat *stop* operasional *Plant* LPG Tanjung Uban, Perseroan tidak dibebankan atas *working loss* LPG Terminal Tanjung Uban yang melebihi batas toleransi.
9. Direksi agar segera dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari temuan internal dan eksternal audit di Perseroan serta melaporkan hasil dan perkembangannya kepada Dewan Komisaris.

Pandangan atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris melihat bahwa secara garis besar prospek usaha yang disampaikan oleh Direksi relevan. Dewan Komisaris

The Board of Commissioners recognizes that the positive financial performance in 2024 could not have been achieved without continuous improvement and consistent innovation. In terms of human capital, the Company has undertaken various initiatives with a primary focus on enhancing capabilities and productivity.

Supervision toward Strategy Implementation

The Board of Commissioners consistently carried out active supervisory functions toward the Company Strategy using risk-based oversight in accordance with tis responsibilities and authority. Throughout 2024, the Board of Commissioners provided advices, directives, and recommendations to the Management based on the oversight results, including on strategy implementation, implementation of the Company policies, and approvals within its designated authority. The advice, guidance, and recommendations provided include the following:

1. The Board of Directors is advised to re-examine the calculations of the newly agreed tariffs to ensure that they still provide a margin for the Company.
2. The Board of Directors is encouraged to renegotiate more favorable tariffs for the Company.
3. The Board of Directors is expected to accelerate the project execution while ensuring compliance aspects in the construction of the 5,000 KL tank at FT Kotabaru, which is intended to relocate products from two tanks that will undergo repair within the scope of the FT Kotabaru Development Project.
4. The Board of Directors is advised to devise a strategy to increase the supply of fresh water so that the fresh water throughput volume can meet the targets set in the RKAP.
5. The Board of Directors must ensure that TAD (Temporary Additional Duty) costs included in the COGM are appropriate, as TAD can only be included in the COGM if the personnel contribute directly (Direct Labor) to production or service delivery processes, such as operators. However, if TAD personnel function as administrative staff, office cleaners, or security guards, these costs should not be included in the COGM.
6. The Board of Directors is also expected to exercise optimal supervision over the implementation of the LPG Refrigerated Terminal Construction Project in East Java, so that the project can be completed within the targeted timeline.
7. Furthermore, the Board of Directors must ensure the causes of losses are identified by upgrading and modernizing existing custody transfer facilities and paying special attention to the legal aspects of the measuring instruments used.
8. The Board of Directors must ensure that during the operational shutdown of the Tanjung Uban LPG Plant, the Company is not burdened with working losses at the Tanjung Uban LPG Terminal that exceed acceptable tolerance limits.
9. The Board of Directors is urged to promptly follow up on all recommendations resulting from internal and external audits of the Company and report the outcomes and progress to the Board of Commissioners.

Views on Business Prospects

The Board of Commissioners views the overall business prospects presented by the Board of Directors as relevant.

menyampaikan pendapat dan saran terhadap prospek yang disusun oleh Direksi antara lain:

1. Direksi menyusun strategi secara terencana agar target keuangan sesuai RKAP Tahun 2025 dapat tercapai.

2. Direksi agar memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan investasi yang akan dilakukan di tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi agar memperhatikan aspek pengelolaan aset, termasuk proses penghapusan dan pelepasan aset tahun 2025, dengan pengawasan dan tata kelola yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam pelaksanaan RKAP tahun 2025, Direksi diharapkan dapat memperkuat sistem tata kelola internal, serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), penerapan manajemen risiko yang memadai dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Terhadap prospek usaha yang telah disusun Direksi tersebut, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2025 yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi global maupun domestik, serta asumsi makro ekonomi yang relevan. Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan arahan dan rekomendasi melalui Surat Dewan Komisaris 14/DK.PET/2025-S0 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT Pertamina Energy Terminal (PET).

Penilaian atas Efektivitas Pengendalian Internal dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*governance*) di seluruh level organisasi yang mengacu pada berbagai regulasi dan *best practice governance*, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya berupaya memastikan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memberikan nasihat yang dibutuhkan atas setiap tindakan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Perseroan melakukan penyempurnaan aspek *governance* melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan proses pengelolaan dan optimalisasi hasil yang berdampak pada nilai tambah Perseroan di mata pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris mengapresiasi capaian Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal ini tercermin dalam peningkatan skor penilaian GCG oleh tim *assessor* eksternal sebesar 70,56 dengan predikat 'Cukup Baik'. Agar Perseroan terus berkembang dalam menerapkan *governance* pada seluruh kegiatan operasional, Dewan Komisaris mengingatkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Direksi berdasarkan hasil penilaian *governance*, yaitu:

1. Direksi diharapkan memastikan adanya laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

2. Direksi diharapkan memastikan adanya permintaan persetujuan atas struktur organisasi kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners offers the following opinions and suggestions regarding the outlook prepared by the Board of Directors:

1. The Board of Directors should devise a well-planned strategy to ensure that the financial targets set in the 2025 RKAP are achieved.
2. The Board of Directors is expected to ensure that the planning and execution of investments in 2025 are conducted in accordance with applicable regulations.
3. The Board of Directors should pay attention to asset management aspects, including the asset write-off and disposal process in 2025, with rigorous oversight and governance in line with prevailing regulations.
4. In implementing the 2025 RKAP, the Board of Directors is expected to strengthen the internal governance system, enhance the application of prudential principles, and ensure the effective and adequate implementation of risk management and Good Corporate Governance (GCG) practices.

With respect to the business prospects prepared by the Board of Directors, the Board of Commissioners has approved the 2025 Corporate Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors, taking into account global and domestic economic conditions as well as relevant macroeconomic assumptions. The Board of Commissioners has approved and provided directions and recommendations through the Board of Commissioners Letter No. 14/DK.PET/2025-S0 dated May 15, 2025, regarding Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners on the Submission of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pertamina Energy Terminal (PET).

Assessment of the Effectiveness of Internal Control and Corporate Governance Implementation

The Company is committed to consistently implementing corporate governance across all organizational levels in accordance with various regulations and governance best practices to support sustainable performance. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners ensures that the management by the Board of Directors complies with prevailing laws and regulations and provides advice on strategic actions to achieve the Company's objectives. The Company continuously improves its governance aspects through policy refinement, process enhancements, and optimization of outcomes, resulting in added value for stakeholders.

The Board of Commissioners appreciates the Company's achievements in implementing good corporate governance. It is reflected in the improved GCG assessment score by the external assessor team of 70.56 with the predicate 'Fairly Good'. To ensure that the Company continues to develop its governance practices across all operational activities, the Board of Commissioners highlights several areas that must be addressed by the Board of Directors based on the governance assessment results, namely:

1. The Board of Directors is expected to ensure the availability of reports on the training completed by members of the Board of Directors.
2. The Board of Directors is expected to ensure that requests for approval of the organizational structure are submitted to the Board of Commissioners.

3. Direksi diharapkan memastikan ketersediaan SOP secara lengkap untuk seluruh proses bisnis inti Perseroan sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perseroan.

4. Direksi diharapkan memastikan adanya standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.

5. Direksi diharapkan memastikan adanya ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal tujuh hari sejak disahkan/ ditandatangani.
6. Direksi diharapkan memastikan adanya pelaksanaan sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan Perseroan.
7. Direksi diharapkan memastikan penyampaian rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.
8. Direksi diharapkan memastikan penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi Perseroan. Hal ini dapat tercermin juga dengan *vacancy rate* yang tidak lebih dari 15%.
9. Direksi diharapkan memastikan bahwa rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.
10. Direksi diharapkan memastikan tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan. Untuk menilai hal tersebut, dapat dilakukan survei kepuasan karyawan dengan menambahkan parameter penilaian yang berkaitan dengan obyektivitas dan transparansi penempatan karyawan.
11. Direksi diharapkan memastikan adanya *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.
12. Direksi diharapkan memastikan arsitektur sistem informasi telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.
13. Direksi diharapkan memastikan perencanaan teknologi informasi meliputi arah penggunaan dan pengadaannya dengan memperkirakan *trend* perkembangan teknologi.
14. Direksi diharapkan memastikan adanya kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan teknologi informasi (TI).
15. Penerapan teknologi informasi (TI) di Perseroan diharapkan sesuai dengan masterplan dan telah disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.
16. Direksi diharapkan memastikan adanya audit atas TI.

17. Direksi diharapkan memastikan tingkat penerapan TI saat ini telah sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Untuk menilai hal tersebut, dapat dilakukan audit atas TI atau survei kesesuaian penerapan TI dari setiap *user*.
18. Direksi diharapkan memastikan adanya laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta.
19. Direksi diharapkan memastikan adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (termasuk hasil audit TI).

3. The Board of Directors is expected to ensure the availability of complete SOPs for all core business processes of the company, to serve as a guide in carrying out company activities.
4. The Board of Directors is expected to establish standard timelines for the promptness of decision-making by the Board of Directors.
5. The Board of Directors is expected to define provisions for promptly communicating decisions to the levels of the organization below the Board of Directors, no later than seven days after the decisions are ratified/signed.

6. The Board of Directors is expected to ensure the dissemination of the RJPP to all company employees.
7. he Board of Directors is expected to submit the RKAP draft to the GMS and/or the Board of Commissioners on time or according to the specified schedule.
8. The Board of Directors is expected to ensure employee placement at every job level within the Company's organizational structure. It can also be reflected in a vacancy rate of no more than 15%.
9. The Board of Directors is expected to ensure that promotion and transfer plans for one level below the Board of Directors are submitted to the Board of Commissioners to allow the provision of input on such plans.
10. The Board of Directors is expected to ensure adequate objectivity and transparency in employee placement at every job level. It can be assessed through an employee satisfaction survey that includes parameters related to objectivity and transparency in placement.

11. The Board of Directors is expected to ensure the availability of an Information Technology Master Plan (ITMP) as a guideline for IT development, and an Information Technology Detail Plan (ITDP) as a further elaboration of the ITMP, used as a reference for annual planning implementation in accordance with the ITMP.
12. The Board of Directors is expected to ensure that the information system architecture is designed down to the data level and includes its security system.
13. The Board of Directors is expected to ensure that IT planning includes the direction of use and procurement, with forecasts of technological trends.
14. The Board of Directors is expected to ensure the availability of data management policies, data management procedures, and IT reporting.
15. The application of Information Technology (IT) at the Company is expected to be aligned with the master plan and supported by well-developed planning, covering human resources, IT management organizational structure, and service levels.
16. The Board of Directors is expected to ensure that IT audits are conducted.
17. The Board of Directors is expected to ensure that the current IT implementation meets the Company's needs. To evaluate this, an IT audit or a user-based suitability survey can be conducted.
18. The Board of Directors is expected to ensure the availability of written reports on the implementation of the IT system, related to the execution of the ITMP and ITDP, and submit these to the Board of Commissioners, whether requested or not.
19. The Board of Directors is expected to ensure that IT performance reports are submitted to the Board of Commissioners (including the results of IT audits).



20. Direksi diharapkan memastikan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian bersifat terbuka dan tidak rahasia.
21. Direksi diharapkan memastikan adanya kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

22. Direksi diharapkan memastikan adanya penyampaian laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.
23. Direksi diharapkan menetapkan rancangan sistem pengendalian intern Perseroan yang mengatur kerangka (*framework*) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya.
24. Direksi diharapkan memastikan adanya evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas.
25. Direksi diharapkan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.
26. Direksi diharapkan memastikan adanya kebijakan tentang pembinaan usaha kecil.

27. Direksi diharapkan memastikan adanya penyampaian laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham, yang termuat dalam sebuah laporan ditandatangani oleh Direksi dan dibuktikan dengan bukti korespondensi pelaporannya.

20. The Board of Directors is expected to ensure that the Self-Estimated Price (HPS) calculated by experts is open and not confidential.
21. The Board of Directors is expected to ensure the establishment of accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards.
22. The Board of Directors is expected to ensure the submission of quarterly risk management implementation reports and/or reports when requested by the Board of Commissioners.
23. The Board of Directors is expected to establish an internal control system framework for the Company that includes elements of control environment, risk management, control activities, information and communication systems, and monitoring, along with its implementation and reporting.

24. The Board of Directors is expected to ensure evaluations or assessments of the effectiveness of internal controls at the entity level and operational/activity level.
25. The Board of Directors is expected to ensure that the follow-up on audit findings from the Internal Audit Unit (SPI) and external auditors is reported to the Board of Commissioners at least on a quarterly basis.
26. The Board of Directors is expected to ensure the existence of policies for the development and support of small enterprises.
27. The Board of Directors is expected to ensure that quarterly and annual management reports, as well as the annual report, are submitted to the Board of Commissioners before being forwarded to the Shareholders. These reports must be signed by the Board of Directors and supported by evidence of correspondence.

28. Direksi diharapkan memastikan pemberian informasi laporan manajemen triwulanan dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.
29. Direksi diharapkan memastikan adanya program kerja tahunan pengawasan *intern* yang direncanakan oleh SPI dan SPI melaksanakan pengawasan sesuai program kerja tahunan yang sudah ditetapkan.
30. Direksi diharapkan memastikan Fungsi Audit Internal memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian *intern*.
31. Direksi diharapkan memastikan Fungsi Audit Internal memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perseroan.
32. Direksi diharapkan memastikan Fungsi Audit Internal memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.
33. Direksi diharapkan memastikan RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.
34. Direksi diharapkan memastikan adanya mekanisme evaluasi dan *monitoring* yang efektif terhadap implementasi atas kebijakan dan tingkat *compliance* kepada prosedur perusahaan serta memastikan perbaikan berkelanjutan atas evaluasi yang dilakukan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan telah berjalan dengan baik, berfungsi efektif dan memberikan keyakinan yang memadai. Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum penerapan dan atas tindak lanjut WBS selama tahun 2024 di Perseroan berjalan dengan baik. Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan kepada Direksi untuk terus melakukan sosialisasi penerapan WBS dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.

Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

01 Januari 2024 - 23 Februari 2024
Komisaris: Hufron Asrofi

23 Februari 2024 - 24 Juni 2024
Komisaris: Bambang Sujito

24 Juni 2024 - 26 Juli 2024
Komisaris: Bambang Sujito
Komisaris: Nepos MT Pakpahan

26 Juli 2024 - saat ini
Plt. Komisaris Utama: Bambang Sujito
Komisaris: Nepos MT Pakpahan

28. The Board of Directors is expected to ensure that quarterly management reports are also provided to Minority Shareholders with the same content and timing.
29. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Unit (SPI) prepares an annual internal audit work plan and carries out its supervision activities in accordance with the approved work plan.
30. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Function contributes to improvements and enhancements in governance processes, risk management, and internal control.
31. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Function provides input for achieving the Company's business strategy.
32. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Function monitors the follow-up of internal and external audit recommendations.
33. The Board of Directors is expected to ensure that the GMS for the ratification/approval of the RJPP is held no later than 60 (sixty) days after the complete draft RJPP is received or before the next RJPP period begins.
34. The Board of Directors is expected to ensure the existence of an effective evaluation and monitoring mechanism for the implementation of corporate policies and the level of compliance with company procedures, as well as to ensure continuous improvements based on evaluation results.

The Board of Commissioners is of the opinion that, in general, the internal control system implemented by the Company has been functioning effectively and provides adequate assurance. The Board of Commissioners also believes that, overall, the implementation and follow-up of the Whistleblowing System (WBS) throughout 2024 have been carried out properly. The Board of Commissioners continues to advise the Board of Directors to consistently socialize the implementation of WBS in order to foster a clean, professional, and integrity-based working environment.

Composition of the Board of Commissioners

During 2024, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. The changes are as follows:

January 1, 2024 - February 23, 2024
Commissioner: Hufron Asrofi

February 23, 2024 - June 24, 2024
Commissioner: Bambang Sujito

June 24, 2024 - July 26, 2024
Commissioner: Bambang Sujito
Commissioner: Nepos MT Pakpahan

July 26, 2024 - present
Acting President Commissioner: Bambang Sujito
Commissioner: Nepos MT Pakpahan

Alasan Perubahan

Komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan untuk penyempurnaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Reason for the Change

The changes in the composition of the Board of Commissioners were made to improve the implementation of good corporate governance.

Apresiasi

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pemegang Saham, pelanggan, dan mitra usaha atas dukungan yang telah diberikan. Secara khusus Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh Perwira Perseroan atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan di tengah tahun penuh tantangan. Semoga perjalanan tahun 2024 dapat menjadi cermin bagi Perseroan untuk dapat semakin beradaptasi dan mengoptimalkan potensinya dalam mewujudkan visi dan misinya, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris akan terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasehat kepada Manajemen agar kinerja Perseroan dapat terus tumbuh di masa depan, dengan terus mengoptimalkan peluang bisnis yang ada guna mencapai pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Appreciation

The Board of Commissioners extends its gratitude to all Shareholders, customers, and business partners for their continued support. In particular, the Board conveys its appreciation to the Board of Directors and all Company Officers for their dedication and hard work throughout a challenging year. May the journey of 2024 serve as a reflection for the Company to further adapt and optimize its potential in realizing its vision and mission, ultimately delivering added value to the Shareholders and all stakeholders.

The Board of Commissioners remains committed to enhancing its supervisory function and providing guidance to Management so that the Company's performance continues to grow in the future, by continuously optimizing available business opportunities to achieve sustainable corporate performance growth.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners
PT Pertamina Energy Terminal



Bambang Sujito
Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



Bayu Prostiyono

Direktur Utama
President Director

“Pada tahun 2024, Perseroan telah mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih. Perseroan berhasil membuktikan bahwa strategi dan arah bisnis yang telah direncanakan berjalan dengan baik.”

“In 2024, the Company has maintained resilience amid the unrecovered economy. The Company has demonstrated the strategy and business direction are well planned”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2024 Perseroan mampu melanjutkan pertumbuhan dengan tangguh dan berkelanjutan. Konsistensi untuk terus berinovasi serta respon strategis yang tepat berhasil membuat Perseroan mencatatkan kinerja yang positif. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang meliputi kinerja Perseroan, analisis prospek Perseroan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Dear respected shareholders and stakeholders,

Gratitude to the presence of God Almighty for the blessings and grace, the Company has sustained positive and sustainable growth in 2024. Through consistent innovation and timely strategic responses, the Company was able to deliver a strong performance. On this occasion, we are pleased to present the Board of Directors’ Report for the 2024 fiscal year, covering the Company’s performance, business outlook analysis, and the implementation of sound governance practices.

Tinjauan Makro Ekonomi

Pada tahun 2024, kondisi perekonomian global ditandai dengan tren yang melambat dan masih diwarnai ketidakpastian. Berbagai gejolak geopolitik terutama akibat berlanjutnya perang Ukraina-Rusia serta konflik Israel-Palestina semakin kompleks yang menyebabkan volatilitas harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, berpengaruh pada inflasi serta daya beli masyarakat. Berdasarkan ketidakpastian tersebut, beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada akhir 2024 berada dalam rentang 2,6%- 3,2% *year-on-year* (yoy).

Di tengah tantangan ekonomi global yang melambat dan masih diwarnai ketidakpastian tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang terjaga sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,03%, sedikit melambat dari tahun 2023 sebesar 5,05%. Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2024 tercatat sebesar 4,94%, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 4,82%. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh inflasi yang terkendali dan kebijakan moneter yang lebih longgar.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Perseroan

Selama tahun 2024, Perseroan tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari kondisi geopolitik yang masih penuh ketidakpastian, transisi pemerintahan pasca-pemilu maupun tantangan internal. Fokus utama Direksi adalah menjaga kemampuan Perseroan untuk bertransformasi menghadapi perubahan yang cepat. Perseroan telah merumuskan berbagai strategi dan inisiatif untuk memperkuat pengembangan bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan seperti optimalisasi kinerja, melakukan digitalisasi proses bisnis, transformasi organisasi, dan menerapkan operasional yang *excellence*.

Implementasi Strategi serta Kinerja Tahun 2024

Perseroan memastikan implementasi strategi secara menyeluruh melalui komunikasi yang efektif. Pada tahun 2024 Perseroan memiliki strategi, antara lain:

1. Pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis dan komersial untuk segmen terminal dan *fresh water*.
2. Pengelolaan kegiatan *customer relationship & retention management.*
3. Pengelolaan kegiatan penerimaan pendapatan Perseroan melalui mekanisme dan sistematika yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis baru (Inkubasi) bersama dengan pihak-pihak terkait (internal & eksternal Perseroan).
5. Mengelola kegiatan pengembangan strategi bisnis sesuai dengan *roadmap*.
6. Melakukan pengukuran kinerja Perseroan dan *benchmark* terkait evaluasi kinerja Perseroan dan unit bisnis.
7. Melakukan analisis bisnis dan kinerja Perseroan dalam mencapai tujuan strategis Perseroan.
8. Mengelola investasi yang mencakup pelaksanaan peninjauan atas pengajuan usulan investasi, pengarahan dan pengawasan implementasi investasi bisnis, pengarahan dan pengawasan pengelolaan anggaran dan investasi dan pelaksanaan *review* atas pengajuan usulan divestasi.
9. Penerapan aspek *compliance* yang mencakup pelaporan gratifikasi secara periodik, pelaksanaan deklarasi COI, COC, dan kode etik lainnya.

Macro Economic Outlook

In 2024, the global economic trend was at a slower pace and under the pressure of ongoing uncertainty. Variety of geopolitical tension particularly the prolonged Ukraine-Russia war and intensifying conflict of Israel-Palestine has increased volatility in the global commodity price, especially on energy and food that has an impact on inflation and public purchasing power. Due to the current condition, several global institutions such as the World Bank and International Monetary Fund (IMF) predicted the global economy by the end of 2024 would be in the range of 2.6%-3.2% year-on-year (YoY).

Amid the slowing global economy which is overshadowed by uncertainty, the Indonesian economy demonstrated resilience and sustained growth throughout 2024. The national economy posted 5.03% growth, slightly decreased from the 2023 performance at 5.05%. According to the expenditure component, growth in 2024 household consumption recorded 4.94%, higher than the 2023 performance with 4.82%. Household consumption remained as the main contributor to economic growth, supported by controlled inflation and easing monetary policy.

Challenges Faced by the Company

Throughout 2024, the Company encountered various challenges, ranging from ongoing geopolitical uncertainties and the post-election government transition to internal organizational dynamics. The primary focus of the Board of Directors was to ensure the Company's ability to adapt and transform in response to rapid changes. A range of strategies and initiatives were formulated to support broader and more sustainable business development, including performance optimization, business process digitization, organizational transformation, and the pursuit of operational excellence.

Strategy Implementation and 2024 Performance

The Company ensured effective implementation of its strategies through clear and consistent communication across all levels. In 2024, the key strategic priorities included:

1. Managing business and commercial development activities in the terminal and fresh water segments.
2. Managing customer relationship and retention programs to enhance client satisfaction and loyalty.
3. Administering the Company's revenue collection activities in accordance with established mechanisms and systems.
4. Overseeing the incubation and development of new business opportunities in collaboration with internal and external stakeholders.
5. Developing business strategies aligned with the Company's long-term roadmap.
6. Conducting corporate performance measurement and benchmarking to evaluate both corporate and business unit achievements.
7. Performing business and performance analyses to assess progress toward the Company's strategic objectives.
8. Managing investments, including reviewing investment proposals, directing and supervising business investment implementation, overseeing budget and investment management, and reviewing divestment proposals.
9. Enforcing compliance-related practices, including periodic reporting of gratification, declarations of COI, COC, and other ethical standards.

10. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

Peran Direksi dalam Penerapan Kebijakan Strategis

Pada tahun 2024, Direksi Perseroan menunjukkan peran proaktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang adaptif, serta melakukan penyesuaian strategis seiring dengan dinamika perubahan pasar dan regulasi. Direksi memastikan implementasi strategi dilakukan secara menyeluruh dengan komunikasi yang efektif dan intens antara Direksi dan seluruh manajemen. Proses ini melibatkan pemantauan yang aktif terhadap pelaksanaan strategi melalui peninjauan berkala, pemberian umpan balik, serta pengambilan keputusan yang responsif terhadap dinamika pasar dan peraturan yang berlaku.

Kinerja Perseroan Tahun 2024

Perseroan berhasil membuktikan bahwa strategi dan arah bisnis yang telah direncanakan berjalan dengan baik, terlihat dari tercapainya KPI, pertumbuhan pendapatan dan peningkatan laba tahun berjalan. Sepanjang tahun 2024, Perseroan mencatat realisasi KPI sebesar 104,26%.

Pada tahun 2024, pendapatan sebesar Rp1,03 triliun, meningkat 7,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp953,54 miliar. Sedangkan pendapatan tahun 2024 mencapai 83,43% dari target RKAP 2024 sebesar Rp1,23 triliun.

Melanjutkan kinerja yang baik pada tahun 2024 Perseroan juga berhasil mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp79,94 miliar meningkat 17,39% dibandingkan tahun lalu, di mana laba tahun berjalan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp68,10 miliar. Laba tahun berjalan tahun 2024 mencapai 111,09% dari target RKAP 2024 sebesar Rp71,96 miliar.

Prospek Usaha

Memasuki tahun 2025, Perseroan memandang prospek usaha tetap menjanjikan meskipun dihadapkan pada tantangan makroekonomi, seperti potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, volatilitas harga komoditas, dan ketidakpastian global. Di tengah kondisi tersebut, Perseroan tetap optimis dengan peluang pertumbuhan yang dapat dimaksimalkan melalui strategi yang fokus dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Adapun strategi bisnis Perseroan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan evaluasi dan negosiasi skema dan nilai tarif terminal berbasis *storage fee* dan *thruput fee.*
2. Meningkatkan *market size* dan *revenue* melalui kegiatan *Supplier Held Stock* (SHS) dan *Storage Handling Services*.
3. *Feasibility Study* pembangunan Terminal baru dan akuisisi *World-Class Strategic Terminal.*
4. Kajian pengalihan terminal eksisting yang saat ini dikelola oleh PPN.
5. Studi awal diversifikasi dan pengembangan bisnis energi terbarukan, seperti *Used Cooking Oil* (“UCO”), *methanol,* LNG, *Carbon Capture Storage* (“CCS”), dan Karbon Dioksida (“LCO2”).

10. Preparing and submitting the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP).

Role of the Board of Directors in Strategic Policy Implementation

In 2024, the Board of Directors played a proactive role in formulating adaptive strategies and policies, while making strategic adjustments in response to evolving market dynamics and regulatory changes. The Board ensured that the implementation of these strategies was carried out comprehensively through effective and intensive communication between the Board of Directors and the entire management team. This process involved active monitoring of strategy execution through periodic reviews, constructive feedback, and responsive decision-making aligned with prevailing market trends and regulatory developments.

The Company’s 2024 Performance

The Company successfully demonstrated that its strategic direction and business plans were effectively implemented, as evidenced by the achievement of KPIs, revenue growth, and an increase in net income. The Company’s KPI achievement in 2024 reached 104.26%.

In 2024, the Company recorded revenue of Rp1.03 trillion, representing an increase of 7.96% compared to the previous year’s revenue of Rp953.54 billion. The 2024 revenue achievement amounted to 83.43% of the 2024 RKAP target of Rp1.23 trillion.

Continuing the positive momentum, the Company also recorded a net income of Rp79.94 billion in 2024, marking a 17.39% increase from the previous year’s net income of Rp68.10 billion. This figure represents 111.09% of the 2024 RKAP target of Rp71.96 billion.

Business Outlook

Entering 2025, the Company views its business prospects as promising, despite ongoing macroeconomic challenges such as potential slowdowns in national economic growth, commodity price volatility, and global uncertainties. In light of these conditions, the Company remains optimistic about capturing growth opportunities through focused and adaptive strategies in response to evolving market dynamics.

The Company’s business strategies for 2025 are as follows:

1. Proposing the evaluation and renegotiation of terminal tariff schemes based on storage fees and throughput fees.
2. Expanding market size and revenue through Supplier Held Stock (SHS) initiatives and Storage Handling Services.
3. Conducting feasibility studies for the development of new terminals and the acquisition of world-class strategic terminals.
4. Assessing the potential transfer of existing terminals currently managed by PPN.
5. Conducting preliminary studies on diversification and renewable energy business development, including Used Cooking Oil (UCO), methanol, LNG, Carbon Capture Storage (CCS), and Liquid Carbon Dioxide (LCO_2).

6. Penjajakan pengembangan bisnis bersama IML Group untuk potensi penyediaan *Port Reception Facility* ("PRF") dan *bunkering supply point*.
7. Studi awal diversifikasi dan pengembangan bisnis penyimpanan, seperti *floating* terminal dan pengelolaan operasi *ship-to-ship transfer*.
8. Penyelenggaraan CPE (Cadangan Penyangga Energi) Nasional.
9. Penyediaan SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan terus berupaya menyempurnakan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap aspek keberlanjutan yang diwujudkan melalui aktualisasi integritas dan kapabilitas yang terintegrasi.

Secara rutin, Perseroan melakukan tinjauan terhadap kebijakan internal untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai proses bisnis yang terbaru dan efisien serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa melakukan asesmen penerapan GCG. Asesmen menjadi bagian dari mekanisme *check and balances*. Dengan asesmen, maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan. Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG dalam lingkungan Perseroan. Berdasarkan *assessment* penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan, disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada Perseroan mencapai dari skor 70,56 dari skor maksimal 100,00 dengan predikat "Cukup Baik".

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan menjadikan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam menyeimbangkan kinerja keuangan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan bisnis Perseroan dalam jangka panjang. Komitmen ini selaras dengan misi Perseroan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pada tahun 2024, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan TJSL sebesar Rp962.965.000.

6. Exploring joint business development with the IML Group for potential Port Reception Facility (PRF) and bunkering supply point projects.
7. Conducting preliminary studies for storage business diversification, such as floating terminals and ship-to-ship transfer operations.
8. Organizing National CPE (Strategic Energy Buffer).
9. Providing SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) facilities.

Implementation of Corporate Governance

The Company continues to enhance the quality of its corporate governance practices on an ongoing basis, taking into account stakeholder expectations related to sustainability. The commitment is realized through the actualization of integrated integrity and capability.

The Company regularly reviews its internal policies to ensure alignment with the latest and most efficient business processes and compliance with prevailing laws and regulations.

The Company consistently conducts assessments of its GCG implementation. These assessments serve as a check-and-balance mechanism. By conducting such assessments, the Company can accurately measure progress and determine follow-up actions to improve performance. In 2024, the Company conducted an assessment of GCG practices across the organization. Based on the results, the GCG implementation at the Company achieved a score of 70.56 out of a maximum of 100.00, with a rating of "Fairly Good".

Environmental and Social Responsibility

The Company upholds sustainability as a core principle in balancing financial performance with environmental, social, and governance (ESG) responsibilities. This approach is aimed at creating added value, enhancing competitiveness, and strengthening the Company's long-term business resilience. The Company's commitment is in line with its mission to operate in accordance with sustainable business principles. In 2024, The cost incurred for CSER activities amounted to Rp962,965,000.

Komposisi Direksi

Selama tahun 2024, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

1 Januari 2024 - 24 Juni 2024
Direktur : Bayu Prostiyono

24 Juni 2024 - saat ini
Direktur Utama : Bayu Prostiyono
Direktur Operasi : Rangga Raditya

Alasan Perubahan

Komposisi Direksi mengalami perubahan untuk penyempurnaan penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik.

Apresiasi

Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada banyak pihak yang telah menjalin kerja sama yang sangat baik. Kepada Dewan Komisaris, Direksi menyampaikan terima kasih atas peran penting, arahan strategis, serta pengawasan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Direksi juga memberikan apresiasi kepada Perwira Perseroan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi. Dukungan ini telah mendorong Perseroan untuk tetap tangguh dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di tengah tantangan yang dinamis.

Composition of the Board of Directors

During 2024, there were changes in the composition of the Board of Directors. The changes are detailed as follows:

January 1, 2024 - June 24, 2024
Director: Bayu Prostiyono

June 24, 2024 - present
President Director: Bayu Prostiyono
Operations Director: Rangga Raditya

Reason for the Change

The change in the Board of Directors to enhance Good Corporate Governance practices.

Appreciation

The Board of Directors extends its highest appreciation and gratitude to all parties who have fostered strong and meaningful collaboration with the Company. To the Board of Commissioners, we express our sincere thanks for their vital role, strategic guidance, and oversight, which have greatly supported the Company's sustainable growth. We also extend our deepest appreciation to all The Company officers for their unwavering dedication and commitment. This collective support has enabled The Company to remain resilient and achieve sustainable growth amidst an ever-changing and challenging environment.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors
PT Pertamina Energy Terminal



Bayu Prostiyono
Direktur Utama
President Director



Profil Perusahaan

Company Profile



PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

Identitas Perusahaan
Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT Pertamina Energy Terminal (Perseroan)

Tanggal Pendirian
Establishment Date

21 Januari 1988
January 21, 1988

Status Perusahaan
Company Status

Perusahaan Terafiliasi BUMN
Affiliated Company of a State-Owned Enterprise

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta No. 69 oleh Ny. Yetty Taher, S.H., Tanggal 21 Januari 1988 di Jakarta
Deed No. 69 by Mrs. Yetty Taher, S.H., January 21, 1988 in Jakarta

Kepemilikan
Share ownership

PT Pertamina International Shipping ("PIS")	99,98301%
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")	0,01698%
PT Pertamina Port and Logistics ("PPL")	0,00001%

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp38.214.276.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun dua ratus empat belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)
Rp38,214,276,000,000.00 (thirty eight trillion two hundred fourteen billion two hundred seventy six million Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Desember 2024
Issued and Fully Paid-Up Capital as of December 31, 2024

Rp9.957.086.000.000 (Sembilan Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan modal dasar dibagi menjadi 9.957.086 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam) lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
Rp 9,557,086,000,000 (Nine Trillion Five Hundred Fifty Seven Billion and Eighty Six Million Rupiah) with authorized capital 9,957,086 (Nine Million Nine Hundred Fifty Seven and eighty six Rupiah) shares with a value of Rp1,000,000.00 (One Million Rupiah)

Bidang Usaha Utama
Primary Business Field

Terminal Penyimpanan
Terminal Storage
Penyediaan Air Bersih
Fresh Water Supply

Jumlah Karyawan 2024
Number of Employees in 2024

173 Pekerja
173 Employees

Alamat Kantor Pusat dan Akses Informasi Perseroan
Head Office Address and Company Information

Kantor Pusat
Head Office
Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten 42446
Fax: (0254) 601148
Telp: (0254) 601146/601147

Kantor Bisnis
Business Office

Jl. Yos Sudarso No.205, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360
Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: pet.pertamina
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Linkedin: Pertamina Energy Terminal
Website: https://pertamina-pet.com

Riwayat Singkat Perseroan

PT Pertamina Energy Terminal (Perseroan) merupakan anak usaha dari PT Pertamina International Shipping (PIS), yang berada di bawah naungan *Subholding Integrated Marine Logistic*. Perseroan didirikan pada tanggal 21 Januari 1988, dan berperan dalam menyediakan layanan pendukung industri energi nasional.

Pada tahun 1988, Perseroan memulai bisnisnya dengan memberikan layanan *fresh water* ke wilayah Cilegon dan kawasan industri di Batam. Seiring perkembangan bisnis, Perseroan memperluas layanannya melalui produksi air minum dalam kemasan "PATRAQUA", serta pengoperasian fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP) dan *Sewage Treatment Plant* (STP) yang berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan dan penyediaan air bersih.

Transformasi besar Perseroan terjadi pada tahun 2021, saat Perseroan resmi mengembangkan bisnisnya ke sektor penyimpanan minyak dan gas. Saat ini, Perseroan mengelola 6 (enam) terminal energi strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu *Terminal LPG* Tanjung Sekong, *Integrated Terminal* Tanjung Uban, *Fuel Terminal* Pulau Sambu, *Fuel Terminal* Kotabaru, *Fuel Terminal* Baubau, *Terminal LPG Refrigerated* Tuban.

Selain itu, Perseroan tengah membangun Terminal LPG *Refrigerated* Jawa Timur di Tuban, yang dirancang sebagai fasilitas penyimpanan LPG berkapasitas besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan memperkuat distribusi energi ke wilayah Indonesia Timur.

Dengan portofolio tersebut, Perseroan terus berkembang menjadi perusahaan energi yang strategis dan adaptif dalam mendukung rantai pasok logistik energi nasional yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

Perubahan Nama Perseroan

Pada tahun 2022 Perseroan melakukan *rebranding* dengan nama baru PT Pertamina Energy Terminal, berdasarkan pernyataan keputusan Pemegang Saham perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 28 November 2022.

Company at a Glance

PT Pertamina Energy Terminal (The Company) is a subsidiary of PT Pertamina International Shipping PIS, under the Subholding of Integrated Marine Logistic. The Company was established on January 21, 1988, and served in providing supporting services for national energy industry.

In 1988, the Company began its operations by providing fresh water services to the Cilegon area and industrial zones in Batam. As the business evolved, the Company expanded its services through the production of bottled drinking water under the brand "PATRAQUA", as well as the operation of Water Treatment Plants (WTP) and Sewage Treatment Plants (STP), contributing to environmental management and the provision of clean water.

A major transformation occurred in 2021, when the Company officially diversified into the oil and gas storage sector. Today, the Company operates 6 (six) strategic energy terminals across Indonesia, particularly Tanjung Sekong LPG Terminal, Tanjung Uban Integrated Terminal, Pulau Sambu Fuel Terminal, Kotabaru Fuel Terminal, Baubau Fuel Terminal, and Tuban LPG Refrigerated Terminal.

In addition, the Company is currently developing the East Java Refrigerated LPG Terminal in Tuban, which is designed as a large-scale LPG storage facility to enhance national energy security and strengthen energy distribution to Eastern Indonesia.

With this portfolio, the Company continues to grow as a strategic and adaptive energy company, supporting an efficient, safe, and sustainable national energy logistics supply chain.

Change in the Company Name

In 2022, the Company performed rebranding on its company name into PT Pertamina Energy Terminal, in accordance to the Shareholder Resolution on the Artice of Association No. 17 dated November 28, 2022.

Jejak Langkah Perseroan
Corporate Milestone

1998

Melayani pasokan air bersih untuk Kawasan Industri Cilegon dan Batam.
Serving fresh water supply for Cilegon and Batam Industrial Area.

2016

- **Melayani pasokan air bersih ke kapal milik dan sewaan PT Pertamina (Persero).**
  Serving fresh water supply for PT Pertamina (Persero)'s vessels and charter vessels.
- **Produksi air minum dalam kemasan PATRAQUA.**
  Production of PATRAQUA bottled drinking water.

2019

Pengelolaan instalasi pengolahan air (WTP) dan instalasi pengolahan air limbah (STP).
Management of water treatment plant (WTP) and wastewater treatment plant (STP) installations.

2021

- ***Spin off* bisnis 6 terminal menjadi aset milik Perseroan.**
  Spin off of 6 terminals as assets of the Company.
- **Perseroan menjadi anak perusahaan PT Pertamina International Shipping.**
  The Company became a subsidiary of PT Pertamina International Shipping.

2022

***Rebranding* Perseroan dengan nama dan logo baru.**
Rebranding of the Company with a new n ame and logo.

Konsolidasi dan Penguatan Operasional

Optimalisasi Enam Terminal Energi: Perseroan berhasil mengkonsolidasikan operasional enam terminal strategis—TLPG Tanjung Sekong, IT Tanjung Uban, FT Pulau Sambu, FT Kotabaru, FT Baubau, dan *Terminal LPG Refrigerated* Tuban—untuk mendukung ketahanan energi di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP): sebagai bentuk komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan mengimplementasikan ISO 37001:2016 guna memastikan proses bisnis bebas dari praktik penyuapan.

Penguatan Sistem HSSE dan *Compliance*: dilakukan audit dan perbaikan menyeluruh terhadap aspek *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) serta kepatuhan hukum di seluruh unit kerja.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL): Perseroan menggulirkan berbagai program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar, seperti pelatihan wirausaha, pengelolaan lingkungan, dan pendidikan advokasi.

Operational Consolidation and Strengthening

Optimization of Six Energy Terminals: the Company successfully consolidated the operations of six strategic terminals Tanjung Sekong LPG Terminal, Tanjung Uban Integrated Terminal, Pulau Sambu Fuel Terminal, Kotabaru Fuel Terminal, Baubau Fuel Terminal, and Tuban Refrigerated LPG Terminal to support energy security across Western, Central, and Eastern Indonesia.

Implementation of Anti-Bribery Management System (ABMS): Demonstrating its commitment to good corporate governance, the Company implemented ISO 37001:2016 to ensure that business processes are free from bribery and corruption practices.

Strengthening HSSE and Compliance Systems: Comprehensive audits and improvements were conducted across all work units to enhance Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) systems and legal compliance.

Social and Environmental Responsibility (SER) Programs: The Company launched various community-oriented programs with direct social impact, including entrepreneurship training, environmental management initiatives, and vocational education programs.

2023

2024

Akselerasi Pertumbuhan dan Inovasi Pembangunan

Terminal LPG Refrigerated Tuban: Perseroan memulai tahap konstruksi terminal berkapasitas besar (88.000 MT *refrigerated* + 5.000 MT *pressurized*) di Tuban, sebagai hub distribusi LPG untuk wilayah timur Indonesia.

Digitalisasi Proses Operasional: diterapkan sistem digital untuk pemantauan stok, distribusi, dan pelaporan HSSE, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi di seluruh terminal.

Pembentukan Satgas RAFI 2024: Dalam rangka menjamin ketersediaan energi selama Ramadan dan Idul Fitri, Perseroan membentuk Satgas RAFI yang beroperasi di seluruh terminal, bekerja sama dengan *stakeholder* eksternal seperti Kementerian ESDM dan aparat keamanan.

Penguatan Brand dan Reputasi: Perseroan meraih penghargaan CSR *Brand Equity Awards* 2025 dari The Iconomics, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya terhadap program CSR yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Accelerating Growth and Driving Innovation

Development of the East Java Refrigerated LPG Terminal: the Company commenced the construction phase of a large-scale terminal in Tuban (88,000 MT refrigerated and 5,000 MT pressurized). This terminal is designed to serve as a key distribution hub for LPG in Eastern Indonesia.

Digitalization of Operational Processes: The Company implemented a digital system to monitor stock levels, manage distribution, and report on HSSE metrics enhancing operational efficiency and transparency across all terminals.

Establishment of the RAFI 2024 Task Force: To ensure energy availability during Ramadan and Eid al-Fitr, the Company established the RAFI Task Force, which operated across all terminal sites in coordination with external stakeholders, including the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and national security authorities.

Strengthening Brand and Reputation: the Company was honored with the 2025 CSR Brand Equity Award by The Iconomics, recognizing the Company's contributions to CSR programs that align with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Visi dan Misi Perusahaan
Vision and Mission of the Company

Visi dan Misi Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-032/PET0000/2024-S0 tanggal 01 September 2024 tentang Visi dan Misi PT Terminal Energy Terminal.

The Vision and Mission of the Company were established pursuant to Decree No. Kpts-032/PET0000/2024-S0 dated September 1, 2024, concerning the Vision and Mission of PT Pertamina Energy Terminal.

Vision

Menjadi Perusahaan Terminal Energi Terintegrasi Kelas Dunia

Mission

1. **Menjalankan bisnis jasa pengelolaan terminal secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dengan mengutamakan aspek keselamatan, keberlanjutan, lingkungan, dan layanan prima.**
   To carry out integrated terminal handling services business based on strong commercial principles by emphasizing safety, sustainability, environment, and service excellence.
2. **Mengembangkan World Class Green Terminal dalam mendukung penerapan *Environmental, Social and Governance* (ESG) dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.**
   by Develop World Class Green Terminal to support implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) by utilizing green technology and renewable energy.

Penjelasan tentang Misi
Explanation of Mission

Visi ini mencerminkan cita-cita jangka panjang Perseroan untuk menjadi pemain utama dalam industri penyimpanan dan distribusi energi, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga regional dan global. Kata "terintegrasi" menegaskan bahwa Perseroan tidak hanya berfokus pada pengelolaan terminal fisik, tetapi juga pada integrasi proses, teknologi, keamanan, keberlanjutan, serta sinergi dengan seluruh rantai pasok energi. Sedangkan "kelas dunia" menandakan komitmen Perseroan terhadap standar internasional dalam layanan, keselamatan, keberlanjutan, dan Tata Kelola Perusahaan.

The Vision reflects the Company's long-term aspiration to become a leading player in the energy storage and distribution industry, not only at the national level but also regionally and globally. The term "integrated" emphasizes that the Company's focus extends beyond the management of physical terminals to include the integration of processes, technologies, safety, sustainability, and synergy across the entire energy supply chain. Meanwhile, "world-class" signifies the Company's commitment to upholding international standards in service quality, safety, sustainability, and Corporate Governance.

Penjelasan tentang Misi
Explanation of Mission

Misi

Untuk mencapai visinya, Perseroan menetapkan misi strategis berikut:

1. Menyediakan layanan terminal energi yang aman, andal, dan efisien melalui penerapan teknologi dan sistem manajemen terbaik.
2. Fokus pada operasional unggul dengan standar HSSE tinggi, sistem digital terintegrasi, serta inovasi dalam efisiensi energi dan pelayanan pelanggan.
3. Mendukung ketahanan energi nasional dengan menjaga kontinuitas dan kualitas pasokan energi di seluruh wilayah operasional.
4. Berperan penting dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM dan LPG, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
5. Membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan.
6. Kolaborasi erat dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis dalam menjalankan peran sosial, ekonomi, dan lingkungan.
7. Menumbuhkan budaya kerja profesional yang menjunjung integritas, keselamatan, dan keberlanjutan.
8. Penguatan budaya AKHLAK serta penerapan prinsip GCG dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Tata Nilai Perseroan

Core Values AKHLAK adalah nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan menjadi pondasi Perseroan yang merupakan merupakan perusahaan yang terafiliasi BUMN. Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) yang menjadi core values setiap insan PT Pertamina (Persero) selaku induk Perusahaan Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Adapun AKHLAK yang senantiasa dijalankan Perseroan adalah sebagai berikut:

Mission

To realize its Vision, the Company has outlined the following strategic missions:

1. Delivering safe, reliable, and efficient energy terminal services by implementing advanced technologies and best-in-class management systems.
2. Focusing on operational excellence through high HSSE standards, integrated digital systems, and innovations in energy efficiency and customer service.
3. Supporting national energy security by ensuring the continuity and quality of energy supply across all operational regions.
4. Playing a vital role in the availability and distribution of fuel and LPG, particularly in remote, outermost, and underdeveloped regions (known as 3T areas).
5. Fostering synergy with all stakeholders to create long-term, sustainable value.
6. Collaborating with the government, communities, and business partners in fulfilling the Company's social, economic, and environmental roles.
7. Cultivating a professional work culture grounded in integrity, safety, and sustainability.
8. Strengthening of the AKHLAK core values, along with the GHG implementation principles and the Anti-Bribery Management System (ABMS).

Corporate Values

The AKHLAK Core Values represent the fundamental principles of Human Capital within the scope of State-Owned Enterprises (BUMN), serving as both an identity and a unifying element of corporate culture that supports continuous performance improvement. These values also form the foundation of the Company, a company affiliated with SOEs. The Company upholds the values of Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative) collectively referred to as AKHLAK which serve as the core values embraced by every individual within PT Pertamina (Persero), the parent company of the Company, in carrying out its business activities. The AKHLAK values consistently upheld by the Company are as follows:

AKHLAK

A — Amanah / Trustworthy

Menjunjung tinggi dengan amanah yang telah diberikan

Uphold the trust given.

Panduan Perilaku AKHLAK
AKHLAK Conduct Guidance

1. Memenuhi janji dan komitmen
2. Bertanggung jawab atas tugas, Keputusan dan tindakan yang dilakukan
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

1. Fulfilling promises and commitments
2. Taking responsibility for assigned tasks, decisions, and actions taken
3. Upholding moral values and ethics

Contoh Perilaku Spesifik Pertamina
Pertamina Specific Conduct Example

1. Bertanggung jawab atas tugas, Keputusan dan tindakan yang dilakukan hingga tuntas

1. Being accountable for tasks, decisions, and actions until completion

K — Kompeten / Competent

Terus belajar dan mengembangkan kemampuan.

Continue to learn and develop capabilities.

Panduan Perilaku AKHLAK
AKHLAK Conduct Guidance

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

1. Improving personal competence to respond to ever-changing challenges
2. Helping others to learn
3. Completing tasks with the best quality

Contoh Perilaku Spesifik Pertamina
Pertamina Specific Conduct Example

1. Berani mengambil Keputusan secara tepat & tepat berdasarkan risiko yang terukur
2. Mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta kepedulian kepada orang lain, lingkungan sosial dan alam sebagai *way of life*
3. Melayani dengan hati tanpa batas

1. Demonstrating courage in making timely and accurate decisions based on measurable risk
2. Prioritizing Occupational Health and Safety with a deep concern for others, social environment, and nature as a way of life
3. Serving wholeheartedly

H — Harmonis / Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Care for each other and respect differences.

Panduan Perilaku AKHLAK
AKHLAK Conduct Guidance

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

1. Respecting every individuals regardless of their background
2. Willing to help others
3. Fostering conducive work environment

Contoh Perilaku Spesifik Pertamina
Pertamina Specific Conduct Example

1. Saling membantu dan mendukung untuk kepentingan perusahaan

1. Supporting and assisting one another for the benefit of the Company

L — Loyal / Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Remain dedicated and prioritize the interests of the nation and country

Panduan Perilaku AKHLAK
AKHLAK Conduct Guidance

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

1. Upholding good reputation among employees, leaders, SOEs, and Nation
2. Willing to sacrifices to achieve greater goods
3. Obeying leadership as long as does not conflict with laws and ethics

Contoh Perilaku Spesifik Pertamina
Pertamina Specific Conduct Example

1. Berani mengambil Keputusan secara tepat & tepat berdasarkan risiko yang terukur
2. Mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta kepedulian kepada orang lain, lingkungan sosial dan alam sebagai *way of life*
3. Melayani dengan hati tanpa batas

1. Going above and beyond to build and enhance national capacity
2. Demonstrating perseverance in facing challenges and expectations
3. Willing to make sacrifices to achieve the Company's objectives

A — Adaptif / Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Continue to innovate and be enthusiastic about moving forward or facing the changes.

Panduan Perilaku AKHLAK
AKHLAK Conduct Guidance

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
3. Bertindak proaktif

1. Quickly Adapting to be better
2. Continuously improving to be in line with technological advancements
3. Acting proactive

Contoh Perilaku Spesifik Pertamina
Pertamina Specific Conduct Example

1. Kreatif dan inovatif dalam menghasilkan Solusi dan nilai tambah
2. Menunjukkan semangat, antusiasme, dan energi positif

1. Creative and innovative in delivering solutions and added value
2. Exhibiting passion, enthusiasm, and positive energy

K — Kolaboratif / Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis.

Build synergistic cooperation.

Panduan Perilaku AKHLAK
AKHLAK Conduct Guidance

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

1. Providing opportunities for various parties to contribute
2. Being open in collaboration to create added value
3. Mobilizing the use of resources for common goods

Contoh Perilaku Spesifik Pertamina
Pertamina Specific Conduct Example

1. Bersinergi secara agresif untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya untuk Perusahaan dan *stakeholder* lainnya
2. Mencari Solusi terbaik dalam menghadapi perbedaan kepentingan yang terjadi

1. Aggressively synergizing to deliver maximum added value for the Company and other stakeholders
2. Finding best solutions in facing differences in interest

Bidang Usaha

Berdasarkan Akta No 90 Pasal 3 ayat (2) tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki bidang usaha sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan;
2. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
3. Konstruksi;
4. Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan
5. Pengangkutan dan Pergudangan.

Line of Business

Line of Business according to the Article of Association of Deed No. 90 Article 3 paragraph (2(dated September 30, 2021, the Company conducts line of business as follows:

1. Processing Industry
2. Water Treatment, Sewage Treatment, Treatment and Recovery of Waste Materials, and Remediation Activities
3. Construction
4. Wholesale Sales and Retail Sales, Car and Motorcycle Repair
5. Transportation and Warehousing

Kegiatan usaha yang sedang berlangsung saat ini di PT Pertamina Energy Terminal, sebagai berikut:

1. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
2. Industri Air Minum Isi Ulang;
3. Penampungan Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
4. Instalasi Saluran Air (Plambing);
5. Industri Air Kemasan;
6. Aktivitas Penunjang *Treatment* Air;
7. Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
8. Angkutan melalui Saluran Pipa.

Produk dan Jasa

Produk dan jasa yang dihasilkan Perseroan adalah:

1. Jasa Terminal, yaitu penyimpanan/penyaluran Minyak & Gas Bumi;
2. Produk/Jasa *Fresh Water Supply*, yaitu penyaluran dan pengelolaan Air Baku dan Air Bersih serta pengadaan Air Minum Dalam Kemasan

Operating Line of Businesses of PT Pertamina Energy are as the following:

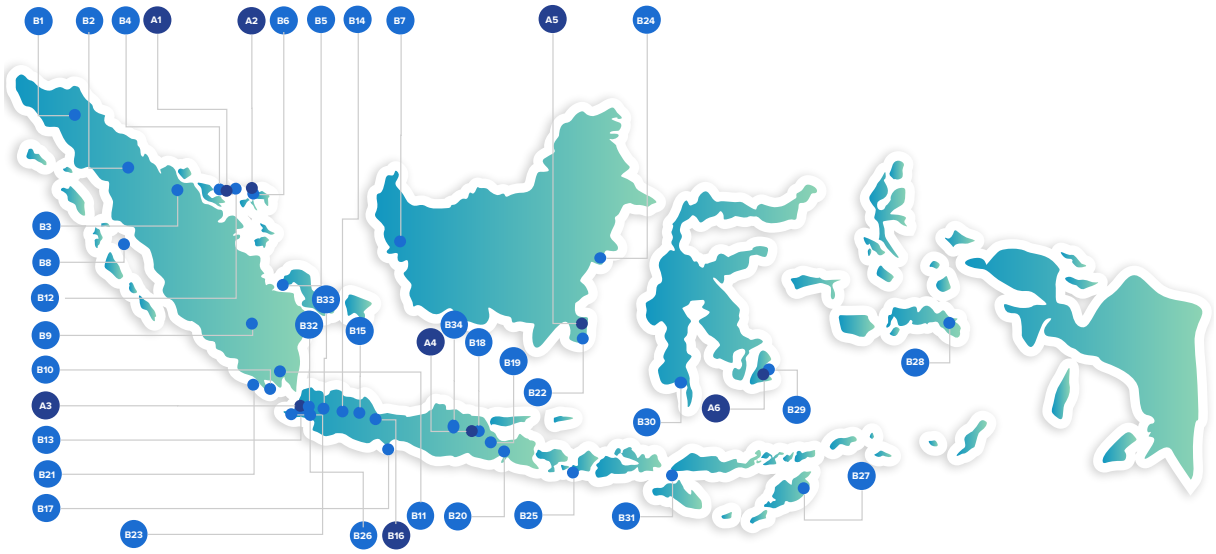
1. Oil and Gas Storage;
2. Refillable Drinking Water Industry;
3. Drinking Water Collection, Purification, and Distribution;
4. Water Pipeline Installation (Plumbing);
5. Bottled Water Industry;
6. Water Treatment Support Activities;
7. Raw Water Storage and Distribution;
8. Transportation via Pipelines.

Product and Services

The products and services provided by PT Pertamina Energy Terminal are:

1. Terminal Services particularly storage/ distribution of Oil & Gas
2. Fresh Water Supply Products/Services, particularly the distribution and management of Raw Water and fresh Water as well as the procurement of Bottled Drinking Water

Wilayah Operasional
Operational Area



Tank Terminal	Fresh Water Supply					
A1. Pulau Sambu Sambu Island	B1. Belawan	B7. Pontianak	B13. Tg. Gerem	B19. Gresik	B25. Manggis	B31. Bima
A2. Tanjung Uban	B2. Dumai	B8. Padang	B14. Tg. Priok	B20. Surabaya	B26. Anyer	B32. Cilegon
A3. Tanjung Sekong	B3. Pekanbaru	B9. Plaju	B15. Balongan	B21. Teluk Semangka	B27. Kupang	B33. Marunda
A4. Tuban	B4. Batam	B10. Panjang	B16. Cirebon	B22. Kotabaru	B28. Wayame	B34. Rembang
A5. Kotabaru	B5. STS Muntok	B11. Tg. Wangi	B17. Cilacap	B23. Tg Sekong	B29. Baubau	
A6. Baubau	B6. Tg. Uban	B12. Sambu	B18. Tuban	B24. Balikpapan	B30. Makassar	

Kantor Cabang atau Perwakilan

Branch Offices or Representation

Terminal Storage

No	Lokasi Location	Alamat Address	No Telp Phone Number	Email
1	*Fuel* Terminal Pulau Sambu Sambu Island Fuel Terminal	Tanjung Sari, Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau 29416	-	sekretaris.ohpsambu@mitrakerja.pertamina.com
2	*Integrated* Terminal Tanjung Uban Tanjung Uban Integrated Terminal	Jl Nusa Indah No. 1 Komplek Pertamina, Tanjung Uban, Bintan Utara, Bintan	0771-81254/81255	mk.eka.syafitri@mitrakerja.pertamina.com
3	LPG Terminal Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	Jl. Yos Sudarso Link Baru I/ II, Lebak Gede, Pulomerak, Cilegon, Banten 42431	02548495195/8495196 /8495197/8495198	mk.yenny.azwar@mitrakerja.pertamina.com
4	*Fuel* Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	Jl. H. Hasan Basrie Km 4.5 Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan	0518-21624/051824282	mk.rakhmad.wahyuni@mitrakerja.pertamina.com
5	*Fuel* Terminal Bau-Bau Bau-Bau Fuel Terminal	Jl Dayanuikhsanuddin Km 8, Sulaa, Betoambari, Baubau Sulawesi Tenggara	0402-2822990	mk.muhammad.syaban@mitrakerja.pertamina.com

Water Operation

Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address	Email
Water Operation Cabang Balikpapan Water Operation Branch Balikpapan	Jl. RE. Martadinata RT. 15 No. 26, Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah	Pi2t.4dhe@gmail.com
Water Operation Cabang Bima Water Operation Branch Bima	JL.Sultan Kaharuddin No.174 Wadumbolo, Kota Bima	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Cilacap Water Operation Branch Cilacap	Jl. Tongkol No. 20 Cilacap Selatan, PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Cilacap	Pet.cilacap@gmail.com rizki.rahardianadi.gmail.com
Water Operation Cabang Dumai Water Operation Branch Dumai	Gedung Pertamina Trans Kontinental Jl. Sultan Syarif Kasim No.262 Dumai	roni3@pertamina.com Yayanandrian256@gmail.com
Water Operation Cabang Gresik Water Operation Branch Gresik	Jln.Harun Thohir Komplek Perkantoran Pertamina RT.001 RW.006 Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Pekanbaru Water Operation Branch Pekanbaru	Sungai Pakning, Bukit Batu, Bengkalis Regency, Riau	roni3@pertamina.com Yayanandrian256@gmail.com
Water Operation Cabang Plaju Water Operation Branch Plaju	Jl. Beringin No 01 Komperta Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Ketutayu07@gmail.com Pkt_plaju@ptk-karyatirta.com
Water Operation Cabang Pontianak Water Operation Branch Pontianak	Jl. RE. Martadinata RT. 15 No. 26, Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah	Pi2t.4dhe@gmail.com Sufyani@pertamina.com
Water Operation Cabang Rembang Water Operation Branch Rembang	Jl. Nasional Rembang-Tuban KM 138, Desa Sedangmulyo,Kecamatan Rembang Sluke,Kabupaten Rembang-Jawa Tengah	irfan.figiawan@pertamina.com
Water Operation Cabang Surabaya Water Operation Branch Surabaya	Teluk Kumai Barat No.113/5 RT:003 RW:002 KEL: Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Teluk Kabung Water Operation Branch Teluk Kabung	Komp. Pratama Indah Cindakir Teluk Kabung, Blok H No.8 RT. 02 / RW. 05, Kel. Teluk Kabung Utara, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang	Rudi.setiawan2@pertamina.com

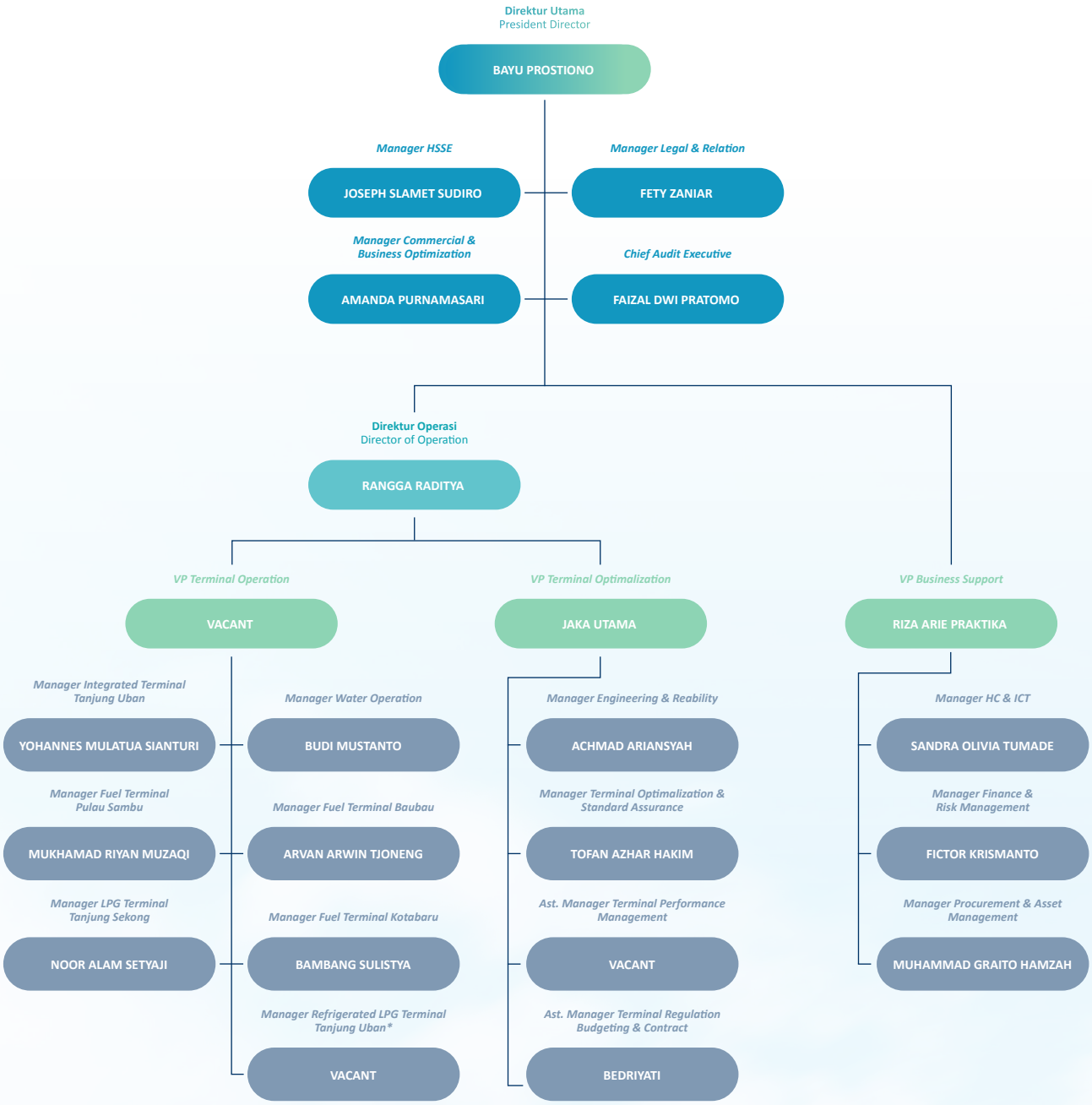
Water Operation

Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address	Email
Water Operation Cabang Tuban Water Operation Branch Tuban	Jl. Tanjung Awar-awar, Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Wayame Water Operation Branch Wayame	Jl. Ir. M Putuhena KM 24 Wayame, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku	kluivertajawaila@gmail.com
Water Operation Cabang Kupang Water Operation Branch Kupang	Pertamina FT Tenau Kupang Jl. Yossudarso No 1 Kupang, NTT, Kec.Alak, Kota Kupang	Rudi.setiawan2@pertamina.com Hetady06pelipus79@gmail.com
Water Operation Cabang Balongan Water Operation Branch Balongan	Jl. Kedung Krisik Selatan No. 9 RT/RW 002/006 Kel.Argasunya, Kec.Harjamukti, Kota Cirebon	balonganpetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Kotabaru Water Operation Branch Kotabaru	Jl. H. Hasan Basri Km. 4,5 Kel. Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kal- Sel 72117	Pi2t.4dhe@gmail.com Parkyoga16@gmail.com
Water Operation Cabang Belawan Water Operation Branch Belawan	Belawan II, Medan Kota Belawan, Kota Medan	roni3@pertamina.com Yayanandrian256@gmail.com
Water Operation Cabang Muntok Water Operation Branch Muntok	Jl. Raya Tg. Kalian (Seberang SLTP Negeri 2) Muntok- Bangka Barat	Ketutayu07@gmail.com
Water Operation Cabang Manggis Water Operation Branch Manggis	Jl. Raya Ulakan, Manggis, Karangasem, Marine Manggis	pktmanggis@gmail.com
Water Operation Cabang Batam Water Operation Branch Batam	Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Gedung Pertamina Trans Kontinental, Batam, Kota Batam, Nongsa, Kep. Riau	Lihat.syahati@pertamina.com Reniangriani15@yahoo.co.id
Water Operation Cabang Tanjung Wangi Water Operation Branch Tanjung Wangi	Jl. Gatot Subroto No.72, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur	Pkt.tanjungwangi@gmail.com
Water Operation Cabang Tanjung Priok Water Operation Branch Tanjung Priok	Jl. Yos Sudarso No.205, Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	irfan.firgiawan@pertamina.com
Water Operation Cabang Lampung Water Operation Branch Lampung	Jl. Sumatera Komp. Pelabuhan Panjang Kantor *Security* Reklamasi, Bandar lampung	Nur.akbar2@pertamina.com
Water Operation Cabang Tanjung Uban Water Operation Branch Tanjung Uban	Jl. Nusa Indah No. 01, Tanjung Uban, Kepulauan Riau	Lihat.syahati@pertamina.com Sarma.manalu@gmail.com
Water Operation Cabang Tanjung Gerem Water Operation Branch Tanjung Gerem	Jl. RE Martadinata No. 50 Tg Gerem, Merak, banten	Aamarullah.pkt@gmail.com
Water Operation Cabang Tanjung Sekong Water Operation Branch Tanjung Sekong	Link Baru I/II Jl. Yos Sudarso, Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon	Aamarullah.pkt@gmail.com
Water Operation Cabang Semarang Water Operation Branch Semarang	Jl. Deli, Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa tengah	balonganpetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Batam- Industri Water Operation Branch Batam- Industry	Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Gedung Pertamina Trans Kontinental, Batam, Kota Batam, Nongsa, Kep. Riau	Lihat.syahati@pertamina.com Reniangriani15@yahoo.co.id
Water Operation Cabang Ciwandan- Industri Water Operation Branch Ciwandan- Industry	PT Pertamina Energi Terminal Jl. Raya Anyer KM 119 Kepuh Ciwandan, Cilegon, Banten	najiullah@pertamina.com deny.suryana@pertamina.com

Struktur Organisasi
Organization Structure

Organisasi PT Pertamina Energy Terminal berdasarkan Surat Keputusan: SK No. Kpts-037/PET0000/2023-S8 tentang Struktur Organisasi tanggal 18 Desember 2023. Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

The organization of PT Pertamina Energy Terminal is based on the Decree: SK No. Kpts-037/PET0000/2023-S8 regarding Organizational Structure dated December 18, 2023. The organizational structure of PT Pertamina Energy Terminal is as follows:



*Status Terminal Tuban masih dalam pembangunan

*Tuban Terminal status is currently under construction

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

Bambang Sujito

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Bekasi | Bekasi

Usia | Age
56 Tahun | 56 Years Old

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- Magister Hukum Sumber Daya Alam, Universitas Indonesia (2014)
- Sarjana Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada (1996)
- Master of Laws in Natural Resource Law, University of Indonesia (2014)
- Bachelor of Civil Law, University of Gadjah Mada (1996)

Dasar hukum pengangkatan | Legal Basis of Appointment
- Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal tanggal 26 Juli 2024.
- Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal tanggal 23 Februari 2024.
- Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal dated July 26, 2024.
- Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal dated February 23, 2024.

Pengalaman Kerja | Career Experience
- Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM (Juni 2022 - September 2023)
- Koordinator Penyusunan Perundang-undangan II Biro Hukum, ESDM KESDM (2020– Mei 2022)
- Kepala Bagian Penyusunan Perundang - undangan II Biro Hukum, KESDM (2018-2020)
- Kepala Bagian Penelahaan Hukum Biro Hukum, KESDM (2017-2018)
- Kepala Bagian Penyusunan Perundang - undangan I Biro Hukum, KESDM (2015-2017)
- Coordinator of Legal Affairs, Directorate General of Mineral and Coal, Secretariat of the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources (June 2022 - September 2023)
- Coordinator for Legislative Drafting II Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2020 - May 2022)
- Head of Legislative Drafting II, Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2018 - 2020)
- Head of Legal Analysis, Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2017 - 2018)
- Coordinator for Legislative Drafting I Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2015 - 2017)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KESDM (Oktober 2023 - sekarang)
Head of Law Firm at Secretariat General of the Ministry of Energy and Mineral Resources (October 2023 - Present)

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation
Tidak Ada | None



Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner
(26 Juli 2024-saat ini)
(July 26, 2024- present)

Komisaris
Commissioner
(23 Februari 2024-26 Juni 2024)
(February 23, 2024- June 26, 2024)

Nepos MT Pakpahan



Komisaris
Commissioner
(24 Juni 2024-saat ini)
(June 24, 2024-present)

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia| Indonesian

Domisili | Domicile
Tangerang Selatan | Tangerang Selatan

Usia | Age
62 Tahun| 62 Years Old

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang (1989).
- Magister (S2) Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2001).
- Bachelor's degree in Mechanical Engineering from University of Brawijaya, Malang (1989).
- Master's degree in Engineering from University of Jenderal Soedirman, Purwokerto (2001).

Dasar hukum pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal tanggal 24 Juni 2024.
Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal dated June 24, 2024.

Pengalaman Kerja | Career Experience
Bergabung dengan PT Pertamina (Persero) dari tahun 1990. Sejumlah jabatan penting yang telah dicapai:
- Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (sejak Desember 2019- Juni 2023).
- VP HSSE *Upstream* PT Pertamina (Persero) (2017-2019).

Joined PT Pertamina (Persero) in 1990 and has held several key positions, including:
- President Director PT Pertamina Trans Kontinental (since December 2019-June 2023).
- VP HSSE Upstream at PT Pertamina (Persero) (2017-2019).

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada | None

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation
Tidak Ada | None

Hufron Asrofi



Komisaris
Commissioner
(26 Agustus 2021-23 Februari 2024)
(August 26, 2021-February 23, 2024)

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta | Jakarta

Usia | Age
65 Tahun | 65 Years Old

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" (2000)
- Sarjana Hukum Keperdataan, Universitas Islam Jakarta (1985)
- Master of Law, College of Law "IBLAM" (2000)
- Bachelor of Civil Law, Jakarta Islamic University (1985)

Dasar hukum pengangkatan | Legal Basis of Appointment
- Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Peteka Karya Tirta sesuai ketentuan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tentang penggantian komisaris PT Peteka Karya Tirta Tanggal 26 Agustus 2021
- Circular shareholder resolution of PT Peteka Karya Tirta in accordance with article 10 paragraph 5 of the Limited Liable Company's articles of association regarding the replacement of commissioners of PT Peteka Karya Tirta dated August 26, 2021

Pengalaman Kerja | Career Experience
- Tenaga Ahli Menteri Sekretariat Jenderal KESDM (2020-2024)
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Biro Hukum (2015-2020)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2014-2015)
- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2011-2014)
- Staf diperbantukan pada BPH Migas (Kepala Bagian Hukum dan Humas) (2005-2011)
- Experts of the Minister of Energy and Mineral Resources Secretariat General (2020-2024)
- Head of the Legal Bureau of the Secretariat General of the Law Bureau (2015-2020)
- Secretary of the Directorate General of Oil and Gas (2014-2015)
- Secretary of the Directorate General of Oil and Gas Secretariat of the Directorate General of Oil and Gas (2011-2014)
- Auxiliary Staff to BPH Migas (Head of Legal and Public Relations Division) (2005-2011)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Staf ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Regulasi & Kerjasama Kelembagaan (2020-sekarang)
Experts in the Minister of Energy and Mineral Resources for Acceleration Regulatory & Institutional Cooperation (2020-present)

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation
Tidak Ada | None

Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

01 Januari 2024 - 23 Februari 2024
Komisaris : Hufron Asrofi

23 Februari 2024 - 24 Juni 2024
Komisaris : Bambang Sujito

24 Juni 2024 - 26 Juli 2024
Komisaris : Bambang Sujito
Komisaris : Nepos MT Pakpahan

26 Juli 2024 - saat ini
Plt. Komisaris Utama : Bambang Sujito
Komisaris : Nepos MT Pakpahan

Alasan Perubahan

Komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan untuk penyempurnaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Composition of the Board of Commissioners

During 2024, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. The changes are as follows:

January 1, 2024 - February 23, 2024
Commissioner: Hufron Asrofi

February 23, 2024 - June 24, 2024
Commissioner: Bambang Sujito

June 24, 2024 - July 26, 2024
Commissioner: Bambang Sujito
Commissioner: Nepos MT Pakpahan

July 26, 2024 - present
Acting President Commissioner : Bambang Sujito
Commissioner: Nepos MT Pakpahan

Reason for the Change

The changes in the composition of the Board of Commissioners were made to strengthen the implementation of Good Corporate governance

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Bayu Prostiyono



Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta | Jakarta

Usia | Age
48 Tahun | 48 Years Old

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- Magister Teknik Universitas Indonesia (2009)
- Sarjana Teknik Institut Teknologi Sepuluh November (1996)
- Master of Engineering, University of Indonesia (2009)
- Bachelor of Engineering, Sepuluh November Institute of Technology (1996)

Dasar hukum pengangkatan | Legal Basis of Appointment
- Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal tanggal 24 Juni 2024.
- Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal tanggal 03 Juli 2023.
- Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal dated June 24, 2024.
- Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal dated July 03, 2024.

Pengalaman Kerja | Career Experience
- *Manager Supply & Distribution* JBT PT Pertamina Patra Niaga (2022-2023)
- *Manager Fleet Operation* PT Pertamina Patra Niaga (2021-2023)
- *Integrated Terminal Manager* Jakarta (2020-2021)
- *Supply & Distribution* JBT *Manager* PT Pertamina Patra Niaga (2022-2023)
- *Fleet Operation Manager* PT Pertamina Patra Niaga (2021-2023)
- *Integrated Terminal Manager* Jakarta (2020-2021)
- Manager Supply & Distribution JBT PT Pertamina Patra Niaga (2022-2023)
- Manager Fleet Operation PT Pertamina Patra Niaga (2021-2023)
- Integrated Terminal Manager Jakarta (2020-2021)
- Supply & Distribution JBT Manager PT Pertamina Patra Niaga (2022-2023)
- Fleet Operation Manager PT Pertamina Patra Niaga (2021-2023)
- Integrated Terminal Manager Jakarta (2020-2021)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada | None

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation
Tidak Ada | None

Direktur Utama
President Director
(24 Juni 2024-saat ini)
(June 24, 2024-present)

Direktur
Director
(3 Juli 2023-24 Juni 2024)
(July 3, 2023- June 24, 2024)

Rangga Raditya



Direktur Operasi
Director of Operation
(24 Juni 2024-saat ini)
(June 24, 2024-present)

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia| Indonesian

Domisili | Domicile
Jakarta | Bekasi

Usia | Age
46 Tahun| 46 Years Old

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background
- Institut Teknologi Bandung/Bandung S1-Teknik Elektro
- Universitas Indonesia/Jakarta S2-Teknik Industri
- *Rotterdam School of Management*, Erasmus University/Belanda S2-*Business Administration*
- Bandung Institute of Technology/Bandung, Bachelor's degree in Electrical Engineering
- University of Indonesia/Jakarta, Master's degree in Industrial Engineering,
- Rotterdam School of Management, Erasmus University/Netherland, Master's degree in Business Administration.

Dasar hukum pengangkatan | Legal Basis of Appointment
Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal tanggal 24 Juni 2024.
Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal dated June 24, 2024.

Pengalaman Kerja | Career Experience
- *GM Marine Business & Operation Region* II (2023-2024)
- *VP Marketing* (2021-2023)
- *Region Manager Marine* I (2020-2021)
- GM Marine Business & Operation Region II (2023-2024)
- VP Marketing (2021-2023)
- Region Manager Marine I (2020-2021)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position
Tidak Ada | None

Hubungan Afiliasi | Affiliate Relation
Tidak Ada | None

Komposisi Direksi

Selama tahun 2024, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

1 Januari 2024 - 24 Juni 2024
Direktur: Bayu Prostiyono

24 Juni 2024 - saat ini
Direktur Utama: Bayu Prostiyono
Direktur Operasi: Rangga Raditya

Alasan Perubahan

Komposisi Direksi mengalami perubahan untuk penyempurnaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Composition of the Board of Directors

In 2024, changes occurred in the composition of the Board of Directors. The details of these changes are as follows:

January 1, 2024 – June 24, 2024
Director: Bayu Prostiyono

June 24, 2024 – present
President Director: Bayu Prostiyono
Operations Director: Rangga Raditya

Reason for the Change

The Board of Directors experienced change to enhance Good Corporate Governance practices.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Bagi Perseroan, Sumber Daya Manusia memegang peran strategis dalam mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian target jangka panjang Perseroan. Dalam menghadapi dinamika industri energi yang terus berkembang, fokus utama diarahkan pada penguatan kompetensi, pengembangan kapabilitas, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan produktif. Pengelolaan tersebut dijalankan secara terpadu, sesuai dengan rencana Perseroan tahunan dan jangka panjang yang diselaraskan dengan strategi guna meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja.

For the Company, Human Capital plays a strategic role in supporting operational sustainability and the achievement of long-term corporate objectives. In response to the continuously evolving dynamics of the energy industry, the Company's primary focus lies in strengthening competencies, developing capabilities, and fostering a safe, inclusive, and productive work environment. Human Capital management is implemented in an integrated manner, aligned with both the Company's annual and long-term plans, and synchronized with corporate strategies to enhance competitiveness and accelerate performance.

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin
Composition of Employees Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	Tahun 2023 In 2023		Tahun 2024 In 2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	144	92,90%	154	89,02%
Perempuan Female	11	7,10%	19	10,98%
Jumlah Total	155	100%	173	100%

Komposisi Pekerja berdasarkan Jabatan
Composition of Employees Based on Position

Jabatan Position	Tahun 2023 In 2023		Tahun 2024 In 2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Vice President (VP)	1	0,65%	2	1,15%
Manager/setara Manager/ Equivalent	13	8,39%	15	8,68%
Staf & Assistant Manager Staff & Assistant Manager	141	90,97%	156	90,17%
Jumlah Total	155	100%	173	100%

Komposisi Pekerja berdasarkan Usia
Composition of Employees Based on Age

Usia Age	Tahun 2023 In 2023		Tahun 2024 In 2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<25 Tahun <25 Years old	1	0,65%	11	6,36%
26-30 Tahun 26-30 Years old	29	18,71%	26	15,02%
31-35 Tahun 31-35 Years old	25	16,13%	24	13,87%
36-40 Tahun 36-40 Years old	43	27,74%	51	29,48%

Komposisi Pekerja berdasarkan Usia
Composition of Employees Based on Age

Usia Age	Tahun 2023 In 2023		Tahun 2024 In 2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
41-45 Tahun 41-45 Years old	24	15,48%	29	16,76%
46-50 Tahun 46-50 Years old	16	10,32%	16	9,24%
>50 Tahun >50 Years old	16	10,97%	16	9,24%
Jumlah Total	155	100%	173	100%

Komposisi Pekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan
Composition of Employees Based on Educational Background

Tingkat Pendidikan Educational Background	Tahun 2023 In 2023		Tahun 2024 In 2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pascasarjana Post Graduate	3	1,94%	5	2,89%
Sarjana Bachelor	39	25,16%	69	39,88%
Diploma	48	30,97%	50	28,90%
SLTA dan Setara Senior High Schools and Equivalent	64	41,29%	49	28,32%
<SLTA < Senior High Schools	1	0,65%	0	0%
Jumlah Total	155	100%	173	100%

Komposisi Pekerja berdasarkan Status Ketenagakerjaan
Composition of Employees Based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan Employment Status	Tahun 2023 In 2023		Tahun 2024 In 2024	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pegawai Tetap (PWTT) Perbantuan PTK Permanent Auxiliary Employee from PTK	4	2,58%	3	1,73%
Pegawai Tetap (PWTT) Permanent Employee	40	25,81%	54	31,21%
Pegawai Tetap (PWTT) *Holding* Permanent Direct Hire Employee from Holding	100	64,52%	104	60,11%
Pegawai Tetap (PWTT) PIS Permanent Direct Hire Employee from PIS	5	3,23%	4	2,31%
Pegawai Tetap (PWTT) Perbantuan PHE Permanent Auxiliary Employee from PHE	1	0,65%	2	1,15%
PWT PET PET PWT	-	0,00%	1	0,59%
BKO TNI Polri	5	3,25%	5	2,89%
Jumlah Total	154	100%	173	100%

Program Pengembangan Pekerja

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, sepanjang tahun 2024 Perseroan telah menjalankan berbagai macam Program Pengembangan Pekerja yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis. Program ini mencakup pelatihan pengelolaan risiko, pengelolaan limbah, sampai dengan pelatihan untuk well-being pekerja. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kesiapan SDM dalam mendukung operasional yang andal, aman, dan sesuai dengan standar industri.

Employee Competency Development

As part of the Company's commitment to enhancing workforce competence and productivity, throughout 2024 the Company implemented a series of Employee Development Programs focused on strengthening both technical and non-technical skills. These programs included training on risk management, waste management, and employee well-being. This initiative is aimed at ensuring the readiness of human capital to support reliable, safe, and industry-compliant operations.

Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Biaya Costs
Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Hazardous Waste (B3) Management Training	2	3 *Day*	Pertamina *Corporate* University	Rp19.000.000 (*Estimated*)
Pelatihan Pengelolaan Pencemaran Air Water Pollution Management Training	5	1 *Day*	HSE *Training Centre*	Rp147.630.000 (*Estimated*)
Certified Risk Professional	7	2 *Day*	HSETC	Rp52.500.000 (*Estimated*)
Pelatihan *Manager Energy* Energy Manager Training	4	3 *Day*	Pertamina *Corporate* University	Rp48.000.000 (*Estimated*)
Pelatihan *Gas Tester* Gas Tester Training	3	2 *Day*	HSE *Training Centre*	Rp63.270.000 (*Estimated*)
Pelatihan Petugas Pengambil Contoh Sampling Staff Training	2	2 *Day*	PPSDM	Rp42.700.000 (*Estimated*)
Pelatihan *Public Speaking for Executive* Public Speaking for Executive Training	20	2 *Day*	Talkinc	Rp89.000.000
Pelatihan *Well Being Managing Stress* Well Being Manaiging Stress Training	1	2 *Day*	GSR	Rp20.000.000 (*Estimated*)

Rencana Pelatihan

Training Plan

Fungsi dan Jenis Pelatihan Function and Type of Training	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
HSSE - *Security Management System*	Q2-Q3
Procurement & *Asset Management* - Verifikator TKDN	Q2-Q3
Finance & *Risk Management* - *Certified Risk Professional*	Q2-Q3
HC & ICT - *Certified Human Resource Officer*	Q3-Q4
TOSA - *Demand & Production Fore Casting*	Q3-Q4
Engineering & *Reliability* - *Advanced Inventory Control*	Q2-Q3
Terminal Operation - *Distribution Management*	Q3-Q4
Terminal Operation - *Fundamental Supply Planning & Scheduling*	Q2-Q4
Legal - *Contract & Litigation Management Program*	Q3-Q4
Commercial & Business Optimization - *Integrated Channel Management*	Q2-Q4
Audit Executive - *Certified Information Systems Auditor* (CISA)	Q3-Q4
CBO - *Business Analysis & Forecasting*	Q2-Q3
Terminal Optimization - *Mechanical Engineering*	Q3-Q4

Adanya Persamaan Kesempatan kepada Seluruh Pekerja

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perseroan, tanpa memandang unsur *gender*, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan adil, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pekerja untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perseroan memberikan kesempatan pengembangan karier kepada seluruh pekerja Perseroan.

Equal Opportunity for All Employees

The Company provides equal and equitable opportunities to every outstanding citizen to work and contribute to the Company, regardless of gender, religion, race, or any other discriminatory factors. The recruitment system is carried out transparently and fairly, based on the planning of employee needs to support the achievement of the Company's short-term and long-term goals. The Company provides career development opportunities to all the Company officers.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

Komposisi Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The shareholder composition of the Company as of December 31, 20234 is as follows:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal Nominal Value	Persentase Percentage (%)	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders
PT Pertamina International *Shipping*	9.955.394	9.955.394.000.000	99,98301%	✓	✓
PT Pertamina Trans Kontinental	1.691	1.691.000.000	0,01698%	-	-
PT Pertamina *Port and Logistics*	1	1.000.000	0,00001%	-	-

Nama Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham

Name of Shareholder who owns 5% or more shares

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal Nominal Value	Persentase (%) Percentage (%)
PT Pertamina International *Shipping*	9.955.394	9.955.394.000.000	99,98301%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris & Direksi per 31 Desember 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan.

Composition of Shareholder by the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2024

Throughout 2024, none of the members of the Board of Commissioners or the Board of Directors held any shares in the Company.

Nama Pemegang Saham yang Memiliki Kurang dari 5%

Name of Shareholder who owns less than 5% shares

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal Nominal Value	Persentase (%) Percentage (%)
PT Pertamina Trans Kontinental	1.691	1.691.000.000	0,01698%
PT Pertamina Port and Logistics	1	1.000.000	0,00001%

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Majority and Controlling Shareholders

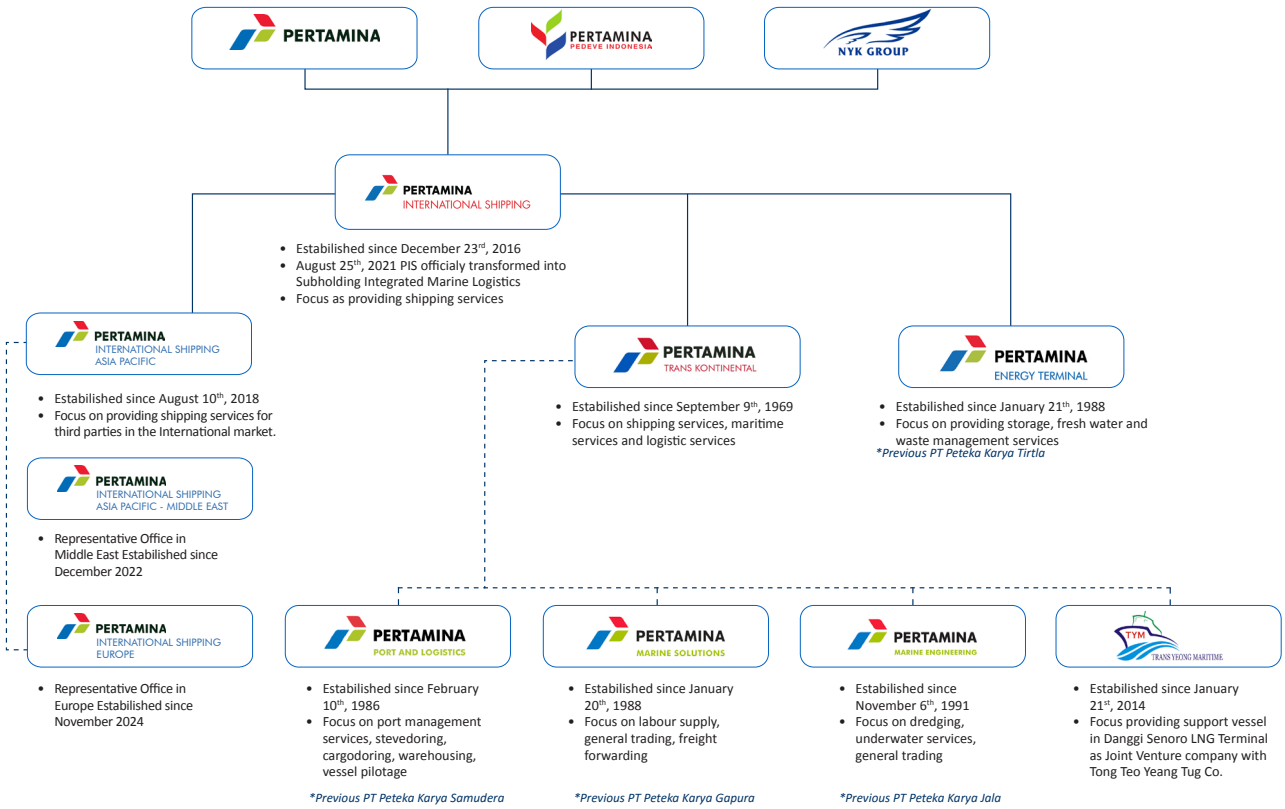


Struktur *Group* Perseroan

Berdasarkan pada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. S-616/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan Restrukturisasi *Subholding Shipping* menjadi *Subholding Integrated Marine Logistics*, maka struktur grup Perseroan sebagai berikut:

Corporate Group Structure

Referring to Letter of Minister of State Owned Enterprise of Indonesia in General Meeting of Shareholders (GMS) No. S-616/MBU/08/2021 dated August 25, 2021 regarding the Approval of Sub-holding Shipping Restructure to Sub-holding Integrated Marine Logistics, therefore, there is changes in the group structure in the Company as the following:



Anak Perusahaan & Afiliasi

Pada tahun 2024, Perseroan tidak memiliki Anak Perusahaan. Perseroan memiliki saham minoritas pada PT Pertamina Marine Engineering dengan persentase kepemilikan 0,83% dengan nilai wajar Rp100.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2024.

Subsidiaries & Affiliates

In 2024, the Company had no subsidiaries. The Company has a minority stake in PT Pertamina Marine Engineering with a 0.83% ownership percentage and a fair value of Rp100,000,000 as of December 31, 2024.

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Nama Asosiasi Association Name	Posisi Position
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)	Anggota Member

Kronologi Pencatatan Saham
Stock Listing Chronology

Selama tahun 2024, Perseroan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nominal dan harga Perseroan.

Throughout 2024, the Company has no stock listing chronology, number of shares, nominal value and price.

Efek Lainnya
Other Securities

Selama tahun 2024, Perseroan tidak melakukan aktivitas penerbitan dan perdagangan efek apapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait efek lainnya.

Throughout 2024 the Company does not conduct any activities related to the issuance and trading of any other securities. Therefore, there is no information regarding other securities.

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions

Selama tahun 2024, Perseroan bekerja sama dengan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang sebagai berikut:

Throughout 2024, the Company collaborates with the following supporting institutions and/or professions:

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Alamat Address	:	KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan (PricewaterhouseCoopers) KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Partners (PricewaterhouseCoopers)
Periode penugasan Assignment Period	:	01 Januari- 31 Desember 2024 January 1-December 31, 2024
Informasi jasa audit yang diberikan Information related to audit services given	:	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Preparation of Financial Statements for the 2024 Fiscal Year
Biaya jasa (*fee*) Service Fee	:	Rp910.800.000
Alamat Address	:	WTC 3 33rd- 43rd Floor 12920 Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta
Jasa non audit yang diberikan Non Audit services given	:	Jasa penilaian penurunan nilai aset tetap Impairment Assessment Services for Fixed
Biaya jasa non audit Asset Non Audit Service Fee	:	Rp600.000.000

Notaris
Notary

Nama Name	:	Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn.
Alamat Address	:	Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat Grand Slipi Tower, 16th Floor, Unit B1 Jl. S. Parman Kav. 22–24, West Jakarta
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	:	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Energy Terminal Deed of Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal
Periode penugasan Assignment Period	:	05 Maret 2024 dan 25 Juni 2025 March 5, 2024, and June 25, 2025.

Notaris
Notary

Nama Name	:	Yoanes Oetomo Putra, S.H., M.Kn.
Alamat Address	:	Komplek Ruko PCI Blok A4 Nomor 13, RT 003 RW 006, Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten Komplek Ruko PCI, Block A4 No. 13 RT 003 RW 006, Kedaleman Subdistrict, Cibeber District, Cilegon City, Banten Province
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	:	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Energy Terminal Deed of Circular Resolution of the Shareholders of PT Pertamina Energy Terminal
Periode penugasan Assignment Period	:	24 Agustus 2024 August 24, 2024

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on Company Website

Informasi terkait Pertamina Energy Terminal yang dimuat pada *website* Perseroan https://pertamina-pet.com antara lain sebagai berikut:

Information related to Pertamina Energy Terminal is published on the Company website https://pertamina-pet.com as follows:

Beranda Home	
Tentang Kami About Us	• Visi & Misi • Profil Perusahaan • Perjalanan Kami • *Core Values* • Manajemen • Penghargaan dan Sertifikasi • *World Class Green Terminal* • Vision & Mission • Company Profile • Our Journey • Core Values • Management • Awards and Certifications • World-Class Green Terminal
Bisnis Kami Our Business	• *Terminal Storage* a. LPG *Terminal* Tanjung Sekong b. LPG *Terminal* Tuban c. *Fuel Terminal* Pulau Sambu d. *Integrated Terminal* Tanjung Uban e. *Fuel Terminal* Kotabaru f. *Fuel Terminal* Baubau • *Water Operation* • Terminal Storage a. Tanjung Sekong LPG Terminal b. Tuban LPG Terminal c. Pulau Sambu Fuel Terminal d. Tanjung Uban Integrated Terminal e. Kotabaru Fuel Terminal f. Baubau Fuel Terminal • Water Operation
Media & Informasi News and Info	• Berita • Pengumuman • News • Announcements
Lainnya Other	• Integritas Perusahaan • Karir • Tata Kelola & Kebijakan • Corporate Integrity • Careers • Governance & Policies
Kontak Kami Our Contact	Email: corsec.pet@pertamina.com

Peristiwa Penting Tahun 2024
Significant Event in 2024



November 2024 | November 2024

Penandatanganan *Head of Agreement* Perseroan dan SPMT tentang Rencana Kerja Sama Pembangunan dan Pengoperasian Proyek JIGT di Kalibaru, Pelabuhan Tajung Priok.

Signing of Head of Agreement between the Company and SPMT outlining a planned collaboration for the development and operation of the Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) Project at Kalibaru, Tanjung Priok Port.



November 2024 | November 2024

Pemasokan Listrik oleh PLN ke Pulau Sambu

Electricity Supply by PLN to Pulau Sambu



November 2024 | November 2024

Penandatanganan 2 Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Krakatau Steel Grup untuk memanfaatkan teknologi efisiensi teknologi. Kolaborasi ini melibatkan PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK), PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan (KTOP, serta PT Catur Eka Mandiri (CEM)

Signing of Two Memoranda of Understanding between the Company and the Krakatau Steel Group to harness efficiency-enhancing technologies. The collaboration involves PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK), PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Krakatau Tirta Operation and Maintenance (KTOP), and PT Catur Eka Mandiri (CEM)

Penghargaan & Sertifikasi Tahun 2024
Awards & Certifications in 2024

Penghargaan | **Awards**



Pemenang 7th CSR *Brand Equity Awards* 2025 atas pelaksanaan CSR tahun 2024
Winner of the 7th CSR Brand Equity Awards 2025 for the Implementation of CSR Programs in 2024

Penyelenggara	: The Iconomics
Organizer	: The Iconomics
Tanggal	: 29 April 2025
Date	: April 29, 2025



Tempat Penimbunan Pabean (TPB) Terbaik I Tahun 2023
1st Place , Best Bonded Storage Facility (TPB) 2023

Penyelenggara	: KPPBC TMP B Tanjungpinang
Organizer	: KPPBC TMP B Tanjungpinang
Tanggal	: 22 Februari 2024
Date	: February 22, 2024



PERCA Biru Integrated Terminal Tanjung Uban

Penyelenggara	: PT Pertamina (Persero)
Organizer	: PT Pertamina (Persero)
Tanggal	: 18 November 2024
Date	: November 18, 2024



Peringkat Hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2023-2024 Terminal BBM Baubau dan Terminal LPG Tanjung Sekong

Green Rating in the 2023–2024 PROPER (Corporate Performance Rating Program) for Baubau Fuel Terminal and Tanjung Sekong LPG Terminal

Penyelenggara	: Kementerian Lingkungan Hidup
Organizer	: Ministry of Environment
Tanggal	: Tanggal: 1 Maret 2025
Date	: March 1, 2025

Sertifikasi

Certification



ISO 9001:2015 (Kantor Pusat)
ISO 9001:2015 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 9001:2015
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Fuel Terminal* Pulau Sambu)
ISO 9001:2015
(Pulau Sambu Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Fuel Terminal* Kotabaru)
ISO 9001:2015
(Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015 (*Fuel Terminal* Baubau)
ISO 9001:2015 (Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*LPG Terminal* Tanjung Sekong)
ISO 9001:2015
(Tanjung Sekong LPG Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015 (Kantor Pusat)
ISO 14001:2015 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 9001:2015
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(*Fuel Terminal* Pulau Sambu)
ISO 14001:2015
(Pulau Sambu Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(*Fuel Terminal* Kotabaru)
ISO 14001:2015
(Kotabaru Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(*Fuel Terminal* Baubau)
ISO 14001:2015
(Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(LPG *Terminal* Tanjung Sekong)
ISO 14001:2015
(Tanjung Sekong Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 28000:2022 (Kantor Pusat)
ISO 28000:2022 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
19 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 19, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 28000:2022
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 28000:2022
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
19 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 19, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018 (Kantor Pusat)
ISO 45001:2018 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 45001:2018
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018
(*Fuel Terminal* Pulau Sambu)
ISO 45001:2018
(Pulau Sambu Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018
(*Fuel Terminal* Kotabaru)
ISO 45001:2018
(Kotabaru Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018 (*Fuel Terminal* Baubau)
ISO 45001:2018 (Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku | Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018 (LPG *Terminal* Tanjung Sekong)
ISO 45001:2018 (Tanjung Sekong LPG Terminal)

Masa Berlaku | Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
PT Pertamina Energy Terminal - Laboratory Fuel Terminal Pulau Sambu

Masa Berlaku | Validity Period
23 April 2023 - 16 April 2028
April 23, 2023 - April 16, 2028

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Committee



SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
PT Pertamina Energy Terminal - Fuel Terminal Kotabaru

Masa Berlaku | Validity Period
23 April 2023 - 16 April 2028
April 23, 2023 - April 16, 2028

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Committee

Sinergi Pertamina *Group*
Pertamina Group Synergy



Disajikan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

Nama Perusahaan Company Name	Bentuk Sinergi Form of Synergy	Sisi Party	Realisasi Tahun Realization Year		Persentase Kenaikan/ Penurunan Percentage of Increase/ Decrease
			2023	2024	
PT Pertamina (Persero)	*Chargeback* biaya ICT ICT Chargeback Cost	Pembeli Buyer	3.172.730.000	1.594.230.000	(49,76%)
PT Pertamina Training & Consulting	Penyedia Tenaga Kerja Labor Provider	Pembeli Buyer	69.139.548.000	64.849.591.000	(6,21%)
PT Pertamina Marine Solutions	Penyedia Tenaga Kerja Labor Provider	Pembeli Buyer	40.589.447.000	47.717.465.000	17,58%
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Asuransi Aset Asset Insurance	Pembeli Buyer	7.273.135.000	46.759.528.000	543,00%
PT Pertamina International Shipping	Bunga atas pinjaman pemegang saham Shareholder's Loan Interest	Pembeli Buyer	1.226.376.000	43.721.391.000	3465,47%
PT Pertamina Marine Engineering	Manajemen Konstruksi, Maintenance Construction Management, Maintenance	Pembeli Buyer	44.546.321.000	17.698.644.000	(60,27%)
PT Pertamina Port and Logistics	Pemakaian Listrik dan Air Use of Electricity and Water	Pembeli Buyer	2.217.102.000	10.305.790.000	364,84%
PT Pertamina Patra Niaga	Pemakaian *Own Use* Own Use usage	Pembeli Buyer	40.666.912.000	6.642.226.000	(83,67%)
PT Prima Armada Raya	Penyedia Jasa Kendaraan Vehicle Service Provider	Pembeli Buyer	4.882.501.000	6.278.889.000	28,56%

Disajikan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

Nama Perusahaan Company Name	Bentuk Sinergi Form of Synergy	Sisi Party	Realisasi Tahun Realization Year		Persentase Kenaikan/ Penurunan Percentage of Increase/ Decrease
			2023	2024	
PT Pertamina Maintenance & Construction	Konsultasi dan Inspeksi Consultation and Inspection	Pembeli Buyer	1.707.284.000	4.266.390.000	149,90%
PT Kilang Pertamina Internasional	*Supply* Air Tawar Fresh Water Supply	Pembeli Buyer	5.817.269.000	3.786.805.000	(34,91%)
PT Pertamina Bina Medika IHC	Layanan Kesehatan Medical Services	Pembeli Buyer	2.612.305.000	3.673.131.000	40,59%
PT Pertamina Power Indonesia	Pemakaian Listrik Electricity Usage	Pembeli Buyer	2.028.052.000	2.305.328.000	13,65%
PT Perusahaan Gas Negara	Sarana Komunikasi Radio Radio Communication services	Pembeli Buyer	0	1.629.993.000	N/A
PT Patra Jasa	Layanan Pemeliharaan Fasilitas Integrated Facility Management Solutions	Pembeli Buyer	907.309.000	1.247.269.000	37,49%
PT Pertamina Trans Kontinental	Pemakaian Listrik, Air dan *Fresh Water* Use of Electricity, Water, and Freshwater	Pembeli Buyer	797.388.000	833.000.000	4,47%
Lain-Lain	-	Pembeli Buyer	885.084.000	288.471.000	(67,41%)
Jumlah Total			228.468.763.000	263.598.141.000	15,37%

Disajikan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

Nama Perusahaan Company Name	Bentuk Sinergi Form of Synergy	Sisi Party	Realisasi Tahun Realization Year		Persentase Kenaikan/ Penurunan Percentage of Increase/ Decrease
			2023	2024	
PT Pertamina Patra Niaga)	Jasa Penyimpanan dan Penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak Oil Fuel Storage and Delivery Services at The Fuel Oil Terminal	Penjual Seller	863.233.060.000	930.688.383.000	7,82%
PT Pertamina International Shipping	*Supply Fresh Water* Fresh Water Supply	Penjual Seller	18.424.990.000	20.578.982.000	11,70%
PT Pertamina Trans Kontinental	Supply Fresh Water Fresh Water Supply	Penjual Seller	6.207.591.000	7.705.333.000	24,12%
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Pengoperasian dan pemeliharaan *Water Treatment Plant* ("WTP") dan *Sewage Treatment Plant* ("STP") Operation and Maintenance of Water Treatment Plant ("WTP") and Sewage Treatment Plant ("STP")	Penjual Seller	6.682.261.000	4.638.920.000	(-30,58%)
PT Pertamina Hulu Energi *Offshore Southeast* (OSES)	*Monitoring* Bahan Bakar Fuel Monitoring	Penjual Seller	1.156.741.000	1.051.343.000	(9,12%)
Lain-Lain	-	Penjual Seller	6.235.756.800	5.997.828.070	xxxx
Jumlah Total			897.160.936.000	966.268.598.000	7,71%



Analisa dan Diskusi Manajemen

Management Discussion and Analysis



PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

Tinjauan Perekonomian
Economic Review



Perekonomian global pada tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi laju pertumbuhannya. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund (IMF) dalam World Economy Outlook* (WEO) Januari 2025, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia diperkirakan hanya mencapai 3,2%, sedikit menurun dibandingkan dengan 3,3% yang tercatat pada tahun 2023 (*World Economic Outlook*, Oktober 2024). Meskipun ada penurunan, pertumbuhan global diperkirakan akan tetap stabil pada kisaran 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026.

Amerika Serikat mencatatkan pertumbuhan yang lebih solid, sebesar sekitar 2,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara maju lainnya yang hanya mencatatkan angka pertumbuhan 1,7%. Meskipun inflasi global menunjukkan tren penurunan, IMF memperingatkan bahwa tarif impor yang diusulkan oleh Amerika Serikat dapat menambah ketidakpastian ekonomi dan berpotensi memperlambat pertumbuhan.

Disisi lain, Tiongkok, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, hanya mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 4,8%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh dampak dari kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat serta tantangan internal, seperti penurunan permintaan domestik dan ketidakstabilan sektor properti. Meskipun masih menunjukkan angka positif, Cina menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan laju pertumbuhannya di tengah persaingan global yang semakin ketat dan perubahan dalam kebijakan domestik serta global.

The global economy in 2024 faced various challenges that affected its growth rate. According to data from the International Monetary Fund (IMF) in the January 2025 World Economic Outlook (WEO), global Gross Domestic Product (GDP) growth is estimated to reach only 3.2%, slightly drop from the 3.3% recorded in 2023 (World Economic Outlook, October 2024). Despite the decline, global growth is projected to remain stable at around 3.3% for 2025 and 2026.

The United States recorded a slightly solid growth rate of approximately 2.8%, significantly higher than the average growth of other advanced economies, which stood at only 1.7%. Although global inflation shows a declining trend, the IMF has warned that proposed import tariffs by the United States could add to economic uncertainty and potentially slow down growth.

On the other hand, China, as one of the world's largest economic powers, recorded growth of only about 4.8%. The figure is lower compared to previous periods, mainly due to the impact of trade policies implemented by the United States as well as internal challenges such as declining domestic demand and instability in the property sector. Although still posting positive growth, China faces considerable pressure to maintain its growth momentum amid intensifying global competition and changes in both domestic and international policies.

Overview of the World Economic Outlook Projections

(Percent change, unless noted otherwise)

	Year over Year								
	Estimate		Projections		Difference from October 2024 WEO Projections 1/		Q4 over Q4/ Estimate	Q4 over Q4/ Projections	
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2024	2025	2026
World Output	3.3	3.2	3.3	3.3	6.1	0.0	3.4	3.2	3.1
Advance Economies	1.7	1.7	1.9	1.8	0.1	0.0	1.8	1.9	1.7
United States	2.9	2.8	2.7	2.1	0.5	0.1	2.7	2.4	2.1
Euro Area	0.4	0.8	1.0	1.4	-0.2	-0.1	1.1	1.2	1.4
Germany	-0.3	-0.2	0.3	1.1	-0.5	-0.3	-0.1	0.8	0.9
France	1.1	1.1	0.8	1.1	-0.3	-0.2	0.7	1.0	1.2
Italy	0.7	0.6	0.7	0.9	-0.1	0.2	0.6	1.0	0.7
Spain	2.7	3.1	2.3	1.8	0.2	0.0	3.2	1.9	2.0
Japan	1.5	-0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7
United Kingdom	0.3	0.9	1.6	1.5	0.1	0.0	1.7	1.8	1.3
Canada	1.5	1.3	2.0	2.0	-0.4	0.0	1.8	2.1	1.9
Other Advance Economics 3/	1.9	2.0	2.1	2.3	-0.1	0.0	1.7	2.8	1.7
Emerging Market and Developing Economies	4.4	4.2	4.2	4.3	0.0	0.1	4.6	4.2	4.2
Emerging and Developing Asia	5.7	5.2	5.1	5.1	0.1	0.2	5.6	4.9	5.1
China	5.2	4.8	4.6	4.5	0.1	0.4	4.9	4.5	4.5
India 4/	8.2	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0	7.5	6.5	6.5
Emerging and Developing Europe	3.3	3.2	2.2	2.4	0.0	-0.1	2.3	2.9	1.6
Russia	3.6	3.8	1.4	1.2	0.1	0.0	2.7	1.2	1.2
Latin America and the Carribean	2.4	2.4	2.5	2.7	0.0	0.0	2.6	2.7	2.4
Brazil	3.2	3.7	2.2	2.2	0.0	-0.1	4.1	2.1	2.3
Mexico	3.3	1.8	1.4	2.0	0.1	0.0	1.8	1.4	2.2
Middle East and Central Asia	2s.0	2.4	3.6	3.9	-0.3	-0.3	...	...	...
Saudi Arabia	-0.8	1.4	3.3	4.1	-1.3	-0.3	5.0	1.2	4.1
Sub-Saharan Africa	3.6	3.8	4.2	4.2	0.0	-0.2	...	...	...
Nigeria	2.9	3.1	3.2	3.0	0.0	0.0	3.5	3.7	3.8
South Africa	0.7	0.8	1.5	1.5	0.0	0.1	1.7	0.6	2.2
Memorandum									
World Growth Based on Mark Exchange Rates	2.8	2.7	2.9	2.8	0.1	0.1	2.9	2.7	2.6
European Union	0.6	1.0	1.4	1.7	-0.2	0.0	1.3	1.5	1.7
ASEAN-5/5	4.0	4.5	4.6	4.5	0.1	0.0	4.9	3.9	5.0
Middle East and North Africa	1.8	2.0	3.5	3.9	-0.5	-0.3	...	...	...
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.5	4.2	4.2	4.2	0.0	0.1	4.6	4.2	4.2
Low-Income Developing Economies	4.1	4.1	4.6	5.4	-0.1	-0.2	...	...	...
World Trade Volume (goods and services) 6/	0.7	3.4	3.2	3.3	-0.2	-0.1	...	...	...
Advanced Economies	0.0	2.2	2.1	2.5	-0.5	-0.3	...	...	...
Emerging Market and Developing Economies	2.0	5.4	5.0	4.6	0.3	0.2	...	...	...
Commodity Prices									
Oil 7/	-16.4	-1.9	-11.7	-2.6	-1.3	1.0	-10.8	-5.0	-2.2
Nontuel (Average Based On World Commodity Import)	-5.7	3.4	2.5	-0.1	2.7	-0.9	7.1	0.1	0.5
World Consumer Prices 8/	6.7	5.7	4.2	3.5	-0.1	-0.1	5.2	3.5	3.0
Advanced Economies 9/	4.6	2.6	2.1	2.0	0.1	0.0	2.2	2.1	2.0
Emerging Market Developing Developing Economies 8/	8.1	7.8	5.6	4.5	-0.3	-0.2	7.6	4.6	3.8

Note : Real effective the exchange rates are assumed to remain constant at the levels prevalling during October 22-November 19, 2024. Economies are listed on the basis of economic size. The aggregated quarterly data are seasonally. *...* Indicates that data are not available or not applicable. WEO-World Economic Outlook.
1/ Difference based on rounded figures for the current and October 2024 WEO forecasts. Countries for which forecasts have been updated relative to October 2024 WEO forecasts account for approximately 90 percent of world GDP measured at purchasing-power-parity weights.
2/ For World Output (Emerging Market and Developing Economies, the quarterly estimates and projections account for approximately 90 percent (80 percent) of annual wolrd (emerging markert and developing economies) output at purchasing-power-parity weights.
3/ Excludes the Group of Seven (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom) and Europe area countries.
4/ For India, data and projections are presented on a fiscal year (FY) basis, with FY 2023/24 (starting in April 2023) shown in the 2023 column. India's growth projections are 6.8 percent for 2025 and 6.5 percent for 2026 based on calendar year.
5/ Indonesia, Malaysia. Philippines, Singapore, Thailand.
6/ Simple average of growth rates for export and import volumes (goods and services).
7/ Simple average of prices of UK Brent, Dubai Fateh, and West Texas intermediate crude oil. The average assumed price of oil in US dollars a barrel, based on futures markets (as of November 20, 2024), is $69.96 for 2026.
8/ Excludes Venezuela.
9/ The assumed inflation rate for the euro area is 2.1 percent for 2025 and 2.0 percent for 2026, that for Japan is 2.0 percent for 2025 and 2.0 percent for 2026, and that for the United States is 2.0 percent for 2025 and 2.1 percent for 2026.

Sumber: WEO Januari 2025
Source : WEO January 2025

Berdasarkan data pada rilis bulan Maret 2025 dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), pertumbuhan diproyeksikan melambat karena kenaikan tarif mulai berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dampak negatif diproyeksikan akan sangat parah di Kanada dan Meksiko, mengingat keterbukaan perdagangan yang lebih besar, pentingnya hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, dan asumsi bahwa mereka akan menanggapi sepenuhnya kenaikan tarif bilateral AS. Dampak ini hanya akan diimbangi sebagian oleh pelonggaran kebijakan moneter karena meningkatnya kapasitas cadangan. Pertumbuhan PDB riil di Amerika Serikat diproyeksikan melambat dari laju cepatnya sebesar 2,8% pada tahun 2024 menjadi 2,2% pada tahun 2025 dan 1,6% pada tahun 2026, dengan pertumbuhan di Kanada diproyeksikan melambat dari 1,5% pada tahun 2024 menjadi 0,7% pada tahun 2025 dan 0,7% pada tahun 2026. Di Meksiko, ekonomi diproyeksikan mengalami resesi, dengan *output* menurun sebesar 1,3% pada tahun 2025 dan 0,6% pada tahun 2026.

According to data released in March 2025 by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), growth is projected to slow down as tariff increases take effect in the United States, Canada, and Mexico. The negative impact is expected to be particularly severe in Canada and Mexico, given their greater trade openness, the importance of bilateral relations with the United States, and the assumption that they will fully reciprocate the U.S. bilateral tariff hikes. The impact will only be partially offset by the easing of monetary policy due to increased reserve capacity. Real GDP growth in the United States is projected to slow from its strong pace of 2.8% in 2024 to 2.2% in 2025 and 1.6% in 2026. Growth in Canada is projected to decline from 1.5% in 2024 to 0.7% in 2025 and remain at 0.7% in 2026. In Mexico, the economy is projected to enter a recession, with output declining by 1.3% in 2025 and 0.6% in 2026.

Growth is projected to be stronger and inflation lower in a scenario with fewer tariff increases



Note: See main text to for details of the baseline and lighter tarrif scenario
Source: OECD Interim Economic Outlook 117 database: and CEO calculations.

Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan yang positif meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan (*year-on-year*/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,05%. Seluruh lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sektor jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 9,80%. Namun, Indonesia menghadapi potensi dampak dari kebijakan tarif impor yang diusulkan oleh Amerika Serikat, yang dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 hingga 0,5 poin persentase.

Meanwhile, Indonesia's economy in 2024 recorded positive growth, although it slightly dropped compared to the previous year. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesia's economy grew by 5.03% year-on-year (yoy), slightly lower than the 5.05% achieved in 2023. All business sectors showed positive growth, with the other services sector recording the highest increase at 9.80%. However, Indonesia faces potential impacts from the import tariff policies proposed by the United States, which could reduce the country's economic growth rate by 0.3 to 0.5 percentage points.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV-2024

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024

Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXVIII, 05 Februari 2025
Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXVIII, 05 Februari 2025

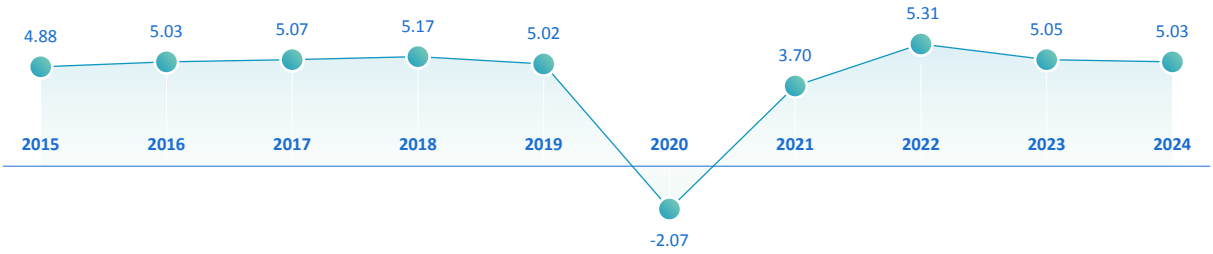
Q-TO-Q	Y-ON-Y	C-TO-C	Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Berlaku
0,53%	0,02%	0,03%	Rp22.139,0 Triliun

PDB Perkapita 2024 — Rp78.617.420 (US$ 4.960,3)

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2015-2024

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Pdb) 2015-2024

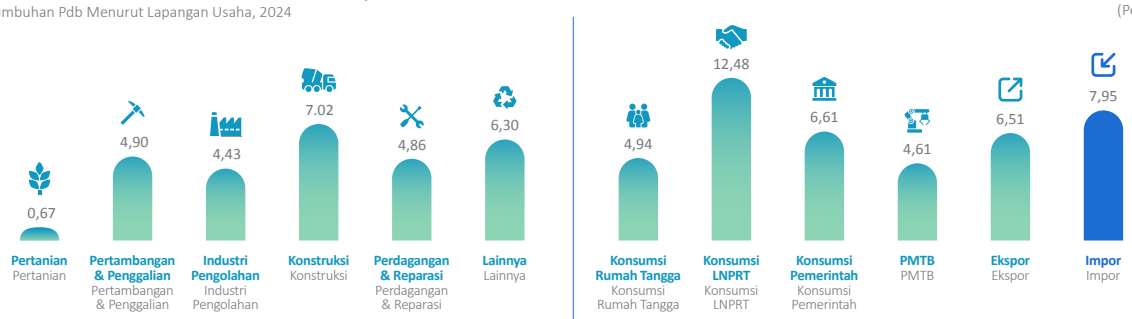
(Persen)
(Percent)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA, 2024

Pertumbuhan Pdb Menurut Lapangan Usaha, 2024

(Persen)
(Percent)

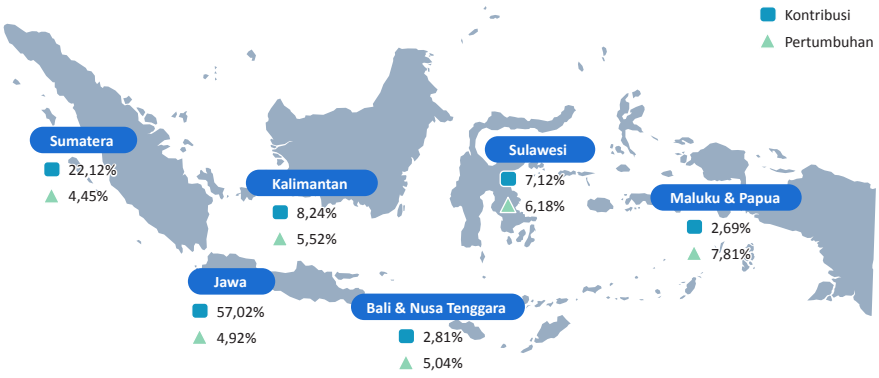


PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT WILAYAH

Pertumbuhan Dan Kontribusi Pdrb Menurut Wilayah

Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,02 persen dengan pertumbuhan 4,92 persen

Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,02 persen dengan pertumbuhan 4,92 persen

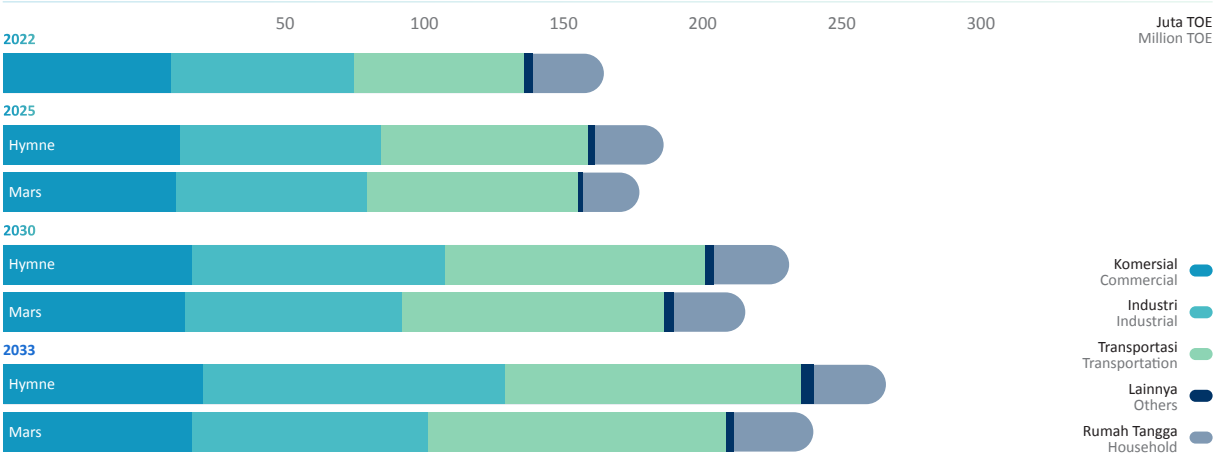


Sumber: BPS
Source : BPS

Tinjauan Industri
Industry Review

Dikutip dari *Outlook* Energi Indonesia, Permintaan energi pada masing-masing scenario dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kebijakan yang diambil selama periode proyeksi. Dalam sepuluh tahun ke depan, permintaan energi final pada skenario *Hymne* diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,6%. Sedangkan permintaan energi *final scenario Mars* tumbuh lebih rendah rata-rata 3,5% per tahun sejalan dengan adanya efisiensi energi di semua sektor. Permintaan energi pada masing-masing skenario tahun 2025, 2030, dan 2033 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini:

According to the Indonesia Energy Outlook, energy demand in each scenario is influenced by economic growth, population growth, and policies enacted during the projection period. Over the next decade, final energy demand in the Hymne scenario is projected to grow at an average rate of 4.6% per year. In contrast, final energy demand in the Mars scenario is expected to grow at a lower average rate of 3.5% per year due to energy efficiency measures implemented across all sectors. The projected energy demand for the years 2025, 2030, and 2033 under each scenario is illustrated in the following chart:



Gambar Permintaan Energi Final per Sektor

Figure Final Energy Demand by Sector

BBM mendominasi konsumsi energi final di tahun 2022 hingga 10 tahun ke depan sehingga pada tahun 2033 konsumsi BBM mencapai 113 juta TOE (*Hymne*) dan 96 juta TOE (*Mars*). Namun demikian rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM pada kedua skenario di bawah rata-rata pertumbuhan total konsumsi energi final yatu 4% (*Hymne*) dan 2,5% (*Mars*). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya substitusi BBM ke energi listrik, pemanfaatan biodiesel hingga B40 mulai dan etanol E5 serta dimulainya penggunaan hidrogen sebesar 0,045 juta TOE pada sektor transportasi mulai tahun 2031.

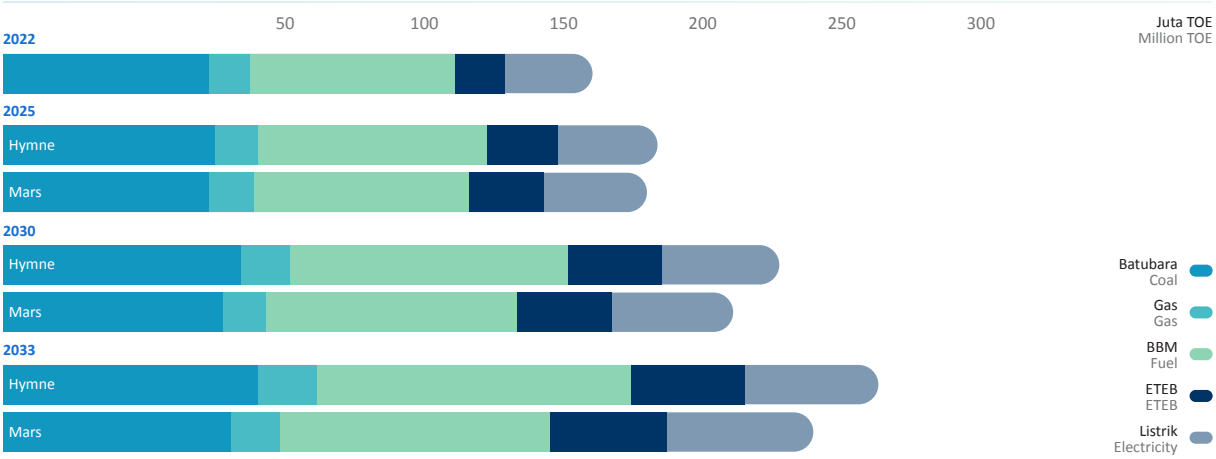
Pertumbuhan konsumsi energi terbesar berdasarkan jenisnya adalah ETEB (biodiesel dan bioetanol) yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 7,4%/tahun (*Hymne*) dan 7,5%/tahun (*Mars*) dengan adanya peningkatan campuran FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dalam minyak diesel sebesar 40% pada tahun 2025 dan etanol pada bensin sebesar 10% mulai tahun 2025. Konsumsi gas dalam 10 tahun ke depan rata-rata tumbuh sekitar 3,2% (*Hymne*) dan 2% (*Mars*), sementara konsumsi batubara tumbuh sekitar 5,4% (*Hymne*) dan 3% (*Mars*).

Perkembangan konsumsi energi *final* per jenis energi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini:

Fossil fuels dominated final energy consumption in 2022 and will continue to do so for the next 10 years, reaching 113 million TOE (Hymne) and 96 million TOE (Mars) by 2033. However, the average growth rate of fossil fuel consumption in both scenarios is below the average growth rate of total final energy consumption, which is 4% (Hymne) and 2.5% (Mars). This condition is influenced by efforts to substitute fossil fuels with electricity, the utilization of biodiesel up to B40, and ethanol E5, as well as the introduction of hydrogen amounting to 0.045 million TOE in the transportation sector starting in 2031.

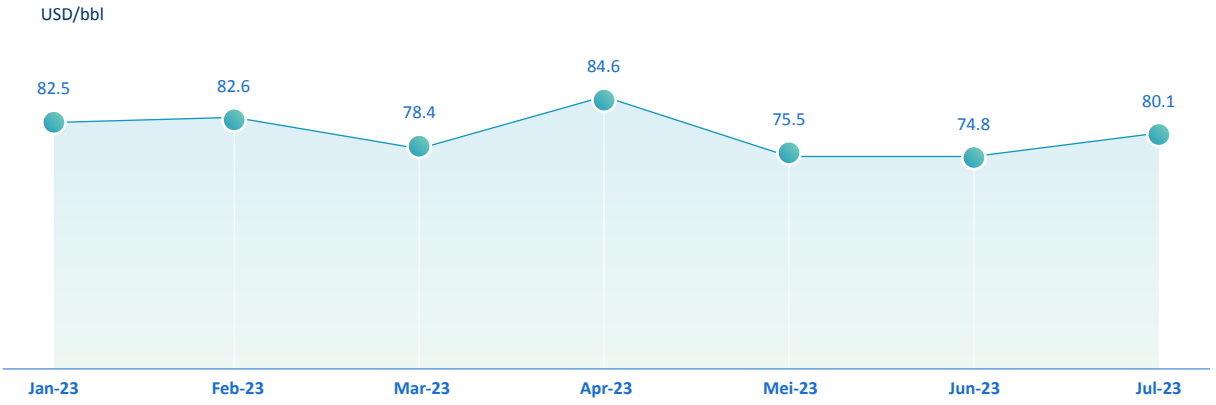
The largest growth in energy consumption by type is seen in ETEB (ETEB - biodiesel and bioethanol), each increasing at an average rate of 7.4% per year (Hymne) and 7.5% per year (Mars) due to the increased blending of FAME (Fatty Acid Methyl Ester) in diesel oil to 40% by 2025 and ethanol in gasoline to 10% starting in 2025. Gas consumption over the next 10 years is expected to grow at an average rate of around 3.2% (Hymne) and 2% (Mars), while coal consumption is projected to grow by approximately 5.4% (Hymne) and 3% (Mars).

The development of final energy consumption by type of energy is shown in the figure below:



Dikutip dari Pertamina *Outlook* Energy 2024, Industri hulu migas dinilai telah menunjukkan ketahanannya dengan pemulihan yang kuat dari pandemi Covid-19. Namun, saat ini terdapat tantangan besar berikutnya bagi pelaku usaha migas, yakni untuk menunjukkan keberlanjutan dan mampu memenuhi permintaan energi seiring dengan pemulihan ekonomi dan kegiatan produksi masyarakat. Ditambah dengan tren global transisi energi yang terjadi di beberapa negara di dunia, hal itu tentunya akan menekan permintaan atau demand produk migas di masa mendatang. Melihat perkembangan harga minyak di sepanjang tahun 2024, terlihat bahwa harga minyak dunia masih berada di atas rata-rata 70 dolar AS/barel.

According to the Pertamina Energy Outlook 2024, the upstream oil and gas industry has demonstrated its resilience with a strong recovery from the Covid-19 pandemic. However, the next significant challenge for oil and gas businesses is to demonstrate sustainability and the ability to meet energy demand in line with economic recovery and increased production activities. Additionally, the global trend of energy transition occurring in several countries around the world will inevitably pressure the demand for oil and gas products in the future. Observing the oil price trends throughout 2024, it is shown that global oil prices have remained above an average of 70 USD per barrel.



Gambar Harga Dated Brent 2023
Sumber: statista.com (2023)

Figure of Dated Brent Price in 2023
Source : statista.com (2023)

Saat ini, Perseroan migas dunia juga dituntut untuk menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong percepatan transisi energi global. Perusahaan migas di Eropa, seperti Total, ENI, dan BP, telah melakukan investasi energi terbarukan ke dalam portofolio bisnisnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong bagi perusahaan migas dunia untuk bergerak dalam transisi energi, antara lain:

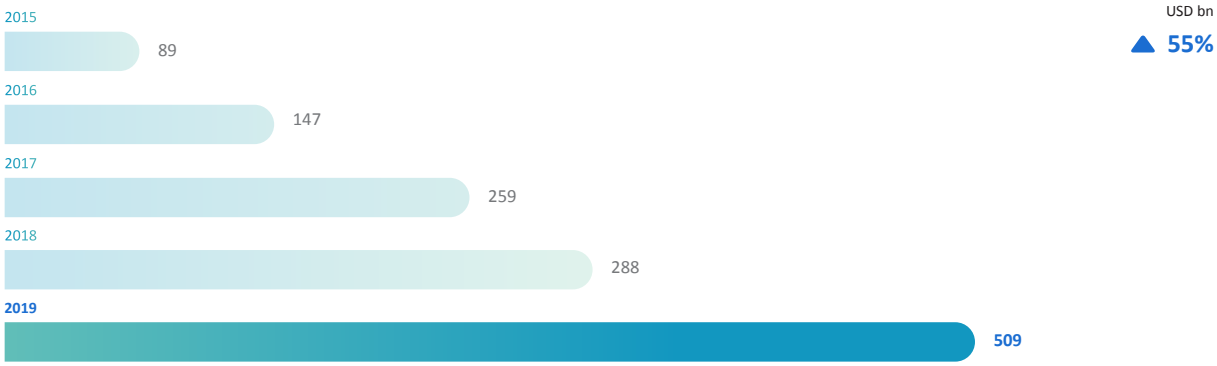
1. Tekanan dekarbonisasi: Mengurangi emisi operasional, mengembangkan CCS/CCUS, dan mendorong implementasi bahan bakar rendah karbon.
2. Diversifikasi bisnis energi: Berinvestasi dalam EBET untuk mendukung portofolio bisnis yang berkelanjutan ke depan.

Currently, global oil and gas companies are demanded to be one of the main drivers in accelerating the global energy transition. European oil and gas companies, such as Total, ENI, and BP, have already incorporated renewable energy investments into their business portfolios. Several factors are driving global oil and gas companies to engage in the energy transition, including:

1. Decarbonization Pressure: Reducing operational emissions, developing CCS/CCIS and promoting the implementation of low-carbon fuels.
2. Energy Business Diversification: Investing in renewable energy to support a sustainable business portfolio in the future.

Investasi Perusahaan migas dunia ke depan akan semakin terdiversifikasi dengan penurunan investasi di sektor hulu, dan digantikan dengan peningkatan investasi energi terbarukan atau rendah karbon. Hal itu ditujukan untuk membuat portofolio bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Moving forward, global oil and gas companies' investments will become increasingly diversified, with a reduction in upstream sector investments and a corresponding increase in renewable or low-carbon energy investments. This shift aims to create a sustainable business portfolio for the companies.



Gambar Investasi Proyek Sustainability Global
Sumber: Analisis PEI (2022)

Figure of Investment in Sustainability Global Projects
Source : PEI Analysis (2022)

Permintaan energi global diukur pada titik akhir penggunaan energi *decarbonizes* dalam ketiga skenario. Pangsa bahan bakar fosil dalam total akhir konsumsi energi (TFC) menurun dari sekitar 65% pada 2019 menjadi 30-50% pada tahun 2050 dalam tiga skenario. Peran listrik meningkat secara substansial, dengan listrik konsumsi meningkat sebesar 75- 85% dari prospek di ketiganya skenario. Porsi listrik pada titik akhir penggunaan meningkat dari 20% pada 2019 menjadi sekitar 30% di Momentum Baru dan 45-50% di Dipercepat dan *Net Zero*.

Global energy demand at the end-use level is expected to undergo significant decarbonization across three projected scenarios. The share of fossil fuels in total final consumption (TFC) is anticipated to decrease from around 65% in 2019 to between 30% and 50% by 2050 in these scenarios. The role of electricity is projected to increase substantially, with electricity consumption rising by 75-85% across all scenarios. The share of electricity in final energy consumption is expected to grow from 20% in 2019 to approximately 30% in the New Momentum scenario and 45-50% in the Accelerated and Net Zero scenarios.

Indonesia memiliki salah satu cadangan minyak terbukti terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Negara ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan akibatnya, permintaan akan produk minyak bumi dan produk minyak turunan kemungkinan besar akan meningkat di masa depan. Perkembangan seperti itu cenderung menghadirkan peluang signifikan bagi pemain yang terlibat di pasar. Meningkatnya adopsi energi terbarukan dapat menahan pasar selama periode perkiraan. Indonesia telah mulai menambahkan energi terbarukan ke dalam bauran energinya untuk mengurangi pangsa batubara dan minyak bumi domestik agar memiliki emisi yang lebih rendah dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Target tersebut, ditambah dengan kebijakan dan program pemerintah, telah menghasilkan beberapa proyek energi terbarukan yang dikembangkan di seluruh negeri.

Indonesia boasts one of the largest proven oil reserves among Southeast Asian countries. The nation's rapid economic growth is likely to drive an increase in demand for petroleum and petroleum products in the future, presenting significant opportunities for market players. However, the rise in renewable energy adoption might constrain the market during the forecast period. Indonesia has started incorporating renewable energy into its energy mix to reduce the domestic share of coal and petroleum, aiming for lower emissions and a greener economy. The government has set targets for renewable energy usage to reach 23% by 2025 and 31% by 2050. These targets, supported by government policies and programs, have spurred the development of several renewable energy projects across the country.

Maka dalam hal ini, bagi Perseroan sebagai *energy storage provider*, menjadikan situasi dan proyeksi kondisi industri minyak dan gas di masa mendatang sebagai acuan dalam melakukan adaptasi dan pengembangan bisnis *storage*. Segala upaya dimaksimalkan sebagai bentuk dukungan dalam transisi energi. Tidak terlepas dari bisnis yang dijalankan saat ini, sebagai *storage provider* untuk bahan bakar minyak dan gas Perseroan dituntut untuk berinovasi dalam memberikan layanan storage secara adaptif menyikapi volatilitas pangsa pasar di masa mendatang. Berbagai kemungkinan transisi energi dapat

Therefore, for the Company as an energy storage provider, the current situation and future projections of the oil and gas industry serve as a reference in adapting and developing its storage business. Every effort is maximized as a form of support for the energy transition. While continuing its current operations as a storage provider for oil and gas fuels, the Company is required to innovate by offering adaptive storage services in response to future market volatility. Various potential energy transition scenarios can be seen as business opportunities for the Company to maintain its corporate existence and strengthen

dijadikan sebagai peluang bisnis bagi Perseroan kedepannya untuk dapat mempertahankan eksistensi Perseroan dan dukungan sebagai salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping dan afiliasi PT Pertamina (Persero).

Di sisi lain meninjau lanskap energi yang terus berlanjut dan berubah secara adaptif adalah transisi sistem energi rendah karbon dan sistem terminal storage yang berbasis *Green Port* dan *Smart Port*. Dilansir dari *Ports and Maritime Organization, Green Port* merupakan suatu konsep baru dalam pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, *community development*, dan kepentingan ekonomi dari pelabuhan itu sendiri. Implementasi konsep *Green Port* dan *Smart Port* telah dijalankan dan diterapkan oleh pelabuhan- pelabuhan di dunia, antara lain Belanda (Rotterdam), USA (Los Angeles), dan Jerman (Hamburg), sedangkan Malaysia dan Singapura tengah melakukan uji coba untuk disegerakan dalam penerapannya.

its role as a subsidiary of PT Pertamina International Shipping and Affilites of PT Pertamina (Persero).

In the evolving energy landscape, transitioning to low-carbon energy systems and green, smart terminal storage systems is critical. According to the Ports and Maritime Organization, the Green Port concept represents a new approach to sustainable port development, integrating environmental conservation, energy efficiency, community development, and economic interests of the port. The implementation of Green Port and Smart Port concepts has been adopted by ports worldwide, including Rotterdam (Netherlands), Los Angeles (USA), and Hamburg (Germany). Malaysia and Singapore are also testing these concepts for imminent implementation.



Salah satu negara tetangga yang berkembang pesat pada sistem penyimpanan terminal dengan menerapkan sistem *Green Port* dan *Smart Port* adalah Singapura. Tarif sewa penyimpanan di Singapura meningkat lebih dari 25% dari tahun sebelumnya menjadi sekitar $7/meter kubik per bulan, menurut *S&P Global Platts*. Singapura juga merupakan stasiun pengisian bahan bakar kapal terbesar di dunia dengan lebih dari 47 juta MT bahan bakar bunker. Sementara variasi harga antar terminal penyimpanan tergantung pada infrastruktur dan kemampuan terminal. Pelaku pasar melaporkan bahwa biaya sewa penyimpanan untuk spektrum minyak mentah dan produk minyak telah meningkat lebih dari 25% y-o-y menjadi sekitar $7/cu m per bulan.

Salah satu terminal *benchmarking* yaitu PSA yang mengembangkan *mega port* sebagai etalase untuk teknologi dan sistem pelabuhan terbaru dengan mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di

Singapore, a neighboring country, has rapidly developed its terminal storage system by implementing Green Port and Smart Port systems. According to S&P Global Platts, storage rental rates in Singapore have increased by more than 25% from the previous year, reaching approximately $7 per cubic meter per month. Singapore is also the largest bunkering station globally, handling over 47 million MT of bunker fuel. The price variations between storage terminals depend on the infrastructure and capabilities of each terminal. Market players report the rental costs for crude oil and oil products storage have risen by more than 25% year-on-year to around $7/cu m per month.

One notable terminal, PSA, has developed a mega port showcasing the latest port technology and systems. By adopting technological innovations, PSA has enhanced productivity and efficiency at its ports while reducing dependence on manual

pelabuhannya serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Dengan penerapan otomatisasi sistem terminal dengan *automated loading and discharging system*, alih-alih penggerak utama dioperasikan oleh masing-masing pengemudi, saat ini kegiatan perawatan dan analisis telah menggunakan kendaraan berpemandu otomatis (AGV) di pelabuhan. PSA juga mengadaptasi penggunaan *drone* dan robot untuk tugas-tugas mulai dari inspeksi dan perbaikan hingga distribusi komoditas.

Dalam menerapkan sistem *green port*, terminal di Singapura berfokus pada pengelolaan kapal yang akan sandar. Kapal harus beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sebelum melintasi batas pelabuhan, menurut *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA). Adanya insentif untuk biaya Pelabuhan bagi kapal-kapal dengan emisi karbon rendah sebesar 10% adalah bagian dari serangkaian tindakan untuk mendorong penggunaan bahan bakar *bunker* rendah karbon atau nol karbon. Perubahan lain adanya program oleh *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA) yaitu pengurangan biaya pelabuhan 30% untuk menggunakan bahan bakar nol-karbon di pelabuhan sementara semua kapal yang menggunakan bahan bakar rendah karbon bisa mendapatkan pengurangan biaya sebesar 25%. Selain pada manajemen kapal, pengelolaan operasional Pelabuhan dilakukan dengan menerapkan *smart grid system* untuk meminimalisir penggunaan energi listrik di Pelabuhan.

labor. The terminal has implemented an automated loading and discharging system, where automated guided vehicles (AGVs) now handle maintenance and analysis activities instead of manual drivers. PSA has also embraced the use of drones and robots for tasks ranging from inspection and repairs to commodity distribution.

In implementing the Green Port system, Singapore's terminals focus on managing incoming vessels. According to the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), vessels must switch to more environmentally friendly fuels before crossing the port boundary. Incentives for low-carbon emission ships include a 10% port fee reduction as part of a series of measures to promote the use of low-carbon or zero-carbon bunker fuels. Additionally, MPA offers a 30% port fee reduction for ships using zero-carbon fuels, while all ships using low-carbon fuels can receive a 25% reduction. Operational management at the ports is optimized by implementing a smart grid system to minimize electricity usage. This system helps ensure energy efficiency and sustainability in port operations.

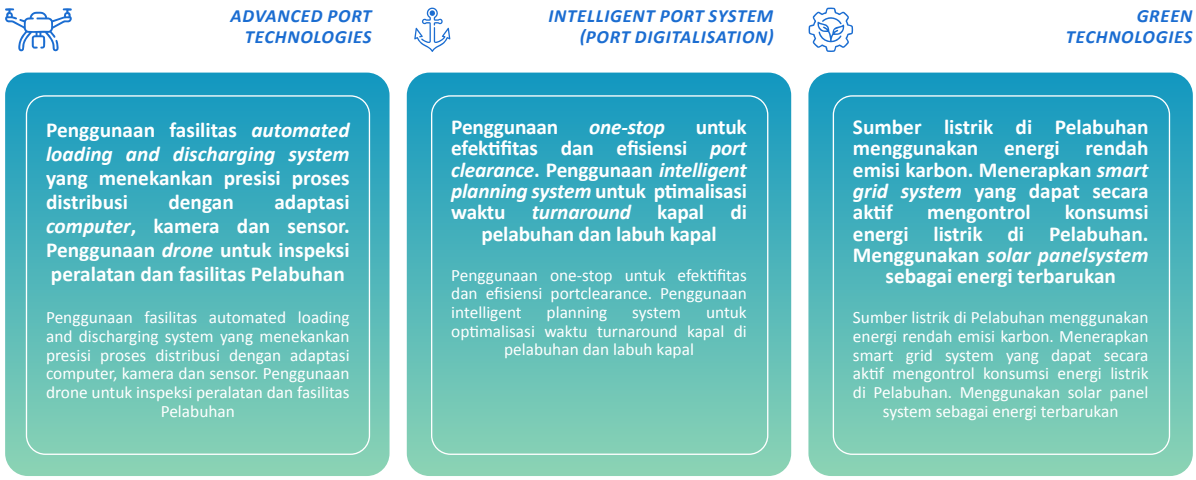


Figure Smart Port and Green Port System

Faktorisasi tersebut menjadi fokusan penting bagi Perseroan yang merupakan industri jasa terminal penyimpanan minyak dan gas, *fresh water supply*, dan *waste management* untuk dapat beradaptasi terhadap regulasi secara global dalam pengelolaan terminal yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja operasional terminal, serta meningkatkan kapabilitas bisnis Perseroan.

Figure Smart Port and Green Port System

These factors become a critical focus for the Company, which operates in the oil and gas storage, fresh water supply, and waste management industries. The Company must adapt to global regulations on environmentally friendly and technology-based terminal management to enhance the operational effectiveness and efficiency of its terminal operations and to improve the company's business capabilities.

Tinjauan Per Segmen Usaha

Terminal

Terhitung mulai bulan September 2021 Perseroan mulai melakukan usaha pengelolaan Terminal BBM dan LPG, khususnya pada *Fuel Terminal* Pulau Sambu, *Integrated Terminal* Tanjung Uban, LPG Terminal Tanjung Sekong, Fuel Terminal Kotabaru, *Fuel terminal* Baubau. Adapun pengelolaan terminal tersebut meliputi kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan LPG. Secara garis besar, aktivitas di terminal antara lain:

Business Segment Overview

Terminals

As of September 2021, the Company began managing Fuel and LPG terminals, specifically at Fuel Terminal Pulau Sambu, Integrated Terminal Tanjung Uban, LPG Terminal Tanjung Sekong, Fuel Terminal Kotabaru, and Fuel Terminal Baubau. The management of these terminals includes activities related to the reception, storage, and distribution of Fuel and LPG. In general, the activities at the terminals include:



Unloading and Backloading

Storage and Blending

Skid Tank Distribution

Enclosed Ground Flare

Cooldown, Gassing Up and HAP Distribution by Vessel

Sarana dan Prasarana Terminal

Terminal Infrastructure and Facilities



Fresh Water

Perseroan awalnya adalah Anak Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental yang bergerak dibidang pengelolaan dan pengadaan air bersih yang maju, unggul dan terpercaya serta berwawasan lingkungan. Berdiri pada 21 Januari 1988 dengan fokus bisnis antara lain:

1. *Supply fresh water* ke Industri wilayah Cilegon dan Batam sejak tahun 1988
2. *Supply fresh water* ke kapal milik dan charter PT Pertamina Group serta kapal pihak ketiga lainnya dilaksanakan sejak tahun 2016, dengan sebaran lokasi operasional di 34 wilayah di seluruh Indonesia.

Kemudian, Perseroan mulai melakukan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Patraqua dan Pengelolaan *Water Treatment Plant* (WTP) dilakukan sejak tahun 2016. Dengan Pengalaman operasional kurang lebih 37 tahun, Perseroan telah mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan pemegang saham dalam membangun usahanya.

Fresh Water

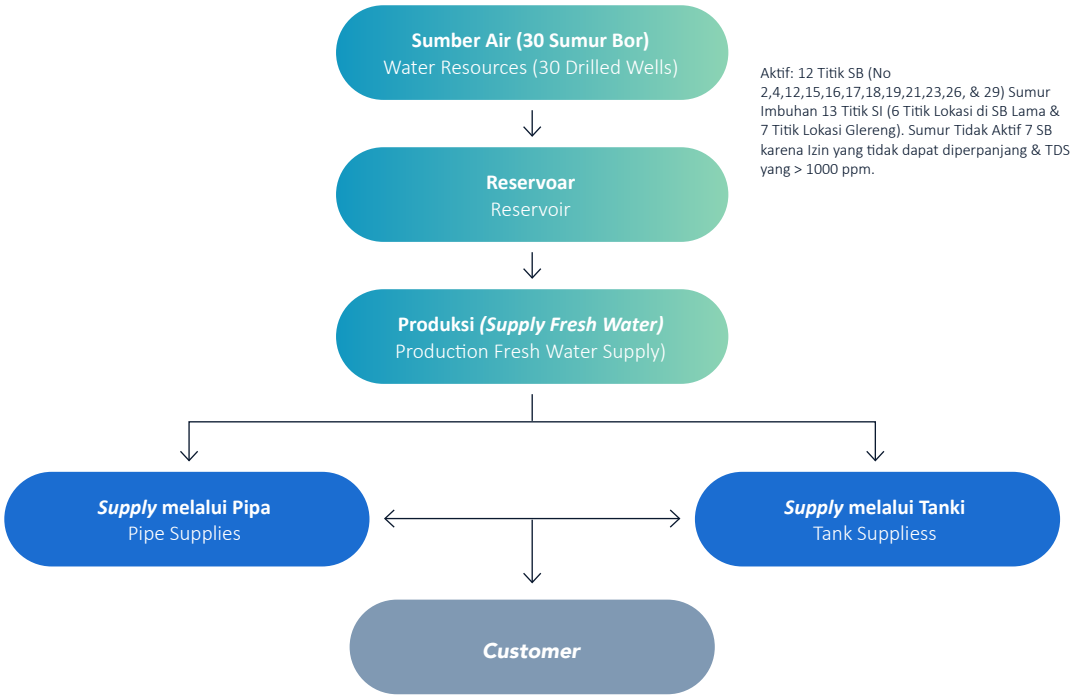
The Company initially began as a subsidiary of PT Pertamina Trans Kontinental, specializing in the management and supply of clean water. The company is recognized for its advanced, superior, and reliable services with an environmental focus. Established on January 21, 1988, its business focuses include:

1. Supplying fresh water to industries in the Cilegon and Batam areas since 1988.
2. Supplying fresh water to vessels owned and chartered by the Pertamina Group and other third-party vessels since 2016, with operational locations spread across 34 regions throughout Indonesia.

Subsequently, the Company began the production of Patraqua Bottled Drinking Water (AMDK) and the management of a Water Treatment Plant (WTP) in 2016. With approximately 37 years of operational experience, the Company has successfully contributed to both the government and its shareholders in developing and expanding its business.

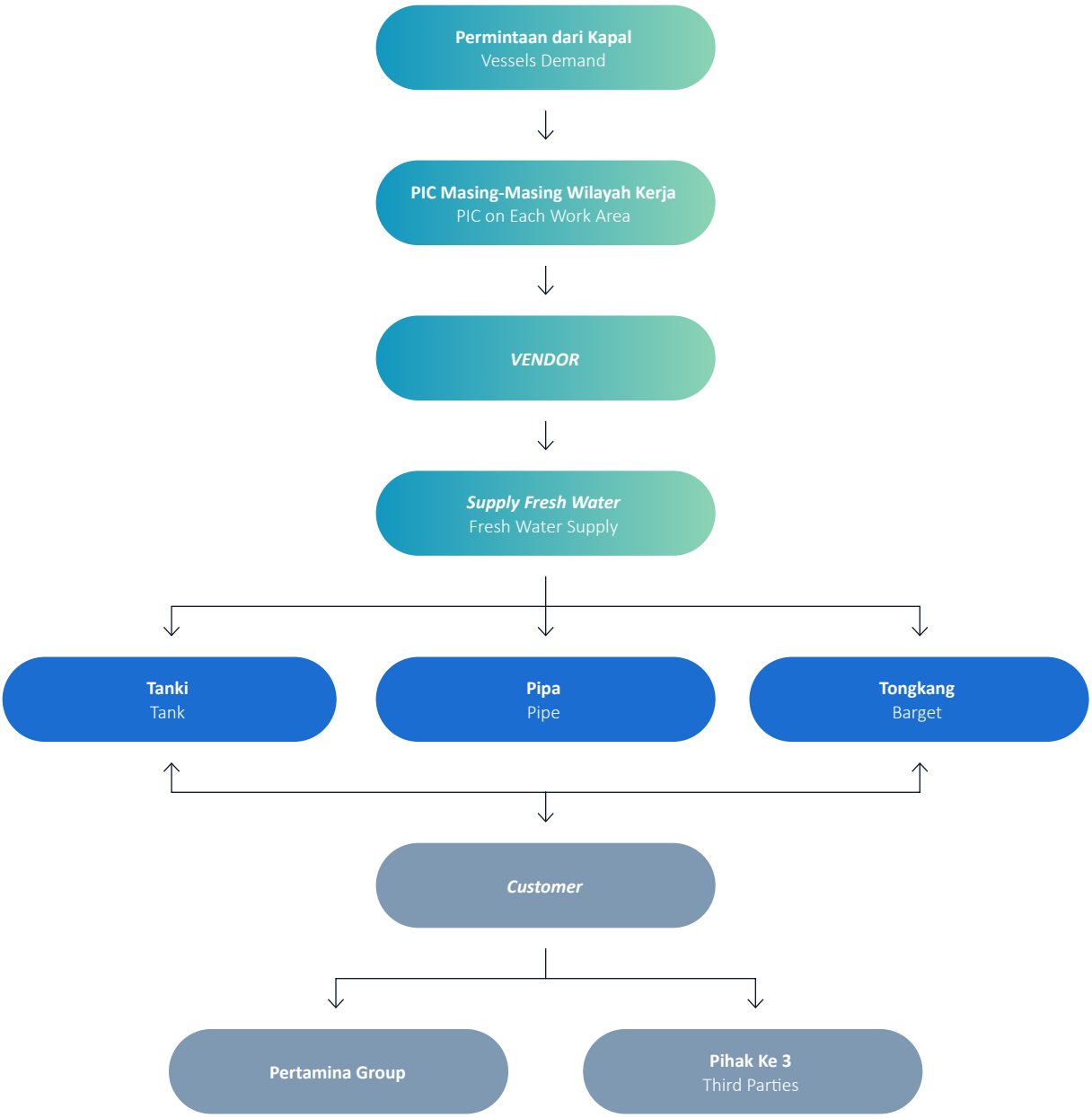
Proses Bisnis *Supply Fresh Water* Industri

Supply Fresh Water Industry Business Process



Proses Bisnis *Supply Fresh Water* Industri

Supply Fresh Water Industry Business Process



Flow Chart Supply Fresh Water Industri

Pendapatan per Segmen

Pendapatan jasa penyimpanan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp952,80 miliar mengalami peningkatan 7,63% atau naik Rp67,55 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp885,26 miliar. Pendapatan penyediaan air bersih Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp67,28 miliar mengalami penurunan 1,47% atau Rp1,0 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,28 miliar. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat pendapatan atas pemulihan lahan di Integrated Terminal Tanjung Uban senilai Rp9,40 miliar.

Segment Revenue

Storage service revenue as of December 31, 2024 was recorded at Rp952.80 billion, marking an increase of 7.63% or Rp67.55 billion compared to the previous year's figure of Rp885.26 billion. The Company's fresh water supply revenue as of December 31, 2024 was recorded at Rp67.28 billion, showing a decrease of 1.47% or Rp10 billion compared to Rp68.28 billion in the previous year. In addition, in 2024, the Company recorded income from land restoration at the Tanjung Uban Integrated Terminal amounting to Rp9.40 billion.

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands of Rupiah

Ikhtisar Operasional Operational Overview	2024	2023
Jasa penyimpanan Storage Services	952.801.250	885.255.683
Penyediaan air bersih Fresh Water Supply	67.278.003	68.280.580
Pemulihan lahan Land Recovery	9.396.000	-
Jumlah Total	1.029.475.252	953.536.263

Kapasitas Produksi
Capacity of Production

Water Operation	2024	2023
Unit Deep Well	14	19

Hingga sampai 31 Desember Tahun 2024 terjadi penurunan 5 unit dibandingkan tahun 2023.

As of December 31, 2024 there was a decline of 5 units compared to 2023.

Disajikan dalam m^3
Presented in m^3

Water Operation	2024	2023
Produksi *Deep Well* Ciwandan & Industri Batam Deep Well Production Ciwandan & Batam Industry	2.426.946	2.893.787
Pengisian Air Ke Kapal Water Supply to Vessel	391.270	427.066
Penjualan AMDK Bottled Drinking Water Sales	1.121	1.040
Volume Produksi Production Volume	2.819.316	3.321.894

Volume Produksi Tahun 2024 adalah sebesar 2.819.316 M^3 tercapai 73% dari RKAP 2024 yaitu sebesar 3.892.569 M^3 .

Adapun penyebab tidak tercapainya RKAP 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan suplai air ke kapal
   Total pengisian air ke kapal adalah jumlah (*volume* atau *tonase*) yang dihasilkan untuk *supply* air ke kapal-kapal di seluruh wilayah kerja Perseroan. Sampai dengan bulan Desember 2024 total pengisian air ke kapal sebesar 391.250 M^3. Angka tersebut menurun sebesar 8% dari tahun 2023. Penurunan penyaluran ke kapal disebabkan oleh menurunnya permintaan suplai air untuk kapal di wilayah Dumai, Cilacap & Balikpapan khususnya kapal-kapal dari Waruna *Group*.
2. Penurunan debit dari Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) di Ciwandan
   Total produksi *deep well* adalah jumlah (*volume* atau *tonase*) yang dihasilkan dari pemompaan air dari sumur bor untuk disalurkan ke *customer* industri di Ciwandan. Sampai dengan bulan Desember 2024 total penyaluran dari produksi *deep well* sebesar 1.204.311 M^3. Angka tersebut menurun sebesar 36% dari tahun 2023. Penurunan penyaluran ke industri disebabkan oleh menurunnya debit air yang diijinkan untuk disalurkan sesuai SIPA terbaru yang diterbitkan Kementerian ESDM. Penurunan yang signifikan dari Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Ciwandan inilah yang menyebabkan pencapaian *thruput* di tahun 2024 tidak tercapai.

Production Volume in 2024 was recorded at 2,819,316 M^3, achieving 73% of the 2024 RKAP target of 3,892,569 M^3.

The shortfall in achieving the 2024 RKAP target was due to the following factors:

1. Decline in water supply to vessels
   The total water delivered to vessels refers to the volume or tonnage produced for supplying water to ships across all the Company operational areas. As of December 2024, the total water supply to vessels amounted to 391,250 M^3, reflecting an 8% decrease from 2023. This decline was primarily due to reduced demand for ship water supply in the Dumai, Cilacap, and Balikpapan areas, particularly from vessels operated by the Waruna Group.

2. Decrease in groundwater withdrawal quota from Groundwater Utilization Permit (SIPA) in Ciwandan
   The total deep well production refers to the volume or tonnage produced from groundwater pumping for distribution to industrial customers in Ciwandan. As of December 2024, the total volume distributed from deep well production was 1,204,311 M^3, representing a 36% decline compared to 2023. This reduction was due to the decreased allowable groundwater withdrawal quota as per the latest SIPA issued by the ESDM. The significant reduction in the Ciwandan SIPA quota was the primary reason for the unachieved throughput in 2024.

Kinerja Keuangan Komprehensif

Pembahasan kinerja keuangan komprehensif disampaikan dengan mengacu pada Laporan Keuangan PT Pertamina Energy Terminal yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Hasil audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 menghasilkan Opini sesuai Laporan Keuangan *Audited*: menyajikan secara wajar, dalam hal semua material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Comprehensive Financial Performance

The discussion of comprehensive financial performance refers to the Financial Statements of PT Pertamina Energy Terminal as of December 31, 2024 and 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PricewaterhouseCoopers).

The audit of the Company's 2024 Financial Statements resulted in an unqualified opinion as stated in the Audited Financial Report: the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Jumlah Aset Total Assets	8.495.906.125	8.036.349.449	459.556.676	5,72%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.556.262.348	1.177.205.886	379.056.462	32,20%
Ekuitas Equity	6.939.643.777	6.859.143.563	80.500.214	1,17%

Perseroan mencatat nilai aset pada akhir tahun 2024 meningkat sebesar 5,72% dibandingkan dengan nilai aset Perseroan tahun 2023. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kenaikan pada aset tidak lancar PT Pertamina Energy Terminal yaitu pada akun aset tetap. Di sisi lain, nilai liabilitas Perseroan juga mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni sebesar 32,20% dibandingkan tahun 2023 dikarenakan peningkatan utang usaha dan bunga atas pinjaman pemegang saham. Perseroan mencatatkan peningkatan ekuitas sebesar 1,17% di tahun 2024, yang berasal dari kenaikan saldo laba.

The Company recorded a 5.72% increase in assets value at the end of 2024 compared to the assets value in 2023. This increase was primarily due to a rise in non-current assets, particularly in the fixed assets account of PT Pertamina Energy Terminal. On the other hand, PET's liabilities also increased by 32.20% in 2024 compared to 2023, due to the increase in trade payables and interest on shareholder loans. Meanwhile, the Company recorded a 1.17% increase in equity in 2024, which was derived from the increase in retained earnings.

Aset

Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Asset Lancar Current Assets	586.932.115	971.620.233	(384.688.118)	(39,59%)
Asset Tidak Lancar Non-current Assets	7.908.974.010	7.064.729.216	844.244.794	11,95%
Total Asset	8.495.906.125	8.036.349.449	459.556.676	5,72%

Pada tanggal 31 Desember 2024, total aset Perseroan Rp8,50 triliun atau meningkat 5,72%. Total aset terdiri dari aset lancar Rp586,93 miliar dan aset tidak lancar Rp7,91 triliun. Peningkatan jumlah aset sebesar Rp459,56 miliar atau 5,72% didominasi oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp844,24 miliar.

As of December 31, 2024, the Company's total assets amounted to Rp8.50 trillion, representing an increase of 5.72%. The total assets consisted of current assets of Rp586.93 billion and non-current assets of Rp7.91 trillion. The increase in total assets by Rp459.56 billion or 5.72% was mainly driven by an increase in non-current assets amounting to Rp844.24 billion.

Aset Lancar

Current Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	417.738.410	664.535.031	(246.796.621)	(37,14%)
Piutang Usaha **Trade Receivables**				
Pihak Berelasi Related Parties	2.448.749	3.191.934	(743.185)	(23,28%)
Pihak Ketiga Third Parties	24.590.223	70.986.611	(46.396.388)	(65,36%)
Aset Kontrak **Contract Assets**				
Pihak Berelasi Related Parties	4.657.843	3.663.605	994.238	27,14%
Pihak Ketiga Third Parties	137.025.178	228.949.130	(91.923.952)	(40,15%)
Persediaan Inventories	11.207	20.457	(9.250)	(45,22%)
Uang Muka dan Biaya dibayar Dimuka Advances and Prepayments	460.505	273.465	187.040	68,40%
Aset Lancar **Total Current Assets**	**586.932.115**	**971.620.233**	**(384.688.118)**	**(39,59%)**

Aset lancar Perseroan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 39,59% menjadi Rp586,93 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp971,62 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh:

1. Penurunan kas dan setara kas senilai Rp246,80 miliar atau 37,14%.
2. Penurunan piutang usaha senilai Rp47,14 miliar atau 63,55%.
3. Penurunan aset kontrak senilai Rp90,93 miliar atau 39,09%.

The Company's current assets in 2024 decreased by 39.59% to Rp586.93 billion, compared to Rp971.62 billion in 2023. This decrease was primarily attributable to:

1. A decrease in cash and cash equivalents amounting to Rp246.80 billion or 37.14%.
2. A decrease in trade receivables amounting to Rp47.14 billion or 63.55%.
3. A decrease in contract assets amounting to Rp90.93 billion or 39.09%.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Aset Tetap Fixed Assets	7.583.720.797	6.828.196.678	755.524.119	11,06%
Aset Hak Guna Right-of use assets	42.753.403	65.324.048	(22.570.645)	(34,55%)
Penyertaan Saham Investments in Shares	1.391.555	1.313.570	77.985	5,94%
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes				
Pajak lain-lain Other Taxes	237.293.063	96.665.234	140.627.829	145,48%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	40.105.282	47.293.181	(7.187.899)	(15,20%)

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Taksiran Pengembalian Pajak-Pajak Penghasilan Estimated Claim for Tax Refund Corporate Income tax				
Pajak Penghasilan Corporate Income Taxes	3.709.910	25.936.505	(22.226.595)	(85,70%)
Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	7.908.974.010	7.064.729.216	844.244.794	11,95%

Aset tidak lancar perusahaan meningkat 11,95% atau sebesar Rp844,25 miliar dari Rp7,07 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp7,91 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan aset tetap. Peningkatan ini didukung oleh:

1. Penambahan aset tetap senilai Rp755,52 miliar atau 11,06% atas pembangunan terminal LPG refrigerated Jawa Timur.
2. Penambahan pajak dibayar dimuka senilai Rp140,63 miliar atau 145,48%.

The Company's non-current assets increased by 11.95% or Rp844.25 billion, from Rp7.07 trillion in 2023 to Rp7.91 trillion in 2024. The increase was primarily driven by an increase in fixed assets. The increase was supported by:

1. An increase in fixed assets amounting to Rp755.52 billion or 11.06%, attributable to the development of the East Java refrigerated LPG terminal.
2. An increase in prepaid taxes amounting to Rp140.63 billion or 145.48%.

Liabilitas

Liabilities

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.489.050.205	555.798.172	933.252.033	167,91%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	67.212.143	621.407.714	(554.195.571)	(89,18%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.556.262.348	1.177.205.886	379.056.462	32,20%

Nilai liabilitas Perseroan mengalami peningkatan 32,20% atau sebesar Rp379,06 miliar. Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan 167,91% atau sebesar Rp933,25 miliar. Sedangkan liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 89,18% atau sebesar Rp554,20 miliar.

The Company's liabilities increased by 32.20%, or Rp379.06 billion in 2024. This increase was primarily driven by a significant rise in non-current liabilities, which grew by 167.91%, or Rp933.25 billion. On the other hand, the Company's current liabilities experienced a substantial decline of 89.18%, amounting to Rp554.20 billion.

Liabilitas Jangka Pendek

Non-Current Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Utang Usaha **Trade Payables**				
Pihak Berelasi Related Parties	61.248.187	16.596.447	44.651.740	269,04%
Pihak Ketiga Third Parties	320.445.089	117.339.255	203.105.834	173,09%
Biaya Masih Harus dibayar Accrued Expenses	391.398.676	338.423.981	52.974.695	15,65%
Utang Pajak **Tax Payable**				

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Pajak Lain-Lain Other Taxes	7.541.412	8.808.620	(1.267.208)	(14,39%)
Pinjaman Pemegang Saham Shareholder Loans	612.971.068	-	612.971.068	0,00%
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Sewa Current Portion of Lease Liabilities	94.348.929	73.206.947	21.141.982	28,88%
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Current Portion of Post Employment	1.096.844	1.422.922	(326.078)	(22,92%)
Liabilitas Jangka Pendek Total current liabilities	1.489.050.205	555.798.172	933.252.033	167,91%

Nilai liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 167,91% atau Rp933,25 miliar dari Rp555,80 miliar tahun 2023 menjadi Rp1,49 triliun tahun 2024. Peningkatan ini antara lain disebabkan:

1. Pinjaman pemegang saham yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
2. Kenaikan utang usaha senilai Rp247,76 miliar atau 184,98%.
3. Kenaikan biaya masih harus dibayar senilai Rp52,98 miliar atau 15,65%.
4. Kenaikan bagian jangka pendek dari liabilitas sewa senilai Rp21,14 miliar atau 28,88%.

The current assets experienced an increase by 167.91% or Rp933.25 billion from Rp555.80 billion in 2023 to Rp1.49 trillion in 2024. The increase was primarily driven by:

1. Shareholder loans maturing within less than one year.
2. An increase in trade payables amounting to Rp247.76 billion or 184.98%.
3. An increase in accrued expenses amounting to Rp52.98 billion or 15.65%.
4. An increase in the current portion of lease liabilities amounting to Rp21.14 billion or 28.88%.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	38.322.144	54.994.989	(16.672.845)	(30,32%)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post Employment Liabilities	28.889.999	23.277.449	5.612.550	24,11%
Pinjaman Pemegang Saham Shareholders loan	-	543.135.276	(543.135.276)	(100,00%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	67.212.143	621.407.714	(554.195.571)	(89,18%)

Nilai liabilitas jangka panjang mengalami penurunan 89,18% atau Rp554,20 miliar dari Rp621,41 miliar tahun 2023 menjadi Rp67,21 miliar tahun 2024. Penurunan ini antara lain disebabkan:

1. Pinjaman pemegang yang pada tahun 2023 diakui sebagai liabilitias jangka panjang, di tahun 2024 diakui sebagai liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
2. Penurunan liabilitas sewa senilai Rp16,67 miliar atau 30,32%.

The value of non-current assets decreased by 89.18% or Rp 554.20 billion from Rp621.41 billion in 2023 to Rp67.21 billion in 2024. The decrease was primarily attributable to:

1. Shareholder loans, which were classified as non-current liabilities in 2023, being reclassified as current liabilities in 2024 due to their maturity within one year.
2. A decrease in lease liabilities amounting to Rp16.67 billion or 30.32%.

Ekuitas

Equity

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Modal saham - nilai nominal per saham Rp1.000, modal dasar 38.214.276 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 9.957.086 lembar saham Share Capital – par value of Rp1,000 per share; authorized capital of 38,214,276 shares; issued and fully paid in capital of 9,957,086 shares	9.957.086.000	9.957.086.000	0	0,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid in Capital	(3.241.595.356)	(3.241.595.356)	0	0,00%
Rugi Komprehensif Lain Other Comprehensive Loss	(2.325.467)	(2.884.576)	559.109	(19,38%)
Saldo Laba Retained Earnings				
Dicadangkan Appropriated	78.321.821	10.220.812	68.101.009	666,30%
Belum Dicadangkan Unappropriated	148.156.779	136.316.683	11.840.096	8,69%
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.939.643.777	6.859.143.563	80.500.214	1,17%

Hingga 31 Desember 2024, nilai Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,17% atau setara Rp80,50 milliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

As of December 31, 2024, The Value of Equity of the Company increased by 1.17% or Rp80.50 billion compared to the previous year.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Consolidated Comprehensive Profit or Loss Statement

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Pendapatan Revenue	1.029.475.252	953.536.263	75.938.989	7,96%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(915.132.190)	(859.791.613)	(55.340.577)	6,44%
Laba Bruto **Gross Profit**	**114.343.062**	**93.744.650**	**20.598.412**	**21,97%**
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(124.198.762)	(76.759.071)	(47.439.691)	61,80%
Pendapatan Keuangan Finance Income	20.877.227	5.738.039	15.139.188	263,84%
Beban Keuangan Finance Costs	(4.343.035)	(6.970.466)	2.627.431	(37,69%)
Lain-Lain, (Bersih) Others, (net)	124.482.065	75.458.611	49.023.454	64,97%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan **Profit before Income tax**	**131.160.557**	**91.211.763**	**39.948.794**	**43,80%**

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(51.219.452)	(23.110.754)	(28.108.698)	121,63%
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**79.941.105**	**68.101.009**	**11.840.096**	**17,39%**
Penghasilan Komprehensif Lain **Other Comprehensive Income**				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Laba Rugi **Items that will not be reclassified to Profit or Loss**				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Remeasurement of Post-Employment Benefit Liabilities	638.822	(1.347.953)	1.986.775	(147,39%)
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	(140.541)	296.549	(437.090)	(147,39%)
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi **Items that will be reclassified to Profit or Loss**				
Perubahan Nilai Wajar Instrumen Ekuitas Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	77.985	119.357	(41.372)	(34,66%)
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	(17.157)	(26.259)	9.102	(34,66%)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Comprehensive Income for the Year**	**80.500.214**	**67.142.703**	**13.357.511**	**19,89%**

Pendapatan

Pada tahun 2024, pendapatan sebesar Rp1,03 triliun atau naik 7,96% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp953,54 miliar. Hal ini disebabkan disebabkan oleh peningkatan penjualan pada segmen bisnis jasa penyimpanan senilai Rp67,55 miliar dan pemulihan lahan senilai Rp9,40 miliar.

Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2024, beban pokok pendapatan sebesar Rp915,13 miliar di mana terjadi kenaikan biaya operasi sebesar Rp55,34 miliar atau naik 6,44% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp859,79 miliar. Kenaikan terutama disebabkan oleh gaji dan tunjangan dan penurunan nilai aset tetap.

Laba Bruto

Pada akhir tahun 2024, Perseroan mencatat laba bruto sebesar Rp114,34 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp20,60 miliar atau 21,97% dibandingkan tahun 2023 laba bruto sebesar Rp93,75 miliar.

Laba sebelum pajak penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan 43,80% atau sebesar Rp39,95 miliar dari Rp91,21 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp131,16 miliar pada tahun 2024. Kenaikan laba sebelum pajak disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain atas pencairan bank garansi.

Revenue

In 2024, revenue reached Rp1.03 trillion, representing an increase of 7.96% compared to Rp953.54 billion in 2023. This growth was mainly driven by an increase in sales from the storage services business segment in value of Rp67.55 billlion and land recovery in amount of Rp9.40 billion.

Cost of Revenue

In 2024, the cost of revenue amounted to Rp915.13 billion, reflecting a rise of Rp55.34 billion or 6.44% compared to Rp859.79 billion in 2023. The increase was primarily due to higher salaries and benefits, as well as impairment of fixed assets.

Gross Profit

By the end of 2024, the Company recorded a gross profit of Rp114.34 billion, an increase of Rp20.60 billion or 21.97% compared to the 2023 gross profit of Rp93.75 billion.

Profit Before Income Tax

Profit before income tax increased by 43.80% or Rp39.95 billion, rising from Rp91.21 billion in 2023 to Rp131.16 billion in 2024. The increase in profit before income tax was driven by other income from the realization of a bank guarantee.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan mengalami peningkatan sebesar 17,39% atau sebesar Rp11,84 miliar dari Rp68,10 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp79,94 miliar pada tahun 2024. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan terminal serta adanya pendapatan lain-lain.

Profit for the Year

Profit for the year increased by 17.39% or Rp11.84 billion, from Rp68.10 billion in 2023 to Rp79.94 billion in 2024. The achievement was supported by an increase in terminal revenue as well as other income.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Change in 2023-2024	
			Jumlah Total	%
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash Flows from (used in) Operating Activities	558.353.489	106.717.645	451.635.844	423,21%
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Cash Flows from (used in) Investing Activities	(801.855.128)	(515.906.551)	(285.948.577)	55,43%
Arus Kas Bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (used in) Financing Activities	(3.294.982)	541.588.115	(544.883.097)	(100,61%)
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) Cash and Cash Equivalents	(246.796.621)	132.399.209	(379.195.830)	(286,40%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning of the Year	664.535.031	532.135.822	132.399.209	24,88%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of The Year	417.738.410	664.535.031	(246.796.621)	(37,14%)

Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2024, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp558,35 miliar meningkat 423,21% atau sebesar Rp451,64 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp106,72 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan.

Cash Flows from Operating Activities

In 2024, net cash flows from operating activities amounted to Rp558.35 billion, marking a significant increase of 423.21% or Rp451.64 billion compared to Rp106.72 billion in the previous year. This increase was primarily due to higher cash receipts from customers.

Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2024, jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat 55,43% atau sebesar Rp285,95 miliar dari minus Rp515,91 miliar pada tahun 2023 menjadi minus Rp801,86 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan terminal *LPG refrigerated* Jawa Timur.

Cash Flows from Investing Activities

In 2024, net cash flows used in investing activities increased by 55.43% or Rp285.95 billion, from negative Rp515.91 billion in 2023 to negative Rp801.86 billion in 2024. The uplift was mainly attributed to development of refrigerated LPG Terminal in East Java.

Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2024, jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun 100,61% atau sebesar Rp544,88 miliar dari Rp541,59 miliar pada tahun 2023 menjadi minus Rp3,29 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya penerimaan dari pinjaman pemegang saham pada tahun 2024.

Cash Flows from Financing Activities

In 2024, net cash flows used in financing activities decreased by 101.61% or Rp544.88 billion, from Rp541.59 billion in 2023 to negative Rp3.29 billion in 2024. The decrease was due to the absence of shareholder loans in 2024.

Kemampuan Membayar Utang

Perseroan senantiasa menjaga likuiditas Perseroan sebagai bentuk tanggung jawab kepada kreditur. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan menjaga saldo kecukupan kas, memonitor jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perseroan juga selalu mempertahankan kredibilitas Perseroan.

Ability to Pay Debt

The Company consistently maintains the Company's liquidity as a form of responsibility to creditors. Liquidity risk management is carried out by maintaining adequate cash balances, monitoring loan maturities and funding sources, and being prepared to maintain market positioning. The Company also consistently upholds the Company's credibility.

Secara kuantitatif, kemampuan membayar utang jangka pendek direfleksikan dalam rasio likuiditas. Perseroan menggunakan rasio kas dan rasio lancar sebagai komponen rasio likuiditas. Pada 31 Desember 2024, Perseroan mencatat rasio kas (*cash ratio*) sebesar 28,05% dan rasio lancar (*current ratio*) tercatat sebesar 39,42%.

Quantitatively, the ability to pay short-term debt is reflected in liquidity ratios. The Company uses the cash ratio and current ratio as components of liquidity measurement. As of December 31, 2024, The Company recorded a cash ratio of 28.05% and a current ratio of 39.42%.

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Rasio Ratio	2024	2023
Rasio Kas Cash Ratio	28,05%	119,56%
Rasio Lancar Current Ratio	39,42%	174,82%

Rasio Solvabilitas

Solvency Ratio

Rasio Ratio	2024	2023
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset Debt to Total Assets Ratio	18,32%	14,65%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	22,43%	17,16%

Perseroan menggunakan rasio liabilitas terhadap total aset dan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebagai komponen dari rasio solvabilitas. Pada 31 Desember 2024, rasio liabilitas terhadap total aset sebesar 18,32%, sementara rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 22,43%.

The Company uses the debt to total assets ratio and the debt to equity ratio as components of its solvency ratio. As of December 31, 2024, the debt to total assets ratio recorded at 18.32%, while the debt to equity ratio was recorded at 22.43%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perseroan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang terdiri dari *average collection* periode (rata-rata periode penagihan). Rata-rata periode penagihan piutang Perseroan pada tahun 2024 adalah sebanyak 9,59 hari.

Accounts Receivable Collection Rate

The accounts receivable collection rate is used to measure the period of time it takes for the Company to collect receivables into cash after the completion of work/services. The accounts receivable collection rate consists of the average collection period. The average collection period for The Company in 2024 was 9.59 days.

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/ utang yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Komposisi struktur permodalan Perseroan tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Capital structure is the balance between the use of equity and debt, which includes current and non-current debt. The capital structure is a combination of equity and debt. The composition of the Company's capital structure for 2023-2024 is as follows:

Komposisi Struktur Modal

Capital Strucutre Composition

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Uraian Description	2024	Komposisi % Composition %	2023	Komposisi % Composition %
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.556.262.348	18%	1.177.205.886	15%
Jumlah Ekuitas Total Equities	6.939.643.777	82%	6.859.143.563	85%
Jumlah Total	8.495.906.125	100%	8.036.349.449	100%

Dari komposisi struktur modal Perseroan, baik di tahun 2023 dan 2024, terlihat modal Perseroan didominasi oleh ekuitas dibandingkan dengan liabilitas. Aset yang dibiayai oleh liabilitas tahun 2024 sebesar 18%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 15%. Adapun aset yang dibiayai oleh ekuitas pada tahun 2024 sebesar 82% menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 85%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan melakukan pengelolaan struktur permodalan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Perseroan dapat menyesuaikan dengan cara mengusahakan pendanaan melalui pinjaman untuk memelihara struktur permodalan. Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Manajemen melakukan pengawasan struktur modal menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (*rasio solvabilitas - debt to equity ratio*), yang merupakan nilai utang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2024, rasio utang terhadap ekuitas tercatat sebesar 22,43%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 17,16%.

Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dan Realisasinya

Based on the Company's capital structure composition in both 2023 and 2024, it can be seen that the Company's capital was dominated by equity compared to liabilities. In 2024, assets financed by liabilities accounted for 18%, which increased compared to 15% in 2023. Meanwhile, assets financed by equity in 2024 stood at 82%, down from 85% recorded in 2023.

Management Policy on Capital Structure

The Company manages its capital structure and makes adjustments when necessary in response to changing economic conditions. The Company may seek financing through loans to maintain its capital structure. The primary objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a sound capital ratio in order to support its operations and maximize shareholder returns. Management monitors the capital structure using the debt to equity ratio (solvency ratio), which is calculated by dividing total debt by total equity. In 2024, the debt to equity ratio was recorded at 22.43%, an increase from 17.16% in the previous year.

Comparison Between Targets at the Beginning of the Fiscal Year and Actual Realization

Dinyatakan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

	Deskripsi Description	Desember 2024 December 2024	
		RKAP 2024 2024 RKAP	*Audited*
I	Pendapatan Operasi Operating Income		
	Bisnis *Supply Fresh Water* Fresh Water Supply Business	85.848.265.287	67.278.002.514
	Bisnis 5 Terminal: 5 Terminal Business:	1.148.084.949.503	952.801.249.724
I	• Tanjung Uban	400.911.283.000	421.339.358.101
	• Pulau Sambu	168.963.300.000	(32.952.272)
	• Kotabaru	76.314.935.137	70.879.444.763
	• Bau-bau	170.462.072.527	152.868.558.796
	• Tanjung Sekong	331.433.359.839	307.746.840.335
	• Pemulihan Lahan Kontaminasi Restoration of Contaminated Land	-	9.396.000.000
	Total Pendapatan Total Revenues	1.233.933.214.790	1.029.475.252.238

Dinyatakan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

	Deskripsi Description	Desember 2024 December 2024	
		RKAP 2024 2024 RKAP	*Audited*
II	*COST OF GOOD SOLD*		
	Bisnis *Supply Fresh Water* Fresh Water Supply Business	49.836.126.137	58.100.210.342
	Bisnis 5 Terminal: 5 Terminal Business:	410.425.811.581	479.436.483.505
	• Tanjung Uban	146.446.494.806	168.670.873.270
	• Pulau Sambu	85.725.765.884	122.313.016.533
	• Kotabaru	32.790.535.258	38.598.728.219
	• Bau-bau	51.162.154.821	49.358.296.579
	• Tanjung Sekong	94.300.860.813	100.495.568.904
	Depresiasi Impairment	386.820.794.706	368.895.496.973
	Total *Cost of Good Sold*	847.082.732.424	915.132.190.819
	Gross Profit/(Loss)	386.850.482.366	114.343.061.418
III	*General and Administration Expenses*	184.705.442.506	124.198.761.190
	Total Operating Expense	184.105.442.506	124.198.761.190
	Profit/(Loss) From Operating	202.145.039.869	(9.855.699.771)
	OTHER Income/(Expenses)	(109.889.817.510)	141.016.257.008
	Profit/(Loss) Before Tax	92.255.222.349	131.160.557.237
	Corporate Income Tax	20.296.149.545	44.189.250.798
	Deferred tax income	0	7.030.201.696
	Total income tax expenses	20.296.149.545	51.219.452.494
	Profit/(Loss) After Tax	71.959.072.805	79.941.104.743
	EBIT	202.145.039.869	(9.855.699.771)
	EBITDA	588.965.834.566	343.713.397.576
	Net Profit Margin	5,83%	7,77%
	Depresiasi Impairment	386.820.794.706	368.895.496.973

Proyeksi Tahun 2025

2025 Projection

Dinyatakan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

No	Target RKAP Tahun 2025 Keterangan Description	2025 RKAP Target TARGET RKAP TAHUN 2025 2024 RKAP Target
I	PENDAPATAN OPERASI OPERATING INCOME	1.298.900.374.207
	Bisnis *Supply Fresh Water* & Lainnya Fresh Water Supply Business & Others	83.886.192.937
	Bisnis 5 Terminal: 5 Terminal Business:	1.215.014.181.271
	Terminal Tanjung Uban Tanjung Uban Terminal	466.421.268.175
	Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Terminal	173.129.472.000
	Terminal Kotabaru Kotabaru Terminal	86.274.904.139

Dinyatakan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

No	Target RKAP Tahun 2025 Keterangan Description	2025 RKAP Target TARGET RKAP TAHUN 2025 2024 RKAP Target
	Terminal Bau-bau Bau-bau Terminal	176.021.424.762
	Terminal Tanjung Sekong Tanjung Sekong Terminal	313.167.112.195
II	BEBAN OPERASIONAL OPERATING EXPENSES	891.841.631.758
	Bisnis *Supply Fresh Water* & Lainnya Fresh Water Supply Business & Others	48.902.598.099
	Bisnis 5 Terminal: 5 Terminal Business:	439.637.939.437
	Terminal Tanjung Uban Tanjung Uban Terminal	156.257.435.404
	Terminal Pulau Sambu Pulau Sambu Terminal	77.901.158.143
	Terminal Kotabaru Kotabaru Terminal	38.771.323.711
	Terminal Bau-bau Bau-bau Terminal	66.851.542.840
	Terminal Tanjung Sekong Tanjung Sekong Terminal	99.856.479.340
	Depresiasi Impairment	403.301.094.222
III	LABA OPERASI OPERATING PROFIT	407.058.742.449
	Payroll & Employee Benefit	117.356.279.570
	Services	155.101.622.296
	Man Power Related	16.813.522.843
	Insurance	7.037.774.244
	Material Consumed	3.205.609.722
	Promotion & Corp Image	3.346.200.000
	Financial Expense	11.012.308.199
	Fuel & Products Consumed	507.360.000
	Maintenance	1.788.835.652
IV	BEBAN *OVERHEAD* OVERHEAD EXPENSES	316.169.512.525
V	LABA USAHA BUSINESS PROFIT	90.889.229.924
	Pendapatan (Beban) Lain Other Revenues (Expenses)	786.420.452
VI	LABA USAHA SEBELUM PAJAK BUSINESS PROFIT BEFORE INCOME TAX	91.675.650.376
VII	PAJAK INCOME TAX	18.120.966.251
VIII	LABA SETELAH PAJAK PROFIT AFTER INCOME TAX	73.554.684.125

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Attachments for Capital Expenditure Investments

Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal yang dilakukan pada tahun 2024. Pembahasan mengenai ikatan material atas investasi barang modal tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company did not engage in any material attachments for capital expenditure investments made in 2024. Discussion regarding material attachments for capital expenditure investments is not disclosed in this Annual Report.

Investasi Barang Modal

Investasi barang modal adalah aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset atau investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Capital Expenditure Investments

Capital expenditure investments are activities involving expenditure of funds used to purchase a quantity of assets or investments expected to provide future value benefits.

Deskripsi Description	Tujuan dari Ikatan Objective and Bond	Sumber Dana yang Diharapkan untuk Memenuhi Ikatan Expected Source of Funds to Fulfill the Bond	Mata Uang yang Menjadi Denominasi Denominated Currency	Langkah yang Direncanakan Perseroan untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing yang Terkait The Compnay's Planned Steps to Hedge Risk from Relevant Foreign Currency Positions
Pembangunan Terminal LPG Reff Jatim Development of LPG Terminal Reff East Java	Penyediaan layanan pendukung untuk distribusi kebutuhan LPG Provision of Support Services for LPG Distribution	Pinjaman pemegang saham, *intercompany fund, external funding*, dll Shareholder Loans, Intercompany Funds, External Financing, etc.	USD	*Currency hedging*, deposito, dll

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Soundness Level

Indikator Indicators	Nilai Value	Pencapaian Achievement
Nilai Kinerja Keuangan Financial Performance Value	31,82	Kurang Sehat
Nilai Kinerja Operasional Operational Performance Value	20,00	Sangat Baik
Nilai Kinerja Administrasi Administration Performance Value	9,50	Tertib
Tingkat Kesehatan Soundness Level	61,32	Kurang Sehat-BBB

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Pada tahun 2024, tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Material Information and Facts Occurring After the Accountant's Report Date

In 2024, there was no material information or facts that occurred after the date of the accountant's report.

Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi
Business Outlook, Industry Conditions, and Economic Conditions

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 sebesar 3,3% per tahun. Proyeksi IMF Januari 2025 menunjukkan bahwa ekonomi global masih dalam jalur pemulihan, meskipun

The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth in 2025 and 2026 to reach 3.3% per year. According to the IMF's January 2025 forecast, the global economy remains on a recovery path, despite running at a moderate and uncertain

dengan laju yang lebih moderat dan penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ini dipicu oleh resiliensi negara berkembang serta kondisi ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Asia. Namun, risiko global tetap tinggi, dan keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada stabilitas geopolitik, arah kebijakan moneter, serta ketahanan fiskal. IMF memperkirakan inflasi global akan mencapai 4,2% pada tahun 2025, menandakan tren penurunan inflasi yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

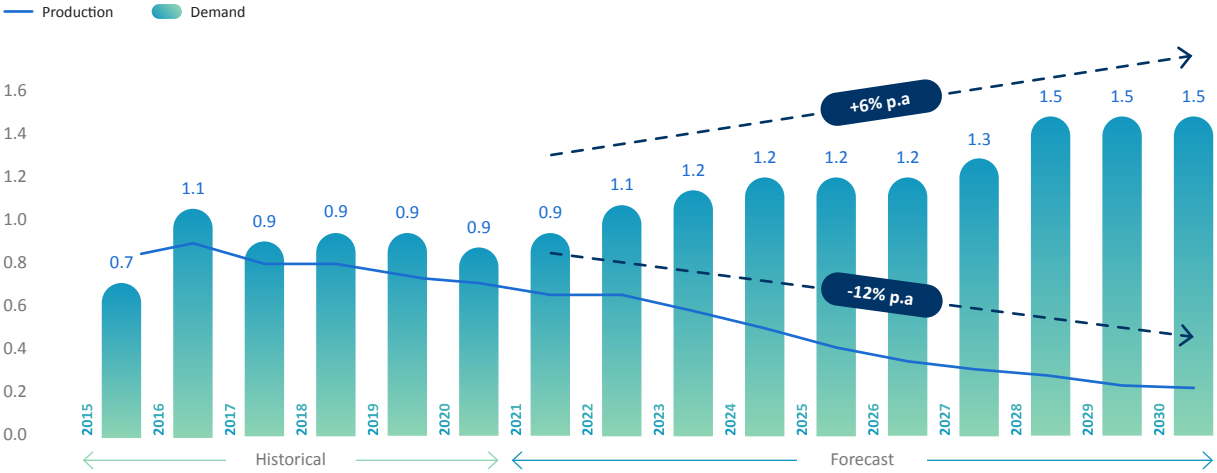
Di sisi lain, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,1%, angka ini mencerminkan optimisme terhadap kemampuan Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global. Potensi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh serangkaian reformasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, serta peningkatan adopsi teknologi digital yang semakin pesat di berbagai sektor. Indonesia juga diharapkan memperoleh manfaat dari investasi yang terus mengalir ke sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital. Dukungan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.

Secara keseluruhan pengangkutan kargo domestik sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan akan naik sebesar 4% per tahun sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi untuk impor minyak mentah yaitu sebesar 3,6% per tahun. Hal tersebut diakibatkan meningkatnya pertumbuhan *demand* minyak mentah sebesar 6% per tahun namun tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

pace. This growth is driven by the resilience of developing countries and favorable economic conditions in the United States and Asia. However, global risks remain elevated, and the success of the recovery heavily depends on geopolitical stability, the direction of monetary policy, and fiscal resilience. The IMF also forecasts global inflation to reach 4.2% in 2025, indicating a continued downward trend from the previous year.

On the other hand, the World Bank projects that Indonesia's economic growth will reach 5.1% in 2025. This figure reflects optimism regarding Indonesia's ability to sustain growth momentum despite global uncertainties. Indonesia's economic potential in 2025 remains promising, supported by a series of policy reforms implemented by the government, as well as the rapid adoption of digital technologies across various sectors. Indonesia is also expected to benefit from continued investment flows into strategic sectors such as infrastructure, renewable energy, manufacturing, and the digital economy. Pro-growth fiscal policies and efforts to enhance human capital through education and training will be crucial in strengthening Indonesia's competitiveness at regional and global levels.

Overall, domestic cargo transportation is projected to increase by 4% annually through 2027, in line with growing domestic demand. In Southeast Asia, Indonesia is expected to record the highest growth in crude oil imports at 3.6% annually. It is due to rising crude oil demand at an average of 6% per year, which is not matched by domestic production that continues to decline year after year.



Sumber: ESDM *Report* 2019, Wood Mackenzie, KPI, ICISTechnon Feb 2021, *Muted Scenario* Feb 2021
Gambar 10. Pertumbuhan Permintaan dan Produksi (juta bbl)

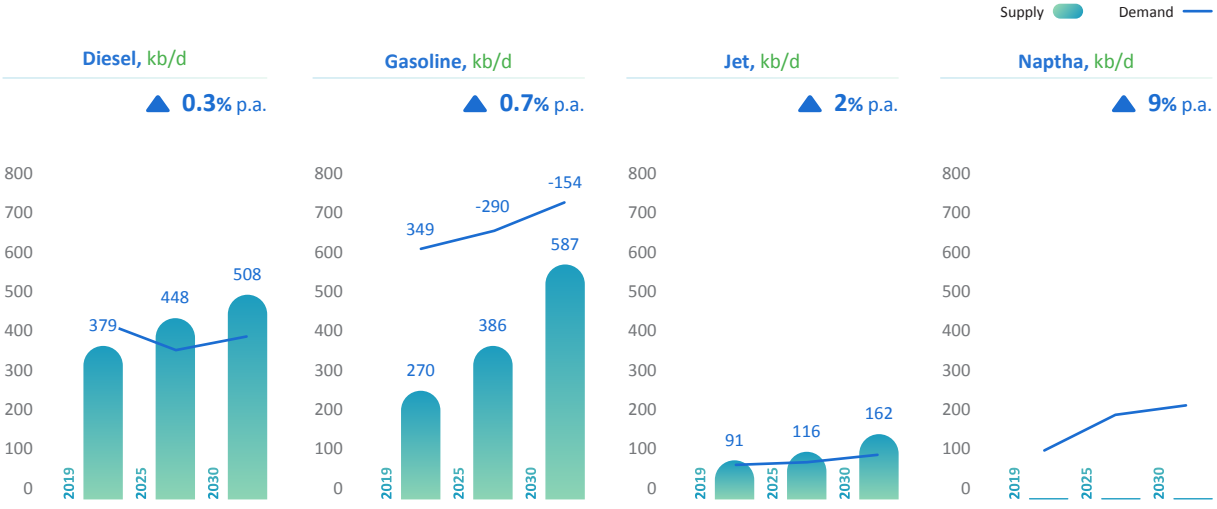
Source: ESDM Report 2019, Wood Mackenzie, KPI, ICISTechnon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021
Figure 10. Growth of Demand and Production (million bbl)

Demand kargo impor produk berupa diesel, bensin, avtur dan naphtha diproyeksikan akan meningkat akibat defisit produksi domestik. Defisit terbesar berasal dari bensin sebesar ±100 kbpd. Pertumbuhan permintaan diesel dan bensin relatif stabil di 0,3% dan bensin 0,7% per tahun yang berasal dari transportasi mobil dan motor. Sementara itu, pertumbuhan

The demand for imported cargo products such as diesel, gasoline, aviation fuel (avtur), and naphtha is projected to increase due to the domestic production deficit. The largest deficit is in gasoline at approximately ±100 thousand barrels per day (kbpd). The growth in demand for diesel and gasoline is relatively stable at 0.3% and 0.7% per year, respectively, driven

permintaan produk yang lebih besar terdapat pada naphta 9% dan avtur 2% per tahun yang berasal dari industri petrokimia dan penerbangan.

by transportation via cars and motorcycles. Meanwhile, there is greater demand growth for naphtha at 9% and avtur at 2% per year, stemming from the petrochemical and aviation industries.

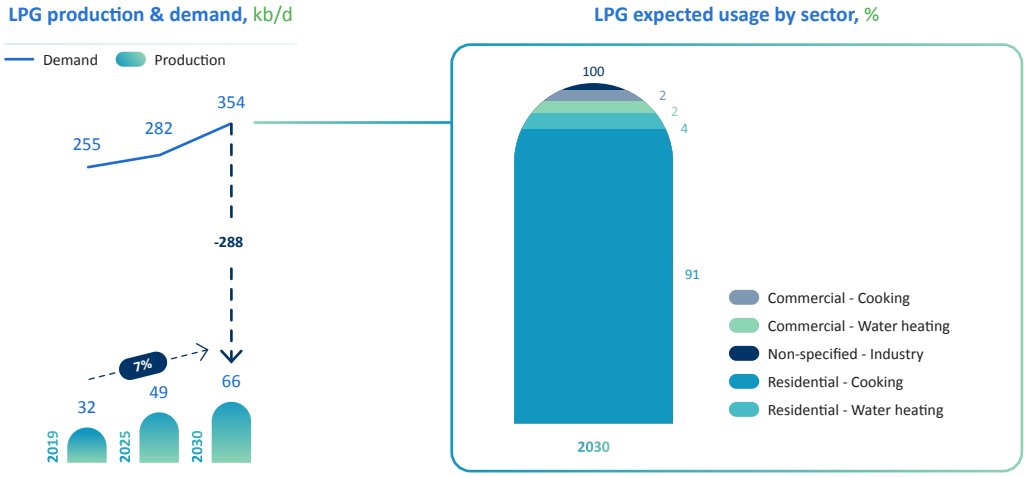


Sumber: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective
Gambar 11. Pertumbuhan Permintaan dan Produksi Indonesia (dalam juta bbl)

Source: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective
Figure 11. Growth of Demand and Production in Indonesia (in million bbl)

Indonesia merupakan importir LPG terbesar di Asia Tenggara dengan cakupan lebih dari 60% volume dan diperkirakan akan meningkat 4,5% per tahun. Pertumbuhan permintaan LPG di Indonesia diproyeksi sebesar 3% per tahun. Sedangkan produksi LPG bertumbuh 7% per tahun. Hingga 2030, diperkirakan terjadi defisit lebih dari 200 kbpd. Konsumsi LPG terbesar di Indonesia sebanyak 90% berasal dari sektor rumah tangga.

Indonesia is the largest importer of LPG in Southeast Asia, accounting for more than 60% of total volume, with import volumes projected to grow by 4.5% annually. Domestic demand for LPG is expected to increase by 3% per year, while local LPG production is projected to grow at a rate of 7% annually. However, a supply deficit of over 200 thousand barrels per day (kbpd) is anticipated by 2030. Currently, approximately 90% of LPG consumption in Indonesia comes from the household sector.



Sumber: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective
Gambar 12. Produksi, Permintaan, Proyeksi Konsumsi LPG per Sektor di Indonesia

Source: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective
Figure 12. Production, Demand, Projected LPG Consumption by Sector in Indonesia

Pasar-pasar utama di Asia Tenggara/APAC mengalami kekurangan kapasitas penyimpanan, Perseroan melakukan sinergi dengan Grup Pertamina agar dapat memaksimalkan pendapatan.

The major markets in Southeast Asia/APAC are experiencing a shortage of storage capacity. The Company is synergizing with the Pertamina Group to maximize revenue.

Vietnam	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	681	1,297
Gasoil	821	1,566
Fuel oil	23	45
Jet fuel and Korosono	141	268
LPG	156	297

Thailand	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	945	1,204
Gasoil	1,969	2,510
Fuel oil	592	754
Jet fuel and Korosono	592	755
LPG	521	664

Malaysia	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	1,453	1,835
Gasoil	1,014	1,281
Fuel oil	60	75
Jet fuel and Korosono	333	420
LPG	249	315



Low demand outlook

High demand outlook

Philipines	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	591	1,053
Gasoil	1,016	1,812
Fuel oil	142	253
Jet fuel and Korosono	104	241
LPG	169	664

Australia	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	1,312	1,712
Gasoil	2,527	3,170
Fuel oil	40	63
Jet fuel and Korosono	583	890
LPG	74	97

Aspek Pemasaran

Sebagai Perusahaan terminal terintegrasi yang berfokus kepada *storage handling service*, aspek pelayanan yang prima yang didukung dengan upaya *upgrading* sarana dan fasilitas serta keandalan operasional yang terus ditingkatkan Perseroan merupakan salah satu kunci agar Perseroan dapat berkembang ke depan sehingga dapat memenuhi ekspektasi pasar. Strategi ini menjadi hal yang krusial, terlebih pengembangan bisnis Perseroan yang sebelumnya penyuplai *Fresh Water* untuk kebutuhan industri.

Strategi Pemasaran

Dalam menyusun strategi pemasaran, Perseroan berorientasi pada optimalisasi penggunaan fasilitas penyimpanan BBM eksisting di 5 (lima) terminal dan pembangunan terminal baru yang bertujuan untuk menangkap potensi pangsa pasar permintaan BBM yang terus meningkat. Strategi Pemasaran Perseroan memetakan langkah-langkah strategis yang berfokus pada kemandirian ekspansi pasar. Dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan secara maksimal, Perseroan menjalankan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai target pendapatan dan laba Perseroan, Perseroan menjalankan strategi pemasaran sebagai berikut:

1. *Upgrade Terminal Capability* (Akselerasi Revitalisasi *Automation* & *Standardization*).
2. Digitalisasi Proses Bisnis PETSO.
3. *Strategic Partnership* dengan *Local Partner* dan Anak Perusahaan Lainnya.
4. *Focus* mempertahankan pengelolaan 6 Terminal dan Tersus/ TUKS nya.
5. *Upgrade Terminal Capacity*.
6. Pembangunan Terminal Baru.
7. Ekspansi Bisnis (*Strategic Partnership* dengan *Global Player Terminal/Shore Base*).
8. *Joint Venture*.
9. *Joint Management* (AP).

Pangsa Pasar

Perseroan sebagai Perseroan yang mengelola bisnis terminal dan *fresh water* mampu memenuhi kebutuhan jasa layanan terminal terpadu. Pangsa pasar utama Perseroan adalah

Marketing Aspect

As an integrated terminal company focusing on storage handling services, the Company recognizes that providing excellent services supported by efforts to upgrade facilities and operational reliability is crucial for its future development and meeting market expectations. This strategy is particularly important given the Company's previous role as a supplier of Fresh Water to industrial needs.

Marketing Strategy

In formulating its marketing strategy, the Company aims to optimize the use of existing fuel storage facilities at 5 terminals and the construction of new terminals to capture the developing market demand for fuel. the Company's marketing strategy maps out strategic steps focusing on market expansion. To optimally achieve the established targets, the Company implements the following marketing strategies:

To achieve the Company revenue and profit targets maximally, the Company executes several marketing strategies as follows:

1. Upgrade Terminal Capability (Accelerating Revitalization of Automation & Standardization).
2. Digitalization of PETSO Business Processes.
3. Strategic Partnerships with Local Partners and Other Subsidiaries.
4. Focus on maintaining the management of 6 Terminals and Tersus/TUKS.
5. Upgrade Terminal Capacity.
6. Construction of New Terminals.
7. Business Expansion (Strategic Partnerships with Global Players in Terminals/Shore Bases).
8. Joint Ventures.
9. Joint Management (AP).

Market Share

The Company, as a company managing terminal and fresh water businesses, is able to meet the needs of integrated terminal service offerings. The Company's main market share includes

Pertamina *Group* yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga dalam bentuk kerjasama jasa pengelolaan BBM/LPG di terminal Perseroan, PIS dan PTK sebagai konsumen *fresh water* untuk armada kapal, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebagai konsumen dalam kegiatan *Water Treatment Plant* (WTP).

Pada tahun kedua menjalankan bisnis penyimpanan di terminal, Perseroan berfokus pada upaya peningkatan *thruput* yang dapat dilayani kepada mitra utama dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga di 5 (lima) terminal Perseroan. Kelima terminal tersebut merupakan terminal strategis sebagai titik suplai penyedia BBM bagi *end terminal* lainnya. Terminal Perseroan berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan BBM di Indonesia. Terminal LPG Tanjung Sekong berperan penting dalam pemenuhan 40% kebutuhan nasional. Terminal Tanjung Uban yang berlokasi strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan Singapura sebagai salah satu *international hub* di Kawasan Asia tersebut berperan penting pada kehandalan BBM di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan dan sekitarnya, pasokan BBM sebagian besar di suplai dari Terminal Kotabaru, dan Terminal Bau-Bau menjadi titik suplai untuk pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

Strategi Pemasaran Perseroan memetakan langkah-langkah strategis yang berfokus pada kemandirian ekspansi pasar. Dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan secara maksimal, Perseroan menjalankan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Mengupayakan pertumbuhan laba, *volume* dan pangsa pasar, serta mengedepankan *cost leadership* melalui efisiensi pada semua lini operasi (termasuk sentralisasi pengadaan) secara berkesinambungan;
2. Menyelaraskan sinergi antar Pertamina *Group* dalam rangka mengoptimalkan peran kontribusi Perseroan terhadap peningkatan kinerja Pertamina *Group* dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan adaptasi model bisnis terhadap disrupsi pasar dan teknologi;
4. Melakukan akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia;
5. Mengembangkan bisnis global/*overseas* secara selektif dengan memprioritaskan kawasan yang potensial;
6. Menyediakan jasa terminal dan penyimpanan berstandar internasional;
7. Menjajaki potensi kerja sama dengan mitra- mitra dan pemain global terpercaya di kawasan regional Asia.

the Pertamina Group, which comprises PT Pertamina Patra Niaga for collaboration in managing fuel/LPG services at the Company terminals, PIS and PTK as consumers of fresh water for fleet ships, and PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur as a consumer in Water Treatment Plant (WTP) activities.

In its second year of terminal storage business operations, the Company focuses on efforts to increase throughput to its main partner, PT Pertamina Patra Niaga, at the 5 the Company terminals. These five terminals serve as strategic supply points for providing fuel to other end terminals. The Company terminals contribute significantly to fulfilling fuel needs in Indonesia. The LPG Terminal Tanjung Sekong plays a crucial role in meeting 40% of the national demand. Terminal Tanjung Uban, strategically located near Singapore as one of the international hubs in the Asia region, plays an important role in fuel reliability in the North Sumatra region and its surroundings. Meanwhile, for the Kalimantan region and its surroundings, most of the fuel supply comes from Kotabaru Terminal, and the Bau-Bau Terminal serves as a supply point for fuel needs in the Sulawesi region and its surroundings.

The Company's marketing strategy maps out strategic steps focusing on market expansion. To achieve its targets to the fullest extent, the Company implements several marketing strategies as follows:

1. Striving for profit, volume, and market share growth, and emphasizing cost leadership through efficiency in all operational lines (including centralized procurement) continuously;
2. Aligning synergy among Pertamina Group entities to optimize the Company's contribution to Pertamina Group performance improvement while adhering to applicable laws and regulations;
3. Adapting business models to market and technological disruptions;
4. Accelerating competitiveness through innovation and strengthening the quality of human resources;
5. Developing global/overseas business selectively by prioritizing potential regions;
6. Providing international standard terminal and storage services;
7. Exploring potential cooperation with trusted global partners in the regional Asia market.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tahun 2024 dan 2023 pembagian dividen dimana keseluruhan alokasi laba diperuntukan sebagai cadangan Perseroan dalam rangka peningkatan manfaat bagi Perseroan. Pada tahun 2024, Pemegang Saham menyetujui untuk Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua

Based on the Circular Resolution of Shareholders in 2024 and 2023 regarding dividend distribution, the entire allocation of profit was designated as Company reserves to enhance the Company's long-term value. In 2024, the Shareholders approved not to distribute dividends for the 2023 fiscal year and resolved to allocate the entire net profit of the 2023 fiscal

puluh tiga). Menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp68.101.009.000,- (enam puluh delapan miliar seratus satu juta sembilan ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari Laba bersih sebagai cadangan wajib. Pada tahun 2023, Menyetujui untuk tidak dilakukan pembagian Dividen oleh Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kemudian menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp13.172.603.047,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) atau 100% (seratus persen) dari Laba bersih sebagai cadangan untuk memperkuat stuktur permodalan dan mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

year, amounting to Rp68,101,009,000 (sixty-eight billion one hundred one million and nine thousand Rupiah), or 100% of the net profit, as a statutory reserve. In 2023, the Shareholders similarly approved not to distribute dividends for the 2022 fiscal year and resolved to allocate the full amount of the 2022 net profit, totaling Rp13,172,603,047 (thirteen billion one hundred seventy-two million six hundred three thousand forty-seven Rupiah), or 100% of the net profit, as reserves to strengthen the Company's capital structure and support its sustainable growth.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen (ESOP/ MSOP) Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP) Ownership of Shares by the Board of Directors and Board of Commissioners

Pada tahun 2024, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran atau opsi penawaran saham. Dengan demikian laporan tahunan tidak menyajikan informasi mengenai *stock option* yang dimiliki oleh perwira dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

In 2024, the Company did not have a stock ownership program for employees and/or management conducted through offering or stock option plans. Therefore, the annual report does not provide information regarding stock options held by officers and management, including the number of shares and exercise prices, timeframes, and eligibility criteria for employees and/or management.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the use of Funds from Public Offerings

Pada tahun 2024, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari kegiatan Penawaran Saham Umum Perseroan.

In 2024, the Company did not carry out any Public Share Offerings on any stock exchange. Therefore, this Annual Report does not provide information related to the total proceeds from offerings, plans for the use of funds, details of fund usage, fund balances, and the date of approval by the General Meeting of Shareholders for the Public Share Offering activities of the Company.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest or Transactions with Related Parties.

Transaksi pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Related Party Transactions

The Company conducts transactions with related parties as defined under PSAK 224 (Revised 2015), "Related Party Disclosures."

Transactions with related parties are carried out based on terms cvagreed upon by both parties, which may not be the same as those applicable to transactions with unrelated parties.

The nature of related party relationships is as follows:

Pihak Berelasi dan Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Related Parties and Related Entities With Government	Sifat hubungan Nature of Relationship	Saldo dan sifat transaksi Balance and Nature of Transaction
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pemegang saham utama Major Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PIS	Pemegang saham mayoritas Majority Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha dan pinjaman dari pemegang saham Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable and Loan from Shareholders
PTK	Pemegang saham Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PPL	Pemegang saham Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PT Pertamina Patra Niaga ("PPN")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan dan aset kontrak Revenue and Contract Assets
PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PT Pertamina Marine Engineering ("PME")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan, aset kontrak, penyertaan saham dan utang usaha Cost of revenue, contract assets, investment in shares, and trade payables
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables

Pihak Berelasi dan Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Related Parties and Related Entities With Government	Sifat hubungan Nature of Relationship	Saldo dan sifat transaksi Balance and Nature of Transaction
PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Pertamina Bina Medika ("PBM")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Patra Jasa ("Patra Jasa")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha Cost of revenue, Trade Receivables, and Trade Payables
PT Elnusa Petrofin ("Elnusa")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Pertamina Power Indonesia ("PPI")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payable
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan Cost of revenue
PT Pertamina Maintenance & Construction ("PMC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan dan aset kontrak Revenue and Contract Assets
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("WIKA")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Utang Usaha Trade Payables
Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah Government Affiliated Entity	Penempatan kas dan setara kas Deposit for Cash and Cash Equivalent
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah Government Affiliated Entity	Penempatan kas dan setara kas Deposit for Cash and Cash Equivalent

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perseroan

Changes in Laws and Regulations and the Impact on Company Performance

No	Peraturan Perundang-Undangan Laws and Regulation	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perseroan Impact on the Company
1	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi Presidential Regulation (Perpres) No. 96 of 2024 on Energy Buffer Reserves	Keseluruhan peraturan. Entire regulation.	Perpres No. 96/2024 tentang CPE dapat menjadi *entry point* integrasi Terminal Perseroan. Dalam hal ini Perseroan memiliki *competitive adventage* memiliki ijin usaha, tidak hanya ijin timbun. Agar Perseroan berkoordinasi dengan *Taskforce* PIS memastikan *competitive adventage* ini tersampaikan dengan baik. Perpres No. 96/2024 on Energy Buffer Reserves (CPE) can serve as an entry point for integrating the Company Terminals. In this regard, the Company holds a competitive advantage by possessing a business license, not merely a storage permit. The Company is encouraged to coordinate with the PIS Taskforce to ensure that this competitive advantage is effectively communicated.
2	Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah. Minister of Finance Regulation No. 131 of 2024 Concerning the Value Added Tax (VAT) Treatment on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Provision of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area.	Keseluruhan peraturan. Entire regulation.	Kenaikan tarif PPN akan memengaruhi keuangan Perseroan. Increase in VAT will impact the Company Finance.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Changes in Accounting Policies, Reasons, and Their Impact on the Company's Financial Statements

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 116 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontak Asuransi":
- Amendemen PSAK No. 117 Kontrak Asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – informasi komparatif;
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan Perseroan dari penerapan standar baru dan amendemen ini, yang tidak diadopsi dini oleh Perseroan.

Starting from January 1, 2024, references to each PSAK and ISAK have been revised in accordance with the issuance by the Indonesian Financial Accounting Standards Board - Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI").

The application of the following revised standards, which became effective on January 1, 2024, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies nor did they have a material impact on the amounts reported for the current or prior year:

- Amendment to PSAK 201 "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with covenants;
- Amendment to PSAK 116 "Leases" regarding lease liabilities in sale and leaseback transactions;
- Amendments to PSAK 207 "Statement of Cash Flows" and PSAK 107 "Financial Instruments: Disclosures" regarding supplier finance arrangements.

New standards, amendments, and interpretations that have been issued but are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption permitted, are as follows:

- PSAK 117 "Insurance Contracts";
- Amendment to PSAK No. 117 on the initial application of PSAK 117 and PSAK 109 – comparative information;
- Amendment to PSAK 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability."

As of the date of issuance of these financial statements, the Company is assessing the potential impacts of these new and amended standards on the Company's financial statements. These standards have not been adopted early by the Company.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Kelangsungan usaha Perseroan sangat dipengaruhi baik oleh kondisi eksternal maupun internal. Oleh karena itu, Perseroan secara berkala melakukan kajian dan analisis untuk memetakan setiap tantangan dan kendala yang memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, dan menjadikannya sebagai peluang pertumbuhan. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar Perseroan dalam menentukan strategi, kebijakan strategis, inisiatif strategis, serta sasaran strategis Perseroan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang

The sustainability of the Company's business is significantly influenced by external and internal factors. Accordingly, the Company regularly conducts reviews and analyses to map out the challenges and obstacles affecting its business continuity, with the goal of transforming them into opportunities for growth. The results of these assessments serve as the foundation for determining the Company's strategy, strategic policies, key initiatives, and strategic objectives, all of which are outlined in the Corporate's Long-Term Plan (RJPP). To support

Perusahaan (RJPP). Analisis dan kajian yang dilakukan Perseroan menggunakan metode analisis SWOT.

Faktor-faktor Potensial dan Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Berikut analisis SWOT yang dihadapi Perseroan:

STRENGTH
- Lokasi strategis
- Jaringan infrastruktur yang luas
- Bagian dari Pertamina *Group*
- Beberapa Terminal terdapat fasilitas PLB yang mendukung kegiatan ekspor impor
- Memiliki portfolio di bidang air yang mana merupakan komoditas vital manusia dan industri

WEAKNESS
- Perlu modifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar
- Ketergantungan terhadap satu pelanggan (Terminal)
- Modifikasi dan/atau Pembangunan baru butuh waktu dan modal
- Kelebihan lahan untuk pengembangan terbatas
- Kapabilitas utama masih di sektor *fuel* dan LPG
- Lokasi Terminal bukan Bagian KEK/FTZ

OPPORTUNITY
- Asta Cita Presiden yang mendukung swasembada energi membutuhkan tambahan *storage*
- Perpres Cadangan Penyangga Energi yang membutuhkan tambahan *storage*
- Hilirisasi industri petrokimia dan gas

THREAT
- Transisi energi
- Perubahan *stakeholder* dan regulasi yang mempengaruhi bisnis
- Pembatasan penggunaan sumber air tanah

Evaluasi dan Asesmen Manajemen atas Faktor-faktor Potensial dan Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

this process, the Company applies SWOT analysis to identify and evaluate key influencing factors.

Potential and Significant Factors Affecting the Company Business Continuity

The following presents the SWOT analysis conducted by the Company:

STRENGTH
- Strategically located assets
- Extensive infrastructure network
- Part of the Pertamina Group
- Some terminals are equipped with PLB facilities that support import-export activities
- Diversified portfolio in the water sector, a vital commodity for both human consumption and industrial use

WEAKNESS
- Need for infrastructure modifications to meet evolving market demands
- Dependency on a single customer (terminal-based)
- Modifications and/or new developments require significant time and capital investment
- Limited available land for future development
- Core capabilities remain concentrated in fuel and LPG sectors
- Terminal locations are not part of Special Economic Zones (SEZ) or Free Trade Zones (FTZ)

OPPORTUNITY
- Asta Cita Presiden promoting energy self-sufficiency, creating demand for additional storage capacity
- Presidential Regulation on Strategic Energy Reserves requiring additional storage facilities
- Industrial downstreaming in the petrochemical and gas sectors

THREAT
- Energy transition trends
- Shifts in stakeholder expectations and regulatory changes affecting business operations
- Restrictions on the use of groundwater resources

Management's Evaluation and Assessment of Potential and Significant Factors Affecting the Company's Business Continuity

The Company's management has conducted an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and believes that the Company has sufficient resources to sustain its operations in the foreseeable future. Furthermore, management has not identified any material uncertainties that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Perseroan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") pada setiap aspek kegiatan bisnis sebagai landasan dalam rangka meningkatkan kinerja, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan bisnis.

The Company is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) across all aspects of its business activities. These principles serve as the foundation for enhancing performance, maximizing value for shareholders and stakeholders, and ensuring long-term business sustainability.

Penerapan GCG Perseroan mengacu prinsip dasar, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* (TARIF).

The Company's GCG implementation is governed by five core principles: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness (TARIF)

Prinsip Principle	**Implementasi** Implementation
Transparansi Transparency	Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku, meliputi: • Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan. • Pembuatan Laporan Tahunan. • Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, semester, dan triwulan. Perseroan adheres to the prevailing regulations concerning information transparency, including: • Developing and explaining Annual Corporate Work Plan and Budget (RKAP). • Preparing Annual Report. • Preparing Financial Statements regularly: annually, semiannually, and quarterly.
Akuntabilitas Accountability	• Pembagian tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing organ Perseroan, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta kinerjanya baik secara kolegial maupun individual. • Memiliki standar kinerja untuk semua jajaran/level organisasi yang telah disepakati bersama, konsisten terhadap implementasi nilai- nilai Perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan, serta memiliki sistem *reward and punishment*. • Memiliki sistem pelaporan berkala dan senantiasa mengevaluasi pencapaian serta kinerja Perseroan. • Distributing the roles and authorities clearly across the Corporate organs, including General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, as well as their collegiate and individual performance. • Establishing performance standards across the organizational levels that are agreed by everyone, implementing the Corporate values, business objectives, and Corporate strategies consistently, and putting reward and punishment systems in place. • Establishing a regular reporting system and evaluating the Company's performance and achievement regularly.
Pertanggungjawaban Responsibility	• Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya antara lain di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , industri, konstruksi, dan lingkungan yang relevan bagi Perseroan. • Melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk melakukan wajib pungut dengan baik dan tepat waktu. • Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*). • Adhering to the terms of the Articles of Association, the prevailing laws, and other relevant regulations concerning Energy and Mineral Resources (ESDM), industry, construction, and environment that are relevant to the Company. • Fulfilling tax obligation, including paying the tax properly and timely. • Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs.
Kemandirian Independence	• Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan. • Pemegang saham maupun Dewan Komisaris Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengintervensi kepengurusan Perseroan. • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. • Menerapkan kebijakan dan sistem yang dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan. • Respecting each other's rights, obligations, roles, authorities, and responsibilities across the Company's organs. • Prohibiting the shareholders and the Board of Commissioners from intervening in the management of the Company. • Avoiding conflict of interests in all decision-making processes by signing an integrity pact by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the employees. • Implementing the policy and system to minimize conflict of interests.
Kewajaran Fairness	• Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). • Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta memberikan akses keterbukaan informasi. • The Company upholds the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness (equal treatment). • The Company provides all stakeholders with the opportunity to offer input and express opinions in the interest of the Company, as well as ensures access to transparent and open information.

Dasar Penerapan GCG

Perseroan melaksanakan GCG berdasarkan sejumlah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang:
   - Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan/atau perubahannya.
   - Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya.
   - UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau perubahannya.
   - Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dan/atau perubahannya.

2. Peraturan/Keputusan Menteri:
   - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
   - Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
   - Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Referensi Hukum

Pedoman Pelaksanaan GCG: Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.

Legal Basis of GCG Implementation

The Company implements GCG based on applicable provisions and regulations, including:

1. Laws :
   - Republic of Indonesia Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents.
   - Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
   - Republic of Indonesia Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
   - Law of the Republic of Indonesia Number 01 of 2025 concerning State-Owned Enterprises and/or its amendments.
2. Ministerial Regulations/Decrees:
   - Minister of SOE Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises
   - Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning: Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of SOEs.
   - Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning: Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises

Legal References

Guidelines for GCG Implementation: General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia (PUGKI) 2021.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

Struktur GCG Perseroan terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung. Setiap organ Perseroan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG yang efektif dengan berkewajiban menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan

Perseroan's Good Corporate Governance (GCG) structure consists of the main governance organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, and supporting organs. Each corporate organ plays a critical role in ensuring the effective implementation of GCG and is obligated to carry out its functions in accordance with the Company's Articles of Association. These roles aim to enhance performance, protect stakeholder interests, and strengthen compliance with prevailing laws and regulations.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's organ with authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Directors is the Company's organ authorized and fully responsible for managing the Company for the Company's interests, in accordance with the purpose and

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

objectives of the Company, and represents the Company both inside and outside the court as stipulated in the Articles of Association.
3. The Board of Commissioners is the Company's organ responsible for general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat, memberikan suara, dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Seluruh keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan, serta dilakukan secara wajar, dan transparan.

Pemegang Saham
Saham Perseroan dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental, dan PT Pertamina Port and Logistics. Hak-hak pemegang saham di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya), baik kepada Dewan Komisaris maupun Direksi.
3. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya apabila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.
4. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Kewenangan RUPS
RUPS maupun Pemegang Saham memiliki wewenang yang dibatasi oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya adalah:
1. RUPS dapat mendelegasikan kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan.
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision-making organ within the Company's governance structure, holding authorities that are not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits set by applicable laws and/or the Articles of Association. The GMS serves as a forum for shareholders to exercise their rights to express opinions, cast votes, and obtain information related to the Company, provided that such matters are relevant to the meeting agenda and do not conflict with the interests of the Company, while also adhering to the Articles of Association and prevailing regulations. All resolutions made at the GMS are based on the best interests of the Company and are adopted in a fair and transparent manner.

Shareholders
The Company's shares are owned by PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental, and PT Pertamina Port and Logistics. Shareholders' rights include:

1. Attending and voting in the GMS.
2. Obtaining material information (including the right to ask questions) from both the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Convening the GMS in the event of the Board of Directors and/or Board of Commissioners failing to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS when deemed necessary, such as when the company faces significant performance decline.
4. Obtaining explanations regarding the implementation of GCG.

Authority of the GMS
Both the GMS and shareholders have authority limited by the Articles of Association and applicable regulations, including:

1. The GMS can delegate authority to a GMS Proxy in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and applicable regulations. In maintaining the independence between company organs, the GMS Proxy is not a member of the Board of Commissioners.
2. Appointing and dismissing the Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Approving the Corporate Long-Term Business Plan (RJPP)

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Menetapkan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja.
5. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

Ketentuan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Ketentuan atau Agenda RUPS Tahunan antara lain:

1. Direksi wajib menyampaikan:
   - Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS.
   - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP).
4. Mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Pengusulan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris dan Pengusulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Memutuskan hal-hal lain yang diajukan di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ketentuan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan Perseroan. Ketentuan RUPS Luar Biasa, antara lain:

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan beserta alasannya.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2024

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu RUPS dengan kehadiran (RUPS fisik) dan RUPS Sirkuler. Di tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS fisik, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2024

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Patraqua dan telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 19 Juni 2024 RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemegang Saham/perwakilan. Adapun agenda, hasil, dan realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 oleh Manajemen Perseroan, sebagai berikut:

and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
4. Determining the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, considering performance achievements.
5. Setting policies regarding potential conflicts related to the Board of Commissioners.
6. Determining the maximum number of concurrent positions of a member of the Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Delegating to the Board of Commissioners the division of duties and authorities among the members of the Board of Directors.

Annual GMS Provisions

The Annual GMS is held annually, no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year. The provisions or agenda of the Annual GMS include:

1. The Board of Directors is required to present:
   - The Annual Report for approval by the GMS.
   - Financial Statements for ratification by the GMS.
2. Approving the use of the Company's net profit.
3. Appointing Public Accountant Firm (KAP).
4. Appointing or dismissing members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Proposal for Performance-Based Incentives (Tantiem) and Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. Deciding on other matters presented in the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Extraordinary GMS Provisions

An Extraordinary GMS can be held as needed or in the interest of the company. The provisions for an Extraordinary GMS include:

1. The Board of Directors or Board of Commissioners is authorized to convene an Extraordinary GMS.
2. The Board of Directors is required to call and convene an Extraordinary GMS upon written request from one or more Shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with valid voting rights.
3. The written request must state the matters to be discussed and the reasons behind.

GMS Implementation in 2024

The GMS can be conducted in 2 (two) methods: in-person GMS (physical GMS) and Circular GMS. In 2024, the Company held 1 (one) Annual GMS for the 2023 fiscal year.

GMS Resolution in 2024

The Annual GMS for the 2023 fiscal year was held on Wednesday, June 19, 2024 at Patraqua Meeting Room and has been notarized with Notary Deed No. 7 dated June 19, 2024. The Annual GMS for the 2023 fiscal year was attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Shareholders/representatives. The agenda, resolutions, and the implementation of the resolutions of the Annual GMS for the 2024 fiscal year by the Company's Management are as follows:

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-Up
Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 Presentation of the 2023 Annual Report	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta penjelasannya yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 000857/2.1025/AU.1/10/1130-6/1/IV/2024 tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat, "wajar dalam semua hal yang material". Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sepanjang: 1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). 2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Approval of the Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Statements along with the Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners	Approved the Company's Annual Report for the 2023 (two thousand and three) Fiscal Year and ratifying the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023 (December thirty first two thousand and twenty three), as audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in Report No. 000857/2.1025/AU.1/10/1130-6/1/IV/2024 dated April 30, 2024 (April thirtieth two thousands twenty four), with an unqualified opinion, "fair in all material respects." Granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ending December 31, 2023 (December thirty first two thousand and twenty three), provided that: 1. Such actions are reflected in the Company's Annual Report (including the Financial Statements) for the fiscal year ending December 31, 2023 (December thirty first two thousand and twenty three); and 2. Such actions do not constitute criminal acts and/or violations of law.	
Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Proposal for the Determination of the Use of Profit for the 2023 Fiscal Year (two thousand and twenty three)	Pemegang Saham menyetujui untuk Perseroan tidak melakukan pembagian Dividen Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp68.101.009.000,- (enam puluh delapan miliar seratus satu juta sembilan ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari Laba bersih sebagai cadangan wajib. The Shareholders approved that the Company would not distribute dividends for the 2023 fiscal year. The Company's net profit for the 2023 (two thousand and three) fiscal year in the amount of Rp68,101,009,000 (sixty-eight billion one hundred one million nine thousand Rupiah), or 100% (one hundred percent) of the net profit, shall be designated as statutory reserves.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up
Pengusulan Penetapan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2024 Proposal for the Reappointment of the Public Accounting Firm (KAP) for the 2024 Fiscal Year	Pemegang Saham menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berubah nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan Dewan Komisaris Perseroan. The Shareholders approved the reappointment of the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, which changed its name to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners in 2024, conducted the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024 (December thirty first two thousand and twenty four), in accordance with the evaluation and recommendation of the Company's Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
Pengusulan Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Proposal for Performance-Based Incentives (Tantiem) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year (two thousand and twenty three)	Pemegang Saham memutuskan penghargaan atas kinerja (tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. The Shareholders resolved that the performance incentives (tantiem) for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 (two thousand and three) fiscal year shall be determined at a later time and stipulated in a separate circular GMS.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-Up
Pengusulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year (two thousand and twenty four)	Pemegang Saham memutuskan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. The Shareholders resolved that the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 (two thousand and four) fiscal year shall also be determined at a later time and stipulated in a separate circular GMS.	Telah ditindaklanjuti Has been followed up

RUPS Sirkuler Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan RUPS Sirkuler sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Pengalihan Tugas Direktur, Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 05 Maret 2024 dan Tindak Lanjutnya.

Circular GMS in 2024

In 2024, the Company conducted 4 (four) Circular GMS, with the following details:

Resolution of the Shareholders by Circular Decision concerning the Reassignment of the Director's Duties, and the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pertamina Energy Terminal

Resolution of the Circular GMS dated March 5, 2024, and its Follow-Up Actions.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-up
	1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Hufron Asrofi, sebagai Komisaris Perseroan dengan alasan penyegaran organisasi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan. 2. Mengangkat Tuan Bambang Sujito, sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 23-02-2024 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat), untuk jangka waktu 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi: **Dewan Komisaris** Komisaris : Tuan Bambang Sujito tersebut. 3. Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana Keputusan angka 2. (dua) diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris serta melaksanakan tindakan hukum lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Respectfully discharged Mr. Hufron Asrofi from his position as Commissioner of the Company due to organizational restructuring, with sincere appreciation for his services to the Company. 2. Appointed Mr. Bambang Sujito as Commissioner of the Company, effective as of February 23, 2024 (February twenty third, two thousand twenty four), for 1 (one) term of office as stipulated in the Company's Articles of Association, or until otherwise decided by the General Meeting of Shareholders of the Company. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners of the Company was as follows: **Board of Commissioners** Commissioner: Mr. Bambang Sujito. 3. For any member of the Board of Commissioners appointed as referred to in point 2 (two) above who held another position prohibited under prevailing laws and regulations, relevant authorities' provisions, or internal rules (including the Company's Articles of Association), he was required to resign or was dismissed from such position. 4. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with substitution rights) to incorporate this Circular Resolution of Shareholders into a notarial deed and to perform any other legal actions required in accordance with the applicable regulations.	Telah dilaksanakan Has been followed up

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 24 Juni 2024 dan Tindak Lanjutnya.

Circular Resolution of the Shareholders

Resolutions of the Circular GMS dated June 24, 2024, and Its Follow-Up Actions.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-up
Pengalihan Tugas Direktur, Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal Transfer of Director's Duties and Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pertamina Energy Terminal	1. Mengalihkan tugas Sdr. Bayu Prostiyono yang semula menjabat sebagai Direktur PT Pertamina Energy Terminal menjadi Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal dikarenakan perubahan organisasi Perseroan, dengan ketentuan bahwa melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. 2. Mengangkat: • Sdr. Rangga Raditya sebagai Direktur Operasi PT Pertamina Energy Terminal. • Sdr. Nepos MT Pakpahan sebagai Komisaris PT Pertamina Energy Terminal. Berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini ditandatangani, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. Dengan demikian susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi: Direktur Utama : Sdr. Bayu Prostiyono Direktur Operasi : Sdr. Rangga Raditya Dan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi: Komisaris : Sdr. Bambang Sujito Komisaris : Sdr. Nepos MT Pakpahan 3. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana keputusan angka 2 (dua) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Transferred the duties of Mr. Bayu Prostiyono, who previously served as Director of PT Pertamina Energy Terminal, to the position of President Director of PT Pertamina Energy Terminal due to organizational changes within the Company, under the provision that he would continue the remainder of his previous term of office. 2. Appointed: • Mr. Rangga Raditya as Director of Operations of PT Pertamina Energy Terminal. • Mr. Nepos MT Pakpahan as Commissioner of PT Pertamina Energy Terminal. These appointments became effective as of the date this Shareholders' Circular Resolution was signed, for a term of 1 (one) period as stipulated in the Company's Articles of Association, or until otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. Thus, the composition of the Company's Board of Directors became: President Director: Mr. Bayu Prostiyono Director of Operations: Mr. Rangga Raditya And the composition of the Company's Board of Commissioners became: Commissioner: Mr. Bambang Sujito Commissioner: Mr. Nepos MT Pakpahan 3. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as stated in point 2 (two) above who were still holding other positions prohibited by prevailing laws and regulations, relevant authority provisions, or internal rules (including the Company's Articles of Association), such individuals were required to resign or be dismissed from those positions. 4. Granted authority to the Company's Board of Directors (with substitution rights) to formalize and declare this Shareholders' Circular Resolution in a notarial deed and to carry out any other necessary legal actions in accordance with applicable regulations.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. The resolution of the GMS agenda takes effect immediately.

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Penugasan Pelaksana Tugas Komisaris Utama PT Pertamina Energy Terminal

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 31 Juli 2024 dan Tindak Lanjutnya.

Circular Shareholders' Resolution on the Appointment of Acting President Commissioner of PT Pertamina Energy Terminal

Resolution of the Circular GMS dated July 31, 2024 and its Follow-Up Actions.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-Up
Penugasan Pelaksana Tugas Komisaris Utama PT Pertamina Energy Terminal Assignment of Acting President Commissioner of PT Pertamina Energy Terminal	1. Menunjuk Sdr. Bambang Sujito untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama PT Pertamina Energy Terminal selain menjalankan tugasnya sebagai Komisaris PT Pertamina Energy Terminal berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini ditandatangani sampai dengan diangkatnya Komisaris Utama PT Pertamina Energy Terminal yang definitif. 2. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mendapat penugasan sebagaimana keputusan angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris serta melaksanakan tindakan hukum yang lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Appointed Mr. Bambang Sujito to serve as the Acting President Commissioner of PT Pertamina Energy Terminal, in addition to his duties as Commissioner of PT Pertamina Energy Terminal, effective as of the date this Circular Shareholders' Resolution was signed and remaining in effect until the definitive President Commissioner of PT Pertamina Energy Terminal is appointed. 2. For members of the Company's Board of Commissioners assigned as referred to in point 1 above, who are still holding other positions prohibited by laws and regulations, provisions of the relevant authorities/agencies, or internal regulations (including the Company's Articles of Association), they must resign or be dismissed from such positions. 3. Authorized the Board of Directors of the Company (with substitution rights) to execute and state this Circular Shareholders' Resolution in a notarial deed and to undertake any other legal actions as required in accordance with the prevailing laws and regulations.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. The resolution of the GMS agenda takes effect immediately.

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 24 September 2024 dan Tindak Lanjutnya.

Circular Shareholders' Resolution on the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP)

Resolution of the Circular General Meeting of Shareholders dated September 24, 2024 and its Follow-Up Actions.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-up
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2024	1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana dimaksud dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler ini, dengan ringkasan sebagai berikut: a. Laba (Rugi) (USD) Pendapatan : 82,26 Juta Biaya Operasi : (56,47) Juta Laba/(Rugi) Operasi : 25,79 Juta Beban Umum dan Administrasi : (12,31) Juta Laba Usaha : 13,48 Juta Beban Lain-lain : (7,33) Juta Laba Usaha Sebelum Pajak : 6,15 Juta Pajak : (1,35) Juta Laba Usaha Setelah Pajak : 4,80 Juta b. EBITDA (USD) : 39,26 Juta c. INVESTASI (USD) Anorganik : 6 ribu *Business Development* (BD) : 121,66 Juta *Non Business Development* (NBD) : 128,62 Juta Total Investasi 1. Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Fiscal Year 2024 (twenty twenty-four) as stated in the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2024 (twenty twenty-four), which is inseparable from this Circular Resolution of the Shareholders, summarized as follows: a. Profit (Loss) (USD) Revenue : 82.26 Million Operating Expenses : (56.47) Million Operating Profit/(Loss) : 25.79 Million General and Administrative Expenses : (12.31) Million Operating Income : 13.48 Million Other Expenses : (7.33) Million Profit Before Tax : 6.15 Million Tax : (1.35) Million Profit After Tax : 4.80 Million b. EBITDA (USD) : 39.26 Million c. INVESTMENT (USD) Inorganic : 6 thousand Business Development (BD) : 121.66 Million Non-Business Development (NBD) : 128.62 Million Total Investment	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. The resolution of the GMS agenda takes effect immediately

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-up
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2024	2. Menyetujui *Key Performance Indicator* (KPI)/Kesepakatan Kinerja Perseroan Tahun 2024 setelah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sebagai *Subholding Integrated Marine Logistics* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku RKAP Perseroan Tahun 2024. 3. Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RKAP Perseroan Tahun 2024 dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan RKAP Tahun 2024. 2. Approving the Key Performance Indicator (KPI)/Corporate Performance Agreement for 2024 after being determined and signed by the President Director of PT Pertamina International Shipping as the Subholding of Integrated Marine Logistics, which forms an integral part of the Company's 2024 RKAP Book. 3. The Company's Board of Directors shall be responsible for the implementation of the 2024 RKAP, while the Company's Board of Commissioners 4. Memberikan arahan-arahan kepada Direksi Perseroan, dengan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, agar: a. Mengupayakan pencapaian target pada RKAP tahun 2024 secara optimal, baik yang terkait dengan target operasional maupun keuangan, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan dan pengawasan RKAP Tahun 2024 kepada Pemegang Saham, yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. c. Mengupayakan pelaksanaan inisiatif strategis dan/atau Program *Strategic Delivery Unit* yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN tahun 2024, serta inisiatif lain yang ditetapkan dan dijalankan dengan prinsip manajemen proyek yang baik dan juga dilaporkan secara berkala kepada Pemegang Saham. d. Pemilihan instrumen pinjaman eksternal, nilai dan jadwal penarikannya agar dilakukan secara *prudent* dan selektif, memperhatikan kepatuhan secara prudent, memperhatikan kepatuhan pada GCG dan ketentuan yang berlaku, mempertimbangkan kondisi *market, update* kebutuhan pendanaan, biaya yang efisien, mempertimbangkan kesehatan rasio keuangan serta memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban sehingga memberikan *benefit* yang optimum bagi Perusahaan dan dilakukan mitigasi risiko yang memadai agar tidak berdampak pada cross default Pemegang Saham. e. Memastikan bahwa proses persiapan dan pelaksanaan investasi dilakukan secara prudent termasuk tingkat kualitas proposal investasi yang komprehensif dan *bankable* sehingga dapat dieksekusi sesuai target OTOBOSOR dan/atau attractive di mata calon mitra strategis maupun lender (apabila menggunakan *project financing*). f. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan para *stakeholder* terkait baik untuk hal-hal yang berhubungan dengan operasional maupun pengembangan bisnis dan investasi. g. Melakukan *monitoring* yang ketat atas kesesuaian pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan mengupayakan adanya optimasi serta penyesuaian rencana kerja yang mempertimbangkan aspek keuangan, operasional, bisnis serta trend bisnis global. h. Meningkatkan *awareness* dan menjadikan budaya *Health, Safety, Security, dan Environment* (HSSE) sebagai *top priority* dalam seluruh kegiatan operasional maupun non operasional di semua lini Perusahaan sehingga menciptakan situasi kerja yang aman serta mencapai *zero accident.* i. Melakukan penilaian indeks kematangan risiko (*Risk Maturity Index*) tahun 2024. j. Memastikan terlaksananya rencana kerja *asset integrity management system* untuk mendukung objektif kegiatan operasional (*operational excellence*). 4. Providing directives to the Company's Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, to: a. Strive to achieve the 2024 RKAP targets optimally, including both operational and financial targets, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and professionalism in accordance with prevailing laws and regulations. b. Submit regular reports on the implementation and supervision of the 2024 RKAP to the Shareholders, including monthly, quarterly, semi-annual, and other reports as required by applicable regulations. c. Pursue the implementation of strategic initiatives and/or Strategic Delivery Unit Programs as stipulated by the Ministry of SOEs in 2024, as well as other initiatives executed with sound project management principles and reported periodically to the Shareholders. d. The selection of external loan instruments, including their amount and disbursement schedule, must be carried out prudently and selectively, with due regard to prudent compliance, adherence to GCG principles and applicable regulations, market conditions, updated funding needs, cost efficiency, the soundness of financial ratios, and the Company's debt-servicing capability, in order to deliver optimum benefits to the Company. Adequate risk mitigation must also be ensured to avoid any cross-default impact on the Shareholders. e. Ensure that the investment preparation and execution process is carried out prudently, including producing comprehensive and bankable investment proposals, allowing for execution in accordance with OTOBOSOR targets and/or attractiveness to potential strategic partners or lenders (in the case of project financing). f. Maintain intensive coordination and communication with relevant stakeholders, both in relation to operational matters and business development and investment. g. Closely monitor the alignment of the Corporate Long-Term Plan (RJPP) implementation and strive for optimization and adjustment of work plans by considering financial, operational, business, and global business trend aspects.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. The resolution of the GMS agenda takes effect immediately

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow-up
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2024	h. Increase awareness and embed Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) culture as a top priority in all operational and non-operational activities across all Company lines, aiming to create a safe working environment and achieve zero accidents. i. Conduct a risk maturity index assessment (Risk Maturity Index) in 2024. j. Ensure the execution of the asset integrity management system work plan to support operational excellence objectives. 5. Menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk: a. Menyatakan keputusan-keputusan tersebut di atas di hadapan Notaris (apabila diperlukan); b. Membuat, menandatangani dan menyampaikan setiap akta sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler ini dan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak berwenang yang terkait dan/atau untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang yang terkait, termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan c. Melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang diperlukan atau diharuskan oleh hukum yang berlaku untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini. 6. Persetujuan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler ini didasarkan pada hasil pendalaman sesuai dengan dan terbatas pada informasi, data dan dokumen yang diberikan dan/atau dinyatakan oleh Perseroan. Verifikasi mengenai keabsahan dan validitas terhadap informasi, data dan dokumen yang diberikan dan/atau dinyatakan tersebut sepenuhnya ada di pihak pemberi informasi. 5. Approved to appoint and grant authority, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors, either collectively or individually, to: a. Declare the aforementioned resolutions before a Notary (if necessary); b. Prepare, sign, and submit any deed in relation to this Circular Resolution of the Shareholders and to make notifications to, and/or obtain approvals from, the relevant authorities, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; and c. Carry out any and all actions and measures necessary or required by applicable law to implement this Circular Resolution of the Shareholders. 6. The approval of this Circular Resolution of the Shareholders is based on the review conducted in accordance with and limited to the information, data, and documents provided and/or declared by the Company. The verification of the authenticity and validity of such information, data, and documents lies entirely with the party providing the information.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. The resolution of the GMS agenda takes effect immediately

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2023

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu RUPS dengan kehadiran (RUPS fisik) dan RUPS Sirkuler. Di tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS fisik, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2023

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 diselenggarakan pada hari Selasa, 06 Juni 2023 bertempat di Jakarta dan telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 06 Juni 2023 RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemegang Saham/perwakilan. Adapun agenda, hasil, dan realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 oleh Manajemen Perseroan, sebagai berikut:

GMS Implementation in 2023

The GMS can be conducted in two methods: in-person GMS (physical GMS) and Circular GMS. In 2023, the Company held one Annual GMS for the 2022 fiscal year.

GMS Resolution in 2023

The Annual GMS for the 2022 fiscal year was held on Tuesday, June 6, 2023, at Jakarta, and was notarized with Notary Deed No. 4 dated June 6,2023. The Annual GMS for the 2022 fiscal year was attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Shareholders/representatives. The agenda, results, and the implementation of the resolutions of the Annual GMS for the 2022 fiscal year by the Company's Management are as follows:

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Presentation of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year		
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Approval of the Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Statements accompanied by Full Discharge and Release of Responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) beserta penjelasannya yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor : 00907/2.1025/AU.1/10/11305/1/V/2023 tertanggal 19-05-2023 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sepanjang: 1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); 2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kedua Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2022 (two thousands and twenty two) and ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022 (two thousands and twenty two), along with its explanations, which have been audited by the Public Accounting Firm TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN as stated in Report Number: 00907/2.1025/AU.1/10/11305/1/V/2023 dated May 19, 2023, with the opinion "Fair in All Material Respects." We grant full discharge and release (Volledig Acquit et De Charge) to the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions conducted during the Fiscal Year ending December 31, 2022, provided that: 1. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Statements) for the Fiscal Year ending December 31, 2022 (Thirty First December Two Thousands and Twenty Two) 2. These actions are not criminal acts and/or violations of law. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Second Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 Proposal for the Allocation of Profits for the 2022 Fiscal Year	Menyetujui untuk tidak dilakukan pembagian Dividen oleh Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kemudian menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp13.172.603.047,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat puluh tujuh Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari Laba bersih sebagai cadangan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Ketiga Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agreement not to distribute dividends by the Company for the 2022 Fiscal Year and instead allocate the Company's Net Profit for the 2022 (two thousands and twenty two) Fiscal Year amounting to Rp13,172,603,047.00 (thirteen billion one hundred seventy-two million six hundred three thousand forty-seven Indonesian Rupiah), or 100% (one hundred percent) of the Net Profit, as reserves to strengthen the capital structure and support the sustainable growth of the Company. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Third Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.
Penunjukan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2023 Reappointment of Public Accountant Firm for the 2023 Fiscal Year	Menyetujui penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN Price Waterhouse Coopers dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Keempat Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agreement to reappoint the Public Accountant Firm (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN Price Waterhouse Coopers to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2023, in accordance with the evaluation results and proposal of the Company's Board of Commissioners. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Fourth Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Pengusulan Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 Proposal for Performance Awards (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year	Menyetujui pengusulan penetapan penghargaan atas kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kelima Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agreement to propose the determination of performance-based compensation (Tantiem) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022 to be decided later and determined in a separate circular GMS. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Fifth Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.
Pengusulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Proposal for Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year	PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL selaku pemegang saham Perseroan, menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING, as the majority shareholder in the Company, agrees the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023 will be determined later and established in a separate circular GMS. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL, as a shareholder of the Company, agrees the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023 will be determined later and established in a separate circular GMS.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.

RUPS Sirkuler Tahun 2023

Di tahun 2023, Perseroan melaksanakan RUPS Sirkuler sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 9 November 2023 dan Tindak Lanjutnya.

Circular GMS in 2023

In 2023, the Company conducted Circular GMS a total of 2 (two) times, with the following details:

Results of the Circular Resolution of Shareholders on Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023

Results of the Circular GMS on November 9, 2023 and its Follow ups.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow Ups
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023	1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler ini, dengan ringkasan sebagai berikut: a. Laba (Rugi) (IDR 000) Pendapatan : 961.680.640 Biaya Operasional : (719.540.910) Laba Operasi : 242.139.731 Beban *Overhead* : (141.625.987) Laba Usaha : 100.513.744 Pendapatan/ (Beban) Lain-lain : (45.475.791) Laba Usaha Sebelum Pajak : 55.037.744 Pajak Penghasilan : (11.086.168) Laba Sebelum Hak Minoritas : 43.951.786 Hak Minoritas : - Laba Bersih : 43.951.786 EBIT : 100.513.744 Depresiasi : 343.999.547	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. Resolutions passed during the GMS agenda take effect immediately.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow Ups
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023	b. EBITDA (IDR 000) : 444.668.443 c. INVESTASI (USD 000) : 49.525 *Business Development* (BD) : 19.489 *Non Business Development* (NBD) : 69.014 Total Investasi 1. Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) as stated in the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three), which is inseparable from this Circular Resolution of the Shareholders, summarized as follows: a. Profit (Loss) (IDR 000) Revenue : 961,680,640 Operating Expenses : (719,540,910) Operating Profit : 242,139,731 Overhead Expenses : (141,625,987) Business Profit : 100,513,744 Other Income/ (Expenses) : (45,475,791) Operating Profit Before Tax : 55,037,744 Income Tax : (11,086,168) Profit Before Minority Interest : 43,951,786 Minority Interest : - Net Profit : 43,951,786 EBIT : 100,513,744 Depreciation : 343,999,547 b. EBITDA (IDR 000) : 444,668,443 c. INVESTMENT (USD 000) Business Development (BD) : 49,525 Non-Business Development (NBD) : 19,489 Total Investment : 69,014 2. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP) Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 63.41 (klasifikasi "Kurang Sehat BBB", sebagaimana termuat: dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan keterangan sebagai berikut: Nilai Kinerja Keuangan (NKK) : 33.41 (Kurang Sehat) Nilai Kinerja Operasional (NKO) : 20.00 (Sangat Baik) Nilai Kinerja Administrasi (NKA) : 10,00 (Tertib) Total (NKK+NKO+NKA) : 63.41 Klasifikasi : Kurang Sehat BBB 3. Menyetujui *Key Performance Indicator* ("KPI")/ Kesepakatan Kinerja Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) setelah ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Utama PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 4. Menyetujui rencana transformasi dan organisasi PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL Sebagai bagian dari rencana transformasi dan organisasi Subholding Integrated Marine Logistics yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 5. Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 6. Memberikan arahan-arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. RKAP Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang disahkan merupakan pedoman kerja bagi. Direksi dalam pengelolaan Perseroan dan sebagai sarana pemantauan serta pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan/pengawasan RKAP tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan lainnya secara tepat waktu sesui dengan ketentuan yang berlaku. b. Mengupayakan pencapaian target pada RKAP tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara optimal baik yang terkait dengan target operasional, investasi, maupun keuangan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *profesionalisme* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis sensitivitas secara berkala terhadap faktor-faktor strategis dan material serta menyiapkan langkah antisipasinya (*contingency plan*) apabila terdapat kondisi di luar asumsi yang bersifat material. c. Direksi agar terus melakukan efisiensi pada semua lini, dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan termasuk menurunkan *losses*, menyelaraskan sinergi program antar Direktorat, dan fokus pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. d. Target-target investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan nilai tambah bagi Perusahaan khususnya mendukung pencapaian target produksi dan penjualan. e. Mengupayakan pelaksanaan inisiatif strategis baik yang sudah tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai 2024 (dua ribu dua puluh empat) maupun berbagai strategic mapping yang telah disusun sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut agar disertai dengan project management yang lebih baik dan juga dilaporkan secara berkala kepada Pemegang Saham. f. Meningkatkan *awareness* terhadap budaya *Health, Safety, Security*, dan *Environment* (HSSE) dalam seluruh kegiatan operasional maupun non operasional di tingkat korporat, unit operasi, Anak Perusahaan maupun mitra kerja Perusahaan sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan kondusif.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. Resolutions passed during the GMS agenda take effect immediately.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow Ups
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023	2. Approval of the Company's Soundness Level (TKP) for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) at 63.41 (classified as "Less Sound BBB") as stated in the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three), with the following details: Financial Performance Value (FPV) : 33.41 (Less Sound) Operational Performance Value (OPV) : 20.00 (Very Good) Administrative Performance Value (APV) : 10.00 (Orderly) Total (FPV+OPV+APV) : 63.41 Classification : Less Sound BBB 3. Approval of the Key Performance Indicator ("KPI")/ Performance Agreement of the Company for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) after being determined and ratified by the President Director of PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING, which is an integral part of the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three). 4. Approval of the transformation and organizational plan of PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL as part of the transformation and organizational plan of the Integrated Marine Logistics Subholding, which is an integral part of the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) RKAP Book. 5. The Board of Directors of the Company is responsible for the implementation of the Company's RKAP for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three), and the Board of Commissioners of the Company is responsible for overseeing the implementation of the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) RKAP. 6. Providing guidance to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows: a. The approved RKAP for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) serves as a guideline for the Board of Directors in managing the Company and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to provide regular reports to the Shareholders in a timely manner on the implementation/supervision of the 2023 (twenty twenty-three) RKAP, including monthly reports, quarterly reports, and other reports in accordance with applicable regulations. b. Strive for optimal achievement of targets in the 2023 (twenty twenty-three) RKAP, both related to operational, investment, and financial targets, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and professionalism in accordance with applicable laws and regulations, conducting periodic sensitivity analysis on strategic and material factors, and preparing contingency plans if there are conditions beyond the assumed material. c. The Directors are required to continue efficiency measures across all areas, from upstream to downstream continuously, including reducing losses, aligning synergy programs between Directorates, and focusing on improving product quality and customer service. d. Investment targets set in the 2023 (twenty twenty-three) RKAP should be implemented timely and accurately, providing added value to the company, especially supporting production and sales targets. e. Strive for the implementation of strategic initiatives both outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the years 2020 (twenty twenty) to 2024 (twenty twenty-four) and various strategic mappings prepared according to set targets. The implementation of these initiatives should be accompanied by better project management and reported regularly to the Shareholders. f. Enhance awareness of the Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) culture in all operational and non-operational activities at the corporate level, operational units, subsidiaries, and company partners, thereby creating a safe and conducive working environment. g. Kebijakan tentang kepegawaian agar mengarah pada upaya menghilangkan *silo mentality*, Kesiapan *talent pool*, dan *position successor*, rasio antara pekerja *outsource* dengan pekerja tetap yang ideal, serta menjadikan HSSE (*Health, Safety, Security and Environment*) sebagai bagian dari budaya kerja Perusahaan. h. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan sinergi dan peran Perseroan dalam rangka mengoptimalkan peran dan kontribusi positif Perseroan terhadap peningkatan Kinerja Pertamina *Group*. i. Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal. Temuan temuan tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian hari. j. Direksi diminta agar meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri dengan mengutamakan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan terafiliasi dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan perekonomian, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. g. The Company's employment policy is directed toward eliminating silo mentality, strengthening the readiness of the talent pool and position successors, achieving an ideal ratio between outsourced and permanent employees, and embedding Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) as an integral part of the corporate work culture. h. The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, is requested to enhance synergy and the Company's role to optimize its positive contribution to improve Pertamina Group's performance. i. The Board of Directors should follow up on and resolve the findings and recommendations from both internal and external auditors. These findings should not recur in the future. j. The Board of Directors is requested to increase the use of domestic goods and services by prioritizing synergy between State-Owned Enterprises, subsidiaries, and/or affiliated companies to enhance business efficiency and the economy, while still adhering to the applicable laws and regulations.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. Resolutions passed during the GMS agenda take effect immediately.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow Ups
	k. Direksi diminta untuk melakukan akselerasi transformasi *digital* Perusahaan dengan teknologi informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan strategis Perusahaan serta menjadi penggerak kegiatan operasional Perusahaan. l. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar melakukan *cascading* KPI korporat sampai dengan tingkat individu dengan mengacu pada kontrak manajemen antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). m. Penarikan pinjaman eksternal agar dilakukan dengan *prudent* dan *selective* dengan tetap mempertimbangkan aspek *timing, sizing* dan *pricing*, sehingga dapat dicapai *terms* & *conditions* yang paling optimal dan biaya yang paling efisien untuk kepentingan terbaik Perusahaan. n. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku. Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenalnya/bukti identitasnya, demikian pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang telah diberikan olehnya adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik perdata, pidana, administrasi negara maupun lainnya, serta selanjutnya juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menerima isi akta ini dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari. k. The Board of Directors is requested to accelerate the company's digital transformation with information technology supporting strategic decision-making and driving the company's operational activities. l. The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, should cascade corporate KPIs down to the individual level, based on the management contract between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders as the basis for performance evaluation in 2023. m. The external borrowing should be carried out prudently and selectively, considering aspects of timing, sizing, and pricing, to achieve the most optimal terms and conditions and the most efficient costs for the best interest of the Company. n. Authorize the Board of Directors or its proxy to make and declare this Circular Shareholder Decision in a notarial deed and carry out other legal actions deemed necessary in accordance with the prevailing regulations. Finally, the appearing party declares that the identity according to their identification card/evidence of identity is accurate, as well as all documents, data, and information provided by them are complete and true as submitted to me, the Notary, and fully responsible for it. Therefore, the appearing party releases the witnesses and the Notary from all claims and lawsuits of any kind, whether civil, criminal, state administration, or otherwise, and further declares that they have understood, comprehended, and accepted the content of this deed with all its subsequent consequences.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. Resolutions passed during the GMS agenda take effect immediately.

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Perubahan Direksi

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 07 Juli 2023 dan Tindak Lanjutnya.

Results of the Circular Resolution of Shareholders on Changes to the Board of Directors

Results of the Circular GMS on July 7, 2023 and its Follow ups.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak lanjut Follow Ups
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Dismissal and Appointment of Director	1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Hari Purnomo, sebagai Direktur Perseroan dengan alasan penyegaran organisasi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan. 2. Mengangkat Tuan Bayu Prostiyono sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 03-07-2023 (tiga juli dua ribu dua puluh tiga), untuk jangka waktu 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. 3. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana keputusan angka 2 (dua) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris serta melaksanakan tindakan hukum yang lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. 1. To honorably dismiss Mr. Hari Purnomo as Director of the Company due to organizational restructuring, with gratitude for his services to the Company. 2. To appoint Mr. Bayu Prostiyono as Director of the Company, effective from July 3, 2023 (third of July, two thousand and twenty-three), for a term of 1 (one) period as stipulated in the Company's Articles of Association or until the Company's General Meeting of Shareholders decides otherwise. 3. For the Director appointed as per decision number 2 (two) above, who currently holds another position prohibited by laws and regulations, the relevant authority, or internal regulations (including the Company's Articles of Association), he must resign or be dismissed from that position. 4. To authorize the Company's Board of Directors (with substitution rights) to draft and declare this Circular Resolution of Shareholders in a notarial deed and to undertake any other legal actions required according to applicable regulations.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. Resolutions passed during the GMS agenda take effect immediately.

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan termasuk mewakili Perseroan dengan pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam *Board Manual*.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman Kerja yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-004/PET0000/2022-S0 tentang Board Manual PT Pertamina Energy Terminal.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direktur bertugas untuk:
   a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; dan
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan, Direktur melakukan:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
   Direktur Wajib Menyusun RKAP, dengan ketentuan:

   a. RKAP disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan tata waktu dalam Anggaran Dasar sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
   b. RKAP paling sedikit memuat:
      1) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
      2) Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran operasi; dan
      3) Proyeksi keuangan Perusahaan;
   c. Dalam hal terjadi:
      1) Direktur tidak menyampaikan RKAP kepada Komisaris sesuai dengan tata waktu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan; dan
      2) RKAP belum mendapatkan persetujuan hingga dimulainya tahun buku yang akan datang Perusahaan menggunakan RKAP tahun sebelumnya.
2. Penyusunan Laporan Tahunan
   Direktur wajib Menyusun laporan tahunan dengan ketentuan;
   a. Laporan tahunan disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat penelaahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir;

The Board of Directors is a corporate organ responsible for the management of the Company, including representing the Company in dealings with third parties, both inside and outside of court. The execution of duties and responsibilities by the Board of Directors is carried out in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Further provisions regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors are detailed in the Board Manual.

Board Manual

The Company's Board of Directors has a Board Manual that serves as a guide for carrying out their duties and responsibilities, based on Decree No.Kpts-004/PET0000/2020-S0 regarding the Board Manual of PT Pertamina Energy Terminal.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1. The Board of Directors is responsible for:
   a. Leading and managing the Company in accordance with its purpose and objectives, and constantly striving to improve the efficiency and effectiveness of the company; and
   b. Preserving and managing the company's assets.

In carrying out management duties, the Board of Directors performs the following:

1. Preparation of the Annual Work Plan
   The Directors are required to prepare the RKAP with the following provisions:
   a. The RKAP is submitted to the Board of Commissioners for approval according to the timeline specified in the Articles of Association prior to the start of the upcoming fiscal year;
   b. The RKAP must include at least:
      1) Mission, business objectives, business strategy, company policies, and work programs/activities;
      2) Detailed company budget for each work program/activity, including investment budget and operational budget; and
      3) Company financial projections;
   c. In the event that:
      1) The Board of Directors fails to submit the RKAP to the Board of Commissioners according to the specified timeline in the Articles of Association; and
      2) The RKAP has not received approval until the start of the upcoming fiscal year, the Company will use the previous year's RKAP.

2. Preparation of the Annual Report
   The Board of Directors is required to prepare the annual report with the following provisions:
   a. The annual report is submitted to the Board of Commissioners for review no later than 6 (six) months after the end of the company's fiscal year;

b. Laporan tahunan paling sedikit memuat;
   1) Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
   2) Laporan mengenai kegiatan Perusahaan;
   3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
   4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
   5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
   6) Nama Direktur dan Komisaris;
   7) Gaji dan tunjangan bagi Direktur dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau; dan
   8) Informasi mengenai rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris).
c. Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disampaikan oleh Direktur kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham sebelum disahkan oleh RUPS;
d. Dalam hal Direktur atau Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan;
   1) Yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang diletakkan dalam laporan tahunan; dan
   2) Jika tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan; dan
e. Direktur wajib menyerahkan laporan keuangan Perusahaan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diaudit.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahaan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS tahunan dengan ketentuan:
a. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada:
   1) Direktur atas pengurusan Perusahaan; dan
   2) Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan, yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; dan
b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direktur dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Direktur dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

b. The annual report must include at least:
   1) Financial statements prepared in accordance with financial accounting standards, including at least the balance sheet for the latest fiscal year compared to the previous fiscal year, income statement for the relevant fiscal year, cash flow statement, and statement of changes in equity, along with notes to the financial statements;
   2) Report on the company's activities;
   3) Report on the implementation of social and environmental responsibilities;
   4) Details of issues arose during the fiscal year affecting the company's business activities;
   5) Report on the supervisory tasks carried out by the Board of Commissioners during the latest fiscal year;
   6) Names of Directors and Commissioners;
   7) Salaries and allowances for the Directors, and salaries or honorariums and allowances for the Commissioners for the latest fiscal year; and
   8) Information regarding meetings held during the fiscal year (both internal and joint meetings with the Board of Commissioners);
c. The annual report is signed by the Board of Directors and Board of Commissioners serving in the relevant fiscal year, and submitted by the Board of Directors to the GMS no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, taking into account the applicable provisions, to be examined by the Shareholders prior to being approved by the GMS.;
d. In the event that a Director or Commissioner does not sign the annual report:
   1) The reason must be stated in a separate written letter enclosed with the annual report; and
   2) If no written reason is provided, it is deemed the person approves the contents of the annual report;and
e. The Board of Directors is required to submit the company's financial statements to the public accountant appointed by the GMS for auditing.

Approval of the annual report, including the ratification of the Financial Statements, is carried out by GMS according to the following provisions:
a. The decision to ratify the financial statements and approve the annual report by the annual GMS implies granting full release of responsibility to:
   1) The Board of Directors for the management of the company; and
   2) The Board of Commissioners for their supervisory duties over the company, that have been carried out during the previous fiscal year, as long as such actions are reflected in the annual report and financial statements; and
b. In the event the provided financial statements are found to be incorrect and/or misleading, the Board of Directors and Board of Commissioners are cooperatively responsible towards the affected parties. The Board of Directors and Board of Commissioners are exempt from such responsibility if it is proven the situation is not their fault.

3. Pertanggungjawaban Direktur diatur sebagai berikut:

   a. Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan Perundang-undangan;
   b. Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jika dapat membuktikan;
      1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
      2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
      3) Tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan Perusahaan yang mengakibatkan kerugian; dan
      4) Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. The responsibilities of the Board Directors are regulated as follows:

   a. The Directors are personally liable for any losses incurred by the Company if found fault or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the company, as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations;
   b. The Directors cannot be held accountable for losses incurred by the Company as mentioned in point (a) if they can prove:
      1) The losses are not due to their fault or negligence;
      2) They have carried out their managerial duties in good faith and with prudence for the interests and in accordance with the purpose and objectives of the Company;
      3) They do not have any direct or indirect conflicts of interest regarding company management actions that result in losses; and
      4) They have taken measures to prevent the occurrence or continuation of such losses.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-046/PET0000/2024-S8 tentang Tugas dan Wewenang Direksi di PT Pertamina Energy Terminal yang ditetapkan pada tanggal 02 Agustus 2024, tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

In accordance with the Board of Directors Decree No. Kpts-046/PET0000/2024-S8 concerning Duties and Authorities of the Board of Directors of PT Pertamina Energy Terminal issued on 02 Agustus 2024, the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors
Bayu Prostiyono	Direktur Utama President Director	1. Sebagai *Chief Executive Officer* (CEO), memberikan arahan, mengendalikan kebijakan, dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam menjalankan Visi, Misi dan Strategi Perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS. 3. Memimpin para Direksi dalam melaksanakan Keputusan Direksi. 4. Menyelenggarakan penempatan investasi sesuai kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh RUPS. 5. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 6. Menentukan keputusan yang diambil apabila dalam Rapat Direksi terdapat jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya. 7. Atas nama Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak serta mewakili Perseroan. 8. Atas nama Direksi, mengesahkan semua Surat Keputusan Direksi/Direktur Utama sesuai dengan jenis keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau ketetapan lainnya. 9. Atas nama Direksi, menunjuk pekerja atau pihak lain untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan. 10. Memimpin dan mendorong terlaksananya pembentukan budaya Perusahaan, peningkatan citra dan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Government*). 1. As Chief Executive Officer (CEO), provides direction, controls policies, and holds full responsibility in carrying out duties to realize the Company's Vision, Mission, and Strategy in compliance with applicable laws and regulations. 2. Prepares the draft of the Corporate Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) to be consulted with the Board of Commissioners and ratified through the GMS. 3. Leads the Board of Directors in implementing the decisions of the Board of Directors. 4. Carries out investment placements in accordance with the investment policy determined by the GMS. 5. Convenes and leads Board of Directors' meetings in accordance with the Articles of Association. 6. Determines the final decision when votes are equally divided in the Board of Directors' meeting. 7. On behalf of the Board of Directors, has the right and authority to act and represent the Company. 8. On behalf of the Board of Directors, ratifies all decisions of the Board of Directors/President Director in accordance with the types of decisions stipulated in the Articles of Association or other applicable provisions. 9. On behalf of the Board of Directors, appoints employees or other parties to represent the Company inside and outside the court. 10. Leads and promotes the establishment of a corporate culture, enhancement of the Company's image, and implementation of Good Corporate Governance.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors
		11. Menetapkan susunan organisasi Perusahaan, serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh Direktorat dan Fungsi yang ada di lingkungan Perusahaan dalam mencapai sasaran kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan. 12. Memberikan informasi kepada *Stakeholders* terhadap keputusan Direksi yang memberi dampak besar kepada publik baik yang berkaitan dengan keputusan bisnis, aspek legal, ataupun isu-isu tentang Perusahaan yang berkembang di masyarakat. 13. Bertanggung jawab secara pribadi dan secara bersama-sama (tanggung renteng) apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 11. Determines the organizational structure of the Company, and leads and coordinates all Directorates and Functions within the Company to achieve the Company's established performance targets. 12. Provides information to stakeholders regarding Board of Directors' decisions that significantly impact the public, whether related to business decisions, legal aspects, or emerging company-related issues in the public domain. 13. Holds personal and joint (collective) responsibility in the event of fault or negligence in carrying out duties for the interest and business of the Company
Rangga Raditya	Direktur Operasi Director of Operations	1. Menyusun rencana, mengelola, memonitor dan mengevaluasi kegiatan operasi terminal (sarana penerimaan dan penyaluran meliputi darat dan laut, distribusi, *warehousing/storage*) sehingga mampu merealisasikan kegiatan penyaluran produk dalam lingkungan PT PET secara optimal. 2. Menyusun rencana, mengelola, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan rencana pengembangan *asset*/sarana dan fasilitas operasi sehingga mampu merealisasikan kegiatan penyaluran produk dalam lingkungan PT PET secara optimal. 3. Menyusun rencana, mengelola, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan *asset*/sarana dan fasilitas operasi sehingga mampu merealisasikan kegiatan penyaluran produk dalam lingkungan PT PET secara optimal. 4. Menyusun rencana, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan kehandalan sarana dan fasilitas operasi baik milik sendiri atau yang dimiliki oleh mitra kerja (*join venture/joint operation*). 5. Menyusun rencana dan melaksanakan proyek pengembangan dan peningkatan kehandalan sarana dan fasilitas operasi baik secara *Full Equity* ataupun secara kemitraan (BOT/BOO). 6. Menyusun rencana, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan *scheduling* transportasi laut dan darat/*fleet* untuk kelancaran distribusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. 7. Menyusun rencana, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kehandalan operasi dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan Pemasaran dan Penjualan produk di Terminal. 8. Bertanggung jawab secara pribadi dan secara bersama-sama (tanggung renteng) apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 1. Plans, manages, monitors, and evaluates terminal operations activities (receiving and distribution facilities including land and sea, distribution, warehousing/storage) to ensure optimal product distribution activities within PT PET. 2. Plans, manages, monitors, and evaluates the management of asset/facility and operational infrastructure development plans to ensure optimal product distribution activities within PT PET. 3. Plans, manages, monitors, and evaluates the maintenance of assets/facilities and operational infrastructure to ensure optimal product distribution activities within PT PET. 4. Plans, executes, monitors, and evaluates the reliability management of operational facilities and infrastructure, whether owned by the Company or partners (joint venture/joint operation). 5. Plans and executes development projects and reliability improvement of operational facilities and infrastructure either through full equity or partnership schemes (BOT/BOO). 6. Plans, executes, monitors, and evaluates the scheduling of land and sea transportation/fleet to ensure smooth distribution in order to optimally meet customer needs. 7. Plans, executes, monitors, and evaluates operational and infrastructure reliability to support Marketing and Sales activities at the Terminal. 8. Holds personal and joint (collective) responsibility in the event of fault or negligence in carrying out duties for the interest and business of the Company.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi BUMN

1. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.

2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.

3. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.

Appointment of the Board of Directors of SOEs

1. The GMS/Minister can appoint a candidate proposed by the Succession Committee to become a member of the SOEs Board of Directors.
2. For certain SOEs, the appointment of someone as a member of the Board of Directors can be done after passing the Competency Fit and Proper Test (UKK) according to sectoral regulations.
3. In the event the appointment of a member of the Board of Directors is made prior to the UKK according to sectoral regulations, the SOEs Board of Directors is authorized to perform the duties and functions as a member of the Board of Directors from the moment they are declared to have passed the UKK according to sectoral regulations.

4. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
5. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
6. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
   a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
   b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
7. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
8. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
9. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
10. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
11. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
12. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
13. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
14. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
15. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
16. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
17. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
19. Pengusulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi

4. The term of office for a SOEs Board member as referred to in paragraph (3) is effective from the date of appointment by the GMS/Minister.
5. In the event the SOEs Board member is declared not to have passed the UKK according to sectoral regulations, the GMS/Minister may dismiss the Board member, taking into account the sectoral regulations.
6. The appointment of a person as a member of the SOEs Board of Directors can be done through:
   a. A decision by the Minister as the GMS/shareholder if all shares/capital of the SOEs are owned by the State; or
   b. A decision by the GMS or a circular resolution by all shareholders if not all shares are owned by the State.
7. For publicly listed companies, the curriculum vitae of candidates for the Board of Directors to be proposed for appointment at the GMS must be available and announced at the GMS before making a decision on their appointment as a member of the SOEs Board of Directors.
8. Prior to being appointed as a member of the SOEs Board of Directors, the candidate must sign a resignation letter from any other positions that are prohibited to be held concurrently with the SOEs Board of Directors position, effective from the date of their appointment.
9. If the candidate does not resign within the period stipulated by the relevant laws and regulations, their position as a member of the SOEs Board of Directors will be terminated at the end of that period.
10. In cases where the appointment decision is made by the Minister's Decision or a circular resolution by all shareholders, the Deputy processes the delivery of the Decision Letter to the selected member of the SOEs Board of Directors after the decision is made.
11. In the process of delivering the Decision Letter, the Deputy is assisted by senior primary leadership officials responsible for legal matters, Assistant Deputies, and Sector Assistant Deputies.
12. After the Decision Letter is handed over, all documents are submitted to the Deputy for administration.
13. If the appointment is to be decided at the GMS, the results of the UKK are submitted to the Minister along with the candidate appointment letter and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS.
14. After the GMS is conducted, all documents related to the appointment of SOEs Board of Directors members are handed over to the Deputy for administration.
15. The administrative process by the Deputy as referred to in paragraphs (12) and (14) includes the documentation of the appointment and assessment process.
16. The members of the Board of Directors start their tenure effectively from the date specified in the Minister's Decision/GMS/circular resolution by all shareholders.
17. The format of the statement letter regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors is as stipulated in Appendix IV, which is an integral part of this Ministerial Regulation.
18. The appointment and dismissal of the Board of Directors are carried out by the GMS.
19. The proposal for candidates for the Subsidiary's

Pertamina selaku Pemegang Saham harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pertamina dan disetujui oleh RUPS Pertamina sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.

20. Pengusulan calon Direksi Perusahaan Patungan yang berasal dari Pertamina, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pertamina dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pengusulan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Patungan yang berlaku di Pertamina.

21. Pengusulan calon Direksi Perusahaan Patungan yang berasal dari luar Pertamina, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham.

22. Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku serta dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan.
23. Rekrutmen Direksi dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan *(fit and proper test)*.
24. Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) maka salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur (mana yang relevan sesuai Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan).
25. Selain ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, masa jabatan Direksi Perusahaan adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan dengan persetujuan RUPS.

26. Anggota Direksi tidak diperkenankan memangku jabatan rangkap baik struktural maupun fungsional pada Perusahaan lain.
27. Apabila tidak dapat dihindari, anggota Direksi dapat merangkap jabatan di Perusahaan lain setelah mendapat persetujuan RUPS.
28. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh waktu pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
29. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
    a. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
    b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
    c. Meninggal dunia;
    d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS; dan
    e. Selesai atau berakhirnya masa jabatan/masa kerja sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

30. Pemberhentian Direktur sewaktu-waktu oleh RUPS Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentian, antara lain:
    a. Tidak/kurang mampu memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
    b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
    c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebagai Direktur dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan;
    d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;

Board of Directors by Pertamina's Board of Directors as the Shareholder must obtain written approval from Pertamina's Board of Commissioners and be approved by Pertamina's SOEs prior to being decided in the Subsidiary's GMS.

20. The proposal for candidates for the Joint Venture Company's Board of Directors originating from Pertamina must obtain written approval from Pertamina's Board of Directors and must comply with the rules and regulations regarding the proposal and appointment of Joint Venture Company's Board of Directors applicable at Pertamina.
21. The proposal for candidates for the Joint Venture Company's Board of Directors originating from outside Pertamina must obtain written approval from Pertamina's Board of Directors as the Shareholder.
22. The appointment of the Board of Directors is based on considerations of expertise, integrity, leadership, experience, behavior, and dedication to developing the company for its progress.
23. Recruitment of the Board of Directors is carried out through a suitability and competence test (fit and proper test).
24. The number of Board members is adjusted to the needs, and if there is more than 1 (one) Board member, one of them is appointed as the President Director or CEO (whichever is relevant according to the Articles of Association of each Company).
25. In addition to being stipulated in the Articles of Association of the Company, the term of office of the Company's Board of Directors is a maximum of 3 (three) years and can then be re-elected for 1 (one) more term with the approval of the GMS.
26. Board members are not allowed to hold concurrent positions, whether structural or functional, in other companies.
27. If unavoidable, Board members may hold concurrent positions in other companies after obtaining approval from the GMS.
28. In carrying out their duties, the Board of Directors must dedicate their time, thoughts, and attention full-time to the tasks, obligations, and goals of the company.
29. The position of a Board member ends if:
    a. Resign from their position by notifying the Company in writing within a maximum period of 30 (thirty) days before the date of their resignation;
    b. No longer meet the requirements of the regulations;
    c. Passed away;
    d. Dismissed based on a GMS decision; and
    e. The expiration or termination of the term of office/employment according to the provisions of the Company's Articles of Association.
30. Termination of Directors at any time by the GMS Directors may be terminated at any time by the GMS based on a GMS decision stating the reasons for termination, including:
    a. Failure or inadequacy to fulfill their obligations as agreed in the management contract;
    b. Inability to perform their duties properly;
    c. No longer meeting the requirements as a Director and/or violating the provisions of the Company's Articles of Association and/or regulations;
    d. Involved in actions detrimental to the Company and/or the state;

e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur; dan
g. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

31. Pemberhentian sementara waktu Direktur oleh Komisaris
Direktur dapat diberhentikan sementara oleh Komisaris jika Direktur tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direktur disertai dengan alasannya;
b. Komisaris wajib melaksanakan pengurusan Perusahaan selama Direktur diberhentikan sementara;
c. Direktur yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sejak menerima pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS;
e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Direktur diberi kesempatan untuk membela diri;
f. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Direktur;
g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 menguatkan keputusan pemberhentian sementara, Direktur diberhentikan untuk seterusnya; dan
h. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal pemberhentian sementara tidak diadakan RUPS maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan Direktur yang diberhentikan sementara dimaksud dapat menjabat kembali.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi
Kebijakan rapat Direksi diatur berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-004/PET0000/2022-S0 tentang *Board Manual* PT Pertamina Energy Terminal.

Pelaksanaan Rapat Direksi
Direksi menyelenggarakan rapat untuk mengambil keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perseroan. Direksi mengutamakan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Rapat Direksi terdiri atas rapat gabungan antara Komisaris dan Direksi, rapat dengan Pertamina sebagai *Holding*, rapat bersama PT Pertamina International Shipping, dan rapat dengan pihak eksternal. Pada tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat internal dan 10 (sepuluh) kali rapat gabungan.

e. Found guilty by a court judgment that has obtained legal force;
f. Engaging in actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a Director; and
g. Other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

31. Temporary Suspension of Directors by the Board of Commissioners
Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners if the Director acts contrary to the Company's Articles of Association or legal regulations, subject to the following conditions:
a. The temporary suspension must be notified in writing to the Director along with the reasons;
b. The Board of Commissioners must manage the Company during the Director's temporary suspension;
c. The Director who is temporarily suspended is not authorized to manage the Company or represent the Company both in and out of court from the receipt of the notification of suspension as referred to in point 1;
d. Within a maximum period of 30 (thirty) days after the temporary suspension, the Board of Commissioners must convene a GMS;
e. In the GMS referred to in point 4, the Director is given the opportunity to defend themselves;
f. The GMS referred to in point 4 will decide whether to revoke or uphold the decision of the temporary suspension of the Director;
g. In the event the GMS as intended in number 4 confirms the decision to temporarily dismiss the Director, the Director will be dismissed permanently; and
h. If, within a maximum period of 30 (thirty) days after the date of the temporary suspension, the GMS is not held, the temporary suspension shall be legally void, and the Director temporarily suspended may resume their duties.

Board of Directors Meeting

Board of Directors Meeting Policy
The policy for Board of Directors meetings is regulated based on Decree No. Kpts-004/PET0000/2020-S0 regarding the Board Manual of PT Pertamina Energy Terminal.

The Implementation of Board of Directors Meetings
The Board of Directors holds meetings to make important decisions related to the operational and business activities of the Company. The Board of Directors prioritizes decision-making through deliberation and consensus. Board of Directors meetings include joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, meetings with Pertamina as the Holding company, meetings with PT Pertamina International Shipping, and meetings with external parties. In 2024, the Board of Directors conducted 11 (eleven) internal meetings and 10 (ten) joint meetings.

Risalah Rapat Internal Direksi
Minutes of the Internal Meeting of the Board of Directors

No	Tanggal dan Tempat Rapat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	05 Januari 2024 January 05, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
2	26 Januari 2024 January 26, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
3	13 Februari 2024 February 13, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
4	07 Maret 2024 March 07, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
5	20 Maret 2024 March 20, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
6	17 April 2024 April 17, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
7	21 Mei 2024 May 21, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • *Management*
8	04 Juli 2024 July 04, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur Utama • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • Rangga Raditya • *Management*

Risalah Rapat Internal Direksi
Minutes of the Internal Meeting of the Board of Directors

No	Tanggal dan Tempat Rapat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
9	18 Juli 2024 July 18, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur Utama • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • Rangga Raditya • *Management*
10	28 Agustus 2024 August 28, 2024	• *Safety Pause* • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur Utama • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • Rangga Raditya • *Management*
11	15 Oktober 2024 October 15, 2024	• Safety Pause • AKHLAK *Moment* • Laporan dari setiap Fungsi • Arahan Direktur Utama • Safety Pause • Akhlak Moment • Report from all Functions • Directors Directive	• Bayu Prostiyono • Rangga Raditya • *Management*

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of the Joint Meetings

No	Tanggal dan Tempat Rapat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	26 Maret 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter March 26, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* • Laporan *progress* terkait perizinan • Kinerja operasional Perseroan • *Progress* investasi Perseroan • Kinerja keuangan Perseroan • Safety Pause • Progress Report on Licensing • Company Operational Performance • Company Investment Progress • Company Financial Performance	• Bambang Sujito • Bayu Prostiyono
2	24 April 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter April 24, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* • Kinerja operasional Perseroan • Kinerja keuangan Perseroan • Rencana strategis Perseroan RKAP 2024 • *Progress* proyek Terminal LPG Ref Jatim • Safety Pause • Company Operational Performance • Company Financial Performance • Company's Strategic Plan in the 2024 RKAP • Project Progress of LPG Ref Terminal in East Java	• Bambang Sujito • Bayu Prostiyono
3	28 Mei 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter May 28, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* • Kinerja operasional Perseroan • Kinerja keuangan Perseroan • Laporan Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) • Arahan lain Komisaris • Safety Pause • Company Operational Performance • Company Financial Performance • Report on Preparation for Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) • Other Directions from the Board of Commissioners	• Bambang Sujito • Bayu Prostiyono

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of the Joint Meetings

No	Tanggal dan Tempat Rapat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
4	01 Juli 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter July 1, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* • Kinerja operasional Perseroan • Kinerja keuangan Perseroan • *Progress* perizinan usaha minyak dan gas bumi • Hal lain yang disampaikan Direktur • Arahan lain Komisaris • Safety Pause • Company Operational Performance • Company Financial Performance • Progress of Oil and Gas Business Licensing • Additional Updates from the Director • Other Directions from the Board of Commissioners	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Bayu Prostiyono • Rangga Raditya
5	07 Agustus 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter August 05, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office		
6	30 Agustus 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter August 30, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* • Kinerja operasional Perseroan • Perencanaan implementasi *Operational Excellent* • Kinerja keuangan Perseroan • Realisasi biaya investasi YTD 2026 61% dibawah RKAP YTD 2024 • Arahan lain Komisaris • Safety Pause • Company Operational Performance • Planning for Operational Excellence Implementation • Company Financial Performance • YTD 2026 Investment Cost Realization: 61% below YTD 2024 RKAP • Other Directions from the Board of Commissioners	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Bayu Prostiyono • Rangga Raditya
7	1 Oktober 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter October 1, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* • AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) • HSSE • Kinerja operasional • Kinerja keuangan • Realisasi biaya investasi • Utilisasi *Fuel* Terminal Pulau Sambu • *Progress* Terintegrasi Terminal Pertamina *Group* • *Update progress offtake agreement* • Safety Pause • AKHLAK Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) • HSSE • Operational Performance • Financial Performance • Investment Cost Realization • Utilization of Pulau Sambu Fuel Terminal • Progress on Terminal Integration within Pertamina Group • Update on Offtake Agreement Progress	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Bayu Prostiyono • Rangga Raditya
8	25 November 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter November 25, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• AKHLAK *moment* • Kinerja operasional • Kinerja keuangan Perseroan • Kinerja investasi Perseroan • Kinerja *working loss* Perseroan • *Progress* atas Rencana Integrasi Terminal Pertamina *Group* • *Update progress offtake agreement* TLPG Tuban • AKHLAK Moment • Operational Performance • Company Financial Performance • Investment Performance • Working Loss Performance • Progress on Terminal Integration within Pertamina Group • Update on TLPG Tuban Offtake Agreement	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Bayu Prostiyono • Rangga Raditya

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of the Joint Meetings

No	Tanggal dan Tempat Rapat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
9	23 Desember 2024, Ruang Rapat Patraqua Kantor Bisnis Sunter December 23, 2024, Patraqua Meeting Room, Sunter Business Office	• *Safety Pause* by HSSE • *Performance* by HSSE • Kinerja operasional • Kinerja keuangan • *Update progress* investasi • Status tindak lanjut temuan internal audit dan eksternal • Kesiapan operasional • Safety Pause by HSSE • HSSE Performance • Operational Performance • Financial Performance • Investment Progress Update • Status of Internal and External Audit Follow-ups • Operational Readiness	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Bayu Prostiyono • Rangga Raditya
10	11 Februari 2025, *hybrid* February 11, 2025, Hybrid Meeting	• *Highlight* laporan kinerja YTD Desember 2024 • Penjelasan pertanyaan Dewan Komisaris dari fungsi *Commercial and Business Optimization* (CBO) • Kinerja operasional • Aspek keuangan • Aspek operasional • Lain-lain • Highlights of YTD December 2024 Performance Report • Response to Questions from Board of Commissioners by Commercial and Business Optimization (CBO) Function • Operational Performance • Financial Aspects • Operational Aspects • Others	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Bayu Prostiyono • Rangga Raditya

Kehadiran Direksi dalam RUPS 2024

Pada tahun 2024, Direksi menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tanggal 19 Juni 2024. Risalah RUPS Tahunan terdapat pada subbab RUPS.

Attendance of the Board of Directors at the 2024 GMS

In 2024, the Board of Directors attended the Annual General Meeting of Shareholders held on June 19, 2024. The minutes of the Annual GMS are presented in the GMS subsection.

Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors Internal Meeting			Rapat Gabungan Joint Meeting			Kehadiran Direksi dalam RUPS Board of Directors attendance in GMS		
	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%
Bayu Prostiyono Direktur Utama President Director*)	11	11	100%	10	10	100%	1	1	100%
Rangga Raditya Direktur Operasi Director of Operations**)	4	4	100%	7	7	100%	-	-	-

*)Menjabat sebagai Direktur sampai 24 Juni 2024 dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak 24 Juni 2024
**) Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 24 Juni 2024
*)Served as Director until June 24, 2024 and appointed as President Director effective from June 24, 2024
**) Appointed as Director of Operations effective from June 24, 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi

Training and/or Competency Development of the Board of Directors

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
Bayu Prostiyono Direktur Utama President Director*)	29 April 2024 April 29, 2024	Kuliah Umum *Business Judgment Rule* – Pembukaan Program Mini Magister Pertamina 2024 Public Lecture on Business Judgment Rule – Opening of Pertamina Mini Master's Program 2024	Pertamina Corporate University
	26 Juli 2024 July 26, 2024	*Upskilling the Company New Employee & Sharing Session Pertamina Energy Terminal*	Pertamina Corporate University
	14 Oktober 2024 October 14, 2024	Mini Magister Hukum Pertamina Pertamina Mini Master of Law Program	Pertamina Corporate University
	2-3 Desember 2024 December 2–3, 2024	*Public Speaking For Executive*	Human Talent Development
Rangga Raditya Direktur Operasi Director of Operations**)	29 April 2024 April 29, 2024	Webinar Bongkar Muat "Meningkatkan Awarenes pekerja dan Mitra Kerja dalam memerangi fraud melalui penerapan *whistle blowing System* (WBS) di lingkungan PTK *group* Loading and Unloading Webinar: "Enhancing Employee and Partner Awareness in Combating Fraud through the Implementation of the Whistleblowing System (WBS) within the PTK Group"	PT Pertamina International Shipping
	7 Juni 2024 June 7, 2024	Webinar Bongkar Muat "Mitigasi *Fraud* melalui Program Aplikasi Transko Boat di Lingkungan PT PPL" Loading and Unloading Webinar: "Fraud Mitigation through the Transko Boat Application Program at PT PPL"	PT Pertamina International Shipping
	2-3 Desember 2024 December 2–3, 2024	*Public Speaking For Executive*	Human Talent Development

*)Menjabat sebagai Direktur sampai 24 Juni 2024 dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak 24 Juni 2024
**) Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 24 Juni 2024
*)Served as Director until June 24, 2024 and appointed as President Director effective from June 24, 2024
**) Appointed as Director of Operations effective from June 24, 2024

Penilaian atas Kinerja Komite-komite di Bawah Direksi

Pada tahun 2024, belum terdapat Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya.

Assessment of Committees under the Board of Directors

In 2024, there were no committees under the Board of Directors, so there is no information available regarding the assessment of the performance of the committees under the Board of Directors and their assessment criteria.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Direksi dan memberikan rekomendasi terkait strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan. Dalam hal ini, pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi diwujudkan dengan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan selalu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi etika jabatan anggota Dewan Komisaris, yakni etika terkait dengan keteladanan, kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang Perseroan, keuntungan pribadi, benturan kepentingan, etika berusaha dan anti korupsi, serta etika setelah berakhirnya masa jabatan. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris.

Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perusahaan, pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Adapun aspek-aspek yang menjadi pokok pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain:
1. Manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sistem pengendalian intern, termasuk efektivitas pelaksanaan audit eksternal maupun audit internal;
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia khusus tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi;
3. Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
4. Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, terkait pengadaan, mutu dan layanan;
5. Kepatuhan pada regulasi yang berlaku maupun perjanjian dengan pihak ketiga;
6. Pelaksanaan dan kepatuhan pada RKAP dan RJPP, proses bisnis Perusahaan, termasuk apabila terjadi penurunan kinerja Perusahaan;
7. Penerapan GCG, termasuk mekanisme pengungkapan dan penyampaian informasi strategis oleh Direksi kepada publik,

The Board of Commissioners is a corporate organ responsible for overseeing the performance of the Board of Directors and providing recommendations related to strategies and policies concerning the management of the Company. The supervisory role is exercised by ensuring that the Company's operations are conducted in compliance with the Articles of Association, resolutions of the GMS, and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners is also accountable for ensuring the implementation of GCG principles across all levels of the organization.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, with a term of 5 (five) years, and may be reappointed for one additional term without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. Each member of the Board of Commissioners is required to adhere to the ethical standards of their position, which include ethics related to leadership, compliance with regulations, transparency and confidentiality of information, company opportunities, personal gain, conflict of interest, business ethics and anti-corruption, as well as ethics after their term ends. In performing its functions, the Board of Commissioners is supported by the Secretariat of the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners.

Duties and Authorities of the Board of Commissioners

In general, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to supervise and provide advice to the Board of Directors regarding the management of the Company. The Board of Commissioners acts in the interest of the company, in line with the purpose and objectives of the Company. The Board of Commissioners oversees company policies, the implementation of RJPP, RKAP, provisions of the Articles of Association, GMS resolutions, and ensures the Company's compliance with applicable regulations.

The main aspects of oversight and advice provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors include:
1. Risk management, information technology systems, internal control systems, including the effectiveness of external and internal audits;
2. Human Resources management, particularly regarding career management within the company, promotion, transfer, and demotion systems and procedures;
3. Accounting and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK);
4. Policies and their implementation, related to procurement, quality, and services;
5. Compliance with applicable regulations and agreements with third parties;
6. Implementation and compliance with RKAP and RJPP, business processes of the Company, including in the event of declining company performance;
7. Implementation of GCG, including disclosure mechanisms and dissemination of strategic information by the Board of

serta hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya;
8. Mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi, misi, perubahan Anggaran Dasar, dan rencana-rencana strategis Perusahaan lainnya, seperti diatur dalam Anggaran Dasar.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Pengusulan calon Komisaris Anak Perusahaan oleh Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pertamina dan disetujui oleh RUPS Pertamina sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.
3. Pengusulan calon Komisaris Perusahaan Patungan yang berasal dari Pertamina, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pertamina dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pengusulan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang berlaku di Pertamina.
4. Pengusulan calon Komisaris Perusahaan Patungan yang berasal dari luar Pertamina oleh Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham, harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pengusulan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang berlaku di Pertamina.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari tenaga yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. Apabila dipandang perlu, RUPS dapat menetapkan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Independen dengan pertimbangan integritas dan kompetensi.
7. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah paling lama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan dengan persetujuan RUPS.
8. Dewan Komisaris berhenti karena:
   a. Masa jabatannya berakhir
   b. Mengundurkan diri
   c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
   d. Meninggal dunia
   e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS
9. RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sebelum habis masa jabatannya, apabila:
   a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
   c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan dan/ atau Negara, atau terlibat dalam tindakan lainnya yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara
   d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
   e. Karena adanya penugasan dari Pertamina di tempat lain bagi Komisaris yang berasal dari Pertamina
   f. Alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS
10. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membentuk organ pendukung Dewan Komisaris paling sedikit:
    a. Sekretaris Dewan Komisaris;

Directors to the public, as well as important matters related to changes in the business environment and its issues;
8. Reviewing, evaluating, and providing recommendations to the Board of Directors regarding the formulation of vision, mission, changes to the Articles of Association, and other strategic plans of the Company, as regulated in the Articles of Association.

Appointment and Termination of the Board of Commissioners

1. The appointment and termination of members of the Board of Commissioners are carried out by the GMS.
2. The nomination of Commissioners for Pertamina Subsidiary as the Shareholder must obtain written approval from the Pertamina Board of Commissioners and be approved by the Pertamina GMS prior to being determined in the Subsidiary GMS.
3. The nomination of Joint Venture Commissioners originating from Pertamina must obtain written approval from the Pertamina Board of Directors and must comply with the regulations and provisions regarding the nomination and appointment of Joint Venture Commissioners applicable in Pertamina.
4. The nomination of Joint Venture Commissioners originating from outside Pertamina by Pertamina as the Shareholder must comply with the regulations and provisions regarding the nomination and appointment of Joint Venture Commissioners applicable in Pertamina.
5. Members of the Board of Commissioners are appointed from individuals who have integrity, dedication, understanding of the Company's management issues, and adequate knowledge in the relevant business field, and can provide sufficient time to perform their duties.
6. If deemed necessary, the GMS may appoint Independent Commissioners considering their integrity and competence.
7. The term of office of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be reelected for 1 (one) additional term with the approval of the GMS.
8. The Board of Commissioners ceases due to:
   a. Expiration of their term of office
   b. Resignation
   c. Loss of Indonesian citizenship
   d. Death
   e. Dismissal based on GMS resolution
9. The GMS may dismiss the Board of Commissioners before the end of their term of office, when:
   a. Are unable to perform their duties properly
   b. No longer meet the requirements and/or violate the provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and regulations
   c. Engage in actions detrimental to the Company and/or the State or are involved in other actions detrimental to the Company and/or the State
   d. Are found guilty by a court decision that has legal force
   e. Are assigned by Pertamina to other locations for Commissioners originating from Pertamina
   f. Other reasons determined by the GMS
10. In assisting the implementation of their duties, the Board of Commissioners is supported by the supporting organ of the Board of Commissioners, consists of:
    a. Secretary of the Board of Commissioners (if necessary)

b. Komite Audit;
c. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
d. Komite Lain, jika diperlukan.

11. Segala biaya yang diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi beban Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan dimana paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

Chater Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki *Charter* Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-004/PET0000/2022-S0 tentang *Board Manual* PT Pertamina Energy Terminal. Charter Dewan Komisaris merupakan salah satu *soft structure* GCG, yang bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris, agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif, dan efisien, dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Adapun *Charter* Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengatur tentang:

1. Ketentuan umum jabatan, termasuk di dalamnya adalah persyaratan penetapan anggota, kedudukan, rangkap jabatan, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pengunduran diri, pengisian anggota yang lowong, honorarium/remunerasi, serta penilaian kinerja;
2. Tugas, kewajiban, hak, wewenang, tanggung jawab serta mekanisme kerja;
3. Pengambilan keputusan, rapat Dewan Komisaris, pelaporan, rencana kerja, dan anggaran;
4. Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris; dan
5. Prinsip dasar tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

Charter Dewan Komisaris dievaluasi dan diperbarui secara berkala, agar selaras dengan kebutuhan bisnis Perseroan maupun perubahan regulasi.

Rapat Dewan Komisaris

Salah satu mekanisme pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah melalui penyelenggaraan rapat. Kebijakan rapat Dewan Komisaris diatur berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-004/PET0000/2022-S0 tentang *Board Manual* PT Pertamina Energy Terminal.

Dewan Komisaris memberikan pandangan, pendapat, rekomendasi, dan pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris. Adapun rapat Dewan Komisaris terdiri atas rapat internal Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi/Manajemen, dan rapat Komite Dewan Komisaris. Tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam *board manual* Perseroan dan *Charter* Dewan Komisaris.

b. Audit Committee
c. Nomination and Remuneration Committee; and
d. One other committee (if necessary) .

11. All expenses required by the Board of Commissioners to carry out their duties and obligations are at the expense of the Company and are clearly stated in the Company Work Plan and Budget.

Composition of the Board of Commissioners

The number of members of the Board of Commissioners is adjusted according to the needs, with a minimum of 1 (one) member of the Board of Commissioners. If there are more than 1 (one) member of the Board of Commissioners, one of them is appointed as the Chairman of the Board or President Commissioner

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners has a Board of Commissioners Charter that serves as a guideline for carrying out its duties and responsibilities. The Board of Commissioners Charter is one of the soft structures of GCG, aimed at explaining the standard pattern of working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, to create professional, transparent, effective, and efficient management of the Company, while upholding integrity and honesty. The Board of Commissioners Charter regulates:

1. General provisions of positions, including requirements for appointing members, positions, concurrent positions, term of office, appointment and dismissal, resignation, filling vacant positions, honorarium/remuneration, and performance appraisal;
2. Duties, obligations, rights, authorities, responsibilities, and working mechanisms;
3. Decision-making, Board of Commissioners meetings, reporting, work plans, and budgets;
4. Supporting bodies of the Board of Commissioners such as the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners; and
5. Basic principles of the working relationship between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Shareholders.

The Board of Commissioners Charter is periodically evaluated and updated to align with the business needs of the Company and regulatory changes.

Board of Commissioners' Meetings

One of the key mechanisms through which the Board of Commissioners carries out its duties is the conduct of meetings. The policies governing Board of Commissioners' meetings are outlined in Decree No. Kpts-004/PET0000/2022-S0 concerning the Board Manual of PT Pertamina Energy Terminal.

During these meetings, the Board of Commissioners provides views, opinions, recommendations, and makes decisions. Meetings of the Board of Commissioners include internal Board meetings, joint meetings with the Board of Directors/Management, and meetings of the Board Committees. The procedures for convening and conducting meetings of the Board of Commissioners are regulated in the the Company Board Manual and the Board of Commissioners Charter.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 1 (satu) kali rapat internal dan 10 (sepuluh) kali rapat gabungan.

Frequency and Attendance Rate of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

In 2024, the Board of Commissioners held a total of 1 (one) internal meeting and 10 (ten) joint meeting.

No	Tanggal dan Tempat Rapat Date and Venue	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	24 Juni 2024 June 24, 2024	• *Highlight* Kinerja 2023 • Kunjungan Kerja 2023 • *Highlight* Penilaian GCG 2022 s.d 2023 • AOI Dewan Komisaris yang belum ditindaklanjuti • Target Dewan Komisaris Kedepannya • 2023 Performance Highlights • 2023 Working Visit • Highlights of GCG Assessment from 2022 to 2023 • Outstanding Board of Commissioners' AOI (Areas of Interest) • Future Targets of the Board of Commissioners	• Bambang Sujito • Nepos MT Pakpahan • Yunius Andrianto

Risalah Rapat Gabungan

Informasi terkait risalah gabungan terdapat pada subbab Direksi.

Minutes of Joint Meetings

Information regarding the minutes of joint meetings is provided in the subsection on the Board of Directors.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS 2024

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tanggal 19 Juni 2024. Risalah RUPS Tahunan terdapat pada subbab RUPS.

Attendance of the Board of Commissioners at the 2024 GMS

In 2024, the Board of Commissioners attended the Annual General Meeting of Shareholders held on June 19, 2024. The minutes of the Annual GMS are presented in the GMS subsection.

Nama dan Jabatan Name and Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting			Rapat Gabungan Joint Meeting			Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Board of Commissioners attendance in GMS		
	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%
Hufron Asrofi Komisaris Utama*) President Commissioner*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bambang Sujito Plt. Komisaris Utama**) Acting President Commissioner**)	1	1	100%	10	10	100%	1	1	100%
Nepos MT Pakpahan Komisaris***) Commissioner***)	1	1	100%	7	7	100%	-	-	-

*)Menjabat sebagai Komisaris Utama sampai 23 Februari 2024
**) Menjabat sebagai Komisaris 23 Februari 2024-26 Juli 2024 dan menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama sejak 26 Juli 2024
***) Menjabat sebagai Komisaris sejak 24 Juni 2025
*)Served as President Commissioner until February 23, 2024
**) Served as Commissioner February 23, 2024-July 26, 2024 and as Acting President Commissioner since July 26, 2024
***) Served as Commissioner since June 24, 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris mengikuti pelatihan sebagai berikut:

Training and/or Competency Development of the Board of Directors

In 2024, the Board of Commissioners participated in the following training:

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
Bambang Sujito (Plt. Komisaris Utama) Acting President Commissioner*)	28-29 Juni 2024 June 28-29, 2024	Pelatihan *Environmental, Social and Governance* (ESG) untuk Dewan Komisaris & Organ Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pertamina International Shipping Environmental, Social and Governance (ESG) Training for the Board of Commissioners & Board Organs within PT Pertamina International Shipping	BPKP
Nepos MT Pakpahan Komisaris Commissioner**)	28-29 Juni 2024 June 28-29, 2024	Pelatihan *Environmental, Social and Governance* (ESG) untuk Dewan Komisaris & Organ Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pertamina International Shipping Environmental, Social and Governance (ESG) Training for the Board of Commissioners & Board Organs within PT Pertamina International Shipping	BPKP
	3-4 Oktober 2024 October 3-4, 2024	*Certified In Audit Committee Practices Review Course Batch* XLIX Certified in Audit Committee Practices Review Course Batch XLIX	IKAI

*) Menjabat sebagai Komisaris 23 Februari 2024-26 Juli 2024 dan menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama sejak 26 Juli 2024
**) Menjabat sebagai Komisaris sejak 24 Juni 2024
*) Served as Commissioner since February 23, 2024-July 26, 2024 and as Acting President Commissioner since July 26, 2024
**) Served as Commissioner since June 24, 2024

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Prosedur dan Mekanisme Penilaian Kinerja

Perseroan telah memiliki pendekatan dan prosedur penilaian terhadap kinerja Direksi dan Dewan dalam pengelolaan Perseroan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan. Perseroan melakukan penilaian secara objektif dengan mengacu pada peraturan dan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh regulasi yang mengatur institusi BUMN, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Performance Assessment Procedure and Mechanism

The Company has established an approach and procedure for assessing the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing the Company. The Company conducts objective assessments based on regulations and legislation issued by the governing body regulating SOEs and the Company's Articles of Association.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan dari PT Pertamina (Persero) yakni Pedoman Nomor A05-002/K20000/2022-S9 tentang Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di *Subholding* dan Anak Perusahaan Pertamina.

Board of Commissioners' Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners refers to the provisions set by PT Pertamina (Persero), specifically Guideline Number A05-002/K20000/2022-S9 concerning the Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina's Subholdings and Subsidiaries.

No.	KPI	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization
1	KPI Internal Internal KPI	20		
1.1	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	10	12x	8,3%
1.2	Penunjukkan Assesor GCG Appointment GCG Assessor	10	1x	0%
2	KPI Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners KPI to Board of Directors	40		
2.1	Pembahasan terhadap Rancangan RJPP/RKAP Response to Draft RJPP/RKAP	10	Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rancangan RJPP/RKAP diterima Maximum of 30 (thirty) working days after the Draft RJPP/RKAP is received	100%
2.2	Keputusan Pemberian Persetujuan/Tanggapan Tertulis atas Surat Direksi Decision on Granting Approval/Written Response to Director's Letter	10	Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Direksi/Dokumen diterima secara lengkap Maximum of 30 (thirty) working days after the Director's Letter/ Documents are received in full	100%

No.	KPI	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization
2.3	Pemberian Nasehat/Saran/Arahan secara Tertulis Provision of Advice/Recommendation/Guidance in Writing	10	3x	100%
2.4	Pemberian Telaah/Rekomendasi secara Tertulis Provision of Review/Recommendation in Writing	10	3x	100%
3	KPI Dewan Komisaris dengan RUPS Board of Commissioners KPI to GMS	40		
3.1	Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Attendance of the Board of Commissioners in the GMS	10	1x	100%
3.2	Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Annual Report on Supervisory Duties	10	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Laporan keuangan Audited diterima Dewan Komisaris No later than 30 (thirty) working days after the Audited Financial Report is received by the Board of Commissioners	100%
3.3	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebelum pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Proposal for the Appointment of Public Accounting Firm before the GMS for the Approval of the Annual Report	10	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum RUPS tahunan berlangsung No later than 7 (seven) working days before the annual GMS takes place	100%
3.4	Kontribusi Pemenuhan Area of Improvement Dewan Komisaris dalam Penilaian GCG Contribution to Fulfillment of the Area of Improvement for the Board of Commissioners in GCG Assessment	10	Minimal memenuhi 50% dari Total Area of Improvement yang harus dipenuhi Minimum compliance with 50% of the Total Area of Improvement that must be fulfilled	100%
Total		**100**		**80,83%**

Penilaian Individu Dewan Komisaris

Individual Performance Evaluation of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Rata-rata Skor ABS Average ABS Score	Pencapaian KPI KPI Achievement	Komposisi Nilai Kerja Work Value Composition	Predikat Kinerja Performance Rating
1	Bambang Sujito	Plt. Komisaris Utama Acting President Commissioner	4,67	100%	96,70	*High*
2	Nepos MT Pakpahan	Komisaris Commissioner	4,67	100%	96,70	*High*

Penilaian Kinerja Direksi

Hasil Penilaian Kinerja Direksi sesuai KPI Tahun 2024.

Board of Directors' Performance Assessment

The results of the Board of Directors' performance assessment are in line with the KPI for the year 2024.

Kesepakatan Kinerja *Subholding Integrated Marine Logistics* Tahun : 2024 Posisi : Direktur Utama Pertamina Energy Terminal

Performance Agreement of Integrated Marine Logistics Subholding Year: 2024 Position: President Director of Pertamina Energy Terminal

No	KPI	Satuan Unit	Peralatan Tools	Bobot Weight		Bobot Weight	Realisasi TW IV 2024 Q4 2024 Realization			
				Sub	Total	Sub	Target	Real	Perf.	%WP
A.	*Financial*				0		0			
1	EBITDA PET	US$ Juta	*Maximum*	9	35	9	39,26	28,92	↓ 74%	6,63

No	KPI	Satuan Unit	Peralatan Tools	Bobot Weight		Bobot Weight	Realisasi TW IV 2024 Q4 2024 Realization			
				Sub	Total	Sub	Target	Real	Perf.	%WP
2	*Net Profit* PET	US$ Juta	*Maximum*	10		10	4,80	8,28	↑ 110%	11,00
3	*Gross Profit* PET	US$ Juta	*Maximum*	7	35	7	25,79	13,34	↓ 52%	3,62
4	ROIC > WACC IML	%	*Maximum*	9		9	4,27	11,64	↑ 110%	9,90
B.	*Customer Focus*				0		0			
1	*Customer Satisfaction Index* PET	*Likert Scale*	*Maximum*	4		4	4,00	4,00	↑ 100%	4,00
2	SLA *Achievement* PET	%	*Maximum*	5		5	95,00	103,35	↑ 109%	5,44
3	Optimalisasi Aset Terminal PET	%	*Maximum*	3	15	3	100,00	110,00	↑ 110%	3,30
4	*Revenue Non-Captive Market* PET	US$ Juta	*Maximum*	3		3	14,22	13,35	↓ 94%	2,82
C.	*Internal Process*			0			0			
1	Implementasi ESG – IML	%	*Maximum*	4		4	100,00	110,00	↑ 110%	4,40
2	Peningkatan Budaya HSEE IML Enhancement of HSSE IML Culture	%	*Maximum*	5		5	100,00	108,00	↑ 108%	5,40
3	Realisasi Investasi PET PET Investment Realization	%	*Maximum*	5		5	100,00	103,48	↑ 103%	5,17
4	*Implementasi Asset Integrity Management* IML Implementation of Asset Integrity Management IML	%	*Maximum*	5	35	5	100,00	105,66	↑ 106%	5,28
5	*Integrated Port* Time PET	%	*Maximum*	6		6	100,00	110,00	↑ 110%	6,60
6	*PROPER Achievement* PET	%	*Maximum*	6		6	100,00	110,00	↑ 110%	6,60
7	*Milestone Achievement* – TLPG Tuban PET	%	*Maximum*	4		4	100,00	110,00	↑ 110%	4,40
D.	*Learning & Growth*									
1	*Integrated Green Terminal*	%	*Maximum*	3		3	100,00	100,00	↑ 100%	3,00
2	*International Market Expansion*	%	*Maximum*	8	15	8	100,00	110,00	↑ 110%	8,80
3	*Program Strategic Initiatives*	%	*Maximum*	4		4	100,00	110,00	↑ 110%	4,40
										100,76
E.	Boundary (Reward & Consequences)									3,50
1	Pengelolaan Risiko Risk Management	%					100,00	100,00		000

No	KPI	Satuan Unit	Peralatan Tools	Bobot Weight		Bobot Weight	Realisasi TW IV 2024 Q4 2024 Realization			
				Sub	Total	Sub	Target	Real	Perf.	%WP
2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal & Eksternal Follow up on the Recommendation from Internal and External Audit Results	%					100,00	100,00		0,00
3	Optimalisasi Pelaksanaan Sinergi Pertamina Group Optimization of Pertamina Group Synergy Implementation	%					100,00	108,40		2,50
4	GCG *Implementation Compliance*	%					94,50	100,00		1,00
5	*Number of Accident* (NoA)	*Event*					0,00	0,00		0,00
6	*Cost Optimization*	USD JUTA USD Million					15,00	62,36		0,00
Total Performance										104,26

Penilaian Individu Direksi

Individual Performance Evaluation of the Board of Directors

No	Nama Name	Jabatan Position	Rata-rata *Score* ABS Average ABS Score	Pencapaian KPI KPI Achievement	Komposisi Nilai kerja Work Value Composition	*Rating* Kinerja Performance Rating
1	Bayu Prostiyono	Direktur Utama President Director	3,62	100,97%	86,69	6
2	Rangga Raditya	Direktur Operasi DIrector of Operations	4,23	101,20%	92,90	6

Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan/tindakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, surat, dan alat bukti lain yang terkait dengan pengurusan Perusahaan serta pemeriksaan terhadap keuangan Perusahaan; dan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai

Description of the Board of Commissioners' Duties

The Board of Commissioners carries out the following tasks:

1. Conducting supervision over the policies/actions of the Board of Directors in managing the Company, including examining the books, letters, and other evidence related to the Company's management, as well as examining the Company's finances.

2. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company, including providing advice on the implementation of the Company's long-term plans, work plans and budgets, resolutions of the GMS, and relevant laws and regulations.

The Board of Commissioners has the following obligations:

1. Providing opinions and recommendations to the GMS on the Company's long-term plans, annual work plans and budgets, and other plans prepared by the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association;

2. Monitoring the Company's activities and offering opinions and recommendations to the GMS on any matters deemed

setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
3. Melaporkan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Membuat risalah/notula rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
6. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain;
7. Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
8. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
9. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan/atau keputusan RUPS; dan
11. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk Perusahaan.

Dewan Komisaris memiliki hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan kepada Direksi;
2. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
3. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
4. Memeriksa pembukuan, surat, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengurusan Perusahaan serta memeriksa keuangan Perusahaan termasuk memeriksa surat berharga yang terkait dengan Perusahaan;
5. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
7. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau rekomendasi tertulis atas tindakan Direksi sesuai ketentuan dan kewenangan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
9. Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;

significant to the Company's management;
3. Reporting to the GMS in the event of any indications of declining Company performance;
4. Reviewing and examining periodic reports and the annual report prepared by the Board of Directors and signing the annual report;
5. Preparing minutes of meetings of the Board of Commissioners and retaining copies thereof;
6. Reporting share ownership by themselves and/or their immediate family in the Company and in other companies;
7. Providing a report to the GMS on the supervisory duties carried out during the previous fiscal year;
8. Monitoring and ensuring that GCG is implemented effectively and continuously;
9. Evaluating the performance of the External Auditor in accordance with applicable regulations and standards;
10. Carrying out other supervisory and advisory duties as long as they are not in conflict with prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and/or GMS resolutions; and
11. Complying with other applicable provisions set by the parent company.

Rights of the Board of Commissioners:
1. Receiving honorarium and allowances/ facilities, the amount of which is determined by the GMS in accordance with applicable laws and regulations; and
2. Resigning from their position by submitting a written notice to the Company no later than 30 (thirty) calendar days prior to the effective date of resignation.

The Board of Commissioners has the following authorities:
1. Requesting and inquiring about any matters related to the management of the Company from the Board of Directors;
2. Being informed of all policies and actions that have been or will be carried out by the Board of Directors;
3. Accessing Company premises, buildings, offices, or other locations used or controlled by the Company;
4. Examining books, correspondence, and other documents related to Company management, as well as reviewing the Company's financials and related securities;
5. Assuming management authority under specific circumstances and for a certain period in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations;
6. Requesting the attendance of Directors and/or Company officers under the Directors' supervision at Board of Commissioners' meetings;
7. Attending Board of Directors' meetings and providing input on the matters discussed;
8. Issuing written approvals or recommendations on Board of Directors' actions in accordance with the Articles of Association;
9. Proposing candidates for the Board of Directors to the Shareholders in accordance with Company policy and selection criteria;

10. Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham;
11. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;
12. Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi jika anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberhentian dimaksud harus disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
14. Membentuk Komite Audit;
15. Membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
16. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
17. Mempekerjakan tenaga ahli baik yang bekerja sendiri-sendiri maupun dalam kelompok untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan; dan
18. Melaksanakan kewajiban pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan/atau keputusan RUPS.

10. Evaluating the performance of the Board of Directors and reporting the results to the Shareholders;
11. Proposing remuneration for the Board of Directors in line with performance evaluations and regulatory requirements;
12. Temporarily suspending members of the Board of Directors if they act in violation of the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, provided that such suspension is supported by legally justified grounds in accordance with prevailing laws and regulations;
13. Approving or assisting the Board of Directors in performing certain legal actions;
14. Establishing an Audit Committee;
15. Forming other committees, aside from the Audit Committee, if necessary and aligned with the Company's capacity;
16. Appointing and dismissing the Secretary to the Board of Commissioners when deemed necessary;
17. Engaging experts, either individually or in groups, for a limited duration at the Company's expense; and
18. Performing other supervisory duties, as long as they do not conflict with prevailing laws, the Company's Articles of Association, or GMS resolutions.



Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary

Perseroan telah menunjuk seorang Sekretaris Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga berperan memastikan pelaksanaan seluruh aspek kepatuhan Dewan Komisaris terhadap prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *best practices* yang berlaku umum.

The Company has appointed a Secretary to the Board of Commissioners to support the implementation of the functions and effectiveness of the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners reports directly to the Board of Commissioners. She is responsible for the administrative and secretarial activities within the scope of the Board of Commissioners' supervisory duties. The Secretary to the Board of Commissioners also ensures the compliance of the Board of Commissioners with GCG principles in accordance with applicable laws and generally accepted best practices.



Vega Pita

Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
41 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
- S2-Master *of Global Media Communication*, The University of Melbourne/Australia (2016).
- S1 Universitas Indonesia, Sarjana Ilmu Sosial (Komunikasi) (2001-2005).

Dasar hukum pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-007/DK.Perseroan/2024-S0 tanggal 29 Oktober 2024

Pengalaman Kerja
PT. Pertamina (Persero)
- *Assistant Customer Relation / Assistant External Relaton* (*Marketng Operaton Region* II Sumbagsel) (2010- 2011)
- *Officer Contact Pertamina* (Media – *Corporate Communicaton*) (2011 - 2014)
- *Sponsorship Officer (Corporate Brand – Corporate Communication)* (2016- 2017)
- *Senior Officer Creative & Media Advertising (Corporate Brand - Corporate Communication)* (2017- 2020)
- *Senior Analyst Brand Strategy Development / Senior Officer* II *Corporate Brand (Corporate Brand – Corporate Communication)* (2020- 2021)
- *Corporate Brand Manager Corporate Brand – Corporate Communication*) (Nov 2021- Jul 2023)

PT. Pertamina International Shipping
Manager of Corporate Communications & Relations (Corporate Secretary) (Juli 2023- Saat ini)

Jabatan Rangkap
Manager CorCom & *Relation* PT Pertamina International Shipping.

Hubungan Afiliasi
Tidak Ada

Citizenship
Indonesia

Domicile
Jakarta

Age
41 Years old

Educational Background
- Master of Global Media Communication, The University of Melbourne/Australia (2016).
- Bachelor's Degree From University of Indonesia, Social Sciences (Communication) (2001-2005).

Decree of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-007/DK.Perseroan/2024-S0 dated October 29, 2024.

Career Experience
PT. Pertamina (Persero)
- Assistant Customer Relation / Assistant External Relaton (Marketing Operaton Region II Sumbagsel) (2010- 2011)
- Officer Contact Pertamina (Media – Corporate Communicaton) (2011 - 2014)
- Sponsorship Officer (Corporate Brand – Corporate Communication) (2016- 2017)
- Senior Officer Creative & Media Advertising (Corporate Brand - Corporate Communication) (2017- 2020)
- Senior Analyst Brand Strategy Development / Senior Officer II Corporate Brand (Corporate Brand – Corporate Communication) (2020- 2021)
- Corporate Brand Manager Corporate Brand – Corporate Communication) (Nov 2021- Jul 2023)

PT. Pertamina International Shipping
Manager of Corporate Communications & Relations (Corporate Secretary) (July 2023- Present)

Concurrent Position
Manager of Corporate Communications & Relations, PT Pertamina International Shipping

Affiliate Relation
None

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) sekaligus membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta mengadministrasikan seluruh dokumen Dewan Komisaris;
3. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, serta rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
4. Menjaga pemenuhan aspek GCG dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Dewan Komisaris;
5. Mengatur perjalanan dinas untuk Dewan Komisaris, meliputi surat menyurat dan dokumen perjalanan, pengaturan transportasi dan akomodasi serta penyelesaian administrasi seluruh pengeluaran yang terjadi selama perjalanan dinas.

Board of Commissioners Secretary

The Board of Commissioners Secretary carries out the following tasks:

1. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets), and creating minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the company's Articles of Association;
2. Gathering relevant materials and information for the execution of the Board of Commissioners' tasks and administering all Board of Commissioners documents;
3. Drafting the Work Plan and Budget, as well as draft reports of the Board of Commissioners;
4. Ensuring compliance with GCG aspects in the execution of all Board of Commissioners' activities;
5. Arranging business trips for the Board of Commissioners, including correspondence and travel documents, transportation and accommodation arrangements, as well as completing administrative tasks for all expenses incurred during the business trip.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki latar belakang bidang pendidikan formal maupun pengalaman kerja yang beragam, sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain. Melalui kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memiliki keberagaman sudut pandang, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan dapat memitigasi risiko. Keberagaman komposisi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap aspek operasional dan bisnis Perseroan, serta meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkup Perseroan.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors have diverse backgrounds in formal education and work experience, enabling them to complement each other. Through the policy of diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company benefits from diverse perspectives, knowledge, and experience, facilitating objective decision-making and risk mitigation. The diversity in composition is expected to provide added value to the operational and business aspects of the Company, as well as enhance the quality of corporate governance implementation within the Company's scope.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi:

Diversity in Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification & Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**				
Bambang Sujito	• Plt. Komisaris Utama (26 Juli 2024 - saat ini) • Komisaris (23 Februari 2024 - 26 Juli 2024) • Acting President Commissioner (July 26, 2024 - present) • Commissioner (February 23, 2024- July 26, 2024)	• Magister Hukum Sumber Daya Alam, Universitas Indonesia (2014) • Sarjana Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada (1996) • Master of Laws in Natural Resource Law, University of Indonesia (2014) • Bachelor of Civil Law, University of Gadjah Mada (1996)	56 Tahun 56 Years Old	Laki-Laki Male
Nepos MT Pakpahan	• Komisaris (24 Juni 2025 - saat ini) • Commissioner (June 24, 2024 - present)	• Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang (1989) • Magister (S2) Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2001). • Bachelor's degree in Mechanical Engineering from University of Brawijaya, Malang (1989). • Master's degree in Engineering from University of Jenderal Soedirman, Purwokerto (2001).	62 Tahun 62 Years old	Laki-Laki Male

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification & Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Hufron Asrofi	• Komisaris (26 Agustus 2021- 23 Februari 2024) • Commissioner (August 26, 2021- February 23, 2024)	• Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" (2000) • Sarjana Hukum Keperdataan, Universitas Islam Jakarta (1985) • Master of Law, College of Law "IBLAM" (2000) • Bachelor of Civil Law, Jakarta Islamic University (1985)	63 Tahun 63 Years Old	Laki-Laki Male
Direksi **Board of Directors**				
Bayu Prostiyono	• Direktur Utama (24 Juni 2024 - saat ini) • Direktur (03 Juli 2023 - 24 Juni 2024) • President Director (June 24, 2024 - present) • Director (July 3, 2023- June 24, 2024)	• Magister Teknik Universitas Indonesia (2009) • Sarjana Teknik institut Teknologi Sepuluh November (1996) • Master of Engineering, University of Indonesia (1996) • Bachelor of Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1996)	48 Tahun 48 Years Old	Laki-Laki Male
Rangga Raditya	• Direktur Operasi (24 Juni 2024 - saat ini) • Director of Operation (June 24, 2024 - present)	• Institut Teknologi Bandung/Bandung S1-Teknik Elektro Universitas Indonesia/Jakarta S2-Teknik Industri • Rotterdam *School of Management*, Erasmus University/Belanda S2-Business Administration • Bandung Institute of Technology/Bandung, Bachelor's degree in Electrical Engineering • University of Indonesia/Jakarta, Master's degree in Industrial Engineering, • Rotterdam School of Management, Erasmus University/Netherland, Master's degree in Business Administration.	46 Tahun 46 Years old	Laki-Laki Male

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan dan implementasi proses-proses bisnis. Kriteria penilaian untuk Komite Audit dan Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko mengacu pada Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di *Subholding* dan Anak Perusahaan Pertamina. Hasil penilaian kinerja Komite Audit dan Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and Investment Planning & Risk Management Committee in carrying out its duties and responsibilities to oversee the Company's management and the implementation of business processes. The performance assessment criteria for the Audit Committee and Investment Planning & Risk Management Committee refer to the Performance Assessment Guidelines for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Sub-Holding and Pertamina's Subsidiary Companies. The performance assessment result of the Audit Committee and Investment Planning & Risk Management Committee are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Rata-rata *Score* ABS Average ABS Score	Pencapaian KPI KPI Achievement	Komposisi Nilai kerja Work Value Composition	Rating Kinerja Performance Rating
1	Mohammad Irsyad	Komite Audit Audit Committee	4,58	100%	95,80	*High*
2	Naufal Noor Rochman*)	Komite Audit Audit Committee	-	-	-	-
3	Fahrur Roezi	Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Investment Planning & Risk Management Committee	4,50	100%	95,00	*High*
4	Yunius Andrianto	Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Investment Planning & Risk Management Committee	4,58	100%	95,80	*High*

*)menjabat sebagai Komite Audit sejak 1 november 2024
*)menjabat sebagai Komite Audit sejak 1 november 2024

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

Prosedur Penetapan Calon Direksi/Komisaris Cucu Perusahaan - *Top Down Holding*
Procedure for Determining Candidate of Board of Directors/Commissioners of Second Tier Subsidiary Companies - Top Down Holding

Persetujuan Direksi Holding Approval by Holding Director	**Persetujuan Kementerian BUMN** Approval by Ministry of SOEs	**RUPS/KPS3** GMS/KPS3	**Pengukuhan dan Updating Data** Data Finalization and Update
Pemenuhan persyaratan kandidat: • *Assessment*: SLC/*Qualified* (hanya untuk Kandidat Direksi) • *Track Record*: IR & IA • *Digital Footprint* • CISI • LHKPN **Fulfillment of Candidate Requirements:** • Assessment: SLC/Qualified (hanya untuk Kandidat Direksi) • Track Record: IR & IA • Digital Footprint • CISI • LHKPN	• Disampaikan dalam sesi konsultasi dengan Kementerian BUMN • Dalam hal Kementerian BUMN berpendapat lain, maka dilanjutkan prosesnya sesuai Persetujuan Kementerian BUMN • Presented in a consultation session with the Ministry of SOEs • In the event the Ministry of SOEs holds a different opinion, the process will continue in accordance with the Ministry of SOEs' approval.	• Proses RUPS dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan • The GMS process can be carried out in stages or not, referring to the Company's Articles of Association	• Pengukuhan sesuai ketentuan yang berlaku • Updating data pada Portal BUMN, Master Data GTS Holding, dan System ERP Perusahaan • Finalization in accordance with applicable regulations • Updating data on the SOEs Portal, GTS Holding Master Data, and the Company's ERP System
PIC: HC Holding		**PIC: Compliance H/SH**	**PIC: HC Subholding**



Prosedur Penetapan Calon Direksi/Komisaris Cucu Perusahaan - *Bottop Up*

Procedure for Determining Candidate of Board of Directors/Commissioners of Second Tier Subsidiary Companies - Bottom Up

***Sourcing* & Seleksi Kandidat** Sourcing and Selection of Candidate	**Persetujuan Direksi Subholding** Approval of Subholding Directors	**Persetujuan/ Rekomendasi Dewan Komisaris Subholding** Approval/ Recommendation from the Subholding Board of Commissioners	**Persetujuan Direksi Holding** Approval of Holding Directors	**Persetujuan Kementerian BUMN** Approval of Ministry of SOEs	**RUPS/KPS3** GMS/KPS3	**Pengukuhan dan *Updating date*** Finalization and Data Update
• *Talent review meeting* • Penetapan Kandidat FPT • Pemenuhan Persyaratan Kandidat FPT • Pelaksanaan *Fit* & *Proper Test*	• DPKP *Subholding*	• *Approval* Dewan Komisaris (Dekom) dalam hal diatur oleh Anggaran Dasar Perusahaan • Dalam hal Dekom berpendapat lain, maka dilanjutkan prosesnya sesuai Rekomendasi Dekom	• Disampaikan melalui Surat dari Direktur yang membidangin SDM kepada SVP Human Capital Management • Hanya dapat diproses jika persyaratan lengkap dan terpenuhi, diantarannya: 1. Kelengkapan data Kandidat: • *Assessment: SLC/ Qualified* (Hanya untuk Kandidat Direksi) • *Track Record*: IR & IA • *Digital Footprint* • CISI • LHKPN • Justifikasi pengusulan • Surat Rekomendasi Dewan Komisaris • Profil Cucu Perusahaan yang diajukan • Dalam hal Direksi *Holding* berpendapat lain, maka dilanjutkan prosesnya sesuai Persetujuan Direksi *Holding*	melalui sesi Konsultan dengan Kementerian BUMNDalam hal Kementerian BUMN berpendapat lain, maka dilanjutkan prosesnya sesuai persetujuan Kementerian Communicated through a Consultant Session with the Ministry of SOEs. In the event of a differing opinion by the Ministry of SOEs, the process proceeds according to the approval of the Ministry of SOEs	• Proses RUPS/KPS3 dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan • The process of GMS or KPS3 can be conducted in a hierarchical manner or not, in accordance with the provisions set forth in the Company's Articles	• Pengukuhan sesuai ketentuan yang berlaku • Updating data pada portal BUMN, Master Data GTS Holding, dan System ERP • Perusahaan • Finalization in accordance with applicable regulations • Updating data on the SOEs portal, GTS Holding Master Data, and the Company's ERP System
• Talent Review Meeting • Nomination of FPT Candidates • Fulfillment of FPT Candidate Requirements • Conducting Fit & Proper Test		• Approval by the Board of Commissioners as regulated by the Company's Articles of Association. • In the event of a differing opinion by the Board of Commissioners, the process proceeds according to the Board of Commissioners' recommendation.	• The following requirements must be fulfilled for the process to be initiated, conveyed through a letter from the Director in charge of Human Resources to the Senior Vice President of Human Capital Management: 1. Completeness of Candidate Data: • Assessment: SLC/ Qualified (Only for Director Candidates): • Track Record: IR & IA • Digital Footprint • CISI • LHKPN • Justification for the nomination • Letter of Recommendation from the Board of Commissioners • Profile of the proposed Subsidiary Company • In the event of a differing opinion by the Holding Directorate, the process proceeds according to the Holding Directorate's Approval.			

Pemenuhan persyaratan kandidat FPT:
- **Assessment: SLC/Qualified (hanya untuk Kandidat Direksi)**
- **Track Record: IR & IA**
- **Digital Footprint**
- **CISI**
- **LHKPN**

Fulfillment of FPT candidate requirements:
- Assessment: SLC/ Qualified (only for Director Candidates)
- Track Record: IR & IA
- Digital Footprints
- CISI
- LHKPN

PIC: Compliance H/SH	PIC: HC Subholding	PIC: Compliance H/SH	vPIC: HC Subholding

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan diusulkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

The remuneration of the Company's Board of Commissioners is proposed by the Board of Directors after receiving recommendations from the Board of Commissioners, to be determined and approved by the GMS.

Ketentuan dan perhitungan remunerasi Dewan Komisaris Anak Perusahaan ditetapkan berdasarkan Pedoman yang berlaku di Pertamina.

The provisions and calculation of remuneration for the Subsidiary's Board of Commissioners are determined based on the applicable guidelines in Pertamina.

Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi Perseroan diusulkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Remuneration of the Board of Directors

The remuneration of the Company's Board of Directors is proposed by the Board of Directors after receiving recommendations from the Board of Commissioners, to be determined and approved by the GMS.

Ketentuan dan dasar perhitungan remunerasi Direksi Anak Perusahaan ditetapkan berdasarkan Pedoman yang berlaku di Pertamina.

The provisions and basis for calculating the remuneration of the Subsidiary's Board of Directors are determined based on the prevailing guidelines in Pertamina.

Dalam pemberian remunerasi Perseroan berpedoman pada Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler PT Peteka Karya Tirta sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 5 Dan 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Patraqua dan telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 19 Juni 2024 RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemegang Saham/perwakilan.

In granting remuneration, the Company follows the guidelines stated in the Circular Shareholders' Decision of PT Peteka Karya Tirta, in accordance with Article 10, Paragraphs 5 and 6 of the Company's Articles of Association regarding the Determination of Performance Awards for the 2023 Fiscal Year and Remuneration for the 2024 Fiscal Year of the Directors and Board of Commissioners of the Company, dated June 19, 2024 held at the Patraqua Meeting Room and notarized under Notarial Deed No. 7 dated June 19 2024, the AGMS for Fiscal Year 2023 was attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Shareholders/their representatives.

Tunjangan/Fasilitas Allowances/Facilities	Direktur The Board of Directors	Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Gaji/Honorarium	100%	45% dari Gaji Direktur 45% of Director Salary
Tunjangan Perumahan* diberikan apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan Direksi Housing Allowance* given if the company does not provide facilities for the Board of Directors	Besaran Tunjangan Perumahan termasuk biaya utilitas) bagi anggota Direksi diberikan secara bulanan sebesar 40% dari gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000. The amount of Housing Allowance (including utility costs) for members of the Board of Directors is given monthly at 40% of salary, with the maximum provision is Rp27,500,000	
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance		20% dari Honorarium 20% of honorarium.
THRK Religious Holiday Allowance	1 x Gaji 1x Salary	1 x Honorarium
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Maksimum 25% dari gaji dalam satu tahun. Maximum 25% of one year salary	Maksimum 25% dari honorarium dalam satu tahun. Maximum 25% of one year honorarium.

Aktual Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi yang diberikan Perseroan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2024 adalah sebesar Rp3.274.618.332.

Actual Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

The actual remuneration given by the Company to the Board of Directors and Board of Commissioners serving during the year 2024 amounted to Rp3,274,618,332.

	Remunerasi Remuneration
Direktur Utama Board of Director	Rp1.160.389.200 per tahun/annually
Direktur Operasi Director of Operations	Rp986.330.820 per tahun/annually
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Rp563.949.156 per tahun/annually
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Rp563.949.156 per tahun/annually

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris. Komite Audit mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, terutama dalam kaitannya dengan aspek audit. Komite Audit bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit berperan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam hal Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang, Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komite Audit bertugas secara kompeten, objektif, dan independent. Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas kewajaran dan keandalan informasi dan laporan keuangan serta operasional yang akan dikeluarkan Perusahaan termasuk dan tidak terbatas kepada laporan keuangan interim, laporan keuangan tahunan, anggaran dan proyek, serta laporan-laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan Internal Perusahaan;
4. Melakukan kajian berkala untuk mengevaluasi kekinian dan efektivitas kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan terkait aspek operasional dan investasi;
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners that supports the supervisory function, especially concerning audit aspects. The Audit Committee works collectively, independently in carrying out tasks and reporting, and reports directly to the Board of Commissioners. The Audit Committee plays a role in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditor's tasks.

Tasks and Responsibilities of the Audit Committee

In the event that the Audit Committee consists of only one (1) member, the Audit Committee performs its duties collectively in supporting the Board of Commissioners in overseeing the implementation of sound corporate management in accordance with GCG principles. The Audit Committee carries out its duties in a competent, objective, and independent manner. The Audit Committee functions to assist the Board of Commissioners in performing the following responsibilities:

1. Reviewing the reasonableness and reliability of information and financial reports to be issued by PET, including interim financial statements, annual financial statements, budgets and projects, and other reports related to financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations related to the recording, bookkeeping, and reporting of the Company's activities;
3. Reviewing compliance with the Company's internal policies and procedures;
4. Conducting periodic assessments to evaluate the relevance and effectiveness of established policies/guidelines related to operational and investment aspects.
5. Providing independent opinions in case of differences of opinion between the Board of Directors and the Public Accountant regarding the services provided;
6. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants based on independence, scope of assignment, and remuneration;

7. Melakukan penelaahan atas Piagam Komite, Rencana Kerja, Kualitas, Kepatuhan, dan Independensi pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
8. Melakukan penelaahan efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas Akuntan Publik;
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
11. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan Perusahaan untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dievaluasi/ditindaklanjuti oleh DIREKSI Perusahaan;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
13. Mengidentifikasi dan melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
14. Mematuhi ketentuan-ketentuan tentang Komite Audit yang dimuat dalam Piagam Komite Perusahaan dan di atur dari waktu ke waktu.

Piagam, Komposisi, dan Independensi Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini mengatur struktur komite, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, frekuensi rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas Komite Audit. Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Keanggotaan Komite Audit terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perusahaan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perusahaan. Anggota independen Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga, baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, maupun Direksi, serta telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit sesuai ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

7. Reviewing the Committee Charter, work plan, quality, compliance, and independence of the internal audit implementation by the Internal Auditor, and overseeing the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on internal audit findings.
8. Reviewing the effectiveness of the Company's internal control systems;
9. Reviewing the independence and objectivity of the Public Accountant;
10. Reviewing the adequacy of the audit performed by the Public Accountant to ensure that all significant risks have been properly considered;
11. Reviewing complaints related to the Company for reporting to the Board of Commissioners and for further evaluation/ follow-up by the Company's Board of Directors;
12. Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company;
13. Identifying and reporting matters that require the attention of the Board of Commissioners; and
14. Complying with the provisions related to the Audit Committee as outlined in the Company's Audit Committee Charter and as amended from time to time.

Charter, Composition, and Independence of the Audit Committee

The Audit Committee has a Charter that serves as a guideline in carrying out its duties and responsibilities. This Charter regulates the committee's structure, membership requirements, duties, responsibilities, and authorities, meeting frequency, reporting responsibilities, and the tenure of the Audit Committee. The tenure and term of office for Audit Committee members are for 3 (three) years and can be extended for up to 2 (two) years, with a total tenure of up to five years, without prejudice to the Commissioner's right to dismiss them at any time.

The Audit Committee consists of one (1) chairperson and up to three (3) members. The Chairman of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners. The members of the Audit Committee are professionals who are not employees of the Company and have no financial affiliation with the Company. Independent members of the Audit Committee must not have financial and/or familial relationships with the majority shareholders, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors. They must also meet the membership requirements of the Audit Committee in accordance with Article 133 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Governance and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Mohammad Irsyad

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi

Usia
41 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
S1-Ilmu Hukum, Universitas Lampung/Lampung (2005)

Dasar hukum pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-005/DK.Perseroan/2024-S0 tanggal 29 Juli 2024

Pengalaman Kerja
- *Chief Internal Audit* PT Pertamina Retail (2017 - 2018)
- *Senior Auditor Investigation* Audit PT Pertamina (Persero) (2018 - 2022)
- *Chief Internal Audit* PT Pertamina Lubricants (2020 - 2022)
- *Department Head, Strategic Planning and Business Development* Internal Audit- PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2023 - 2024)
- *Manager Shipping Internal Audit*- PT Pertamina International *Shipping* (2025 - present)

Jabatan Rangkap
Manager Shipping IA- PT Pertamina International Shipping

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Citizenship
Indonesia

Domicile
Bekasi

Age
41 Years Old

Educational Background
Bachelor's Degree in Law, University of Lampung/Lampung (2005)

Decree of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-005/DK.Perseroan/2024-S0 dated July 29, 2024.

Career Experience
- *Chief* Internal Audit PT Pertamina Retail (2017 - 2018)
- *Senior Auditor Investigation* Audit PT Pertamina (Persero) (2018 - 2022)
- *Chief* Internal Audit PT Pertamina Lubricants (2020 - 2022)
- *Department Head, Strategic Planning and Business Development* Internal Audit- PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2023 - 2024)
- *Manager Shipping* Internal Audit- PT Pertamina International *Shipping* (2025 - present)

Concurrent Position
Manager Shipping IA- PT Pertamina International Shipping

Affiliate Relation
None



Naufal Noor Rochman

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Depok

Usia
46 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
- S2-*Oil & Gas Engineering*, University of Western Australia/Australia (2008).
- Sarjana Teknik Geologi Universitas Padjajaran (1998-2003).

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-006/DK.Perseroan/2024-S0 Tanggal 25 Oktober 2024

Pengalaman Kerja
- Kepala Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan (2013 - 2015)
- Kepala Seksi Penyiapan Program Pengembangan (2015 - 2017)
- Kepala Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu (2016 - 2018)
- Kasubdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri (2018 – 2020)
- Koordinator Pokja Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri (2020 - 2024)
- Koordinator Pokja Pengembangan Investasi Migas (2024 – sekarang)

Jabatan Rangkap
Koordinator Pokja Pengembangan Investasi Migas

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Citizenship
Indonesia

Domicile
Depok

Age
46 Years old

Educational Background
- Master's Degree in Oil & Gas Engineering, University of Western Australia/Australia (2008).
- Bachelor's Degree in Geological Engineering, University of Padjajaran (1998-2003).

Decree of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-006/DK.Perseroan/2024-S0 dated October 25, 2024.

Career Experience
- Section Head of Utilization Program Preparation (2013 – 2015)
- Section Head of Development Program Preparation (2015 – 2017)
- Section Head of Upstream Worker and General Safety (2016 – 2018)
- Deputy Director of Domestic Potential Empowerment (2018 – 2020)
- Coordinator of the Domestic Potential Empowerment Working Group (2020 – 2024)
- Coordinator of the Oil & Gas Investment Development Working Group (2024 – Present)

Concurrent Position
Coordinator of the Oil & Gas Investment Development Working Group

Affiliate Relation
None

Pernyataan Independensi Komite Audit

Komite Audit PT Pertamina Energy Terminal melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Kualifikasi independesi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Statement of Independence of the Audit Committee

The Audit Committee of PT Pertamina Energy Terminal performs its roles and duties professionally and independently, without interference from any party that violates the applicable laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of the Audit Committee members must fulfill the following criteria:

Aspek Independensi Independence Criteria	Mohammad Irsyad	Naufal Noor Rochman
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person from Public Accounting Firms, Legal Consultant Offices, Public Appraisal Services Firms, or other parties providing assurance, non-assurance, appraisal, and/or consulting services to the Company in the last 6 (six) months.	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. Not a person who worked for or had authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners.	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi , atau Pemegang Saham Utama Perseroan. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓

Pelatihan Dan/Atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Training and/or Competency Development of the Audit Committee

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
Mohammad Irsyad Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	3-4 Oktober 2024 October 3-4, 2024	*Certified In Audit Committee Practices Review Course Batch* XLIX	IKAI
Naufal Noor Rochman Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	2024 2024 2024 2024 2024 2024	• Verifikator TKDN Migas • Pengetahuan Harga Dasar dan Subsidi BBM dan LPG • Intensif Hukum Minyak dan Gas Bumi • *Work* Program & Budget (WP&B) dan *Authorization for Expenditure* • Aspek Teknis dan Regulasi Penentuan Cadangan BBM dan Energy Nasional • Manajemen Proyek • Verifier of Oil & Gas TKDB • Knowledge on Basic Price and Subsidy of Fuel and LPG • Intensive Law for Oil and Gas Work Program & Budget (WP&B) and Authorization for Expenditure • Technical Aspect and Regulation of Determination of Fuel Reserves and National Energy Management Project	• KPDM Migas • Pusdiklat ESDM • Pusdiklat ESDM • Pusdiklat ESDM • Pusdiklat ESDM • Pusdiklat ESDM

Rapat Komite Audit

Kebijakan dan ketentuan pelaksanaan Rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, di antaranya:

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan (sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris) dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Ketua Komite Audit dapat mengundang Direksi, Manajemen, dan Pekerja Perusahaan lainnya serta Auditor Eksternal untuk hadir dalam rapat.
3. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Risalah Rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat.
6. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit 2024

Pada tahun 2024, Komite audit menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebesar 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit tahun 2024

Pada tahun 2024, komite melakukan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melakukan pertemuan Komite Audit dengan Internal Audit Perseroan dan secara rutin melakukan *Initial Meeting* sebelum dilaksanakannya rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris pada periode 2024.

Audit Committee Meetings

Policies and procedures for conducting Audit Committee meetings are regulated in the Audit Committee Charter, including:

1. Audit Committee meetings are held regularly, at least once a month (consistent with the minimum requirement for Board of Commissioners meetings), with pre-agreed meeting agendas.
2. The Chairman of the Audit Committee may invite Directors, Management, other Company Employees, and External Auditors to attend the meetings.
3. Decision-making in Audit Committee meetings is based on consensus.
4. All processes and outcomes of Audit Committee meetings are documented in meeting minutes and communicated to the Board of Commissioners.
5. Minutes of the Audit Committee meetings are distributed to all meeting participants.
6. The Audit Committee may attend Board of Commissioners meetings or joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners if invited.

Audit Committee Meetings in 2024

In 2024, the Audit Committee held 2 (two) meetings with an attendance rate of 100%.

Audit Committee Activities in 2024

In 2024, the Committee carried out activities to fulfill its duties and responsibilities, including holding meetings with the Company Internal Audit and regularly conducting Initial Meetings prior to the joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners during the 2024 period.



Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi
2. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi
3. Uraian tugas dan tanggung jawab
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi

As of December 31, 2024, the Company has not yet established a Nomination and Remuneration Committee.

Accordingly, there is no available information regarding the following:

1. Names, positions, and brief profiles of the Nomination and Remuneration Committee members
2. Independence of the Nomination and Remuneration Committee members
3. Description of duties and responsibilities
4. Description of nomination and remuneration committee activities
5. Frequency of meetings and attendance rate of the nomination and remuneration committee

Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko
Investment Planning & Risk Management Committee

Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko merupakan organ pendukung Dewan Komite Audit mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, terutama dalam kaitannya dengan aspek Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi PT Pertamina Energy Terminal sebagai *subsidiaries* dari PT Pertamina International Shipping melakukan *monitoring*/ penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
2. Melakukan *review* secara berkala terhadap aspek investasi dan risiko dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
3. Melakukan *review* atas kebijakan pengelolaan investasi serta melakukan *monitoring* berkala terhadap realisasi Anggaran Biaya Investasi (ABI) baik secara fisik maupun finansial.
4. Melakukan *monitoring* terhadap proses *Corporate Action*.
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program *Environmental, Social, and Government* (ESG).

The Investment Planning & Risk Management Committee is a supporting organ of the Audit Committee that assists the oversight functions of the Board of Commissioners, particularly with regard to investment planning and risk management aspects.

Duties and Responsibilities of the Investment Planning & Risk Management Committee

1. Evaluating investment planning for PT Pertamina Energy Terminal, a subsidiary of PT Pertamina International Shipping, and monitoring/reviewing compliance with applicable laws and regulations related to Company activities.
2. Conducting regular reviews of investment and risk aspects in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP).
3. Reviewing investment management policies and monitoring the realization of the Investment Budget (ABI), both physically and financially.
4. Monitoring the process of corporate actions.
5. Monitoring and evaluating the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) programs.

6. Melakukan evaluasi aspek risiko dalam pelaksanaan proyek investasi anorganik.
7. Melakukan evaluasi tindak lanjut terhadap *Risk Assessment* operasional maupun non-investasi.
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas *Risk Register* dan *Top Risk*.
9. Melaksanakan tugas khusus lainnya yang diminta oleh Dewan Komisaris.
10. Bekerja secara kompeten, objektif, dan independen, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Piagam, Komposisi, dan Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko

Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko telah memiliki Piagam Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini mengatur struktur komite, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, frekuensi rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko. Periode dan masa jabatan anggota Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali, dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Komite Komite PIMR terdiri Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dan juga bukan berasal dari pekerja Perseroan. Anggota Komite PIMR adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perusahaan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perusahaan. Anggota independen Komite PIMR tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga, baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, maupun Direksi, serta telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite PIMR sesuai ketentuan Pasal 144 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

6. Evaluating risk aspects in the implementation of inorganic investment projects.
7. Assessing follow-up actions from operational and non-investment risk assessments.
8. Monitoring and evaluating the Risk Register and Top Risk profile.
9. Carrying out other specific tasks assigned by the Board of Commissioners.
10. Performing duties in a competent, objective, and independent manner and being directly accountable to the Board of Commissioners.

Charter, Composition, and Structure of the Investment Planning & Risk Management Committee

The Investment Planning & Risk Management Committee operates under its own Committee Charter, which serves as a guideline in carrying out its duties and responsibilities. The Charter outlines the committee's structure, membership requirements, duties, responsibilities and authorities, meeting frequency, reporting responsibilities, and term of office of the Investment Planning & Risk Management. The term of office for the Investment Planning & Risk Management members shall not exceed 3 (three) years and may be reappointed, without limiting the right of the Board of Commissioners to dismiss members at any time.

The IPRMC shall consist of at least 1 (one) member from the Board of Commissioners and at least 1 (one) external member who is neither part of the Board of Commissioners nor an employee of the Company. Members of the IPRMC are professionals who are not employees of the Company and do not have any financial affiliations with the Company. Independent members must not have financial and/or family relationships with the majority shareholders, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, and must meet the membership requirements stipulated under Article 144 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Governance and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Profil Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko

Profile of the Investment Planning & Risk Management Committee



Fahrur Roezi

Anggota Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko
Member of the Investment Planning & Risk Management

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Cibubur

Usia
56 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
S1-Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya/Palembang (1998)

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-002/DK.Perseroan/2024-S0 Tanggal 26 Juni 2024

Pengalaman Kerja
1. *Profesional Operation Experiance*
   - *Technical Assisstant* (1991- 1992).
   - *Supervisor* (1992- 2003).
   - *Scheduling Expert Staff* (2003- 2007).
   - Crude Oil & Product Planning Expert Staff (2007-2009).
   - *Supply Chain & Distribution Section Head* (2009- 2012).
   - *Refinery Planning Section Head* (2012- 2013).
2. *Middle Managment Experiance*
   - *Ast. Manager Opt. Product & Distribution* (2013- 2014).
   - *Ast Manager Prod.uct Non Fuel & Petchem* (2014-2017).
   - *Manager Non Fuel & Petrochemical* (2017- 2019).
   - *Manager Fuel Operation & Optimization* (2019- 2020).
3. *Senior Manager Experience*
   - *VP Integrated Loss Controll Internal Audit* (2020).
   - *VP Integrated Loss Controll* (2020- 2021).
   - *VP Logistics Optimization* (2021- saat ini).

Penghargaan
1. *Crude Oil Management*
   - Pertamina *Award* (2010).
   - Pertamina *Award* (2010).
   - Pertamina *Award* (2011).
2. *Losses Control* (ESG)
   - Pertamina *Award* (2011).
   - Pertamina *Award* (2011).

Jabatan Rangkap
Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Citizenship
Indonesia

Domicile
Cibubur

Age
56 Years Old

Educational Background
Bachelor's Degree in Chemical Engineering, University of Sriwijaya/ Palembang (1998)

Decree of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-002/DK.Perseroan/2024-S0 dated June 26, 2024.

Career Experience
1. Professional Operation Experiance
   - Technical Assisstant (1991- 1992).
   - Supervisor (1992- 2003).
   - Scheduling Expert Staff (2003- 2007).
   - Crude Oil & Product Planning Expert Staff (2007-2009).
   - Supply Chain & Distribution Section Head (2009- 2012).
   - Refinery Planning Section Head (2012- 2013).
2. Middle Managment Experiance
   - Ast. Manager Opt. Product & Distribution (2013- 2014).
   - Ast Manager Prod.uct Non Fuel & Petchem (2014-2017).
   - Manager Non Fuel & Petrochemical (2017- 2019).
   - Manager Fuel Operation & Optimization (2019- 2020).
3. Senior Manager Experience
   - VP Integrated Loss Controll Internal Audit (2020).
   - VP Integrated Loss Controll (2020- 2021).
   - VP Logistics Optimization (2021- present).

Achievement
1. Crude Oil Management
   - Pertamina Award (2010).
   - Pertamina Award (2010).
   - Pertamina Award (2011).
2. Losses Control (ESG)
   - Pertamina Award (2011).
   - Pertamina Award (2011).

Concurrent Position
None

Affiliate Relation
None



Yunius Andrianto

Anggota Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko
Member of the Investment Planning & Risk Management

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Pusat

Usia
37 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
- S2 *Executive* MBA (*Energy Management*), School of Business Management ITB (2024).
- S1-Ekonomi Akuntansi, Universitas Brawijaya/Malang (2011).

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-001/DK.Perseroan/2024-S0 Tanggal 1 Juni 2024

Pengalaman Kerja
- *Sr SPV Consold Statmns of CompreIncme* (2018- 2019)
- *Ast. Man SJVCorp.Action Finance & Service* (2020 - 2020)
- *Sr Analyst* 1 Gas BD & Portofolio (2020 - 2021)
- *Manager Controller & Budgeting* (2021- 2023)
- Pj. *Manager Mgmt Report & Budget* Ctrl (2024)
- *Manager Mgmt Report & Budget* Ctrl (2024 - Present)

Jabatan Rangkap
Manager Management Report & Budget Control

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Citizenship
Indonesia

Domicile
Central Jakarta

Age
37 Years old

Educational Background
- Executive MBA in Energy Management, School of Business and Management, Institute of Technology Bandung (2024).
- Bachelor's Degree in Economics (Accounting), University of Brawijaya/ Malang (2011).

Decree of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-001/DK.Perseroan/2024-S0 dated June 1, 2024

Career Experience
- Sr SPV Consold Statmns of CompreIncme (2018- 2019)
- Ast. Man SJVCorp.Action Finance & Service (2020 - 2020)
- Sr Analyst 1 Gas BD & Portofolio (2020 - 2021)
- Manager Controller & Budgeting (2021- 2023)
- Pj. Manager Mgmt Report & Budget Ctrl (2024)
- Manager Mgmt Report & Budget Ctrl (2024 - Present)

Concurrent Position
Manager Management Report & Budget Control

Affiliate Relation
None

Pernyataan Independensi Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko

Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko PT Pertamina Energy Terminal melaksanakan fungsi dan tugas secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko, Kualifikasi independesi dari anggota Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Statement of Independence of the Investment Planning & Risk Management Committee

The Investment Planning & Risk Management Committee of PT Pertamina Energy Terminal performs its functions and duties professionally and independently, without interference from any parties that may contravene prevailing laws and regulations. In accordance with the Charter of the Investment Planning & Risk Management Committee, the independence qualifications of its members must meet the following criteria:

Aspek Independensi Independence Criteria	Yunius Ardianto	Fahrur Roezi
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person from Public Accounting Firms, Legal Consultant Offices, Public Appraisal Services Firms, or other parties providing assurance, non-assurance, appraisal, and/or consulting services to the Company in the last 6 (six) months.	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. Not a person who worked for or had authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners.	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi , atau Pemegang Saham Utama Perseroan. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓

Pelatihan Dan/Atau Peningkatan Kompetensi Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko

Training And/or Competency Development of the Investment Planning & Risk Management Committee

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
Fahrur Roezi Anggota Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Investment Planning & Risk Management Committee	3-4 Oktober 2024 October 3-4, 2024	*Certified In Audit Committee Practices Review Course Batch* XLIX	IKAI
Yunius Andrianto Anggota Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Investment Planning & Risk Management Committee	Juli 2017 Desember 2016 July 2017 December 2016	*Certified Professional Management Accountant* *Certified Public Accountant*	IMA IAPI

Rapat Komite Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko

Kebijakan dan ketentuan pelaksanaan Rapat Komite PIMR diatur dalam Piagam Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko, di antaranya:

1. Rapat Komite PIMR dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan (sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris) dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.

Investment Planning & Risk Management Committee Meetings

The policies and provisions governing the meetings of the Investment Planning & Risk Management Committee are stipulated in the Committee Charter. Key provisions include:

1. IPRMC meetings shall be held at least once a month (in line with the minimum meeting frequency of the Board of Commissioners), based on a pre-agreed agenda.

2. Ketua Komite PIMR dapat mengundang Dewan Komisari, Direksi, Manajemen, dan Pekerja Perseroan lainnya untuk hadir dalam rapat.

3. Seluruh proses dan hasil rapat Komite PIMR dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*diseenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite PIMR yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Risalah Rapat Komite PIMR dibagikan kepada seluruh Dewan Komisaris.
5. Komite PIMR dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

Pelaksanaan Rapat Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko 2024

Pada tahun 2024, Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko telah melakukan 1 (satu) kali rapat bersama jajaran Management Perseroan dengan tingkat kehadiran 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko telah melakukan 1 (satu) kali rapat bersama jajaran Management Perseroan terkait pembahasan perencanaan investasi PT Pertamina Energy Terminal dan mendampingi kegiatan investasi Perseroan melalui *initial meeting* sebelum pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

2. The Chairman of the IPRMC may invite members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and other employees of the Company to attend meetings.
3. All discussions and outcomes of IPRMC meetings shall be documented in meeting minutes, including any dissenting opinions, and signed by all attending committee members. The minutes shall be submitted to the Board of Commissioners.
4. The meeting minutes of the IPRMC shall be distributed to all members of the Board of Commissioners.
5. The IPRMC may attend meetings of the Board of Commissioners or joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners upon invitation.

Implementation of the Investment Planning & Risk Management Committee Meetings in 2024

In 2024, the Investment Planning & Risk Management Committee held 1 (one) joint meeting with the Company Management with attendance rate of 100%.

Implementation of Investment Planning & Risk Planning Committee Activities in 2024

In 2024, the Investment Planning & Risk Management Committee held 1 (one) meeting with the Company's Management to discuss PT Pertamina Energy Terminal's investment planning and provided support for the Company's investment activities through an initial meeting prior to the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan adalah *Manager Legal & Relation* yang bertugas mengelola, melakukan *review*, dan merekomendasikan aspek hukum terhadap kebijakan atau tindakan korporasi serta aspek perikatan terhadap korporasi untuk mengoptimalkan keberlangsungan PT Pertamina Energy Terminal. *Manager Legal & Relation* dipilih dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi Utama, tetapi dalam mengambil tindakan dengan mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Komisaris.

The function of the Corporate Secretary at the Company is carried out by the Manager of Legal & Relations, who is responsible for managing, reviewing, and providing legal recommendations on corporate policies and actions, as well as contractual matters involving the Company, in order to optimize the continuity and sustainability of PT Pertamina Energy Terminal. The Manager of Legal & Relations is appointed by the Board of Directors and reports directly to the President Director, while also considering input and recommendations from the Board of Commissioners when taking actions.

Profil *Manager Legal & Relation*

Legal & Relation Manager Profile



Fety Zaniar

Manager Legal & Relation

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta Pusat

Usia
41 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
S1-Universitas Brawijaya, Ilmu Hukum/Malang (2001)

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan SKMJ-04217/K20520/2024-S7 tentang Mutasi Jabatan tanggal 02 Agustus 2024.

Pengalaman Kerja
- *Manager Legal & Relation* PT Pertamina Energy Terminal (Agustus 2024 – Sekarang)
- Sr *Legal Counsel* II *Legal Advocacy* I PT Pertamina (Persero) (Mei 2022 – Juli 2024)
- Sr *Legal Counsel* I *Legal Advocacy* I PT Pertamina (Persero) (Juli 2021 – April 2022)
- Sr *Legal Counsel* I Litig. *Case* III *Team* A PT Pertamina (Persero) (April 2021 – Juni 2021)
- Sr *Legal Counsel* I *Public Case Litigation* PT Pertamina (Persero) (Oktober 2020 – Maret 2021)

Jabatan Rangkap
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Citizenship
Indonesia

Domicile
Central Jakarta

Age
41 Years old

Educational Background
Bachelor's Degree in Law, University of Brawijaya/Malang (2001)

Decree of Appointment
Decree No. SKMJ-04217/K20520/2024-S7 concerning Position Transfer dated August 2, 2024.

Career Experience
- Manager Legal & Relation PT Pertamina Energy Terminal (August - Present)
- Sr Legal Counsel II Legal Advocacy I PT Pertamina (Persero) (May 2022 - July 2024)
- Sr Legal Counsel I Legal Advocacy I PT Pertamina (Persero) (July 2021 - April 2022)
- Sr Legal Counsel I Litig. Case III Team A PT Pertamina (Persero) (April 2021- June 2021)
- Sr Legal Counsel I Public Case Litigation PT Pertamina (Persero) (October 2020 - March 2021)

Concurrent Position
None

Affiliate Relation
None

Manager Legal & *Relation* bertugas:

1. Mengevaluasi dan memberikan *review* kebijakan korporasi secara internal, termasuk memberi usulan terhadap sistem tata kerja Perusahaan dengan fokus pada memberikan penilaian internal terhadap kebijakan korporasi untuk meningkatkan sistem tata kerja Perusahaan agar sesuai dengan standar terkini dan mendukung efisiensi operasional.
2. Mengevaluasi dan memberikan *review* rencana kegiatan atau tindakan korporasi dengan tujuan memberikan analisis mendalam terhadap rencana kegiatan atau tindakan korporasi untuk memastikan bahwa setiap rencana diarahkan pada pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Mengelola analisa pertimbangan hukum terhadap korporasi dengan fokus pada merancang dan melaksanakan strategi untuk mengelola hubungan perikatan Perusahaan dengan pihak eksternal serta meninjau agar setiap perikatan mendukung tujuan bisnis dan kepatuhan hukum.
4. Mengelola, mengevaluasi, dan meninjau pengadaan jasa konsultan hukum/notaris untuk proyek dengan fokus pada merancang dan melaksanakan strategi pemilihan dan pengelolaan jasa konsultan hukum atau notaris yang dipilih memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan Perusahaan.
5. Mengelola, mengevaluasi dan meninjau permintaan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara dengan melakukan korespondensi dengan Pertamina *Holding* dan melakukan *monitoring* terhadap proses pendampingan hukum.
6. Mengevaluasi dan meninjau *review* terhadap dokumentasi perikatan dengan tujuan memberikan tinjauan mendalam terhadap dokumen-dokumen perikatan serta meninjau dokumen tersebut telah memenuhi standar hukum dan korporat yang berlaku.
7. Mengevaluasi dan meninjau standarisasi dokumentasi perikatan dengan fokus pada merumuskan standar dan prosedur yang konsisten untuk dokumentasi perikatan serta melakukan *review* bahwa standar tersebut mencakup kebutuhan Perusahaan dan sesuai dengan praktik terbaik.
8. Meninjau aspek litigasi dan non-litigasi dengan mengidentifikasi potensi atau kasus yang sedang berlangsung, berkoordinasi dengan unit terkait, melakukan analisis, serta memberikan nasihat hukum terkait Perusahaan.
9. Mengelola pendampingan hukum atas isu litigasi dan non-litigasi Perusahaan dengan mendampingi atau mewakili Perusahaan atau pekerja, memberikan update kepada manajemen, serta memberikan evaluasi kepada unit terkait atas isu yang sedang berlangsung.
10. Mengelola penyelesaian sengketa dengan melakukan pembelaan hukum di dalam dan luar pengadilan, memberikan masukan serta arahan kepada unit terkait untuk mencegah perkara litigasi, dan mendampingi mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.
11. Meninjau pengadaan jasa konsultan hukum/advokat dengan mengidentifikasi kebutuhan, melakukan *conflict checking* untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan, serta memonitor dan mengevaluasi jasa yang diberikan dengan koordinasi bersama unit terkait.
12. Mengelola *stakeholder* eksternal terkait isu atau potensi isu litigasi dan non-litigasi dengan mengidentifikasi *stakeholder*,

Duties of the Manager of Legal & Relations:

1. Evaluating and reviewing internal corporate policies, including providing recommendations on corporate work system improvements. The focus is to ensure alignment with the latest standards and to support operational efficiency through robust internal policy assessments.
2. Evaluating and reviewing proposed corporate actions or activity plans, aimed at delivering in-depth legal analysis to ensure alignment with the Company's strategic objectives.
3. Managing legal assessments related to corporate agreements, including designing and executing strategies for managing the Company's contractual relationships with external parties, ensuring all agreements support business goals and legal compliance.
4. Managing, evaluating, and reviewing the procurement of legal consultants/notary services for projects, by developing strategies to select and oversee external legal professionals whose competencies match the specific needs of the project and the Company.
5. Managing, evaluating, and reviewing requests for legal opinions and/or legal assistance from the State Lawyer, including correspondence with Pertamina Holding and monitoring the progress of legal assistance provided.
6. Evaluating and reviewing corporate contractual documentation, ensuring legal agreements meet prevailing legal and corporate standards through comprehensive document assessments.
7. Evaluating and reviewing the standardization of contractual documentation, with a focus on formulating consistent procedures and documentation templates that reflect the Company's needs and align with industry best practices.
8. Reviewing litigation and non-litigation matters, by identifying potential or ongoing legal cases, coordinating with relevant units, conducting legal analysis, and providing legal advice to the Company.
9. Managing legal assistance on litigation and non-litigation issues, by accompanying or representing the Company or employees, updating management, and offering evaluations to relevant business units on ongoing legal matters.
10. Managing dispute resolution, including legal defense in and out of court, providing legal guidance to prevent litigation, and supporting mediation or negotiation efforts to resolve disputes effectively.
11. Reviewing the procurement of legal consultant/lawyer services, by identifying legal service needs, conducting conflict checks to ensure there are no conflicts of interest, executing the procurement process in accordance with applicable regulations, and monitoring and evaluating the services rendered in coordination with relevant internal units.
12. Managing external stakeholders related to litigation and non-litigation issues or potential issues, by identifying

mengembangkan strategi pengelolaan, serta melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait.

13. Mengelola pembinaan pekerja fungsi legal *counsel* dengan berkoordinasi dengan fungsi legal di Pertamina *Holding* dan HC untuk mengidentifikasi kebutuhan mutasi, promosi, dan pelatihan.
14. Meninjau penyusunan strategi komunikasi korporasi untuk *corporate branding* setiap entitas dan menetapkan *stakeholder* kunci untuk penerapan strategi komunikasi tersebut.
15. Mengelola hubungan dengan pemerintah dengan memetakan *stakeholder*, mengidentifikasi kebutuhan mereka, menyusun strategi dan program pembinaan hubungan, melakukan pembinaan, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan.
16. Mengelola hubungan dengan quasi pemerintah dengan memetakan *stakeholder*, mengidentifikasi kebutuhan mereka, menyusun strategi dan program pembinaan hubungan, melakukan pembinaan, serta melakukan ***monitoring*** dan evaluasi kegiatan.
17. Mengelola hubungan dengan non-pemerintah dengan memetakan *stakeholder*, mengidentifikasi kebutuhan mereka, menyusun strategi dan program pembinaan hubungan, melakukan pembinaan, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan.
18. Mengelola kegiatan *sponsorship* dengan mengevaluasi dan mengusulkan rencana serta anggaran, melaksanakan kegiatan dengan mekanisme kontra prestasi, dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaannya.
19. Mengelola komunikasi media dengan merencanakan dan menyusun program berdasarkan strategi Perusahaan, membuat produk komunikasi sesuai saluran, menjalin hubungan dengan media, melakukan evaluasi dan *monitoring,* serta melaksanakan program komunikasi dengan masyarakat.
20. Mengelola komunikasi internal Perusahaan dengan merencanakan dan menyusun program komunikasi serta melaksanakan dan membuat produk komunikasi internal, seperti acara internal, sosialisasi, dan acara Perusahaan.
21. Menyusun rencana dan anggaran CSR dengan merencanakan program, melakukan *social mapping*, menjalin kerja sama, melaksanakan kegiatan sesuai pedoman, publikasi, mengikuti penghargaan, menyusun laporan keberlanjutan, serta *monitoring*, evaluasi, dan mengukur dampak CSR.
22. Mengkoordinasikan dukungan untuk Dewan Direksi dengan merencanakan kegiatan, mengelola administrasi, berfungsi sebagai penghubung, menyelenggarakan rapat, menyusun notulen, dan memonitor tindak lanjut keputusan rapat.
23. Mengelola hubungan antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan menyiapkan data dan kebutuhan, bahan rapat, memfasilitasi dan mendokumentasikan rapat BOD-BOC, serta memonitor tindak lanjut keputusan dan kegiatan protokoler.
24. Meninjau tata kelola administrasi dengan menyusun dan menyampaikan laporan manajemen dan tahunan, produk tata kelola, memproses dokumen persetujuan pemegang saham, serta mengelola akta notaris dan keputusan RUPS.
25. Meninjau proses penyusunan kerangka kerja dan kebijakan kepatuhan dengan merancang kebijakan dan inisiatif Perusahaan untuk mematuhi ketentuan, serta melaksanakan kegiatan kepatuhan.

key stakeholders, developing engagement strategies, and coordinating with relevant external parties.

13. Overseeing the development of legal counsel personnel, by coordinating with the Legal Function of Pertamina Holding and the HC Division to identify needs related to rotation, promotion, and training.
14. Reviewing the formulation of corporate communication strategies for corporate branding at each entity, and determining key stakeholders for the implementation of those communication strategies.
15. Managing government relations, by mapping stakeholders, identifying their needs, developing relationship-building strategies and programs, conducting engagement efforts, and performing ongoing monitoring and evaluation.
16. Managing quasi-government stakeholder relations, through similar steps: mapping stakeholders, identifying their needs, developing relationship-building strategies and programs, conducting engagement, and monitoring and evaluating activities.
17. Managing non-government stakeholder relations, with the same structured approach: stakeholder mapping, needs assessment, relationship strategy and programming, stakeholder engagement, and evaluation of activities.
18. Managing sponsorship activities, by evaluating and proposing plans and budgets, implementing sponsorships through mutually agreed deliverables, and assessing and reporting on their execution.
19. Managing media communication, by planning and developing communication programs based on corporate strategy, producing communication materials for various media channels, maintaining media relations, conducting evaluations and monitoring, and executing public communication initiatives.
20. Managing internal corporate communication, by planning and developing internal communication programs and producing related content such as internal events, socialization campaigns, and corporate functions.
21. Preparing CSR plans and budgets, by designing programs, conducting social mapping, establishing partnerships, implementing activities in accordance with guidelines, conducting publication efforts, participating in awards programs, preparing sustainability reports, and monitoring, evaluating, and measuring the impact of CSR initiatives.
22. Coordinating support for the Board of Directors, by planning activities, managing administration, acting as liaison, organizing meetings, preparing meeting minutes, and monitoring the follow-up of decisions.
23. Managing relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners, by preparing data and materials, organizing and documenting BOD-BOC meetings, and monitoring the implementation of decisions and protocol-related activities.
24. Reviewing governance-related administrative processes, by preparing and submitting management and annual reports, developing governance documents, processing shareholder approval documents, and managing notarial deeds and GMS resolutions.
25. Reviewing the development of compliance frameworks and policies, by designing corporate compliance policies and initiatives and implementing compliance programs.

26. Meninjau proses penyusunan kerangka kerja dan kebijakan kepatuhan dengan merancang kebijakan dan inisiatif Perusahaan untuk mematuhi ketentuan, serta melaksanakan kegiatan kepatuhan.
27. Mengelola kepatuhan dan *assessment* GCG dengan memonitor dan mengevaluasi program kepatuhan, mengkoordinasikan rekomendasikan peraturan, dan pelaksanaan audit Perusahaan, serta audit GCG.
28. Mengembangkan pengawasan kepatuhan perundang-undangan terkait Tata Kelola Perusahaan dengan menyusun kebijakan kepatuhan, mengidentifikasi persyaratan regulasi, serta mengarahkan dan memonitor pelaksanaan kajian kepatuhan terhadap peraturan yang berdampak pada bisnis atau transaksi Perusahaan.
29. Mengelola kepatuhan Tata Kelola Perusahaan dengan menilai posisi kepatuhan, mengidentifikasi kelemahan, menerapkan kebijakan pengawasan, memonitor kepatuhan secara berkala, menyusun *scorecards* dan laporan kepatuhan, serta membina hubungan dengan regulator.
30. Mengelola pengurusan dokumen formalitas Perusahaan terkait Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) guna memastikan kepatuhan dan kelancaran administrasi Perusahaan.
31. Mengimplementasikan dan memonitor kebijakan dan pengelolaan kegiatan operasional *share service* untuk Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi.
32. Mengelola *formalities* Perusahaan yang berkaitan dengan Dit. Operasi dengan memastikan pemenuhan regulasi dan kepatuhan terhadap prosedur-prosedur Perusahaan, sehingga mendukung kelancaran operasional dan meminimalkan risiko keberlanjutan.
33. Me*review* dan mengevaluasi pengelolaan risiko yang meliputi penyusunan *risk register*, mitigasi risiko, serta monitoring dan pelaporan risk register secara rutin.
34. Mereview dan mengevaluasi penyusunan program kerja/ RKAP, KPI (*Key Performance Indicator*) dan melakukan *performance reporting* secara komprehensif.

35. Melaporkan LHKPN dan gratifikasi secara periodik, deklarasi COI, COC serta kode etik lainnya .
36. Mengarahkan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan HSSE di Fungsi terkait dan memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan di unit kerja sesuai dengan sistem, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan serta memastikan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan (finansial, sarana dan fasilitas serta *manpower*) untuk penerapan HSSE tersebut.

26. Managing corporate governance compliance and assessments, by monitoring and evaluating compliance programs, coordinating regulatory recommendations, and overseeing internal and GCG audits.
27. Managing GCG compliance and assessments by monitoring and evaluating compliance programs, coordinating regulatory recommendations, and overseeing corporate audits as well as GCG audits.
28. Developing regulatory compliance oversight related to corporate governance by formulating compliance policies, identifying regulatory requirements, and directing and monitoring the implementation of compliance reviews on regulations that impact the company's business or transactions.
29. Managing corporate governance compliance by assessing compliance positions, identifying weaknesses, implementing supervisory policies, regularly monitoring compliance, preparing scorecards and compliance reports, and maintaining relationships with regulators.
30. Administering corporate formal documentation related to the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART) to ensure compliance and smooth corporate administration.

31. Implementing and monitoring policies and the management of shared service operations for Subsidiaries / Affiliated Companies.
32. Managing corporate formalities related to the Directorate of Operations by ensuring regulatory compliance and adherence to company procedures, thereby supporting smooth operations and minimizing sustainability risks.

33. Reviewing and evaluating risk management, including the preparation of risk registers, risk mitigation efforts, as well as routine monitoring and reporting of the risk register.
34. Reviewing and evaluating the preparation of work programs/Company Work Plan and Budget (RKAP), KPI (Key Performance Indicators), and conducting comprehensive performance reporting.
35. Periodically reporting the LHKPN, gratification, declaration of COI, COC, and other codes of conduct.
36. Directing, coordinating, monitoring, and evaluating the management of HSSE in relevant functions and ensuring that its implementation within the work units complies with established systems, procedures, and policies; also ensuring the adequacy of required resources (financial, facilities, and manpower) for the implementation of HSSE

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan

Training and/or competency development of the Corporate Secretary

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
Fety Zaniar Manager Legal & Relation	19 Maret 2024 13 Juni 2024 01 Agustus 2024 16 Oktober 2024 07 November 2024 18 Desember 2024 March 19, 2024 June 13, 2024 August 1, 2024 October 16, 2024 November 7, 2024 December 18, 2024	Aplikasi PREDICT Modul OE Material & Jasa Konsultan PREDICT OE *Material & Consultant Services Module Application* *Women Leadership Accelerator Program* *Fraud Awareness Training* *Corporate Law and Due Diligence in Indonesia: Navigating Legal Frameworks and Strategic Research* *Leadership Project Management and Communication* *Leadership Project & Communication* Aplikasi PREDICT Modul OE Material & Jasa Konsultan PREDICT OE *Material & Consultant Services Module Application* *Women Leadership Accelerator Program* *Fraud Awareness Training* *Corporate Law and Due Diligence in Indonesia: Navigating Legal Frameworks and Strategic Research* *Leadership Project Management and Communication* *Leadership Project & Communication*	Pertamina Corporate University Pertamina Corporate University Pertamina Corporate University

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

1. 74 Pemberitaan Media Nasional.
2. 7 Pendampingan Kunjungan ***Stakeholder*** Eksternal dan Internal.
3. *Weekly* Oceania
   - 7 *Corporate Events.*
   - 14 Aktivitas CSR.
   - 132 *Broadcast.*
4. 21 Agenda BOD (*Weekly* & *BOD BOC Meeting*).
5. Melakukan *Management Retreat.*
6. Melakukan *Weekly Management Meeting .*
7. Melakukan *Management Walk Through* (MWT).
8. Melakukan sosialisasi GCG, COC, COI, dan laporan Gratifikasi.
9. Melaksanakan kegiatan 13 kegiatan CSR.
10. 106/152 GCG AOI (*Self Assessment*).
11. Mengelola media sosial.
12. Melaksanakan *review* 53 Kontrak, 18 Pendampingan, 3 Pedoman, 1 Akta, dan 51 Dokumen hukum Non Kontrak.
13. Memaksimalkan *branding* Perseroan melalui social media, mengikuti awards, dan *media relation.*
14. Meningkatkan *awareness* dan *engagement* antar seluruh unit melalui kegiatan komunikasi yang interaktif dan inklusif.
15. Mengelola akta notaris dan keputusan RUPS.

Implementation of Corporate Secretary Duties

1. 74 National Media Coverages.
2. 7 External and Internal Stakeholder Visit Facilitations.
3. Weekly Oceania
   - 7 Corporate Events.
   - 14 CSR Activities.
   - 132 Broadcasts.
4. 21 BOD Agendas (Weekly & BOD BOC Meetings).
5. Conducted Management Retreat.
6. Held Weekly Management Meetings.
7. Conducted Management Walk Through (MWT).
8. Conducted socialization sessions on GCG, COC, COI, and Gratification Reporting.
9. Carried out 13 CSR programs.
10. 106/152 GCG AOIs (Self-Assessment) completed.
11. Managed social media platforms.
12. Reviewed 53 Contracts, 18 Legal Assistances, 3 Guidelines, 1 Deed, and 51 Non-Contract Legal Documents.
13. Optimized Corporate Branding through social media, participation in awards, and media relations.
14. Increased awareness and engagement across all units through interactive and inclusive communication activities.
15. Managed notarial deeds and GMS resolutions.

Internal Audit
Internal Audit

Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa assurance dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan Tata Kelola Perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

Visi
Menjadi Internal Audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit untuk mendukung visi dan misi Perusahaan.

Misi
Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa *assurance, advisory, insight* dan *foresight* yang berbasis risiko secara independen dan objektif.

Tujuan
1. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dengan memberikan *advisory, insight* dan *foresight* dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.
3. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan Perusahaan dan kemampuan Perusahaan untuk melayani kepentingan publik.

Ruang Lingkup Internal Audit
Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan, untuk meyakini hal-hal sebagai berikut:
1. Regulasi yang berpengaruh signifikan pada Perusahaan telah dipatuhi.
2. Pekerja melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
3. Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor Tata Kelola yang berlaku.
4. Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
5. Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
6. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
7. Informasi finansial, komersial, manajerial, sumber daya manusia, teknologi informasi dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.

Internal Audit is a function that provides independent and objective assurance and consulting services by applying a systematic and disciplined approach to evaluate and enhance the Company's Governance, risk management, and internal control in order to add value to the Company.

Vision
To be a professional and trusted Internal Audit function by applying international standards of the Internal Audit profession in support of the Company's vision and mission.

Mission
To deliver added value to the Company through risk-based assurance, advisory, insight, and foresight services in an independent and objective manner.

Objectives
1. To assist the Company in achieving its objectives effectively and efficiently by evaluating and recommending improvements in governance, risk management, and internal control effectiveness.
2. To support Company management and other stakeholders in decision-making and oversight by providing advisory, insight, foresight, and useful recommendations to enhance organizational effectiveness and efficiency.
3. To enhance the Company's reputation and credibility with stakeholders and its ability to serve the public interest.

Scope of Internal Audit
The scope of Internal Audit assignments includes, but is not limited to, the testing and evaluation of the adequacy and effectiveness of internal control, risk management, and governance processes in achieving the Company's objectives and goals. The scope applies to all operational and business activities of the Company to ensure the following:

1. Compliance with regulations that significantly affect the Company.
2. Employees conduct activities in accordance with applicable policies, standards, procedures, and laws.
3. Interactions between internal and external work units are accountable and align with established governance principles.
4. Risks are properly identified and mitigated.
5. Programs, work plans, and objectives are effectively achieved.
6. The quality of internal control is continuously improved.
7. Significant financial, commercial, managerial, human resources, information technology, and operational information is available accurately, reliably, and in a timely manner.

8. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
9. Aspek bisnis telah dikelola dengan baik dan optimum.

Prinsip Utama Internal Audit

1. Selalu menunjukkan integritas.
2. Menunjukkan kompetensi dan *due professional care*.
3. Objektif dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi.
4. Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
5. Diposisikan secara layak dan didukung dengan sumber daya yang memadai.
6. Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
7. Berkomunikasi secara efektif.
8. Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
9. Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
10. Senantiasa mendorong kemajuan Perusahaan.

Kedudukan Internal Audit

1. Internal Audit dipimpin oleh *Chief Audit Executive* yang di dalam struktur organisasi PT Pertamina Energy Terminal kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.
2. *Chief Audit Executive* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
3. Secara struktural, *Chief Audit Executive* menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama
4. Secara fungsional, *Chief Audit Executive* menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit.
5. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi *Chief Audit Executive* untuk memutuskan persetujuannya.
6. Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan *Chief Audit Executive* untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.
7. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif memberi persetujuan Piagam Internal Audit.

Independensi

1. *Chief Audit Executive* dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
2. *Chief Audit Executive* dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
3. Auditor yang direkrut dari Fungsi Bisnis Pertamina Grup dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit dengan tetap mengedepankan aspek independensi dan objektivitas.
4. *Chief Audit Executive* menyampaikan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama/Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.

8. Resources are procured economically, used efficiently, and adequately safeguarded.
9. Business aspects are managed properly and optimally.

Core Principles of Internal Audit

1. Demonstrates integrity at all times.
2. Displays competence and due professional care.
3. Is objective and free from any influence that may compromise independence.
4. Aligns with the organization's strategies, objectives, and risks.
5. Is appropriately positioned and adequately resourced.
6. Demonstrates quality and continuous improvement.
7. Communicates effectively.
8. Performs risk-based assurance activities.
9. Is insightful, proactive, and future-focused.
10. Consistently drives the Company's improvement.

Position of Internal Audit

1. Internal Audit is led by the Chief Audit Executive, who within the organizational structure of PT Pertamina Energy Terminal, reports directly to the President Director.
2. The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners upon the recommendation of the Audit Committee.
3. Structurally, the Chief Audit Executive maintains communication, coordination, and reporting lines with the President Director.
4. Functionally, the Chief Audit Executive communicates, coordinates, and reports activities to the Audit Committee.
5. The Board of Commissioners, based on the Audit Committee's recommendation, plays an active role in discussions related to the Chief Audit Executive's remuneration for approval.
6. The Board of Commissioners through the Audit Committee may communicate directly with the Chief Audit Executive to ensure the appropriateness of assignment scope, adequacy of resources, and unrestricted access to data and information required for Internal Audit activities.
7. The Board of Commissioners, upon the recommendation of the Audit Committee, is actively involved in approving the Internal Audit Charter.

Independence

1. The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are prohibited from engaging in Company operational activities that may compromise the independence of their duties.
2. The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff must maintain impartiality, avoid conflicts of interest, remain objective in carrying out assignments, and disclose any potential conflicts of interest or threats to independence.
3. Auditors recruited from business functions within the Pertamina Group may only audit their previous business functions at least 1 (one) year after transferring to the Internal Audit Function, while upholding independence and objectivity.
4. The Chief Audit Executive must report to the President Director/President Commissioner/Audit Committee if there is any intervention in determining the audit scope, executing the audit, or reporting the audit results.

5. *Chief Audit Executive* dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

Mandat Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit mendapatkan mandat dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Mandat tersebut menetapkan wewenang dan tanggung jawab fungsi Internal Audit.

Wewenang fungsi Internal Audit:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, informasi personel, properti fisik maupun seluruh sistem informasi digital, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Audit Internal.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan audit dan langkah pelaksanaan *Quality Assessment*.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karir pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan *manpower* pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di Perusahaan.
8. Melaksanakan kegiatan *assurance, advisory*, dan audit investigasi di Perusahaan melalui mekanisme yang ditentukan sebelumnya.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan penyusunan Annual Audit Plan (AAP) yang mencakup antara lain strategi, objek penugasan, jadwal penugasan, resources yang dibutuhkan serta mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan AAP dan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
3. Melaksanakan pengawasan melalui kegiatan *assurance, advisory, insight* dan *foresight* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
4. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan berkoordinasi Fungsi IWF PT Pertamina (Persero).
5. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*Quality Assessment*) kegiatan Internal Audit.
6. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
8. Melaksanakan pengujian, evaluasi efektivitas pengendalian

5. The Chief Audit Executive has the right to communicate and interact directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee without the presence of Management.

Internal Audit Mandate

In carrying out its duties, the Internal Audit function receives a mandate from the President Director and the Board of Commissioners. This mandate defines the authority and responsibilities of the Internal Audit function.

Authorities of the Internal Audit Function:

1. Having unrestricted access to all data, personnel information, physical assets, digital information systems, documents, functions, activities, and other Company resources, including the right to request information or clarification from all officials/employees in the course of performing Internal Audit duties.
2. Determining the audit scope, methods, techniques, strategies, audit approach, and procedures for conducting Quality Assessments.
3. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
4. Coordinating with external auditors and other supervisory institutions.
5. Requesting or obtaining assistance from internal Company employees or external parties in the execution of audit tasks.
6. Holding meetings periodically or as needed with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
7. Determining policy direction, organizational structure, managing career development of audit personnel (transfers and/or promotions), manpower planning for audit assignments, and coordinating and supervising Internal Audit activities within the Company.
8. Conducting assurance, advisory, and investigative audit activities in the Company through predefined mechanisms.

Duties and Responsibilities:

1. Preparing the Annual Audit Plan (AAP), which includes strategies, audit objects, assignment schedules, required resources, and proposing it for approval by the President Director and Board of Commissioners upon recommendation of the Audit Committee.
2. Supervising the implementation and reviewing the ongoing AAP to ensure its alignment with the Company's business processes, risks, as well as the scope and objectives of the assignments.
3. Conducting oversight through assurance, advisory, insight, and foresight activities across all operational and business areas of the Company.
4. Carrying out investigative audits on issues that may result in losses for the Company, in coordination with the IWF Function of PT Pertamina (Persero).
5. Performing evaluations and improvements (Quality Assessments) of Internal Audit activities.
6. Undertaking other assignments mandated by the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
7. Conducting compliance audits with applicable laws and regulations.
8. Performing tests, evaluating the effectiveness of internal

dan manajemen risiko serta Identifikasi alternatif peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
9. Melaksanakan *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
10. Melaksanakan *monitoring* dan identifikasi perkembangan trend, praktik dan isu signifikan serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
11. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan/ *quality assessment* oleh auditor eksternal.
12. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan, tidak terbatas pada kegiatan *assurance, advisory, insight* dan *foresight* di lingkungan Internal Audit Pertamina *Group*.
13. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/ penyingkapan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14. Memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi.
15. Memberikan keyakinan yang memadai atas perlindungan informasi, kerahasiaan, privasi, atas kepemilikan dokumen/ informasi yang diperoleh saat pelaksanaan tugas Audit Internal.
16. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja, serta rekomendasi, *advice*, dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh *Auditee*.
17. Mendukung fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengembangan profesional berkelanjutan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
18. Mendukung adanya transfer *knowledge* dari pihak eksternal kepada anggota Internal Audit apabila menggunakan jasa pihak eksternal serta tidak mempengaruhi independensi.
19. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
20. Melaporkan hasil pengawasan serta risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko *fraud*, dan permasalahan lain kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
21. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit, hasil *quality assessment* dan temuan signifikan kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
22. Memperkuat Tata Kelola Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Standar Pelaksanaan Internal Audit

1. Dalam melaksanakan tugasnya, *Chief Audit Executive* dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit, Kode Etik dan Profesionalisme Internal Audit yang mengacu kepada Standar Audit Internal Global yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan.

control and risk management, and identifying alternatives to improve operational efficiency.
9. Monitoring the implementation of follow-ups to findings from internal, external, and other oversight institutions' audits, and reporting periodically to the President Director and Audit Committee.
10. Monitoring and identifying trends, practices, and significant issues, and reporting them to the President Director and Audit Committee.
11. Coordinating audit/review/quality assessment activities by external auditors.
12. Coordinating audit activities, including assurance, advisory, insight, and foresight within the Pertamina Group Internal Audit environment.
13. Coordinating with the Company's Supervisory Function in following up complaints/disclosures through the Whistleblowing System (WBS) and public or other third-party complaints as per applicable provisions.
14. Providing reasonable assurance on the application of integrity, objectivity, confidentiality, and competence.
15. Providing reasonable assurance on the protection of information, confidentiality, privacy, and ownership of documents/information obtained during audit assignments.
16. Providing reasonable assurance that every assignment is supervised, supported by working papers, and that recommendations, advice, and insights can be implemented by the auditee.
17. Supporting Internal Audit collectively to possess or acquire sufficient continuing professional development, knowledge, skills, and competence.
18. Supporting knowledge transfer from external parties to Internal Audit members when using external services, without compromising independence.
19. Communicating resource limitations, AAP changes, and policy direction changes to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee.
20. Reporting oversight results and significant risks and control issues, including fraud risks and other matters, to the President Director and relevant Directors, and subsequently to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
21. Reporting Internal Audit activities, quality assessment results, and significant findings to the President Director and relevant Directors, and subsequently to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
22. Strengthening Corporate Governance, including but not limited to Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) and Anti-Bribery Management System (SMAP).

Internal Audit Implementation Standards

1. In performing its duties, the Chief Audit Executive and all Internal Audit staff must comply with the Internal Audit Work System, the Internal Audit Code of Conduct and Professionalism, which refers to the Global Internal Audit Standards established by The Institute of Internal Auditors, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of SOEs, as well as other relevant and applicable policies within the Company.

2. Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan Standards, maka Chief Audit Executive harus mengungkapkan hal tersebut dan menyampaikannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit

Kualifikasi dan Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Internal *Chief Internal Audit* dan semua Auditor Internal harus memiliki keahlian dan kecermatan profesi, serta memenuhi kualifikasi profesi yang telah ditetapkan dalam Piagam Audit. Selain itu, Auditor Internal juga harus memiliki sertifikasi yang mendukung keahlian profesi.

Kualifikasi Profesi Internal Audit:

1. Memiliki/menguasai keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
2. Memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi dalam prinsip-prinsip akuntansi, teknik audit, serta kemampuan mengenali proses bisnis dan menganalisa penyimpangan yang signifikan serta dapat memberikan solusi yang tepat,
3. Memiliki keahlian dan keterampilan dalam menerapkan teknik dan prosedur audit untuk mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan,
4. Memiliki keahlian dan keterampilan tentang risiko dan pengendalian bidang teknologi informasi dan teknik audit berbasis teknologi informasi.

Keahlian dan Kecermatan Profesi

Keahlian dan kecermatan profesi merupakan tanggung jawab *Chief Internal Audit* dan semua Auditor Internal. Dalam melaksanakan audit, Auditor Internal secara kolektif harus memiliki keahlian dan kecermatan profesi yang diperlukan.

Keahlian:

1. Wajib memiliki auditor yang menguasai keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang kompeten, jika Auditor Internal tidak memadai untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
2. Auditor Internal secara kolektif wajib memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi dalam prinsip-prinsip akuntansi, teknik audit, serta kemampuan mengenali proses bisnis dan menganalisa penyimpangan yang signifikan, serta dapat memberikan solusi yang tepat.
3. Auditor Internal wajib memiliki keahlian dan keterampilan dalam menerapkan teknik dan prosedur audit untuk mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan.
4. Auditor Internal secara kolektif memiliki keahlian dan keterampilan tentang risiko dan pengendalian bidang teknologi informasi dan teknik audit berbasis teknologi informasi.

Kecermatan Profesional

Auditor Internal wajib melaksanakan audit dengan menggunakan keahlian dan kecermatan profesi dan tingkat kehati-hatian yang tinggi, di antaranya:

1. Kecermatan profesional mewajibkan Auditor Internal untuk mewaspadai adanya indikasi kesalahan, kecurangan, dan pelanggaran hukum serta pengendalian yang memadai.

2. If the management of the Internal Audit Function must be carried out in a manner that deviates from the Standards, the Chief Audit Executive must disclose this and report it to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

The Chief Audit Executive and all Internal Auditors must possess professional skills and due care, and meet the professional qualifications as stipulated in the Audit Charter. In addition, Internal Auditors must hold certifications that support their professional expertise.

Internal Audit Professional Qualifications:

1. Possessing/mastering the necessary expertise and skills to perform their core duties and functions.
2. Having the expertise, skills, and competencies in accounting principles, auditing techniques, and the ability to understand business processes, analyze significant deviations, and offer appropriate solutions.
3. Having expertise and skills in applying audit techniques and procedures to identify, investigate, and test indications of fraud.
4. Possessing expertise and skills in risk and control in the field of information technology, as well as in the application of technology-based auditing techniques.

Professional Expertise and Professional Due Care

Professional expertise and professional due care are the responsibility of the Chief Internal Auditor and all Internal Auditors. In conducting audits, Internal Auditors collectively must possess the required professional expertise and professional due care.

Expertise

1. It is mandatory to have internal auditors who possess the necessary expertise and skills to perform their core duties and responsibilities. Alternatively, competent third-party services may be engaged if the internal audit function lacks sufficient capacity to carry out some or all of its responsibilities.
2. The internal audit team, collectively, must have the knowledge, skills, and competencies in accounting principles, audit techniques, and the ability to understand business processes, identify significant irregularities, and provide appropriate solutions.
3. Internal auditors are also required to be skilled in applying audit techniques and procedures to detect, investigate, and test indications of fraud.

4. Internal Auditors collectively must possess expertise in risk and control assessments in the field of information technology, including the use of IT-based audit methodologies.

Professional Due Care

Internal auditors are required to perform audits with a high degree of professional competence, due care, and diligence, including the following:

1. Professional due care obliges internal auditors to remain alert to the possibility of errors, fraud, legal violations, and the adequacy of internal controls.

2. Kecermatan profesional mewajibkan Auditor Internal untuk melakukan pengujian dan verifikasi secara memadai bukan memeriksa transaksi secara rinci. Oleh karena itu, Auditor Internal tidak memberikan jaminan absolut bahwa tidak ada penyimpangan atau ketidakpatuhan.

Dalam menerapkan kecermatan, Auditor Internal secara profesional perlu mempertimbangkan:
1. Ruang lingkup penugasan,
2. Kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan,
3. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (*governance*),
4. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan,
5. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer; dan teknik-teknik analisis lainnya.

2. It requires internal auditors to conduct adequate testing and verification, rather than performing detailed transaction reviews. Therefore, internal auditors do not provide absolute assurance that no deviations or noncompliance exist.

In applying professional due care, internal auditors must also consider:
1. The scope of the assignment,
2. The complexity and materiality of the assignment,
3. The adequacy and effectiveness of risk management, internal control, and governance processes,
4. The cost-benefit consideration of resource utilization in the assignment,
5. The use of computer-assisted audit techniques and other analytical methods.

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit Professional Certification

Sertifikasi Certifications	Dikeluarkan oleh Certifying Institutions	Jumlah Personel Internal Audit Number of Internal Audits Personnels
Qualified Internal Audit (QIA)	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Body	2
Certified Risk Professional (CRP)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency	1

Kode Etik Internal Audit

Dalam rangka pelaksanaan empat peran Pertamina Internal Audit sebagai *Assurance Provider, Problem Solver, Insight Generator*, dan *Trusted Advisor, Chief Audit Executive* menetapkan Kode Etik dan Profesionalisme Internal Audit PT Pertamina Energy Terminal, sebagai berikut:

Integritas

1. Melaksanakan setiap penugasan dengan bersungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, serta menjunjung tinggi profesionalitas dan nilai-nilai kejujuran.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan kegiatan penugasan, termasuk dalam pengungkapan informasi audit.
3. Menjauhkan diri dari segala bentuk kegiatan yang dapat mencederai reputasi profesi dan Perusahaan.
4. Melakukan interupsi terhadap kejadian yang berpotensi *fraud* di setiap lini kegiatan Perusahaan.
5. Mematuhi kode etik Perusahaan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan Perusahaan.

Objektivitas

1. Menghindarkan diri dari segala bentuk aktivitas yang dapat merusak kualitas penugasan termasuk upaya pengambilan manfaat pribadi, konflik kepentingan, dan keberpihakan subjektif dalam pelaksanaan kegiatan penugasan.
2. Menahan diri untuk tidak menilai aktivitas tertentu yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Auditor dan menolak segala bentuk pemberian dari pihak manapun yang dapat menimbulkan dan/atau mempengaruhi penilaian profesional.
3. Mengungkapkan seluruh fakta penting pelaksanaan penugasan, yang jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi kualitas laporan hasil penugasan.

Internal Audit Code of Conduct

In carrying out the four key roles of Pertamina Internal Audit as Assurance Provider, Problem Solver, Insight Generator, and Trusted Advisor, the Chief Audit Executive has established the Code of Conduct and Professional Standards for Internal Audit at PT Pertamina Energy Terminal as follows:

Integrity

1. Execute every assignment with sincerity, a strong sense of responsibility, and the highest standards of professionalism and honesty.
2. Comply with all applicable laws and regulations during the execution of assignments, including in the disclosure of audit information.
3. Avoid any activities that could damage the reputation of the profession or the Company.
4. Intervene in any incidents that potentially involve fraud across all areas of the Company's operations.
5. Adhere to the Company's code of conduct and contribute to the achievement of corporate goals.

Objectivity

1. Avoid all forms of activity that may compromise the quality of audit assignments, including personal gain, conflicts of interest, or subjective bias.
2. Refrain from assessing any activities for which the auditor was previously responsible, and decline any gifts or benefits from any party that could create or influence professional judgment.
3. Disclose all significant facts relevant to audit assignments that, if omitted, may affect the credibility or quality of audit results.

Kerahasiaan

1. Mengelola informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dengan hati-hati dan menjaga kerahasiaannya.
2. Menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Kompetensi

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai dalam setiap pelaksanaan kegiatan penugasan.
2. Meningkatkan keahlian, efektivitas, kualitas penugasan, dan kompetensi melalui pendidikan profesional yang berkelanjutan.

Profesionalisme

1. Memastikan setiap pelaksanaan kegiatan penugasan sesuai dengan Standar Internal Audit Global.
2. Menerapkan sikap profesional yang cermat dan seksama untuk menilai sifat, keadaan dan kepentingan atas penugasan.
3. Menerapkan sikap skeptis dalam merencanakan dan melaksanakan penugasan.
4. Setiap auditor diminta untuk mendorong dan mengimplementasikan budaya berbasis etika dan profesionalisme dalam organisasi, terhadap auditor yang melanggar kode etik dan profesionalisme, akan dikenakan sanksi profesi maupun sanksi sesuai ketentuan Perusahaan.

Keberadaan Internal Audit

Internal Audit dipimpin oleh *Chief Audit Executive* yang di dalam struktur organisasi PT Pertamina Energy Terminal kedudukannnya berada langsung di bawah Direktur Utama. *Chief Audit Executive* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.

Confidentiality

1. Handle all information obtained during assignments with due care and maintain strict confidentiality.
2. Use information obtained in the course of duties solely for the benefit of the Company.

Competence

1. Possess adequate knowledge, skills, and competence in performing all audit assignments.
2. Continuously enhance expertise, effectiveness, and assignment quality through ongoing professional development.

Professionalism

1. Ensure all audit assignments comply with Global Internal Audit Standards.
2. Apply professional diligence and care in assessing the nature, circumstances, and importance of each assignment.
3. Exercise professional skepticism in the planning and execution of audit activities.
4. Each auditor is expected to promote and uphold a culture of ethics and professionalism within the organization. Auditors found to be in violation of this Code of Conduct and Professional Standards will be subject to professional and/or corporate disciplinary sanctions in accordance with Company regulations.

Internal Audit Function

The Internal Audit function is led by the Chief Audit Executive, who, within the organizational structure of PT Pertamina Energy Terminal, reports directly to the President Director. The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, based on the recommendation of the Audit Committee.

Profil Internal Audit

Internal Audit Profile



Faizal Dwi Pratomo

Chief Audit Executive

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Usia
37 Tahun

Latar Belakang Pendidikan
S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Airlangga

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Manager HCBP Holding PT Pertamina (Persero) Nomor SKMJ-03356/K20520/2024-S8 tanggal 8 Juli 2024

Pengalaman Kerja
- *Chief Audit Executive* PT Pertamina Energy Terminal SH IML (01 Juli 2024 s.d saat ini)
- *Senior Auditor* PT Kilang Pertamina Balikpapan (01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2024)
- *Auditor Operation Internal Audit* PT Pertamina Hulu Indonesia (01 Mei 2021 s.d 31 Mei 2022)
- *Auditor West Area Internal Audit* PT Pertamina EP (01 Juli 2019 s.d 30 April 2021)
- *Auditor Corporate & Central Area Internal Audit* PT Pertamina EP (01 Juli 2017 s.d 30 Juni 2019)

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki rangkap jabatan apapun

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Citizenship
Indonesia

Domicile
Jakarta, Indonesia

Age
37 Years old

Educational Background
Bachelor's Degree in Accounting, University of Airlangga

Decree of Appointment
Appointed based on the Decision Letter of the HCBP Holding Manager of PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-03356/K20520/2024-S8 dated July 8, 2024.

Career Experience
- Chief Audit Executive PT Pertamina Energy Terminal SH IML (July 1, 2024- present)
- Senior Auditor PT Kilang Pertamina Balikpapan (June 1, 2022 - June 30, 2024)
- Auditor Operation Internal Audit PT Pertamina Hulu Indonesia (May 1, 2021 to May 31, 2022)
- Auditor West Area Internal Audit PT Pertamina EP (July 1, 2019- April 30, 2021)
- Auditor Corporate & Central Area Internal Audit PT Pertamina EP (July 1, 2017- June 30, 2019)

Concurrent Position
Does not hold any concurrent positions

Affiliate Relation
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders

Sertifikasi Audit Internal

Certifications of Internal Auditor

Sertifikasi Certifications	Jumlah Pegawai Total Employees
Qualified Internal Auditor (QIA)	2 Pegawai 2 Employees
Certified Risk Profesional (CRP)	1 Pegawai 1 Employee

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Internal Audit

1. Melaksanakan penyusunan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain strategi, objek penugasan, jadwal penugasan, *resources* yang dibutuhkan serta mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan AAP dan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuainnya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
3. Melaksanakan pengawasan melalui kegiatan *assurance, advisory, insight*, dan *foresight* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
4. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan berkoordinasi fungsi IWF PT Pertamina (Persero).
5. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*Quality Assessment*) kegiatan Internal Audit.
6. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
8. Melaksanakan pengujian, evaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko serta identifikasi alternatif peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
9. Melaksanakan *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
10. Melaksanakan *monitoring* dan identifikasi perkembangan *trend*, praktik dan isu signifikan serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
11. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan/ *quality assessment* oleh auditor eksternal.
12. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan, tidak terbatas pada kegiatan *assurance, advisory, insight*, dan *foresight* di lingkungan Internal Audit Pertamina *Group*.
13. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/ penyingkapan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Memberikan keyakinan yang memadai atas perlindungan informasi, kerahasiaan, privasi, atas kepemilikan dokumen/ informasi yang diperoleh saat pelaksanaan tugas Audit Internal.
15. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap penugasan dilakukan dengan *supervise* dan didukung dengan kertas kerja, serta rekomendasi, *advice*, dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh *Auditee*.
16. Mendukung fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengembangan profesional berkelanjutan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
17. Mendukung adanya *transfer knowledge* dari pihak eksternal kepada anggota Internal Audit apabila menggunakan jasa pihak eksternal serta tidak mempengaruhi independensi.
18. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Function

1. Preparing the Annual Audit Plan (AAP), including strategies, audit objects, assignment schedules, required resources, and proposing it for approval by the President Director and Board of Commissioners upon recommendation of the Audit Committee.
2. Supervising the implementation of the AAP and reviewing its execution to ensure alignment with the Company's business processes, risks, scope, and audit objectives.
3. Conducting supervision through assurance, advisory, insight, and foresight activities across all areas of Company operations and business.
4. Performing investigative audits on issues that may cause losses to the Company, in coordination with the IWF function of PT Pertamina (Persero).
5. Conducting Quality Assessments to evaluate and improve the quality of Internal Audit activities.
6. Carrying out other assignments mandated by the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
7. Conducting compliance reviews in accordance with applicable laws and regulations.
8. Testing and evaluating the effectiveness of controls and risk management systems, and identifying alternatives to improve operational efficiency.
9. Monitoring the implementation of follow-up actions from internal and external audits as well as other supervisory institutions, and reporting periodically to the President Director and Audit Committee.
10. Monitoring and identifying trends, best practices, and significant emerging issues, and reporting them to the President Director and Audit Committee.
11. Coordinating audit, inspection, and quality assessment activities conducted by external auditors.
12. Coordinating the management of assurance, advisory, insight, and foresight activities within the Pertamina Group's Internal Audit functions.
13. Coordinating with the Company's Supervisory Function in following up on complaints/disclosures received through the Whistleblowing System (WBS) and other public or external sources, in accordance with applicable regulations.
14. Providing reasonable assurance regarding information protection, confidentiality, privacy, and document/ information ownership obtained during audits.
15. Ensuring that each audit assignment is properly supervised, supported with adequate working papers, and that all recommendations, advice, and insights are implementable by the auditee.
16. Supporting the continuous professional development, knowledge, skills, and competence of the Internal Audit function.
17. Facilitating knowledge transfer from external parties to Internal Audit members when external expertise is used, without compromising independence.
18. Communicating resource limitations, changes to the AAP, and any strategic direction shifts to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee.

19. Melaporkan hasil pengawasan serta risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko *fraud,* dan permasalahan lain kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
20. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit, hasil *quality assessment* dan temuan signifikan kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
21. Memperkuat Tata Kelola Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP).

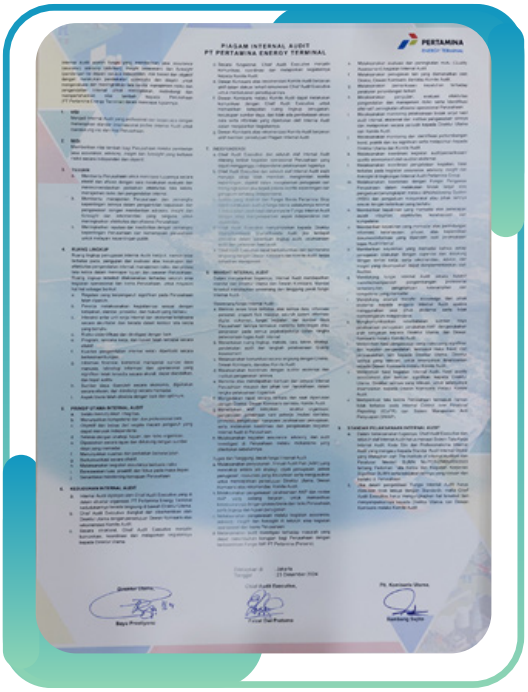
Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Audit Internal

Pada tahun 2024, tidak terdapat pelatihan Audit Internal.

19. Reporting audit results and significant risks and control issues, including fraud risks and other critical matters, to the President Director and relevant Directors, for further submission to the Board of Commissioners via the Audit Committee.
20. Reporting Internal Audit activity results, quality assessment findings, and significant issues to the President Director and relevant Directors, for subsequent submission to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
21. Strengthening Corporate Governance, including but not limited to Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) and the Anti-Bribery Management System (SMAP).

Training and/or Competency Development of Internal Audit

In 2024, no Internal Audit training activities were conducted.



Pelaksanaan kegiatan Internal Audit

Tahun 2024 kegiatan Internal Audit Perseroan yang dilaksanakan oleh Internal Auditor PIS oleh Internal Audit PIS meliputi kegiatan *Assurance* dan *Consulting* baik dalam AAP (*Audit Annual Plan*) maupun Non-AAP. Sepanjang tahun 2024 terdapat satu *Assurance* yang telah dilaksanakan., sebagai berikut:

Counterpart

Internal Audit berperan sebagai *counterpart* bagi auditor atau *assurance provider* lain yakni:

1. Investigator PT Pertamina (Persero);
2. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewaterhouse Coopers (PwC);
4. Internal Auditor PT Pertamina International Shipping (PIS).

Internal Audit Activities Implementation

In 2024, the Company's Internal Audit activities conducted by the Internal Auditor of PT PIS included both Assurance and Consulting engagements, covering assignments under the AAP (Audit Annual Plan) as well as Non-AAP activities. Throughout 2024, one assurance was carried out, as follows:

Counterpart

Internal Audit also served as a counterpart to other auditors or assurance providers, including:

1. Investigators from PT Pertamina (Persero);
2. Auditors from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK);
3. Auditors from the Public Accounting Firm (KAP) PricewaterhouseCoopers (PwC);
4. Internal Auditors of PT Pertamina International Shipping (PIS).

Temuan dan Tidak Lanjut Hasil Audit

Internal Audit telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut temuan audit secara periodik untuk memastikan realisasi tindak lanjut temuan-temuan audit telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti. Jumlah temuan audit yang dimonitor tindak lanjutnya sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Audit Findings and Follow-Up Actions

Internal Audit has conducted periodic monitoring of audit findings to ensure that follow-up actions are implemented and completed as required. The number of audit findings monitored for follow-up throughout 2024 is as follows:

No	Keterangan Description	Desember 2024 December 2024
1	Total Rekomendasi per 31 Desember 2024 Total Recommendations as of December 31, 2024	14
2	Rekomendasi yang ditindaklanjuti per 31 Desember 2024 Recommendations Followed Up as of December 31, 2024	6
3	*Outstanding* Rekomendasi: Outstanding Recommendations:	
	• *Outstanding* melebihi *end date* Outstanding past the agreed end date	-
	• *Outstanding* belum melebihi *end date* Outstanding not yet past the agreed end date	8

Jumlah rekomendasi audit sepanjang periode tahun 2024 adalah 14 rekomendasi. Dari total 14 rekomendasi tersebut, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah 6 rekomendasi (42,85%), sehingga *outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2024 adalah 8 rekomendasi yang belum melebihi *end date*.

The total number of audit recommendations during the 2024 period was 14. Of these, 6 recommendations (42.85%) have been followed up and resolved. As of December 31, 2024, there are 8 outstanding recommendations, all of which have not yet exceeded their respective end dates.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Direksi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern secara efektif yang bertujuan untuk:

1. Menjaga dan mengamankan aset;
2. Menjamin tersedianya informasi dan laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan dan ketentuan *intern*;
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*), dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya; dan
6. Meningkatkan efektivitas budaya Risiko pada organisasi BUMN secara menyeluruh.

SPI pada Perseroan dirancang dan diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota manajemen lainnya serta wajib dilaksanakan oleh seluruh perwira Perseroan.

Based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the Board of Directors is required to implement an effective Internal Control System with the following objectives:

1. Safeguarding and securing assets;
2. Ensuring the availability of accurate, complete, functional, and timely financial and management information and reports;
3. Enhancing compliance with laws and regulations, as well as internal policies and provisions;
4. Reducing financial impacts or losses, deviations including fraud, and violations of prudence aspects;
5. Increasing organizational effectiveness and improving cost efficiency; and
6. Enhancing the effectiveness of the Risk culture within the SOEs organization as a whole.

The Internal Control System (SPI) at the Company is designed and organized by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other management members, and must be implemented by all the Company officers.

Implementasi SPI merupakan proses penyatuan tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan Perusahaan telah terealisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengendalian Internal

Penerapan SPI di Perseroan dimaksudkan untuk memberi keyakinan fokus tujuan dan sasaran kegiatan Perseroan atas:

1. Operasi, yaitu kegiatan operasi dilaksanakan sesuai prinsip efektif dan efisien dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan.
2. Pelaporan, yaitu membuat dan menyajikan laporan keuangan yang bersifat andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

SPI yang diterapkan di Perseroan mencakup:

1. Pengendalian Keuangan
   Sistem Pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas, dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan, serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
2. Pengendalian Operasional

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan operasi maupun investasi agar tercapainya target Perseroan yang terbebas dari kecurangan dan sesuai dengan peraturan di dalam Perseroan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah merujuk pada aspek-aspek yang disyaratkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) IC–Integrated Framework melalui kerangka COSO. Perseroan telah mengadaptasi 5 komponen dan 17 prinsip yang ditentukan dalam kerangka COSO serta menyesuaikan penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka COSO. Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka COSO bertujuan agar Perseroan mampu menentukan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, mengutamakan kepercayaan pelaporan, dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2024

Pada tahun 2024, belum ada informasi terkait efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal.

The implementation of SPI is a continuous integration process of actions and activities to provide assurance that the Company's objectives have been realized through effective and efficient performance, the reliability of financial reporting, asset safeguarding, and compliance with laws and regulations.

Objectives of Internal Control

The implementation of the ICS in the Company aims to provide assurance regarding the focus on the Company's goals and objectives in:

1. Operations, ensuring the operational activities are carried out effectively and efficiently, utilizing all resources available to the company.
2. Reporting, creating and presenting financial reports that are reliable, transparent, and accountable.

Financial and Operational Controls

The SPI implemented in the company includes:

1. Financial Controls
   Internal control systems in financial matters are implemented to provide assurance regarding the accuracy of financial information, the effectiveness and efficiency of the company's management processes, and compliance with relevant laws and regulations.
2. Operational Controls

Alignment of Internal Control System with COSO

Controls in operational activities, including operational and investment activities, are implemented to achieve the Company's targets, free from fraud, and in compliance with internal company regulations.

The implementation of the the Company Internal Control System has referred to the aspects required by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) IC-Integrated Framework through the COSO framework. the Company has adopted the 5 components and 17 principles defined in the COSO framework and adjusted the implementation of the Internal Control System accordingly. The alignment of the Internal Control System with the COSO framework aims to enable the Company to determine objectives aligned with the company's vision and mission, ensure the effectiveness and efficiency of resource utilization, prioritize trustworthy reporting, and comply with applicable laws and regulations.

Effectiveness of the Implementation of the Internal Control System in 2024

In 2024, there was no information on the internal control system implementation effectiveness.

Manajemen Risiko
Risk Management

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur, sistem dan metodologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis/ mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko yang timbul dari aktivitas bisnis Perseroan. Pengelolaan manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*), mengoptimalkan peluang (*opportunity*), mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang sehat, mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat, dan mengintegrasikan strategi korporat. Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan dilakukan oleh Direksi dan Manajemen Perseroan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan *memonitor* risiko usaha yang dihadapi Perseroan dimasa yang akan datang.

Risk Management is a series of procedures, systems, and methodologies implemented to identify, analyze/evaluate, manage, and review risks arising from the Company's business activities. The Company's risk management aims to avoid or minimize potential losses, optimize opportunities, maintain a conducive work environment, enhance shareholder value, improve sound Corporate Governance (GCG), anticipate rapid environmental changes, and integrate corporate strategies. Risk Management is an integral part of good corporate governance and is carried out by the Board of Directors and Company Management to identify, evaluate, manage, and monitor business risks the Company may face in the future.

Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Risiko utama yang dihadapi timbul dari instrumen operasional, seperti kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, kebocoran dan tumpahan minyak di lokasi kerja, menurunnya kualitas baku mutu *fresh water*, *losses volume* produk melebihi toleransi yang ditetapkan di sepanjang jalur suplai dan distribusi, ketidakhandalan sarfas saat melakukan operational *discharge* di terminal, menurunnya penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Risiko Bisnis dengan Freepoint tidak jalan.

The applied risk management covers risks encountered in executing business activities. Major risks faced include operational incidents such as work accidents, fires, explosions, leaks, and oil spills at work sites; deterioration in the quality of fresh water standards; product volume losses exceeding the set tolerance levels along the supply and distribution chain; unreliability of infrastructure during operational discharge at terminals; declining sales of bottled drinking water (AMDK); and business risks with Freepoint becoming non-operational.

Fungsi utama dari manajemen risiko yang dijalankan Perseroan merupakan mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perseroan. Secara rutin, Perseroan menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perseroan dan praktik pasar terbaik.

The primary function of the Company's risk management is to identify all key risks, measure these risks, and manage risk positions according to the Company's policies and procedures. The Company regularly reviews its risk management policies and systems to align with business dynamics and best market practices.

Pedoman berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dan menjadi acuan Anak Perusahaan. Pedoman ini mencakup antara lain:
1. Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi terkait.
3. Prinsip Manajemen Risiko.
4. Kerangka Manajemen Risiko.
5. Proses Manajemen Risiko.
6. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko

The guidelines apply to activities or business operations related to the Company's interests and serve as a reference for Subsidiaries. These guidelines include, among others:
1. Risk Management Policies.
2. Duties and Responsibilities of Related Functions.
3. Risk Management Principles.
4. Risk Management Framework.
5. Risk Management Processes.
6. Implementation of Risk Management Policies.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dasar pelaksanaan atau pengelolaan risiko Perseroan tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina Energy Terminal No. A11-001/PET0600/2023-S9 tanggal 07 Oktober 2023. Pedoman manajemen risiko senantiasa ditinjau dan diperbaharui.

Risk Management Policies

The basis for implementing or managing the company's risks is outlined in the Risk Management Guidelines of PT Pertamina Energy Terminal No. A11-001/PET0600/2023-S9 dated October 7, 2023. These risk management guidelines are continuously reviewed and updated.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh Fungsi *Finance* & *Risk Management* yang disupervisi Direktur. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari

Risk Management Unit

The risk management function is integrated under the Finance & Risk Management Function, which is supervised by the Director. Specifically, risk management responsibilities are assigned to

Manager Finance & Risk Management. Fungsi *Finance & Risk Management* dikelola oleh pimpinan tertinggi fungsi dengan jabatan *Manager* dan terbagi atas 2 sub-fungsi yang terdiri dari *Controller & Risk Management* dan *Treasury & Tax*, dan dalam hal ini pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab sub-fungsi *Controller & Risk Management*.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mencakup:

1. Penetapan Batas Toleransi Risiko.
2. Penyusunan *Risk Profile* termasuk di dalamnya pembuatan skala prioritas dan penetapan rencana *Risk Treatment* (Penanganan Risiko).
3. Pemantauan dan pelaporan pengelolaan risiko.
4. Pengembangan budaya risiko.
5. Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko.

Mekanisme Manajemen Risiko

Dalam rangka membangun kapabilitas pengelolaan risiko pada proses bisnis, Perseroan menggunakan pendekatan 3LOD (*Three Lines of Defence*), dengan menerapkan mekanisme pertahanan secara berlapis dalam mengelola risiko. Lini pertahanan yang pertama terletak pada setiap fungsi sebagai *Risk Owner*. Lini pertahanan kedua adalah pada unit manajemen risiko dan lini pertahanan ketiga berada pada fungsi Internal Audit. Berikut merupakan gambar penerapan konsep 3LOD.

the Manager of Finance & Risk Management. This function is led by the highest-ranking official in the department, holding the position of Manager, and is divided into 2 sub-functions consisting of Controller & Risk Management and Treasury & Tax. In this structure, risk management activities fall under the responsibility of the Controller & Risk Management sub-function.

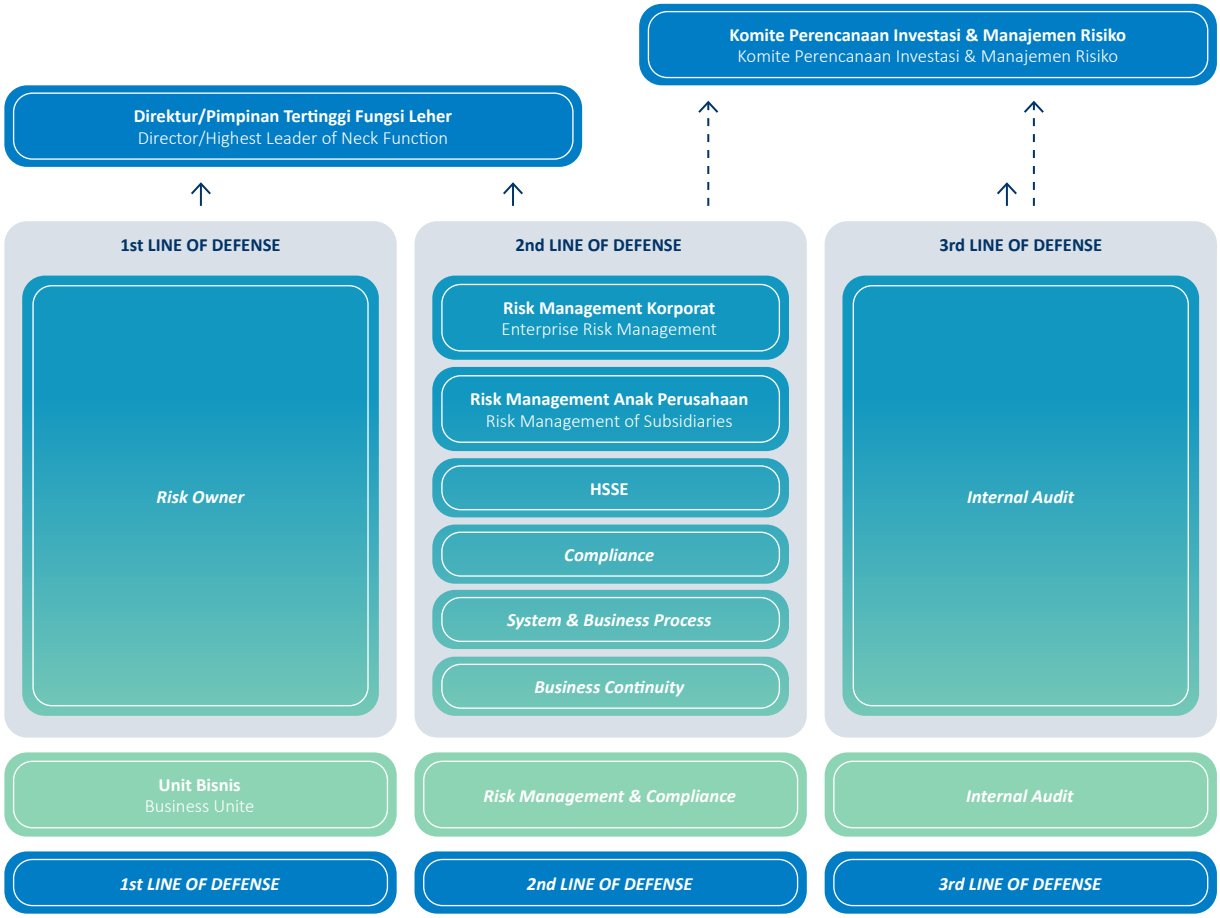
Risk Management Implementation Strategy

The Company's risk management implementation strategy includes:

1. Setting Risk Tolerance Limits.
2. Developing a Risk Profile, including creating a priority scale and establishing a Risk Treatment Plan.
3. Monitoring and reporting risk management.
4. Developing a risk culture.
5. Providing Risk Management infrastructure.

Risk Management Mechanism

In building risk management capabilities in business processes, the Company uses the 3LOD (Three Lines of Defence) approach, implementing layered defense mechanisms in managing risks. The first line of defense lies with each function as the Risk Owner. The second line of defense is the risk management unit, and the third line of defense is the Internal Audit function. Below is an illustration of the implementation of the 3LOD concept.



Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perseroan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *ongoing business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan Perseroan yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perseroan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan. Proses manajemen risiko *Ongoing Business* maupun Investasi sesuai aktivitas usaha Perseroan yaitu:

1. *Scope, Context & Criteria* (Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria).
2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko).
3. *Risk Treatment* (Penanganan Risiko).
4. *Communication & Consultation* (Komunikasi dan Konsultasi).
5. *Monitoring & Review* (Pemantauan dan Tinjauan).
6. *Recording & Reporting* (Pencatatan dan Pelaporan)

Peningkatan Kesadaran Risiko Melalui Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perseroan berupaya meningkatkan kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko guna meningkatkan pengembangan budaya sadar risiko (*risk consciousness*) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Kegiatan pelatihan terkait manajemen risiko yang dilaksanakan tahun 2024 diantaranya:

Pelatihan Terkait Manajemen Risiko Tahun 2024

Materi Pendidikan dan Pelatihan Educational and Training Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Sasaran Peserta Target Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Kesimpulan Agenda Agenda Summary
Pelatihan *Enterprise Risk Management* Enterprise Risk Management Training	06/05/2024 29/05/2024 08/07/2024 29/07/2024 14/10/2024	Pekerja PT Pertamina Energy Terminal	10 (Sepuluh)	

Profil Risiko Perseroan dan Mitigasi Risiko

Profil Risiko Perseroan dan Mitigasi Risiko Company Risk Profile and Risk Mitigation	
Penjelasan Risiko Risk Explanation	**Pemenuhan Target Profit Terminal Belum Maksimal**
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	• Mencari Potential Partner agar Sarfas dapat ter utulisasi secara maksimal • Melakukan perbaikan Sarfas Tidak Melebihi Timeline yang ditetapkan • Pengurangan beban operasional atas biaya *own use* yang tinggi melalui kerjasama dengan PT PLN. • Melakukan Evaluasi *thruput fee* dengan PT Pertamina Patra Niaga secara periodik • Melakukan *upgrading* sarfas agar memenuhi substandar yang dibutuhkan calon *customer*

The risk management process aims to protect the Company in every business activity and transaction, whether it involves ongoing business activities or investment activities. Ongoing business activities are a series of routine the Company activities conducted in accordance with the Company's business processes based on the principle of business continuity. Investment activities, on the other hand, involve the use of resources to increase the Company's value. The risk management process for both ongoing business and investment activities aligns with the Company business activities and includes the following steps:

1. Scope, Context & Criteria (scope, context, and criteria for risk management).
2. Risk Assessment
3. Risk Treatment
4. Communication & Consultation
5. Monitoring & Review
6. Recording & Reporting

Enhancing Risk Awareness Through Risk Management Competency Development

The Company strives to enhance competency and professional certification in Risk Management to foster a culture of risk awareness and knowledge sharing. The risk management training activities conducted in 2024 include:

Risk Management Training in 2024

Company Risk Profile and Risk Mitigation

Suboptimal Terminal Profit Target Achievement
- Seeking potential partners to maximize the utilization of infrastructure (Sarfas)
- Conducting infrastructure improvements within the designated timeline
- Reducing operational expenses from high own-use costs through collaboration with PT PLN
- Conducting periodic throughput fee evaluations with PT Pertamina Patra Niaga
- Upgrading infrastructure to meet the substandard requirements of potential customers

Profil Risiko Perseroan dan Mitigasi Risiko Company Risk Profile and Risk Mitigation	
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	**Keterlambatan Pendanaan Project TLPG Jatim** • Percepatan Finalisasi Kesepakatan *Offtake Agreement Terminal LPG Refrigerated* Jatim (Tuban) antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Energy Terminal • Melakukan Percepatan Perjanjian dengan Menggunakan *MoU land lease agreement* TPPI dan Perseroan • Mengirimkan surat penawaran komersial PLN sebagai dasar pembuatan HoA yang mencantumkan *commercial terms (commercial fee)* • Keikutsertaan Perseroan pada Notpol • Opsi pendanaan menggunakan SHL/ Notpol/ STL/ LTL **Delayed funding for the Jatim TLPG Project** • Accelerating the finalization of the LPG Refrigerated Terminal Offtake Agreement in East Java (Tuban) between PT Pertamina Patra Niaga and PT Pertamina Energy Terminal • Accelerating agreement process by utilizing the MoU for land lease agreement between TPPI and the Company • Sending commercial offer letters to PLN as the basis for preparing the HoA (Heads of Agreement) including commercial terms (commercial fee) • The Company participation in Notpol • Funding options using SHL / Notpol / STL / LTL
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	**Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak** • Pemberian HSSE *Reward and Recognition* untuk meningkatkan motivasi *behavioural safety* kepada pekerja • Melaksanakan seluruh rekomendasi audit dan upaya closing tindak lanjut temuan audit • Usulan pemenuhan kompetensi dan sertifikasi pekerja terkait aspek HSSE • Melaksanakan survei internal dan eksternal atas kehandalan sarfas terminal BBM & LPG • Melakukan maintenance rutin atas sarfas terminal BBM & LPG **Environmental Pollution Due to Oil Spills** • Providing HSSE Reward and Recognition to boost behavioural safety motivation among workers • Implementing all audit recommendations and addressing audit findings • Proposing competency fulfillment and certification for workers related to HSSE aspects • Conducting internal and external surveys on the reliability of Fuel & LPG terminal infrastructure • Performing routine maintenance on Fuel & LPG terminal infrastructure
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	**Terjadinya Kecelakaan Kerja** • Pemberian HSSE *Reward and Recognition* untuk meningkatkan motivasi *behavioural safety* kepada pekerja • Monitor distribusi dan kebutuhan kompetensi pekerja terhadap pengelolaan aspek HSSE • Pemenuhan kompetensi dan sertifikasi pekerja terkait aspek HSSE • Melakukan *survey* atas sarfas terminal BBM & LPG • Melakukan evaluasi SOP/STK yang ada agar sesuai dengan proses bisnis perusahaan • Penerapan CSMS *full cycle kontraktor* • Pelaksanaan Supreme sebagai kontrol HSSE *Management system* terhadap seluruh aspek HSSE Perusahaan • Melakukan *maintenance* rutin atas sarfas terminal BBM & LPG **Occurrence of Work Accidents** • Providing HSSE Reward and Recognition to increase behavioural safety motivation among workers • Monitoring distribution and competency needs of workers in managing HSSE aspects • Fulfilling competency and certification requirements for workers in HSSE • Conducting surveys of Fuel & LPG terminal infrastructure • Evaluating existing SOPs/STKs to ensure alignment with company business processes • Implementing full-cycle CSMS for contractors • Executing Supreme as the HSSE Management System control over all company HSSE aspects • Conducting routine maintenance of Fuel & LPG terminal infrastructure

Profil Risiko Perseroan dan Mitigasi Risiko Company Risk Profile and Risk Mitigation	
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	**Berhentinya Kegiatan Operasional di Terminal Karena Adanya Tuntutan** • Melakukan koordinasi intens baik dengan *legal holding* maupun *subholding* terkait progres penyelesaian perkara **Operational Shutdown at the Terminal Due to Lawsuit** • Conducting intensive coordination with the legal functions of holding and subholding regarding case resolution progress
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	**Proporsi pendapatan yang diperoleh dari pelanggan *Non-Captive* lebih rendah** • Melakukan *benchmark* dengan perusahaan di lingkungan SH IML yang telah memiliki pengalaman dalam mengikuti tender • Mencari informasi tender atau peluang bisnis di luar pertamina dan pendekatan langsung kepada customer **Low Revenue Proportion from Non-Captive Customers** • Benchmarking with SH IML group companies with tender experience • Seeking tender or business opportunities outside Pertamina and engaging directly with potential customers
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	**Tingkat realisasi ABI dan *progress* fisik investasi Perseroan tidak mencapai target** • *Monitoring* dan evaluasi kinerja Investasi • Melibatkan fungsi di Perseroan/SH IML yang relevan dalam membantu proses *gate review* usulan investasi • Menyiapkan backup plan usulan investasi • menyusun anggaran investasi berdasarkan prioritisasi *project* **ABI Realization Rate and the Company Investment Physical Progress Below Target** • Monitoring and evaluating investment performance • Involving relevant the Company/SH IML functions in assisting the investment proposal gate review process • Preparing backup plans for investment proposals • Developing investment budgets based on project prioritization
Penjelasan Risiko Risk Explanation Mitigasi Risiko Risk Mitigation	***Monitoring* transaksi penjualan *fresh water* kapal belum optimal** • *Go-live* (Sosialisasi dan Implementasi) Aplikasi SITA (Sistem Informasi Transaksi Air) • STK atau Juknis terkait Aplikasi SITA (Sistem Informasi Transaksi Air) • *Monitoring* Aplikasi SITA (Sistem Informasi Transaksi Air) **Suboptimal Monitoring of Fresh Water Sales Transactions for Ships** • Go-live (Socialization and Implementation) of the SITA (Water Transaction Information System) Application • SOP or Technical Guidelines related to the SITA (Water Transaction Information System • Application Monitoring the SITA (Water Transaction Information System) Application

Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Perseroan Tahun 2024

Berdasarkan data realisasi atas mitigasi risiko terhadap 8 (delapan) *top* risiko korporat di tahun 2024, Perusahaan telah melakukan penanganan risiko dengan langkah-langkah sebagaimana yang terdapat dalam mitigasi tersebut diatas, yang dapat disimpulkan bahwa realisasi atas mitigasi risiko tersebut telah dilakukan dengan baik. *Monitoring* risiko di tahun 2024 disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan di tahun 2024, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah di susun oleh unit kerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan. *Monitoring* realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding Integrated Marine Logistics* melalui sistem ERMS.

Monitoring of Risk Mitigation Realization in 2024

Based on the realization data of risk mitigation for the 8 (eight) top corporate risks in 2024, the Company has undertaken risk handling measures as outlined in the aforementioned mitigation plans, indicating that the risk mitigation has been well implemented. Risk monitoring in 2024 was structured and carried out comprehensively across business processes in each work unit through stages of risk monitoring, followed by ongoing communication and coordination throughout the year. It was aimed at ensuring the effectiveness of the mitigation (follow-up) actions planned by the work units, confirming they were properly executed in accordance with the established plans, thereby minimizing and controlling potential risks. The realization of risk mitigation is monitored monthly and reported to PT Pertamina International Shipping as the Integrated Marine Logistics Subholding through the ERMS system.

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Akuntan Publik merupakan auditor independen, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Auditor eksternal Perseroan periode 2020 sampai dengan 2024 antara lain sebagai berikut:

The Public Accountant serves as an independent auditor, or external party, that conducts a financial audit to provide an independent and objective opinion regarding the fairness, compliance, and conformity of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations. This process is essential to ensure the independence and quality of the audit results. Therefore, the appointed External Auditor must not have any conflicts of interest with the Company.

The Company's external auditors for the period 2020 through 2024 are as follows:

Tahun Buku Book Year	Nama Akuntan Accountant Name	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Ruang Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Audit Audit Insight	Biaya Audit Cost of Audit
2024	Yusron, S.E., Ak., CPA	KAP Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan (PricewaterhouseCoopers) KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PricewaterhouseCoopers)	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Preparation of Financial Statements for Fiscal Year 2024	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fairly presented in all material res	Rp910.800.000,
2023	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers)	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Preparation of Financial Statements for Fiscal Year 2023	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fairly presented in all material res	Rp436.000.000,-
2022	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers)	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Preparation of Financial Statements for Fiscal Year 2022	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fairly presented in all material res	Rp436.000.000,-
2021	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers)	• Pengendalian internal • Evaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen • Evaluasi penyajian laporan keuangan • Internal control review • Evaluation of the appropriateness of accounting policies applied and the reasonableness of accounting estimates made by management. • Evaluation of financial statement presentation	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fairly presented in all material res	Rp379.388.240,-
2020	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	• Pengendalian internal • Evaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen • Evaluasi penyajian laporan keuangan • Internal control review • Evaluation of the appropriateness of accounting policies applied and the reasonableness of accounting estimates made by management. • Evaluation of financial statement presentation	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Fairly presented in all material res	Biaya dibebankan kepada induk The costs were borne by the parent company

Tahun Buku Book Year	Jasa Selain Audit Keuangan Non-Financial Audit Services	Other Services in Addition to Financial Audit
2024	Jasa penilaian penurunan nilai aset tetap Impairment Assessment Services for Fixed Assets	Rp660.000.000,-

Perkara Hukum Tahun 2024
Legal Cases in 2024

Pada tahun 2024, Perseroan tidak menerima laporan pengaduan Perkara Hukum. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi perkara hukum dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana sepanjang tahun 2024.

In 2024, the Company did not receive any reports or complaints related to legal cases. Throughout the year, no members of the Board of Commissioners or the Board of Directors were involved in any legal proceedings, whether civil or criminal.

Sanksi Administratif 2024
Administrative Sanctions in 2024

Pada tahun 2024, Perseroan tidak menerima sanksi administratif dari pihak regulator maupun laporan pengaduan dalam hal pencemaran lingkungan pada tahun 2024. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi perkara hukum dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana sepanjang tahun 2024.

In 2024, the Company did not receive any administrative sanctions from regulators, nor were there any reports or grievances related to environmental violations. Similarly, no members of the Board of Commissioners or the Board of Directors were involved in any legal proceedings, whether civil or criminal, during the year.

Kode Etik Perseroan
Company Code of Conduct

Kode etik Perseroan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Perwira Perseroan dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Kode etik Perseroan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha jangka panjang Perseroan. Dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya secara profesional, Perseroan mengacu kepada Pedoman Perilaku *Code of Conduct* (CoC) PT Pertamina Energy Terminal tanggal 29 Desember 2022.

COC memuat tentang:

BAB I UMUM

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Pengertian
4. Referensi

BAB II VISI, MISI DAN TATA NILAI UNGGULAN PERUSAHAAN

1. Visi dan Misi
2. Tata Nilai Unggulan Perusahaan

BAB III PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

1. Prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang menjadi prinsip Insan Perseroan
2. Perilaku Integritas Insan Perseroan

The company's Code of Conduct serves as a guide for the conduct of all the Company officers in their interactions with both internal and external parties. The Code of Conduct is one of the factors that influence the long-term sustainability of the company's operations. In carrying out all business activities professionally, the Company adheres to the Code of Conduct Guidelines (CoC) of PT Pertamina Energy Terminal dated December 29, 2022.

Code of Conduct includes:

CHAPTER I GENERAL

1. Objectives
2. Scope
3. Definitions
4. References

CHAPTER II VISION, MISSION, AND COMPANY'S CORE VALUES

1. Vision and Mission
2. Company's Core Values

CHAPTER III PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Company's Principles of GCG as Principles of the Company Individuals
2. Integrity Behavior of the Company Individuals

BAB IV PERSAINGAN SEHAT
1. Persaingan Usaha yang Sehat
2. Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
3. Informasi Penting

BAB V KERAHASIAAN DATA DAN TRANSPARANSI
1. Kerahasiaan Data dan Informasi
2. Pelaporan Akuntansi dan Keuangan
3. Pengelolaan Arsip

BAB VI SIKAP PROFESIONAL
1. Sikap Kerja Profesional
2. Berani Mengungkapkan Masalah
3. Pengambilan Keputusan
4. Hak Kekayaan Intelektual
5. Menghindari Diskriminasi
6. Kesempatan Karir yang Sama
7. Standar Ketenagakerjaan
8. Bebas Narkoba dan Minuman Keras
9. Aktivitas Politik
10. Media Massa
11. Organisasi Profesi
12. Media Massa
13. Organisasi Profesi

BAB VII KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
1. Komitmen Terhadap Pemegang Saham (*Shareholders*)
2. Komitmen Terhadap Pekerja
3. Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
4. Komitmen Terhadap Barang/Jasa
5. Komitmen Terhadap Pemerintah sebagai Regulator
6. Komitmen Terhadap Legislatif
7. Komitmen Terhadap Investor, Kreditur, dan Bank
8. Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi
9. Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan
10. Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

BAB VIII *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
BAB IX KONSEKUENSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

BAB X KOMITMEN INSAN PERSEROAN

Pemberlakuan Kode Etik

COC berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang, dan seluruh karyawan baik di level Kantor Pusat, unit kerja, maupun entitas anak serta afiliasi lainnya yang berada di bawah pengendalian Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

seluruh karyawan telah mengikuti sosialisasi kode etik Perseroan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi kepada karyawan yang terbukti melanggar standar kode etik Perseroan. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran kode etik.

CHAPTER IV FAIR COMPETITION
1. Fair Business Competition
2. Procurement Process for Goods/Services
3. Important Information

CHAPTER V DATA CONFIDENTIALITY AND TRANSPARENCY
1. Data and Information Confidentiality
2. Accounting and Financial Reporting
3. Records Management

CHAPTER VI PROFESSIONAL ATTITUDE
1. Professional Work Attitude
2. Courage to Raise Issues
3. Decision Making
4. Intellectual Property Rights
5. Avoiding Discrimination
6. Equal Career Opportunities
7. Employment Standards
8. Drug-Free and Alcohol-Free Environment
9. Political Activities
10. Mass Media
11. Professional Organizations
12. Mass Media
13. Professional Organizations

CHAPTER VII COMMITMENT TO OTHER STAKEHOLDERS

1. Commitment to Shareholders
2. Commitment to Employees
3. Commitment to Labor Unions
4. Commitment to Goods/Services
5. Commitment to Government as a Regulator
6. Commitment to the Legislative
7. Commitment to Investors, Creditors, and Banks
8. Commitment to Business Partners, Research Institutions, and Universities
9. Commitment to Health, Safety, Security (HSS), and Environmental Protection
10. Commitment to the Surrounding Community and Social Responsibility

CHAPTER VIII WHISTLEBLOWING SYSTEM
CHAPTER IX CONSEQUENCES OF VIOLATING THE CODE OF CONDUCT
CHAPTER X PET INDIVIDUALS' COMMITMENT

Implementation of the Code of Conduct

The Code of Conduct is applicable and mandatory for all individuals within the Company, including the Board of Commissioners, Board of Directors, supporting organs, and all employees at the head office, work units, as well as subsidiary entities and other affiliated entities under the Company's control.

Socialization of the Company's Code of Conduct

All employees have participated in the socialization of the Company's code of conduct.

Sanctions for Violating the Code of Conduct

The Company imposes sanctions on employees who are proven to have violated the standards of the Company's code of conduct. Throughout the year 2024, there were no violations of code of conduct.

Akses dan Transparansi Informasi
Access and Information Transparency

Salah satu prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Perseroan memiliki kewajiban untuk mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan secara terbuka. Perseroan senantiasa menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya implementasi GCG demi terjaminnya hak pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan memiliki situs web resmi Perseroan https://pertamina-pet.com dalam Bahasa Indonesia dan Inggris yang dapat diakses oleh segenap pemangku kepentingan. Situs ini secara berkala terus diperbarui sehingga senantiasa dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan maraknya pemanfaatan media sosial, Perseroan secara aktif membagikan kegiatan dan peristiwa-peristiwa penting melalui media sosial Perseroan. Melalui media sosial, Perseroan dapat menyampaikan informasi secara menarik, variatif dan inovatif kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan juga membuka diri kepada semua pihak atau pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menghubungi kantor pusat Perseroan.

PT Pertamina Energy Terminal (Perseroan)

Kantor Pusat
Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten 42446
Fax: (0254) 601148
Telp: (0254) 601146/601147

Kantor Bisnis
Jl. Yos Sudarso No.205, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360
Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: pet.pertamina
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Website: https://pertamina-pet.com

Transparency is one of the principles of implementing Good Corporate Governance (GCG). The Company has an obligation to disclose material and relevant information about the Company publicly. The Company consistently applies the principle of transparency in conducting its business and operations. It is part of the efforts to implement GCG to ensure the rights of shareholders and other stakeholders.

The Company has an official website for the Company, https://pertamina-pet.com, available in both Indonesian and English, accessible to all stakeholders. The website is regularly updated to provide necessary information to stakeholders.

With the advancement of information technology and the widespread use of social media, the Company actively shares important events and activities through the Company's social media. Through social media, the Company can deliver information in an interesting, diverse, and innovative manner to all stakeholders. the Company is also open to all parties or stakeholders who wish to obtain information directly by contacting the the Company head office.

PT Pertamina Energy Terminal (PET)

Head Office
Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari, Ciwandan District, Cilegon City, Banten Province 42446
Fax: (0254) 601148
Phone: (0254) 601146/601147

Business Office
Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.205, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, North Jakarta, Jakarta Capital Special Region 14360
Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: pet.pertamina
YouTube: Pertamina Energy Terminal
Website: https://pertamina-pet.com

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP)
Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran atau opsi penawaran saham. Dengan demikian laporan tahunan tidak menyajikan informasi mengenai *stock option* yang dimiliki oleh perwira dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/ atau manajemen yang berhak.

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Perseroan.

Stock Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

In 2024, the Company did not have a stock ownership program for employees and/or management conducted through stock offerings or options. Consequently, the annual report does not present information regarding stock options held by officers and management, including the number of shares, exercise prices, terms, or eligibility criteria for employees and/or management.

Stock Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

In 2024, the Board of Directors and Board of Commissioners did not own any shares in the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), saluran WBS yang digunakan oleh Perseroan telah terintegrasi dengan induk Perusahaan. Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran atau tindak kecurangan yang terjadi di lingkungan internal Perseroan. Perseroan memiliki Tata Kerja Organisasi *Whistleblowing System* (WBS) No. B 11-001/PET0500/2022-S9 tanggal 18 Desember 2022.

Penyampaian Laporan Pelanggaran dan Penanganan Pengaduan

Pelapor menyampaikan laporan pelanggaran dengan mengikuti prosedur sesuai TKO *Whistleblowing System* Pertamina, yaitu:

1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Konsultan WBS melalui saluran sebagai berikut:
   a. Telepon: +62 21 3815909, 3815910 dan 3815911
   b. *Website* : www.pertaminaclean.tipoffs.info/
   c. *Email*: pertaminaclean@tipoffs.com.sg
   d. *Fax*: +62 213815912
   e. SMS/*Whatsapp* : +62 8111750612
   f. Kotak Surat : Tip-Offs *Anonymous* Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026
   g. *Drop box* : Kantor Pusat Pertamina
2. Konsultan WBS menerima seluruh pengaduan/ penyingkapan, mencatat, dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
   a. Laporan penerimaan kontak.

As part of PT Pertamina (Persero), the Company's whistleblowing system (WBS) channel is integrated with the parent company. This system serves as a means to disclose allegations of violations or fraudulent acts that occur within the Company's internal environment. the Company has the Whistleblowing System (WBS) Organization Work Procedures No. B 11-001/ Perseroan0500/2022-S9 dated December 18, 2022.

Reporting Violations and Complaint Handling

The reporter submits a violation report by following the procedures in accordance with Pertamina's Whistleblowing System (WBS) OWP, which are as follows:

1. The reporter makes a complaint/disclosure and sends it to the WBS Consultant through the following channels:
   a. Telephone: +62 21 3815909, 3815910, and 3815911
   b. Website: www.pertaminaclean.tipoffs.info/
   c. Email: pertaminaclean@tipoffs.com.sg
   d. Fax: +62 213815912
   e. SMS/WhatsApp: +62 8111750612
   f. Mailbox: Tip-Offs Anonymous Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026
   g. Drop box: Pertamina Head Office
2. The WBS Consultant receives all complaints/disclosures, records them, and documents them in a standard format that produces:
   a. Contact acceptance report

b. Laporan sesuai kategori lingkup pengaduan/ penyingkapan.
c. Laporan diluar kategori lingkup pengaduan/ penyingkapan.
d. Laporan pengungkapan (*disclosure report*).

3. Konsultan WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) dalam format *web* ke dalam *e-room*, yang akan diakses secara online oleh Fungsi *Corporate Secretary* dan Komisaris Utama dalam hal terlapor adalah Direktur. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti Pelapor setiap saat dapat menghubungi konsultan WBS melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.
4. Dalam hal terlapor adalah Pekerja, Fungsi *Corporate Secretary* melakukan Pulbaket dan membuat resumenya kemudian mempresentasikan kepada CCO. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, CCO memutuskan tindak lanjut:

   a. Diteruskan kepada Fungsi terkait, jika pengaduan bukan termasuk kecurangan (*fraud*)
   b. Tindak lanjut atas laporan pengaduan WBS:
      - Ditutup, jika pengaduan tidak memenuhi unsur 3W (*what, where, dan when*).
      - Ditutup, jika kesimpulan penelaahan awal/ klarifikasi tidak mengandung unsur kebenaran.
      - Disampaikan kepada Direktorat teknis terkait dan Fungsi *Human Capital* untuk pemberian sanksinya jika kesimpulan penelaahan awal/klarifikasi mengandung unsur kebenaran.
   c. Jika laporan pengaduan termasuk kecurangan:
      - Disampaikan kepada Fungsi Internal Audit. Untuk proses pendalaman setelah dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi *Corporate Secretary* dan mengandung unsur kebenaran.
      - Tanpa dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi *Corporate Secretary* apabila Fungsi Internal Audit sedang melakukan penelaahan awal.
      - Fungsi *Compliance* dapat meminta bantuan namun tidak terbatas kepada Fungsi *Security, Bunker & Operation Compliance* (BOC) dan Internal Audit dalam proses tindak lanjut laporan pengaduan.
      - Fungsi *Corporate Secretary* dapat bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/ reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar. CCO memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil investigasi WBS yang dilakukan oleh Fungsi terkait.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor sebagaimana diatur dalam perundang- undangan dan *best practices* penyelenggaraan WBS yang berlaku. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk:

1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyikapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.

b. Reports according to the category of the complaint/ disclosure
c. Reports outside the category of the complaint/ disclosure
d. Disclosure report

3. The WBS Consultant submits the disclosure report in web format to the e-room, which will be accessed online by the Corporate Secretary Function and the President Commissioner, in the case where the reported party is a Director. In order to know and ensure their complaint is received and followed up on, the reporter can contact the WBS consultant through the channel they have previously used.
4. In the case where the reported party is an Employee, the Corporate Secretary Function conducts an initial investigation and creates a summary, then presents it to the CCO. Based on the results of this presentation, the CCO decides on the follow-up actions:
   a. Forwarded to the relevant Function if the complaint does not involve fraud.
   b. Follow-up on the WBS complaint:
      - Closed if the complaint does not meet the 3W elements (what, where, and when).
      - Closed if the initial review/clarification conclusion does not contain elements of truth.
      - Forwarded to the relevant technical directorate and the Human Capital Function for imposing sanctions if the initial review/clarification conclusion contains elements of truth.
   c. If the complaint involves fraud:
      - It is forwarded to the Internal Audit Function. For further investigation after an initial review by the Corporate Secretary Function and contains elements of truth.
      - Without an initial review by the Corporate Secretary Function if the Internal Audit Function is conducting an initial review.
      - The Compliance Function can seek assistance, including but not limited to the Security Function, Bunker & Operation Compliance (BOC), and Internal Audit, in the follow-up process of the complaint.
      - The Corporate Secretary Function can collaborate with external investigators if the substance of the complaint/disclosure is related to the Company's image/reputation or causes significant losses. The CCO monitors the implementation of the follow-up actions resulting from the WBS investigation carried out by the relevant Functions.

Protection for Reporters

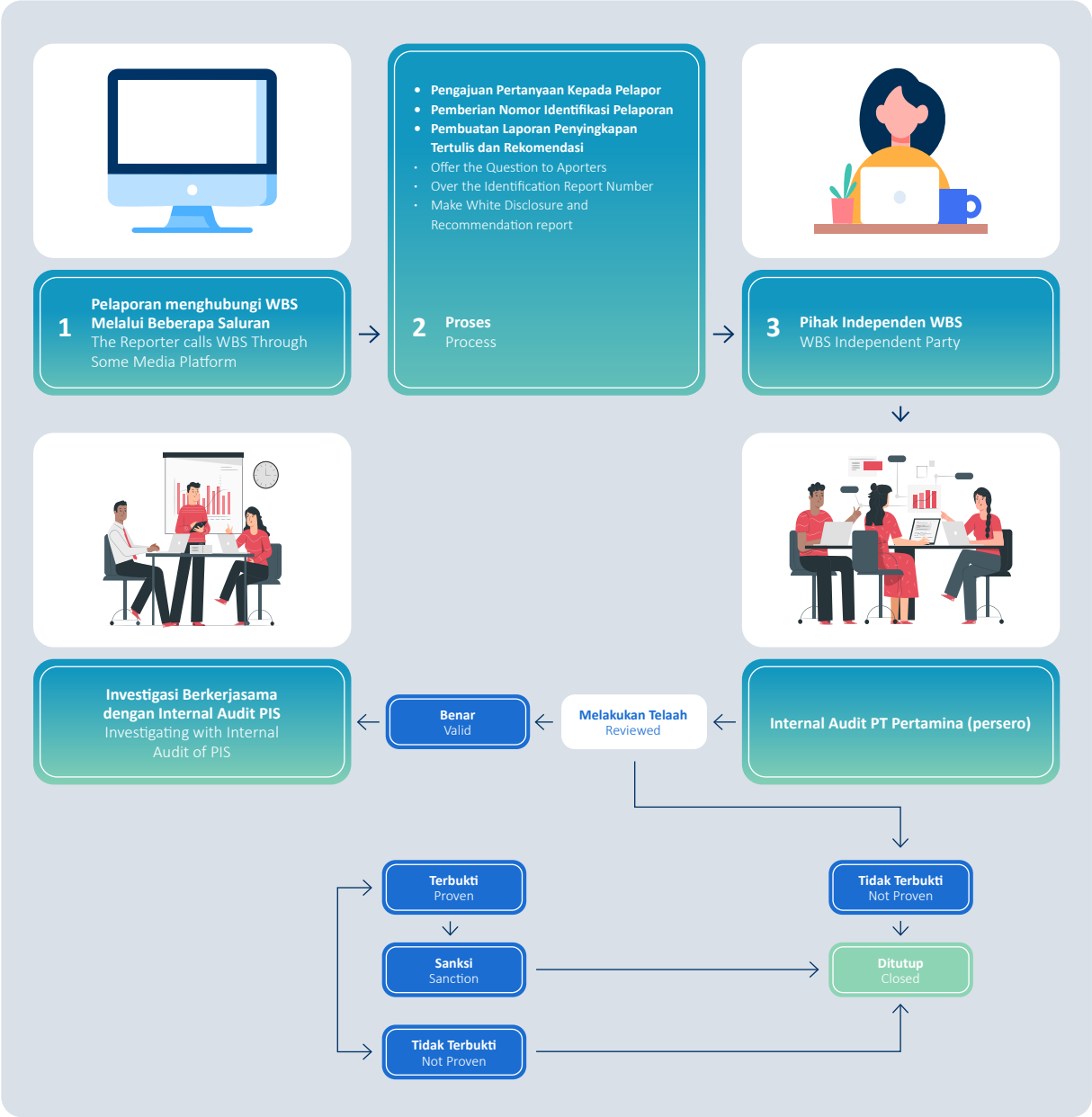
The Company provides assurance of protection to the reporter as regulated by laws and applicable best practices in implementing WBS. The Company provides protection to the reporter in the following forms:

1. In the process of following up on each complaint/disclosure, the Company is obliged to prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence, and professionalism.
2. The identity of the reporter is guaranteed confidentiality by the Company.
3. The Company ensures protection for the reporter from any form of threat, intimidation, punishment, or unpleasant actions from any party, as long as the reporter maintains the confidentiality of the reported case to any party.

4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan penelaahan awal/klarifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan.
5. Dalam memberikan perlindungan, Perusahaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

4. This protection also applies to employees conducting initial investigations/clarifications and individuals providing information related to the complaint/disclosure.
5. In providing protection, the Company may collaborate with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).
6. Those who violate the principle of confidentiality will be subjected to severe sanctions in accordance with the applicable provisions within the Company.

Prosedur Penetapan Calon Direksi/Komisaris Cucu Perusahaan - *Bottop Up*
Procedure for Determining Candidate of Board of Directors/Commissioners of Second Tier Subsidiary Companies - Bottom Up



Pihak yang Mengelola Pengaduan

Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan/penyingkapan berdasarkan kategori Terlapor adalah:

1. CCO: Jika Terlapor adalah Insan Pertamina Energy Terminal selain CCO, pekerja Fungsi *Corporate Secretary*, Dewan Komisaris, dan Direksi.
2. Dewan Komisaris: jika Terlapor adalah Direksi.
3. Direktur: jika CCO dan pekerja Fungsi *Corporate Secretary*.
4. Pemegang Saham: jika terlapor adalah Dewan Komisaris.

Pengaduan yang masuk ke saluran WBS akan dikelola oleh:

1. Konsultan WBS
   Konsultan WBS merupakan konsultan independen yang profesional dengan reputasi baik, bersifat perseorangan maupun badan usaha yang ditunjuk oleh Perusahaan. Konsultan WBS menerima dan mengelola semua pengaduan yang berhubungan dan terkait dengan WBS. Konsultan WBS memberikan hasil laporan pengungkapan (*disclosure report*) melalui sarana *e-room* untuk diteruskan kepada Fungsi Internal Audit.
2. *Chief Audit Executive* (CAE) PT Pertamina (Persero)
   CAE adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas program kepatuhan Perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik pemerintah, Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut

Sampai dengan 31 Desember 2024, total terdapat 4 pengaduan WBS dengan detail sebagai berikut:

Parties Responsible for Handling Complaints

The parties authorized to follow up on complaints/disclosures based on the categories of the Reported are:

1. CCO: If Reported is any individual within Pertamina Energy Terminal, except for the CCO, employees of the Corporate Secretary Function, Board of Commissioners, and Board of Directors.
2. Board of Commissioners: If the Reported is the Board of Directors.
3. Director: If it involves the CCO and employees of the Corporate Secretary Function.
4. Shareholders: If the Reported is the Board of Commissioners.

Complaints received through the WBS channel will be managed by:

1. WBS Consultant
   The WBS Consultant is an independent consultant who is professional and with good reputation, either an individual or a corporate entity, appointed by the Company. The WBS Consultant receives and manages all complaints related to and associated with WBS. The WBS Consultant provides the disclosure report through the e-room platform to be forwarded to the Internal Audit Function.
2. Chief Audit Executive (CAE) of PT Pertamina (Persero)
   The CAE is an official appointed by the President Director responsible for the Company's compliance program, ensuring the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees comply with government regulations, Company policies, and other applicable provisions, as well as ensuring organizational behavior in accordance with the Company's Code of Conduct.

Number of Complaints and Follow-up Actions

As of December 31, 2024 there were total 4 reports on the WBS as follows:

Status	Jumlah Total
Selesai Investigasi Investigation Completed	1
Proses Penanganan Handling Process	1
Analisa Awal Preliminary Analysis	2
Total	4

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Pada tahun 2024, Perseroan memiliki Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) No. A 20-001/ PET0100/2024-S9. Perseroan berkomitmen dalam mencegah praktik korupsi telah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan iklim bisnis yang bersih dan transparan. Pencegahan praktik korupsi pada Perseroan juga mencakup larangan praktik suap, pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi
Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi sebagai berikut:

In 2024, the Company had the Guidelines on Gratuities, Refusals, Acceptance, Gifts/Souvenirs, and Entertainment (Entertainment) No. A 20-001/PET0100/2024-S9 . The Company is committed to preventing corrupt practices and aligns with the government's goal of fostering a clean and transparent business climate. The prevention of corrupt practices within the Company includes the prohibition of bribery, money laundering, gratuities, and others.

Anti Corruption Training/Socialization
In 2024, the Company held anti-corruption socialization as follows:

Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelatihan Training Date	Peserta Participants	Tempat Pelatihan Training Venue
Fraud Perception	Senin, 23 Desember 2024 Monday, December 23, 2024	35 Peserta yang berasal dari Vendor 35 Participants from Vendor	el Hotel Jakarta, Kelapa Gading (Ballroom Lantai 2) el Hotel Jakarta, Kelapa Gading (2nd Floor Ballroom)
Fraud Perception	Selasa, 24 Desember 2024 Tuesday, December 24, 2024	*User Workshop* PT Pertamina Energy Terminal Tahun 2024 User Workshop PT Pertamina Energy Terminal in 2024	el Hotel Jakarta, Kelapa Gading (Meeting Room Emerald) el Hotel Jakarta, Kelapa Gading (Emerald Meeting Room)

Penilaian Penerapan GCG
Assessment of GCG Implementation

SK-16/S.MBU/2012 dijadikan acuan oleh Perseroan dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Tujuan Penilaian GCG
Tujuan pelaksanaan asesmen GCG di lingkungan Perseroan adalah:
1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/ evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Perseroan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di Perseroan yang bersangkutan.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perseroan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *Corporate Governance* di lingkungan Perseroan.
4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, *infrastructure* dan *soft structure* terkait GCG serta memberikan penilaian *scoring* berdasarkan parameter

SK-16/S.MBU/2012 serves as a reference for the Company in assessing the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Objectives of GCG Assessment
The objectives of conducting GCG assessments in the the Company environment are as follows:
1. Measure the quality of GCG implementation through the assessment/evaluation of the level of compliance with GCG criteria based on the actual conditions applied in the Company, by assigning scores/values to GCG implementation and categorizing its quality.
2. Identify the strengths and weaknesses of GCG implementation in the Company and propose improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and GCG implementation in the respective the Company.
3. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for the improvement and development of Corporate Governance policies in the the Company environment.
4. Map and evaluate the completeness of documents, infrastructure, and soft structures related to GCG, provide scoring assessments based on the parameters of the

alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di Perseroan dan memberikan hasil evaluasi dan analisis.
5. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perseroan sejalan dengan *best practices*.

Ministry of State-Owned Enterprises Secretary's Decision Number: SK16/S.MBU/2012 on GCG practices in the Company, and provide evaluation and analysis results.
5. Provide recommendations for improvement to address gaps found in the implementation of GCG in the Company in line with best practices.

Kriteria yang Digunakan

Aspek dan indikator penilaian dalam Asesmen GCG Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya.

Criteria Used

The assessment aspects and indicators in the Company's GCG Assessment are as follows:
1. Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Aspects.

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik

Results of Good Corporate Governance Implementation Assessment

	Aspek Pengujian/ Indikator/Parameter Aspect of Assessment/ Indicator/ Parameter	Bobot Weight	Capaian Tahun 2024 Achievement in 2024		Kualifikasi Qualification	Capaian Tahun 2022 Achievement in 2022		Kualifikasi Qualification
			Skor Score	% Capaian % Achievement		Skor Score	% Capaian % Achievement	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance	7,000	6,52	93,07	Sangat Baik Very Good	5,28	75,37%	Baik Good
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,000	6,74	74,88%	Cukup Baik Fairly Good	6,28	69,75%	Cukup Baik Fairly Good
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,000	22,41	64,03%	Cukup Baik Fairly Good	21,40	61,13%	Cukup Baik Fairly Good
IV	Direksi Board of Directors	35,000	28,36	81,04%	Baik Good	24,12	68,93%	Cukup Baik Fairly Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and transparency	9,000	6,53	72,55%	Cukup Baik Fairly Good	6,49	72,15%	Cukup Baik Fairly Good
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
SKOR KESELURUHAN TOTAL SCORES		100,000	70,56	70,56%	Cukup Baik Fairly Good	63,75	63,75%	Cukup Baik Fairly Good
		KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG DI Perseroan = "CUKUP BAIK" CLASSIFICATION OF THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION IN THE COMPANY = "FAIRLY GOOD"				KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG DI Perseroan = "CUKUP BAIK" CLASSIFICATION OF THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION IN THE COMPANY = "FAIRLY GOOD"		

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik
Notes : 0-50 Bad |50-60 : Poor | 60-75 : Fairly Good | 75-85 : Good | 85-100: Very Good

Catatan: Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk dilakukan *Self Assessment* GCG Perseroan untuk tahun buku 2023.

In order to follow up on the Secretary's Decree regarding the Revocation of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-12/S.MBU/08/2023 concerning the Revocation of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners has instructed a GCG Self-Assessment to be conducted for the Company for the 2023 fiscal year.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Penerapan GCG

Recommendations and Follow-up Actions from the GCG Implementation Assessment

	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Aspect of Assessment/ Indicator/ Parameter	Jumlah AOI Total AOI	Sudah ditindaklanjuti Followed Up	Belum ditindaklanjuti Has not been Followed Up
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance	14	13	1
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	19	13	6
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	65	38	27
IV	Direksi Board of Directors	47	35	12
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and transparency	7	7	-
	Total	152	106	46

Area Pengembangan dan Rekomendasi

Penilaian atas penerapan GCG telah dilaksanakan tersebut telah menghasilkan temuan-temuan yang menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan praktik GCG di Perseroan di masa yang akan datang. Berikut adalah rekomendasi dari penilaian GCG di tahun 2024:

Areas for Improvement and Recommendations

The assessment of GCG implementation has resulted in several findings that serve as recommendations for enhancing the Company's corporate GCG practices in the future. The following are the recommendations based on the 2024 GCG assessment:

Aspek 1

Aspect 1

Tabel Rekomendasi Asesmen GCG 2024
Table of Assessment Recommendation of GCG in 2024

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
1	1.1.(4)	Perusahaan diharapkan dapat memastikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG *Code*) ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini. The Company is expected to ensure that the Good Corporate Governance (GCG) Code is reviewed and updated periodically in accordance with the prevailing laws and regulations.
2	1.2.(3d)	Perusahaan diharapkan dapat melengkapi muatan mengenai pemberian donasi ke dalam pedoman perilaku (Code of Conduct). The Company is expected to include provisions regarding donation giving in the Code of Conduct.
3	1.2.(4)	Perusahaan diharapkan dapat memastikan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini. The Company is expected to ensure that the Code of Conduct is reviewed and updated periodically in accordance with the prevailing laws and regulations.
4	5.12.(2)	Perusahaan diharapkan dapat membuat rekapitulasi pelaporan kegiatan tentang Pengendalian Gratifikasi yang memuat antara lain; terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan The Company is expected to compile a summary report of activities related to Gratification Control, including reports on gratification control within the company environment.
5	5.12.(3)	Perusahaan diharapkan dapat membuat rekapitulasi pelaporan kegiatan tentang Pengendalian Gratifikasi yang memuat antara lain; terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung. The Company is expected to compile a summary report of activities related to Gratification Control, including periodic review and improvement of supporting tools.
6	6.13.(2c)	Perusahaan diharapkan dapat menambahkan muatan Pedoman Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*whistle blowing System*), mengenai Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran. The Company is expected to include provisions in the Whistle Blowing System Guidelines regarding the obligation to report violations.
7	6.15.(4)	Perusahaan diharapkan dapat membuat rekapitulasi pelaporan kegiatan tentang Penanganan Pelanggaran yang memuat antara lain terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan *whistle blowing* secara berkala yang menggambarkan seluruh Sistem Tata Kerja Organisasi unit WBS (*whistle-blowing system*) sepanjang tahun penilaian yang memuat program dan realisasi, pemutakhiran pedoman, kegiatan sosialisasi dan analisis atas laporan yang masuk. The Company is expected to compile a summary report of activities related to Violation Handling, including evaluation and periodic reporting on the implementation of the whistle blowing policy that describes the entire organizational work system of the WBS unit (whistle-blowing system) during the assessment year, including programs and realizations, guideline updates, socialization activities, and analysis of incoming reports.

Aspek 2

Aspect 2

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
1	7.17.4(a)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan SK pembentukan tim UKK untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan; Shareholders are expected to establish a decree for the formation of the UKK team to conduct fit and proper tests;
2	7.19(1)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan bagi anggota Direksi anak Perusahaan Shareholders are expected to establish provisions regarding dual positions that create conflicts of interest for members of the subsidiary's Board of Directors
3	7.19(2)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap anggota Direksi anak Perusahaan, paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut. Shareholders are expected to establish regulations/mechanisms for resignation from dual positions held by subsidiary Directors, no later than 30 days from the dual appointment.
4	8.23.(3)	Pemegang Saham diharapkan dapat melaksanakan penilaian Dewan Komisaris anak Perusahaan mencakup semua kriteria penilaian yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan) Shareholders are expected to carry out an assessment of the Board of Commissioners of the subsidiary, covering all evaluation criteria as stipulated by applicable laws and regulations (assessments of integrity, dedication, understanding of corporate management issues related to one of the management functions, and possessing adequate knowledge in the Company's line of business.)
5	8.24.(2b)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen bagi anak Perusahaan paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya dan kriteria pengangkatan Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi. Shareholders are expected to appoint Independent Commissioners for the subsidiary representing at least 20% of the total members of the Board of Commissioners, explicitly stated in the appointment decision, and the criteria for appointing Independent Commissioners must include competencies in auditing, finance, and accounting.
6	8.25.(1)	Pemegang Saham diharapkan dapat mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris bagi anak Perusahaan yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Shareholders are expected to regulate and determine the maximum number of Board of Commissioner positions a person may hold in subsidiaries.
7	8.25(2)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Shareholders are expected to define roles that may lead to conflicts of interest for the Board of Commissioners in accordance with applicable laws.
8	9.27(2ab)	Pemegang Saham diharapkan dapat melaksanakan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. Shareholders are expected to carry out discussions/reviews of the draft RJPP or revised RJPP.
9	9.27.3	Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. Shareholders are expected to authorize/approve the draft RJPP or revised RJPP.
10	9.27.4	Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara tepat waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan. Shareholders are expected to provide ratification/approval of the RJPP Draft or Revised RJPP in a timely manner, no later than 60 (sixty) days after the complete Draft RJPP or Revised RJPP is received, or before the commencement of the RJPP or Revised RJPP period.
11	9.28.4	Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku Shareholders are expected to approve the RKAP draft in a timely manner in accordance with applicable regulations.
12	10.30.(1b)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja individu Shareholders are expected to establish a Management Contract that includes individual performance targets.
13	10.30.(1c)	Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan penilaian kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi Shareholders are expected to evaluate the performance of individual Directors based on their performance reports.
14	10.30.(2b)	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan target kinerja Dewan Komisaris Shareholders are expected to set performance targets for the Board of Commissioners.
15	10.31.1a	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris bagi anak Perusahaan Shareholders are expected to establish guidelines for salaries/honoraria, benefits, and facilities for Directors and Commissioners of subsidiaries.
16	10.31.2a	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan pedoman tantien/insentif kinerja Dewan Komisaris bagi anak Perusahaan Shareholders are expected to set guidelines for performance incentives/bonuses for the Board of Commissioners in subsidiaries.
17	10.32.1	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal. Shareholders are expected to establish guidelines for the appointment of external audits.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
18	10.32.3	Pemegang Saham diharapkan dapat menetapkan besarnya honorarium/imbalan jasa untuk auditor eksternal tersebut Shareholders are expected to determine the amount of honorarium/fee for the external auditor.
19	12.38.2	Pemegang Saham diharapkan dapat melaksanakan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan. Shareholders are expected to conduct discussions and evaluations of the Good Corporate Governance implementation within the Company.
20	12.38.3	Pemegang Saham diharapkan dapat melaksanakan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Pertamina Energy Terminal. Shareholders are expected to follow up on the improvement areas identified in the assessment of Good Corporate Governance implementation at Pertamina Energy Terminal.

Aspek 3

Aspect 3

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
1	13.41.(3)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perusahaan. The Board of Commissioners is expected to ensure the attendance/active participation of its members in the company orientation program.
2	13.42.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to prepare a work plan and budget for training activities for the members of the Board of Commissioners.
3	13.42.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melaksanakan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to carry out training for its members in accordance with the Board of Commissioners' work plan.
4	13.42.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to prepare a report on the training completed by its members.
5	14.43.(2)	Terdapat penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris. There must be a formal assignment by the Board of Commissioners outlining the division of duties among its members.
6	14.43.(3)	Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Komisaris The division of duties must cover all areas of responsibility of the Commissioners.
7	14.43.(4)	Terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/anggota Komite Dewan Komisaris. There must be assignments of members of the Board of Commissioners to serve as chairman/vice-chairman/ members of the Board of Commissioners' Committees.
8	14.44.(1)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terkait pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain). The Board of Commissioners is expected to establish a formal decision-making mechanism, including decisions made outside of meetings (through circular resolutions or other means).
9	14.45.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to prepare an annual work plan and budget.
10	14.45.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris The annual work plan and budget must include the activities and the budget required to implement the work plan and must be approved by the Board of Commissioners.
11	14.45.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat rencana kerja dan anggaran tahunan memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. The annual work plan and budget must include key performance indicators and their targets that reflect the success criteria for the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners.
12	14.45.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris menggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal. The Board of Commissioners is expected to ensure that the preparation of its Annual Work Plan and Budget utilizes all available tools and support systems of the Board of Commissioners.
13	14.45.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP. The Board of Commissioners is expected to submit its Annual Work Plan and Budget to the Board of Directors to be incorporated as part of the Company's RKAP.
14	14.45.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan. The Board of Commissioners is expected to submit its Annual Work Plan and Budget in writing to the Shareholders for approval.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
15	14.46.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. The Board of Commissioners is expected to ensure that governance policies/guidelines include provisions regarding: the type of information to be submitted (periodically or incidentally), the standard time for its delivery, and the mechanism for the Board of Directors to submit such information.
16	14.46.(3)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya. The Board of Commissioners is expected to ensure that if the Board of Directors fails to meet their obligation to provide information, the Board of Commissioners initiates communication with the Board of Directors to request the necessary information for the execution of its duties.
17	15.47.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan proses telaah RJPP sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners is expected to conduct a review of the RJPP in accordance with the predetermined work plan, through internal discussions or joint meetings with the Board of Directors.
18	15.47.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris). The Board of Commissioners is expected to document the results of the RJPP review in writing (such as minutes of internal Board of Commissioners' meetings or Board of Commissioners' Committee meetings).
19	15.47.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. The Board of Commissioners is expected to ensure that the results of the RJPP review are communicated to and followed up by the Board of Directors.
20	15.47.(3).d	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses telaah RJPP yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to ensure that the RJPP review process utilizes all the tools and resources available within the Board of Commissioners.
21	15.47.(4).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS. The Board of Commissioners is expected to provide a written response in the form of opinions and recommendations regarding the draft RJPP to the GMS.
22	15.47.(4).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan. The Board of Commissioners is expected to submit its response to the RJPP draft within the timeframe stipulated by the regulations/policies.
23	15.47.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality of its response to the RJPP draft.
24	15.48.(4).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS. The Board of Commissioners is expected to provide a written response in the form of opinions and recommendations regarding the draft RKAP to the GMS.
25	15.48.(4).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Board Manual. The Board of Commissioners is expected to submit its response to the RKAP draft within the timeframe set in the Board Manual.
26	15.48.(4).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. The Board of Commissioners is expected to draw a conclusion as to whether the RKAP draft aligns or does not align with the RJPP.
27	16.49.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan adanya penyediaan bahan bacaan/referensi oleh Perusahaan yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan. The Board of Commissioners is expected to ensure the availability of reading materials/references provided by the Company that help the Board update its knowledge of changes in the business environment and issues faced by the Company and/or requests for guidance from the Board of Directors on the Company's issues.
28	16.50.(1)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari *stakeholder* dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. The Board of Commissioners is expected to establish a mechanism to respond to or follow up on suggestions, concerns, or complaints from stakeholders and to provide the Board of Directors with recommendations for resolution.
29	16.50.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi. The Board of Commissioners is expected to ensure that stakeholder suggestions, expectations, concerns, and complaints are intensively discussed and that these discussions result in conclusive recommendations for the Board of Directors.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
30	16.50.(3)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi. The Board of Commissioners is expected to submit suggestions, expectations, concerns, and complaints to the Board of Directors for resolution.
31	16.50.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan *stakeholder* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The Board of Commissioners is expected to ensure that the discussion process regarding stakeholder suggestions, issues, or complaints involves all relevant mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
32	16.50.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan tidak terdapat permasalahan hubungan dengan *stakeholder* yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to ensure that there are no stakeholder relationship issues that impact the Company's performance and that have not been discussed in the Board of Commissioners' meetings.
33	16.51.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) *internal control report*. The Board of Commissioners is expected to conduct a review of: (1) policies/drafts and the implementation of internal control systems; (2) the evaluation results of the effectiveness of internal controls at the entity level; (3) the evaluation results of the effectiveness of internal controls at the operational/activity level; and (4) internal control reports.
34	16.51.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to produce the results of its review of internal control policies/design and implementation.
35	16.51.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The Board of Commissioners is expected to ensure that the review process involves all relevant mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
36	16.51.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi. The Board of Commissioners is expected to deliver guidance to the Board of Directors regarding improvements to the effectiveness of the internal control system.
37	16.51.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. The Board of Commissioners is expected to ensure the quality of improvements to the effectiveness of the internal control system is adequate.
38	16.52.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners is expected to conduct a review of the Company's risk management policy and implementation (including the work plan of the risk management unit), the results of risk analysis on the RKAP draft and its mitigation strategies, and the periodic risk management reports submitted by the Board of Directors.
39	16.52.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. The Board of Commissioners is expected to produce the results of its review of the Company's risk management policy and implementation.
40	16.52.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The Board of Commissioners is expected to ensure that the review process involves all relevant mechanisms within the Board of Commissioners (Board Commissioners Committees).
41	16.52.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. The Board of Commissioners is expected to provide direction on improving the quality of the company's risk management policy and implementation.
42	16.52.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan. The Board of Commissioners is expected to ensure an adequate quality of the Board's direction on the company's risk management.
43	16.53.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. The Board of Commissioners is expected to review the information technology system policy and its implementation according to the established work plan.
44	16.53.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to produce the results of its review of the company's information technology system policy and its implementation.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
45	16.53.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The Board of Commissioners is expected to ensure that the review process utilizes all mechanisms within the Board of Commissioners (Board Committees).
46	16.53.(4)	Dewan Komisaris diharapka dapat menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi. The Board of Commissioners is expected to provide direction to the Board of Directors regarding the company's information technology system policy and implementation.
47	16.53.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality of the Board's direction on the company's information technology system policy and its implementation.
48	16.54.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi. The Board of Commissioners is expected to review: (1) the career development policy and its implementation, including the placement of employees in positions within the company's organizational structure, promotions and demotions, as well as transfers; (2) the promotion and transfer plan for one level below the Board of Directors.
49	16.54.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to provide direction based on the results of supervision and review of the succession plan and its implementation.
50	16.54.(3).c	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The review process carried out by the Board of Commissioners is expected to involve all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
51	16.54.(4)	Dewan Komisaris diharapkan menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to provide direction to the Board of Directors regarding the management succession policy and its implementation.
52	16.54.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality of the Board's direction on the management succession policy and its implementation.
53	16.55.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan dengan manajemen ataupun auditor eksternal. The Board of Commissioners is expected to conduct a review of the accounting policies and financial statement preparation, through discussions of quarterly financial statements with management and/or the external auditor.
54	16.55.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. The Board of Commissioners is expected to provide advice based on the results of the review of accounting policies and financial statement preparation.
55	16.55.(3).c	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The review process carried out by the Board of Commissioners is expected to involve all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
56	16.55.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. The Board of Commissioners is expected to provide direction to the Board of Directors on accounting policies and financial statement preparation and their implementation.
57	16.55.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality of the Board's advice regarding accounting policies and financial statement preparation and their implementation.
58	16.56.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to review the procurement policy and its implementation.
59	16.56.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to provide advice based on the results of supervision and review of the procurement policy and its implementation.
60	16.56.(3).c	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The review process carried out by the Board of Commissioners is expected to involve all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
61	16.56.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to provide direction to the Board of Directors regarding the procurement policy and its implementation.
62	16.56.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality of its recommendations on procurement policy and implementation.
63	16.57.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to review the quality and service policy and its implementation.
64	16.57.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan arahan berdasarkan hasil hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut. The Board of Commissioners is expected to provide direction based on the results of the review of the quality and service policy and its implementation.
65	16.57.(3).c	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan dapat menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The review process conducted by the Board of Commissioners is expected to utilize all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
66	16.57.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to provide direction to the Board of Directors regarding the quality and service policy and its implementation.
67	16.57.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality of its recommendations regarding the quality and service policy and implementation.
68	17.58.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners is expected to conduct a review of the Board of Directors' compliance with the Articles of Association, business-related regulations (sectoral regulations), other applicable laws and regulations, and agreements with third parties.
69	17.58.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan hasil telaahan atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners is expected to present the results of its review on the company's compliance with applicable laws, the Articles of Association, and all agreements and commitments made with third parties.
70	17.58.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The review process conducted by the Board of Commissioners is expected to utilize all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
71	17.58.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan. The Board of Commissioners is expected to provide directives to the Board of Directors based on the results of the review.
72	17.58.(5)	Dewan Komisari diharapkan melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisari semesteran dan tahunan. The Board of Commissioners is expected to report the results of the evaluations/discussions to the GMSA in the semi-annual and annual supervisory reports.
73	17.58.(6)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality in the evaluation of the Board of Directors' compliance with company operations and alignment with the RKAP and/or RJPP.
74	17.58.(7)	Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan dapat menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The evaluation process conducted by the Board of Commissioners is expected to utilize all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
75	17.58.(8)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas pengawasan yang memadai atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate supervisory quality of the Board of Directors' compliance with the Articles of Association, laws and regulations, and agreements with third parties.
76	17.58.(9)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham/ RUPS. The Board of Commissioners is expected to ensure that, in the event of a violation by the Board of Directors, appropriate actions are taken in accordance with its authority and reported to the Shareholders/GMS.
77	17.58.(10)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to ensure that there are no unresolved issues regarding violations that were not discussed by the Board of Commissioners.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
78	17.59.(4)	Komisaris Utama diharapkan dapat menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi. The President Commissioner is expected to sign the Quarterly Management Reports from Q1 to Q3, and all members of the Board of Commissioners are expected to sign the Annual Management Report after it has been evaluated/discussed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.
79	17.60.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners is expected to review transactions or actions of the Board of Directors through internal discussions within the Board of Commissioners and with the Board of Directors, both of which are documented in the minutes of internal Board of Commissioners meetings and joint meetings with the Board of Directors.
80	17.60.(3).b	Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai. In the authorization process, the Board of Commissioners is expected to ensure that strategic actions requiring Board of Commissioners' approval or recommendation are supported by adequate risk analysis.
81	17.60.(3).c	Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris diharapkan dapat menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). The review process conducted by the Board of Commissioners is expected to utilize all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
82	17.60.(4)	Pemberian otorisasi atau rekomendasi diharapkan dapat dilakukan paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. The provision of authorization or recommendations is expected to be given no later than 14 days after the proposal or complete documents are received by the Board of Commissioners.
83	17.61.(3)	Dewan Komisaris melalui Komite Audit diharapkan dapat melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, is expected to carry out the process of appointing external auditor candidates in accordance with the goods and services procurement regulations of each company, and may request assistance from the Board of Directors in the appointment process if necessary.
84	17.61.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. The Board of Commissioners is expected to convey to the GMS the reasons for the nomination and the proposed honorarium/fee for the external auditor.
85	17.61.(5)	Dewan Komisaris diharapkan dapat mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners is expected to evaluate the performance of the External Auditor in accordance with applicable provisions and standards.
86	17.62.(3).a	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. The Board of Commissioners is expected to assess the effectiveness of external audit implementation through: (1) monitoring the alignment of audit progress completion with its work plan; (2) reviewing the compliance of audit execution with public accountant professional standards; and (3) reviewing the results of the external audit and the quality of its recommendations.
87	17.62.(3).b	Dewan Komisaris diharapkan dapat melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI. The Board of Commissioners is expected to assess the effectiveness of internal audit implementation through: (1) reviewing the effectiveness of follow-up monitoring on SPI and external auditor findings; (2) reviewing the compliance of audit execution with internal audit standards; (3) completeness of audit findings' attributes and the quality of internal audit recommendations; (4) review of audit work plan and implementation; and (5) internal audit function management.
88	17.62.(3).c	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PE PET yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is expected to ensure the implementation of: (1) review of complaints related to PET received by the Board of Commissioners and the delivery of recommendations to the Board of Directors based on the review results; (2) review of all complaints received by the Board of Commissioners.
89	17.62.(3).d	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris(Komite Dewan Komisaris). The Board of Commissioners is expected to ensure the review process utilizes all mechanisms within the Board of Commissioners (Board of Commissioners Committees).
90	17.62.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal. The Board of Commissioners is expected to provide direction to the Board of Directors regarding the improvement of internal and external audit effectiveness.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
91	17.63.(3)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut. The Board of Commissioners is expected to prepare a report to the GMS regarding signs of a significant decline in company performance and recommendations for improvements that have been submitted to the Board of Directors to address the root causes of such performance issues.
92	17.63.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memastikan kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi. The Board of Commissioners is expected to ensure adequate quality in its recommendations for improvement provided to the Board of Directors.
93	19.67.(4)	Dewan Komisaris diharapkan dapat menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPSdalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran The Board of Commissioners is expected to present the assessment results of the Board of Directors' performance, both collectively and individually, to the GMS in its semi-annual supervisory report.
94	21.71.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat memiliki/menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnnya, dan disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners is expected to have/establish Key Performance Indicators (KPIs) along with their targets, which are approved by the GMS annually based on the proposal from the respective Board of Commissioners.
95	24.79.(4)	Ketua Komite Dewan Komisaris diharapakan adalah anggota Dewan Komisaris. The Chairman of the Board Committee is expected to be a member of the Board of Commissioners.
96	24.80.(2)	Anggota Komite diharapkan harus berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan. Committee members are expected to be from outside the company and must not have any ties with management, ownership relationships, or the company's business activities.
97	24.83.(1)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi. The Board of Commissioners is expected to prepare a report to the Board of Commissioners for every assignment carried out, accompanied by recommendations.
98	24.83.(2)	Dewan Komisaris diharapkan dapat membuat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. The Board of Commissioners is expected to prepare quarterly and annual reports from the Committee to the Board of Commissioners, containing at minimum a comparison between the realization of activities and the annual work plan, as well as the substance of activities and their recommendations.

Aspek 4 Aspect 4

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
1	25.85.(3)b	Direksi diharapkan memastikan adanya laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi. The Board of Directors is expected to ensure the availability of reports on training completed by members of the Board of Directors.
2	26.86.(4)	Direksi diharapkan memastikan adanya permintaan persetujuan atas struktur organisasi kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors is expected to ensure that approval requests for the organizational structure are submitted to the Board of Commissioners.
3	26.87.(2)	Direksi diharapkan memastikan ketersediaan SOP secara lengkap untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan. The Board of Directors is expected to ensure the complete availability of SOPs for all core business processes of the company as a guideline for conducting company activities.
4	26.88.(2)	Direksi diharapkan memastikan adanya standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi. The Board of Directors is expected to ensure the establishment of a time standard for the urgency level in decision-making by the Board of Directors.
5	26.88.(3)	Direksi diharapkan memastikan adanya ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal tujuh hari sejak disahkan/ditandatangani. The Board of Directors is expected to ensure the existence of provisions regarding the urgency to communicate decisions to organizational levels below the Board of Directors, no later than seven days after the decision is ratified/signed.
6	27.89.(5)	Direksi diharapkan memastikan adanya pelaksanaan sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan. The Board of Directors is expected to ensure the implementation of socialization of the RJPP to all company employees.
7	27.90.(4)	Direksi diharapkan memastikan penyampaian rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. The Board of Directors is expected to ensure the timely submission of the draft RKAP to the GMS and/or the Board of Commissioners or in accordance with the predetermined schedule.
8	27.91.(2a)	Direksi diharapkan memastikan penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Hal ini dapat tercermin juga dengan vacancy rate yang tidak lebih dari 15%. The Board of Directors is expected to ensure the placement of employees at every job level in the company's organization. This should also be reflected in a vacancy rate of no more than 15%.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
9	27.91.(4)	Direksi diharapkan memastikan bahwa rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut. The Board of Directors is expected to ensure that promotion and mutation plans for positions one level below the Board of Directors are submitted to the Board of Commissioners to provide an opportunity for direction regarding the promotion and mutation plans.
10	27.91.(5)	Direksi diharapkan memastikan tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan. Untuk menilai hal tersebut, dapat dilakukan survei kepuasan karyawan dengan menambahkan parameter penilaian yang berkaitan dengan obyektivitas dan transparansi penempatan karyawan. The Board of Directors is expected to ensure an adequate level of objectivity and transparency in the placement of employees at every job level. To assess this, an employee satisfaction survey may be conducted by adding evaluation parameters related to the objectivity and transparency of employee placement.
11	28.100.(1a)	Direksi diharapkan memastikan adanya *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP. The Board of Directors is expected to ensure the existence of an Information Technology Master Plan (ITMP) as a guideline for information technology development and an Information Technology Detail Plan (ITDP) as a further elaboration of the ITMP, which is used as a reference for the implementation of annual planning in accordance with the ITMP.
12	28.100.(1b)	Direksi diharapkan memastikan arsitektur sistem informasi telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya. The Board of Directors is expected to ensure that the information system architecture has been designed down to the data level and its security systems.
13	28.100.(1c)	Direksi diharapkan memastikan perencanaan teknologi informasi meliputi arah penggunaan dan pengadaannya dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi. The Board of Directors is expected to ensure that information technology planning includes direction for usage and procurement by forecasting technology development trends.
14	28.100.(1d)	Direksi diharapkan memastikan adanya kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan teknologi informasi (TI). The Board of Directors is expected to ensure the existence of data management policies, data management procedures, and information technology (IT) reporting.
15	28.100.(2)	Penerapan teknologi informasi (TI) di PET diharapkan sesuai dengan masterplan dan telah disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. The implementation of information technology (IT) at PET is expected to align with the master plan and be accompanied by thorough IT planning that includes human resources, management organizational structure, and the level of service provided by IT.
16	28.100.(3)	Direksi diharapkan memastikan adanya audit atas TI. The Board of Directors is expected to ensure that an IT audit is conducted.
17	28.100.(4)	Direksi diharapkan memastikan tingkat penerapan TI saat ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk menilai hal tersebut, dapat dilakukan audit atas TI atau survei kesesuaian penerapan TI dari setiap user. The Board of Directors is expected to ensure that the current level of IT implementation meets the company's needs. To assess this, an IT audit or a survey on IT implementation suitability from each user may be conducted.
18	28.100.(5a)	Direksi diharapkan memastikan adanya laporan pelaksanaan sistem teknologi informasi secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT *Master Plan* dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta. The Board of Directors is expected to ensure that written reports on the implementation of the information technology system, related to the execution of the IT Master Plan and ITDP, are submitted to the Board of Commissioners, whether requested or not.
19	28.100.(5b)	Direksi diharapkan memastikan adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris (termasuk hasil audit TI). The Board of Directors is expected to ensure that IT performance reports (including IT audit results) are submitted to the Board of Commissioners.
20	28.102.(5)	Direksi diharapkan memastikan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian bersifat terbuka dan tidak rahasia. The Board of Directors is expected to ensure that the owner's estimate (HPS), calculated by experts, is open and not confidential.
21	28.103.(1c)	Fungsi SDM diharapkan melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sampai dengan tahap behaviour evaluation. The HR function is expected to carry out post-training and education evaluations up to the behavioral evaluation stage.
22	29.105.(1)	Direksi diharapkan memastikan adanya kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. The Board of Directors is expected to ensure the existence of accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards.
23	29.106.(8c)	Direksi diharapkan memastikan adanya penyampaian laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors is expected to ensure the submission of quarterly risk management implementation reports and/or reports upon request by the Board of Commissioners.
24	29.107.(1)	Direksi diharapkan menetapkan rancangan sistem pengendalian intern PET yang mengatur kerangka (*framework*) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya. The Board of Directors is expected to establish a draft of PET's internal control system which regulates the internal control framework, including elements such as control environment, risk management, control activities, information and communication systems, monitoring, implementation, and reporting.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
25	29.107.(4)	Direksi diharapkan memastikan adanya evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas. The Board of Directors is expected to ensure the evaluation/assessment of the effectiveness of internal control at the entity level and at the operational/activity level.
26	29.107.(5)	Perusahaan menerbitkan internal control report yang mencakup suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai, serta suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan. The Company issues an internal control report that includes a statement declaring that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures, along with an assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the Company's fiscal year.
27	29.108.(2)	Direksi diharapkan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan. The Board of Directors is expected to ensure the implementation of follow-up actions on the audit findings from Internal Audit and external auditors is reported to the Board of Commissioners regularly, at least every 3 (three) months.
28	31.112(2)	Fungsi PAM diharapkan melakukan asesmen pemasok dengan melengkapi parameter penilaian, yakni aspek biaya. The PAM function is expected to assess suppliers by including the cost aspect in the evaluation parameters.
29	31.118.(1)c	Direksi diharapkan memastikan adanya kebijakan tentang pembinaan usaha kecil. The Board of Directors is expected to ensure the existence of policies concerning the development of small enterprises.
30	31.118.(4)	Fungsi *Corporate Secretary* atau *Legal & Relation* diharapkan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. The Corporate Secretary or Legal & Relations function is expected to carry out partnership programs with small enterprises.
31	33.121.(1)	Direksi diharapkan memastikan adanya penyampaian laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham, yang termuat dalam sebuah laporan ditandatangani oleh Direksi dan dibuktikan dengan bukti korespondensi pelaporannya. The Board of Directors is expected to ensure the submission of quarterly and annual management reports as well as the annual report to the Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders, all of which must be included in a report signed by the Board of Directors and supported with correspondence evidence of the submission.
32	33.122.(1)	Direksi diharapkan memastikan pemberian informasi laporan manajemen triwulanan dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas. The Board of Directors is expected to ensure that the quarterly management report is also provided to minority shareholders with the same content and within the same timeframe.
33	35.129.(5a)	Kepala SPI diharapkan menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. The Head of Internal Audit (SPI) is expected to establish policies and procedures as guidelines for the execution of internal audit functions. The form and content of these policies and procedures must be adjusted to the organizational structure and size of the Internal Audit unit as well as the complexity of the company's business activities.
34	35.129.(5b)	Kepala SPI diharapkan melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. The Head of Internal Audit is expected to implement a quality assurance and improvement program for the Internal Audit Function, covering all aspects of internal audit activities.
35	35.129.(5c)	SPI diharapkan melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Internal Audit is expected to assess the quality assurance and improvement program of the Internal Audit Function as a whole.
36	35.130.(1)	Direksi diharapkan memastikan adanya program kerja tahunan pengawasan intern yang direncanakan oleh SPI dan SPI melaksanakan pengawasan sesuai program kerja tahunan yang sudah ditetapkan. The Board of Directors is expected to ensure the existence of an annual internal audit work program planned by Internal Audit, and that Internal Audit carries out its duties in accordance with the established annual work plan.
37	35.130.(2)	SPI diharapkan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. Internal Audit is expected to report the execution of its duties to the President Director with a copy to the Board of Commissioners c.q. the Audit Committee.
38	35.130.(3)	Direksi diharapkan memastikan Fungsi Audit Internal memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Function contributes to the improvement of governance, risk management, and internal control processes.
39	35.130.(4)	Direksi diharapkan memastikan Fungsi Audit Internal memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Function provides input on efforts to achieve the company's business strategy.
40	35.130.(5)	Direksi diharapkan memastikan Fungsi Audit Internal memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. The Board of Directors is expected to ensure that the Internal Audit Function monitors the follow-up of internal and external audit recommendations.

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
41	36.132.(3c.a)	Sekretaris Perusahaan diharapkan mendokumentasikan Risalah RUPS RJPP yang memuat sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. The Corporate Secretary is expected to document the Minutes of theGMS on the RJPP, which must include at least the time, agenda, participants, opinions expressed during the meeting, and the resolutions of the GMS.
42	36.132.(3d.c)	Sekretaris Perusahaan diharapkan memastikan bahwa dalam risalah rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat). The Corporate Secretary is expected to ensure that the meeting minutes also capture the dynamics of the meeting proceedings.
43	36.132.(4)b	Sekretaris Perusahaan diharapkan melengkapi rencana kerja dengan rencana mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. The Corporate Secretary is expected to include a work plan related to the orientation program for newly appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
44	36.132.(4)c	Sekretaris Perusahaan diharapkan melengkapi bukti materi program induksi yang memuat informasi mengenai: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. The Corporate Secretary is expected to provide documented materials for the orientation program, including information on: (1) the implementation of GCG principles; (2) an overview of the SOEs in relation to its objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues; (3) details on delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee; (4) an explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners/ Supervisory Board and the Board of Directors as well as prohibited matters.
45	37.134.(2)a	Direksi diharapkan memastikan RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. The Board of Directors is expected to ensure that the GMS for approval of the RJPP is held no later than sixty (60) days after the complete RJPP Draft is received, or before the start of the next RJPP period.

Aspek 5

Aspect 5

No	FUK	Rekomendasi Recommendation
1	38.137.(1)	Perusahaan diharapkan dapat melakukan survey tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan secara berkelanjutan. The Company is expected to conduct a survey on the Company's compliance level with adequate corporate information control policies on an ongoing basis.
2	39.138.(3)	Perusahaan diharapkan dapat memastikan kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran *website* dapat menjelaskan mekanisme waktu yang ditetapkan secara konsisten dan dimutakhirkan berkala sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini. The Company is expected to ensure that website management and updating policies clearly explain time mechanisms, consistently applied and regularly updated according to prevailing regulations.
3	40.146.(4)	Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan uraian mengenai nama dan jabatan dalam struktur organisasi berbentuk bagan ke dalam Laporan Tahunan. The Company is expected to disclose the names and positions in the organizational structure chart in the Annual Report.
4	40.146.(5)	Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan uraian mengenai penjelasan tentang visi dan misi perusahaan ke dalam Laporan Tahunan. The Company is expected to disclose a description of the company's vision and mission in the Annual Report.
5	40.148.(3)	Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan uraian mengenai Komite Audit mencakup antara lain: nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit ke dalam Laporan Tahunan. The Company is expected to disclose details on the Audit Committee including: name, position, and brief biography of audit committee members in the Annual Report.
6	40.148.(8)	Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan uraian mengenai Unit Audit Internal mencakup antara lain: nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal ke dalam Laporan Tahunan. The Company is expected to disclose information on the Internal Audit Unit including: name and brief biography of the Head of Internal Audit Unit in the Annual Report.
7	41.150.(1)	Perusahaan diharapkan dapat berpartisipasi dalam keikutsertaan *Annual Report Award* (ARA) di kesempatan berikutnya. The Company is expected to participate in the upcoming Annual Report Award (ARA).
8	41.150.(2)	Perusahaan diharapkan dapat memenangkan kejuaraan *Annual Report Award* (ARA) di kesempatan berikutnya. The Company is expected to win the Annual Report Award (ARA) in the upcoming opportunity.
9	41.151.(2)	Perusahaan diharapkan dapat berpartisipasi dan memperoleh penghargaan lain di bidang Publikasi dan Keterbukaan Informasi. The Company is expected to participate and obtain other awards in the field of Publication and Information Disclosure.



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Corporate Social and Environmental Responsibility



PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Corporate Social and Environmental Responsibility

Perseroan berkomitmen menjalankan program tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) tidak hanya sekadar membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar operasional Perseroan, namun juga berdampak positif bagi keberlanjutan dan keberlangsungan usaha Perseroan.

Bagi Perseroan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) bukan sekadar melaksanakan kewajiban, tetapi lebih dari itu, wujud dari tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan.

Perseroan menjalankan program TJSL yang berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu Ekonomi, Kesehatan, Lingkungan, dan Pendidikan. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan keempat pilar tersebut, program TJSL didukung oleh tiga aspek penting: *volunteerism*, kolaborasi, dan partisipasi di tingkat nasional maupun internasional.

Penerapan TJSL menjadi media untuk memperluas pengenalan program Perseroan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini akan meningkatkan citra positif Perseroan sambil terus memberikan kontribusi secara maksimal bagi ekonomi, lingkungan dan sosial kemasyarakatan serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Untuk mendukung pelaksanaan program kerja TJSL. Pada tahun 2024, realisasi program TJSL adalah Rp962.965.000 untuk implementasi pilar Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Ekonomi.

Dasar Hukum Kebijakan TJSL

Implementasi Perseroan pada program TJSL tercantum pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

The Company is committed to implementing Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs not merely to benefit communities around its operational areas, but also to foster positive impact on the sustainability and continuity of the Company's business.

For the Company, the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) is not only about fulfilling obligations, it is a reflection of the Company's moral responsibility to its stakeholders.

The Company carries out its CSER programs based on four main pillars, namely Economy, Health, Environment, and Education. To ensure the success of these four pillars, the programs are supported by three key aspects: volunteerism, collaboration, and participation at national and international levels.

The implementation of CSER also serves as a means of increasing public and stakeholder awareness of the Company's programs. It enhances The Company's positive image while continuously contributing to the economy, environment, and society, and creating added value for the Company in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). To support the implementation of CSER programs. In 2024, the realization of the CSER programs amounted to Rp962,965,000, to implement Social, Environmental, Health, Education, Social and Economic.

Legal Basis of the CSER Policy

The Company's implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs is based on the following legal frameworks:

1. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
3. Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law
4. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management
5. Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility for Limited Liability Companies
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 of 2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises

Due Diligence Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perseroan

Uji tuntas kegiatan operasional Perseroan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial dipetakan berdasarkan tingkatan materialitas suatu subjek serta matriks risiko negatif yang mungkin muncul.

Dalam aspek ekonomi, Perseroan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Perseroan melaksanakan kajian risiko lingkungan hidup untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya.

Sementara pada aspek sosial, perhatian Perseroan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Detail informasi aspek, topik maupun isu yang mempengaruhi Perseroan serta Pembangunan berkeberlanjutan tersaji pada sub bab isu-isu penting ekonomi, lingkungan dan sosial terkait dampak kegiatan Perseroan.

Stakeholder Penting yang Terdampak/Berdampak

Pemangku Kepentingan Perseroan (*Stakeholders*) adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap Perseroan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan *due diligence* yang dilakukan, Perseroan telah menetapkan pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan Perseroan, atau memiliki pengaruh dalam kegiatan Perseroan. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Due Diligence on the Social, Economic, and Environmental Impacts of the Company's Activities

Due diligence of the Company's operational activities and their impacts on the economy, environment, and society is conducted by mapping material subjects and potential negative risks using a materiality level and risk matrix approach.

In the economic aspect, the Company holds responsibility to ensure sustainable economic performance, free from corrupt practices, while providing value to stakeholders. On the environmental side, the Company conducts environmental risk assessments to identify potential environmental impacts of operations and the corresponding mitigation measures.

Meanwhile, in the social aspect, the Company's attention extends not only to internal stakeholders but also to external stakeholders.

Further details on aspects, topics, and issues influencing the Company and sustainable development are presented in the sub-section on key economic, environmental, and social issues related to the impact of the Company's activities.

Key Stakeholders Affected or Impacting the Company

Company stakeholders are any parties that have either direct or indirect interests whether financial or non-financial in the Company, and who also exert direct or indirect influence on the Company's sustainability.

Based on the due diligence conducted, the Company has identified the stakeholders who are affected by or have influence over the Company's activities. These stakeholders, who either influence or are impacted by the Company's operations, can be described as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik Dan Isu Utama Topic and Main Issues	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Pemegang Saham Shareholders	• Kinerja Perseroan yang baik dan sustain. Dapat tercermin dari hasil kinerja akhir tahun dan harga saham • Pemenuhan GCG yang baik • Kemudahan dalam mendapatkan informasi Perseroan • A good and sustainable company performance can be reflected in year-end performance results and stock prices • Compliance with GCG • Ease of access to company information	RUPS GMS	Minimal setahun sekali At minimum once a year
Pegawai Employees	Kesinambungan Perseroan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang The Company's sustainability affects the long-term welfare of its employees	Serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama Workers Union and Collective Labor Agreement	setahun sekali once a year
Pelanggan Customers	Pelayanan jasa terbaik Excellent service delivery	Rapat Koordinasi Coordination Meeting	Sesuai Kebutuhan As needed
	Harga jasa yang bersaing dan efisien Competitive and efficient service pricing	Komunikasi melalui media yang tersedia Communication through available media	Sesuai Kebutuhan As needed

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Topik Dan Isu Utama Topic and Main Issues	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Pemasok Suppliers	• Layanan informasi Pendaftaran Rekanan • Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan Perseroan • Penilaian Hasil Kinerja Penyedia Barang/Jasa • *Monitoring* evaluasi masukan dan saran dari Penyedia Barang dan Jasa • Information services for Partner Registration • Procurement of Goods/Services aligned with the Company's needs • Performance evaluation of Goods/Services Providers • Monitoring and evaluation of feedback and suggestions from Goods and Services Providers	Kontrak dan perjanjian Contract and agreement	Sesuai Kebutuhan As needed
Regulator Regulators	• Kepatuhan lingkungan • Kinerja keuangan Perseroan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan • Environmental compliance • The Company's financial performance affects the amount of tax paid to the government, contributing to state revenue used for development capital	• Kepatuhan terhadap peraturan • Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) • Compliance to regulations • Economic contribution to the Government (tax and subsidy)	Setiap saat Everytime
Masyarakat Communities	Kegiatan bisnis Perseroan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perseroan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar The Company's business activities contribute to improving the quality of life in the community through its products and services, as well as its presence which can contribute positive impact on the local economy	Kegiatan TJSL CSER Activities	Sesuai kebutuhan/mengikuti ketentuan Pemegang Saham As needed/following shareholders provisions

Fokus Keberlanjutan dan Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainability Focus and Its Relevance to Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Program dan Inisiatif Keberlanjutan Programs and Sustainability Initiatives
Lingkungan Environment			
1	Mengatasi Perubahan Iklim Addressing Climate Change	 	• Program Kampung Iklim-Tanaman Hidroponik (LPG Terminal Tanjung Sekong) • Penanaman 3000 Mangrove bersama di pantai Dompak hasil kolaborasi dengan PIS • Climate Village Program - Hydroponic Plant Cultivation at the Tanjung Sekong LPG Terminal • Planting of 3,000 Mangrove Trees along Dompak Beach in collaboration with PIS

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Program dan Inisiatif Keberlanjutan Programs and Sustainability Initiatives
2	Ekosistem Daratan Land Ecosystem		Program Kehati Taman Nasional Ujung Kulon untuk perlindungan Badak Bercula Satu Kehati Ujung Kulon National Park Program in protecting single-horned rhinoceros.
3	Ekosistem Laut Life Below Water		Program *Ocean Literacy* dan Penanaman Mangrove Bersama PIS Ocean Literacy Program and Mangrove Planting with PIS
Ekonomi Economy			
1	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Decent work and economic growth	 	• *Workshop* Bank Sampah • Pengembangan kelompok usaha olahan ikan UMKM Sulaa Mandiri • Penanggulangan *stunting* berbasis pemanfaatan lahan kosong • Waste Bank Workshop • Development Program for Sulaa Mandiri MSME Fish Processing Group • Stunting Prevention Program Based on Vacant Yard Utilization
Pendidikan Education			
1	Pendidikan Berkualitas Quality Education	 	• Program *Ocean Literacy* • Pengembangan Pemuda Berbasis Sertifikasi • *Panic Button Early Warning System* • Ocean Literacy Program • Youth Development Based on Certifications • Panic Button Early Warning System
Tata Kelola Governance			
1	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance		Pengembangan program *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Development of the Good Corporate Governance (GCG) program, particularly compliance with applicable laws and regulations
2	Pengelolaan Etika Bisnis Business Ethics Management		Implementasi Antikorupsi (SMAP) Implementation of Anti-Corruption (SMAP)
3	Kinerja Keuangan Financial Performance		Kinerja Ekonomi/Keuangan (Pendapatan, Laba, EBITDA) Economic/Financial Performance (Revenue, Profit, EBITDA)

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Program dan Inisiatif Keberlanjutan Programs and Sustainability Initiatives
Sosial Social			
1	Kepegawaian Employment		Keberagaman, kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja diimplementasikan sejak proses rekrutmen, penyediaan skema remunerasi, pengembangan kompetensi, kebijakan cuti dan sebagainya Diversity, gender equality, and equal employment opportunities are implemented starting from the recruitment process, remuneration schemes, competency development, leave policies, and so on.
2	Pembelajaran dan Pengembangan bagi Karyawan Training and Development for Employees		Pengembangan Pemuda berbasis sertifikasi K3 Youth Development through OHS Certification
3	Kegiatan TJSL CSR Activities		• Donasi santunan ke Yayasan Mizan Amanah Kebon Bawang • Program Santunan di 5 wilayah operasi terminal • Program berSeadekah dalam rangka Donasi & Santunan di Wilayah Operasi atau Terminal • Aid assistance to Mizan Amanah Kebon Bawang Foundation • Donation Program in 5 Terminal Operating Areas • "berSeadekah" Program for Donations and Charitable Contributions in Operational or Terminal Areas

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil
Social Responsibility Related to Fair Operations

Komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial Perseroan di bidang operasi yang adil adalah menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Perseroan tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai Perseroan dalam operasionalnya.

The Company's commitment and policy on social responsibility in the area of fair operations is to promote business development grounded in fair operational principles. The Company complies with all applicable laws and regulations, which constitute a fundamental goal of the Company's operations.

Komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan etika ditunjukkan melalui adanya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System* (WBS), Code of Conduct, dan kebijakan gratifikasi.

The Company's commitment to ethical business practices is demonstrated through the implementation of internal control policies, a Whistleblowing System (WBS), a Code of Conduct, and a gratuity policy.

Perseroan berkomitmen menjalankan praktik bisnis dengan

The Company is committed to conducting business with

integritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, menghindari bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*), tidak mentoleransi suap, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

integrity and professionalism, avoiding conflicts of interest, preventing fraudulent practices, and adopting a zero-tolerance stance toward bribery, including corruption, collusion, and nepotism (KKN).

Antikorupsi

Perseroan memiliki komitmen anti korupsi, sejalan dengan program Pemerintah. Komitmen tersebut menjadi bagian dari implementasi prinsip Governansi, bertujuan antara lain untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham. Perseroan telah memiliki kebijakan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Governansi di setiap aspek operasional Perseroan. Pencegahan praktik korupsi pada Perseroan juga mencakup larangan praktik suap, pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain.

Anti-Corruption

The Company is strongly committed to anti-corruption practices, in line with the Government's programs. This commitment forms part of the implementation of Governance principles, aiming among others to enhance customer and shareholder trust. The Company has established policies to embed Governance principles into all aspects of its operations. Anti-corruption measures also include prohibitions on bribery, money laundering, gratuities, and other unethical practices.

Praktik Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Kegiatan untuk pengadaan atau memperoleh barang dan atau jasa di lingkungan Perseroan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya barang dan atau jasa oleh unit kerja pengguna di Perseroan. Salah satu prinsip dasar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan adalah transparan dan adil yang tercermin dari diberikan informasi yang sama terkait pengadaan barang dan jasa, spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, syarat-syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan vendor barang dan atau jasa kepada calon vendor yang mengikuti seleksi pengadaan barang dan jasa.

Perseroan telah menetapkan kebijakan praktik pengadaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A19-002/PET0530/2024-S9 tanggal 4 Juli 2024, Tata Kerja Organisasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa No. B19-004/PET0530/2024-S9 tanggal 20 Juni 2024, dan Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa No. B19-001/PET0530/2024-S9 tanggal 20 Juni 2024. Dalam merespon kepentingan dan harapan dari para pemasok, Perseroan melakukan pendekatan melalui survei kepuasan pemasok, dan proses pemilihan pemasok secara transparan serta adil melalui *e-procurement*.

Transparent Procurement Practices

Procurement activities for goods and/or services within the Company begin with needs planning and continue through to the receipt of goods and/or services by the user work unit at the Company. One of the fundamental principles of procurement within the Company is transparency and fairness, as reflected in the equal dissemination of information related to procurement activities, required goods/services specifications, administrative and technical requirements, evaluation procedures, evaluation results, and vendor selection decisions to all prospective vendors participating in the procurement process.

The Company has formalized procurement practices through the following policies Goods and Services Procurement Guidelines No. A19-002/PET0530/2024-S9 dated July 4, 2024, Organizational Work Procedures for Procurement Planning No. B19-004/PET0530/2024-S9 dated June 2, 2024, and Organizational Work Procedures for Supplier Selection No. B19-001/PET0530/2024-S9 dated June 20, 2024. To address supplier interests and expectations, the Company conducts supplier satisfaction surveys and ensures a transparent and fair supplier selection process through an e-procurement system.

Keterlibatan Politik Yang Bertanggung Jawab

Perwira Perseroan, selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perseroan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas karyawan dalam politik ditanggung oleh yang bersangkutan.

Bagi Perwira Perseroan yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non-aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Responsible Political Involvement

The Company personnel, as citizens, have the constitutional right to assemble, associate, join organizations, and express their political and social aspirations. The Company does not coerce, influence, or direct individual participation in political activities. All consequences arising from employees' political engagement are their personal responsibility.

Any the Company personnel who run for political party leadership and/or legislative office must take a leave of absence during the nomination process. If elected and/or appointed as a legislative member, they must resign from the Company in accordance with applicable laws and regulations.

Persaingan Sehat

Perseroan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan *fair* dengan para pesaing. Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut

Fair Competition

The Company upholds business ethics and engages in sound, honest, and fair competition with peers. As business competition intensifies, the Company is committed to continuous innovation.

Perseroan untuk terus berinovasi. Oleh karenanya Perseroan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perseroan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

Therefore, competitors are viewed as drivers for improvement and progress in business performance in order to compete in the market. The Company avoids any form of unfair agreements with industry players that would harm customers' interests for the sake of gain.

Perseroan menjunjung tinggi nilai bersaing secara sehat, menentang monopoli dalam menjalankan setiap kegiatan bisnisnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan bersaing secara sehat juga berlandaskan pada norma penerapan prinsip-prinsip Governansi di lingkungan Perseroan.

The Company upholds the value of fair competition and rejects monopolistic practices in all business activities, in strict compliance with prevailing laws and regulations. Fair competition is also guided by the application of sound Governance principles within the Company.

Tanggung Jawab Sosial dalam Penerapan HAM
Social Responsibility on Human Rights Implementation

Perlindungan Hak Adat Istiadat, Budaya dan Agama

Aktivitas Perseroan tidak bersinggungan secara langsung dengan isu-isu HAM berat. Meskipun demikian, dalam merumuskan tanggung jawab sosial di bidang HAM, Perseroan mengacu pada isu-isu HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan aktivitas Perseroan. Isu-isu HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan Perseroan adalah pada bidang ketenagakerjaan, pelayanan pelanggan dan masyarakat. Wilayah operasional Perseroan tersebar di wilayah Indonesia. Perbedaaan wilayah ini memungkinkan adanya perbedaan budaya, suku, ras, dan agama.

Protection of Customary Rights, Culture, and Religion

The Company's activities do not directly intersect with serious human rights issues. Nevertheless, in formulating its social responsibility in the area of human rights, the Company refers to human rights issues that are relevant and directly related to its activities. Relevant human rights issues for the Company include labor practices, customer service, and community engagement. The Company's operational areas are spread across various regions of Indonesia, which inherently entails differences in culture, ethnicity, race, and religion.

Untuk menjaga harmonisasi pada insan di luar Perseroan khususnya masyarakat lokal, Perseroan senantiasa menjaga komunikasi dan interaksi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan juga selalu dilandasi dengan prinsip toleransi terhadap adat budaya tanpa harus bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

To maintain harmony with external stakeholders, particularly local communities, the Company consistently ensures effective communication and interaction, and engages in activities that involve these stakeholders. The approach is always based on the principle of tolerance toward local customs and culture, without conflicting with local traditions and practices.

Selain pada adat dan budaya, Perseroan juga selalu memperhatikan hak asasi dalam menganut kepercayaan. Perseroan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, Perseroan juga berupaya memastikan kesetaraan hak serta kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam praktik bisnis yang dijalankan Perseroan.

In addition to respecting customs and culture, the Company also upholds the human right to religious freedom. It allows employees to observe religious practices according to their individual beliefs. Furthermore, the Company strives to ensure equal rights and opportunities for participation and contribution in its business practices.

Landasan dasar kebijakan pengelolaan hak asasi manusia bisa mengacu pada ISO 26000 Tanggung Jawab Sosial. Hal ini meliputi praktik nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan; termasuk di dalamnya masyarakat lokal, perempuan, orang dengan disabilitas dan lain-lain.

The foundation of the Company's human rights policy refers to ISO 26000 on Social Responsibility. It includes non-discriminatory practices and attention to vulnerable groups, including local communities, women, persons with disabilities, and others.

Perseroan telah memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan anak sejalan dengan Konvensi ILO No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), dan Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Sedangkan

The Company has committed not to employ child labor, in accordance with ILO Convention No. 138/1973 on the Minimum Age for Admission to Employment and ILO Convention No. 182/1999 on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. The Company's commitment to the prohibition of forced labor is aligned with ILO Convention No. 29/1930 on Forced or

komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa selaras dengan Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*), dan Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*).

Compulsory Labor, and ILO Convention No. 105/1957 on the Abolition of Forced Labor.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup

Social Responsibility on Environment

Komitmen dan Kebijakan

Kegiatan usaha Perseroan yang memberikan dampak terhadap lingkungan adalah akibat dari kegiatan operasional. Beberapa kegiatan operasional yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan antara lain pemanfaatan energi listrik, penggunaan air dan bahan bakar, yang jika dilakukan secara berlebihan, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, Operasional Perseroan juga menghasilkan limbah dan emisi. Perseroan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memiliki beberapa kebijakan yang ramah lingkungan.

Kegiatan dan Dampaknya

Penghijauan (Program Kampung Iklim)

Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Desa Energi Berdikari adalah dua inisiatif yang sangat relevan dengan upaya untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan energi di tingkat lokal, termasuk di desa-desa. Keduanya juga bisa berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pembangunan energi yang berkelanjutan.

Program Kampung Iklim Desa Energi Berdikari memiliki dua kelompok binaan yang merupakan aktor inti dalam program ini yaitu Kelompok Wanita Tani Wahid Sapa dan Pemuda Berani Inovasi yang merupakan kelompok ibu rumah tangga dan pemuda aktif usia produktif. Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun terakhir antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tiga kali panen dengan jumlah total 120kg Kangkung dan Pakcoy
2. Pembangunan rumah hidroponik
3. Pembangunan PLTS
4. Pengorganisasian KWT Wahid Sapa
5. Pembentukan Kelompok PBI (Pemuda Berani Inovasi)
6. Sosialisasi *Urban Farming*
7. Edukasi Kelompok Masyarakat Program Desa Energi Berdikari

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp180.000.000.

Commitment and Policy

The Company's business activities that may impact the environment are primarily associated with its operational processes. Several operational activities that potentially generate negative environmental impacts include the use of electricity, water, and fuel, which if utilized excessively can indirectly harm the environment. In addition, the Company's operations also generate waste and emissions. The Company is committed to preserving the environment and has adopted several environmentally friendly policies.

Programs and Their Impacts

Reforestation (Climate Village Program)

The Climate Village Program (ProKlim) and the Self-sufficient Village Program initiative are both highly relevant to efforts supporting sustainable development, mitigating climate change impacts, and enhancing local energy resilience, especially in rural areas. These initiatives also align with PT Pertamina (Persero)'s broader mission to support sustainable energy development.

The Self-sufficient Energy Village and Climate Village Program engages two key community groups as the main drivers: the Wahid Sapa Women Farmers Group and Innovative Youth Group consisting of housewives and productive-age youth, respectively. Activities carried out over the past year include:

1. Three harvests totaling 120 kg of Spinach and Pak Choy
2. Construction of a hydroponic greenhouse
3. Installation of a solar power plant (PLTS)
4. Organization of the Wahid Sapa Women's Group
5. Formation of the Innovative Youth Group (PBI)
6. Urban farming awareness campaigns
7. Community education on the Desa Energi Berdikari program

Implementation Costs

The realized budget for this program amounted to Rp180,000,000.



Penguatan Pelaksanaan Patroli *Fully Protected Area* (FPA) untuk Mengamankan Modalitas Populasi Badak

Program Penguatan Pelaksanaan Patroli *Fully Protected Area* (FPA) untuk Mengamankan Modalitas Populasi Badak. Kegiatan ini dimulai dengan *kick off meeting* pada bulan 25 September 2024 di Komplek Kantor SPTN Wilayah II Handeuleum & JRSCA, TNUK dan selanjutnya penggunaan peralatan-peralatan penunjang patroli akan digunakan sepanjang tahun di kawasan TN. Ujung Kulon.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp100.000.000.

Strengthening Patrol Implementation in the Fully Protected Area (FPA) to Safeguard Rhino Population Modalities

The program to strengthen patrol implementation in the Fully Protected Area (FPA) aims to safeguard the modality of the rhino population. The activity commenced with a kick-off meeting on September 25, 2024, held at the Office Complex of SPTN Region II Handeuleum & JRSCA, Ujung Kulon National Park (TNUK). Subsequently, the supporting patrol equipment will be utilized throughout the year within the Ujung Kulon National Park area.

Implementation Cost

The realized budget for this assistance amounted to Rp100,000,000.



Panic Button Early Warning System

Panic Button Early Warning System merupakan aplikasi peringatan akan kondisi bencana serta kriminalitas yang menjadi salah satu upaya Fuel Terminal Baubau dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di wilayah Ring 1. Aplikasi *Panic Button* merupakan langkah pertama dalam memberi peringatan warga apabila terjadi bencana maupun kriminalitas hanya dengan menekan tombol di aplikasi yang telah tersambung di 10 titik di sekitar Kelurahan Sulaa.

Panic Button Early Warning System

The Panic Button Early Warning System is an alert application designed for disaster and criminal activity warnings, serving as part of the Fuel Terminal Baubau's effort to ensure safety and security for communities in the Ring 1 area. The Panic Button application serves as a first-line tool for residents to send alerts in the event of a disaster or crime by simply pressing a button on the app, which is connected to 10 points surrounding Sulaa Subdistrict.

Aplikasi *Panic Button* ini dapat tersambung ke kantor *Fuel Terminal* Baubau khusus untuk bencana kebakaran. Dalam pengembangan di periode selanjutnya, pengembangan aplikasi akan berkoordinasi dengan Dinas Damkar serta pusat kesehatan daerah setempat.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp150.000.000.

The Panic Button application is currently linked to the Baubau Fuel Terminal office specifically for fire emergencies. In future development phases, the application will be further integrated in coordination with the local Fire Department and healthcare centers.

Implementation Cost

The realized budget for the assistance amounted to Rp150,000,000.



Program *Ocean Literacy* dan Penanaman Mangrove Bersama PIS

Perseroan dan PIS berkolaborasi untuk terus mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui program unggulan yaitu Ocean Literacy dan Penanaman Mangrove. Komitmen Perseroan untuk mendukung kelestarian laut dan menjaga pesisir pantai secara berkelanjutan sejalan dengan upaya mencapai SDG 14 Ekosistem Lautan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk nyata pengurangan emisi karbon di wilayah operasional Perseroan.

Ocean Literacy and Mangrove Planting Program with PIS

The Company and PIS collaborated to continuously support social and environmental sustainability through flagship programs, namely Ocean Literacy and Mangrove Planting. The Company's commitment to preserving marine ecosystems and protecting coastal areas aligns with the efforts to achieve SDG 14 - Life Below Water. The activity also represents a tangible action in reducing carbon emissions within the Company's operational areas.



Sertifikasi atas Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Certification



ISO 9001:2015 (Kantor Pusat)
ISO 9001:2015 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 9001:2015
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Fuel Terminal* Pulau Sambu)
ISO 9001:2015
(Pulau Sambu Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Fuel Terminal* Kotabaru)
ISO 9001:2015
(Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015 (*Fuel Terminal* Baubau)
ISO 9001:2015 (Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*LPG Terminal* Tanjung Sekong)
ISO 9001:2015
(Tanjung Sekong LPG Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015 (Kantor Pusat)
ISO 14001:2015 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 9001:2015
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 9001:2015
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(*Fuel Terminal* Pulau Sambu)
ISO 14001:2015
(Pulau Sambu Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(*Fuel Terminal* Kotabaru)
ISO 14001:2015
(Kotabaru Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(*Fuel Terminal* Baubau)
ISO 14001:2015
(Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 14001:2015
(LPG *Terminal* Tanjung Sekong)
ISO 14001:2015
(Tanjung Sekong Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 28000:2022 (Kantor Pusat)
ISO 28000:2022 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
19 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 19, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 28000:2022
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 28000:2022
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
19 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 19, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018 (Kantor Pusat)
ISO 45001:2018 (Head Office)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018
(*Integrated Terminal* Tanjung Uban)
ISO 45001:2018
(Tanjung Uban Integrated Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018
(*Fuel Terminal* Pulau Sambu)
ISO 45001:2018
(Pulau Sambu Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018
(*Fuel Terminal* Kotabaru)
ISO 45001:2018
(Kotabaru Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018 (*Fuel Terminal* Baubau)
ISO 45001:2018 (Baubau Fuel Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



ISO 45001:2018 (LPG *Terminal* Tanjung Sekong)
ISO 45001:2018 (Tanjung Sekong LPG Terminal)

Masa Berlaku| Validity Period
22 Agustus 2024 - 19 Juli 2025
August 22, 2024 - July 19, 2025

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
WQA



SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
PT Pertamina Energy Terminal - Laboratory Fuel Terminal Pulau Sambu

Masa Berlaku| Validity Period
17 April 2023-16 April 2028
April 17, 2023-April 16, 2028

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Committee



SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
PT Pertamina Energy Terminal - Fuel Terminal Kotabaru

Masa Berlaku| Validity Period
17 April 2023-16 April 2028
April 17, 2023-April 16, 2028

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Committee

Pengaduan terkait Masalah Lingkungan

Pada tahun 2024, tidak terdapat pengaduan terkait masalah lingkungan.

Environmental Grievances

In 2024, there were no grievances related to environmental issues.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat
Social Responsibility Toward the Community

Kebijakan dan komitmen Perseroan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat difokuskan kepada seluruh elemen masyarakat. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usaha tidak luput dari dukungan masyarakat di sekitar lingkungan operasional. Perseroan merencanakan dan menetapkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Kegiatan dan Dampaknya

Pada tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat antara lain:

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah (Bank Jelantah RW 04)

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten merupakan program Program TJSL pemilahan sampah anorganik dan organik atau sampah rumah tangga,pemberian sarana dan prasarana penunjang bank sampah serta mengumpulkan nasabah. Permasalahan lainnya dapat dilihat dari masih rendah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, program bank sampah merupakan tindakan preventif dalam aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi dan sabun cuci serba guna adalah salah satu cara untuk mendaur ulang minyak bekas pakai menjadi produk yang berguna dan ramah lingkungan. Minyak jelantah biasanya berasal dari minyak yang telah digunakan untuk menggoreng makanan, dan setelah pemanfaatan ulang, dapat diolah menjadi lilin aromaterapi dan sabun cuci serba guna. Program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

1. FGD dan monitoring evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah.
2. Sosialisasi terkait limbah minyak jelantah.
3. *Workshop* pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi.
4. *Workshop* pengolahan sampah organik kulit buah menjadi *eco enzyme*.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp90.000.000.

The Company's policy and commitment in implementing Social Responsibility toward the community are focused on all elements of society. The Company fully recognizes that the Company's success in conducting its business cannot be separated from the support of the communities surrounding its operational areas. The Company plans and implements targeted programs that provide tangible benefits according to the needs, as mandated by applicable laws and regulations.

Activity Implementation and Impact

In 2024, the Company carried out social responsibility activities toward the community, including:

Community Empowerment Program Based on Waste Bank (Bank Jelantah RW 04)

The Community Empowerment Program Based on Waste Bank in Lebak Gede Subdistrict, Pulomerak District, Cilegon, Banten, is a CSER program focused on the sorting of inorganic and organic/household waste, the provision of supporting infrastructure for the waste bank, and collecting customers. One of the identified problems was the community's low awareness of environmental preservation. Thus, the waste bank program served as a preventive measure in both environmental and public health aspects.

The recycling of used cooking oil into aromatherapy candles and multipurpose cleaning soap is one way to turn waste oil into useful and eco-friendly products. Used cooking oil usually comes from oil used for frying food, and with proper processing, it can be transformed into aromatherapy candles and multipurpose cleaning soap. This program included several activities, such as:

1. FGD and monitoring and evaluation of the community empowerment program based on the waste bank.
2. Socialization on waste cooking oil
3. Workshop on processing used oil into aromatherapy candles
4. Workshop on processing organic fruit peel waste into eco-enzymes

Implementation Cost

The allocated and realized budget for the assistance program was Rp90,000,000.



Program Pencegahan *Stunting* Berbasis Pemanfaatan Lahan Kosong

Fuel Terminal Baubau merespon isu tingginya angka *stunting* dengan melaksanakan program penanggulangan *stunting* dengan program Kedai. Pemenuhan gizi bagi ibu hamil maupun anak-anak perlu menjadi perhatian bagi keluarga dan masyarakat sekitar untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, Program Ketahanan Pangan Keluarga Kelompok Kebun Dapur Ibu (Kedai) dirancang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita di wilayah Kelurahan Sulaa dengan metode pemberdayaan ibu rumah tangga untuk mengelola pekarangan kosong sebagai lahan perkebunan.

Program Kedai selain mengupayakan Solusi pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil juga memanfaatkan potensi berupa banyaknya pekarangan kosong di Kelurahan Sulaa. Program berjalan dengan baik karena kolaborasi dengan Posyandu serta UMKM Katapayi Sulaa Mandiri dalam memberikan pelatihan pembuatan makanan bergizi. Oleh karena itu, program ini sekaligus dapat menyinergikan tujuan masyarakat melalui para komunitas yang ada di Kelurahan Sulaa.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp16.000.000.

Stunting Prevention Program Based on Vacant Yard Utilization

Fuel Terminal Baubau responded to the high stunting rate issue by implementing a stunting prevention program called "Kedai." Fulfilling nutritional needs for pregnant women and children is a key concern for families and communities in realizing a healthy and intelligent future generation. Therefore, the Family Food Security Program of the Mothers' Garden Group (Kedai) was designed as a solution to meet the nutritional needs of pregnant women, infants, and toddlers in Sulaa Ward through the empowerment of housewives to manage vacant yards as productive land.

The Kedai Program not only aimed to address nutritional needs for children and pregnant women but also utilized the potential of the many vacant yards in Sulaa Ward. The program progressed well thanks to collaboration with local Posyandu and the Katapayi Sulaa Mandiri MSME, which provided training on preparing nutritious food. As such, this program also helped align community goals through the engagement of existing community groups in Kelurahan Sulaa.

Implementation Cost

The allocated budget realized for this assistance was Rp16,000,000.



Program Pengembangan Kelompok Usaha Olahan Ikan UMKM Katapayi Sulaa Mandiri

Potensi alam di lingkungan Kelurahan Sulaa, utamanya adalah potensi laut baik dari sektor pariwisata ataupun hasil laut seperti ikan cakalang. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa warga yang memiliki keahlian mengolah ikan menjadi olahan sambal ikan dan ikan asap yang memiliki cita rasa berkualitas.

Development Program for Katapayi Sulaa Mandiri MSME Fish Processing Group

The natural potential in the Sulaa Ward, especially from the sea, includes tourism and marine products such as skipjack tuna. This potential has been utilized by several residents skilled in processing fish into spicy fish sauce and smoked fish products with high-quality taste.

Hasil olahan ikan dari UMKM Katapayi Sulaa Mandiri ini cukup digemari oleh para konsumen sekitar. Fuel Terminal Baubau melihat hal tersebut sebagai peluang untuk menjadikan UMKM Katapayi Sulaa Mandiri sebagai solusi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga yang merupakan Perempuan kepala keluarga atau perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Sulaa, utamanya yang termasuk ke dalam daftar warga dengan status kemiskinan ekstrem.

Fuel Terminal Baubau berupaya menyesuaikan tujuan dengan berkolaborasi bersama organisasi dan kelompok usaha, serta menetap dalam mengatasi permasalahan di wilayah Ring 1. Dalam hal ini, *Fuel Terminal* Baubau melakukan intervensi pada temuan stunting yang cukup banyak di Kelurahan Sulaa dengan dingan program Penanggulangan.

Stunting Berbasis Potensi Hasil Laut berupa Pelatihan Pembuatan Makanan Bergizi untuk Balita *Stunting*. Pelatihan tersebut berhasil meningkatkan penjualan produk ikan asap pada bulan September sebanyak hampir 50% dari rata-rata penjualan per bulan sebanyak 6 sampai 7 kilogram setiap bulan. Pendampingan Fuel Terminal Baubau kepada UMKM Katapayi Sulaa Mandiri ini akan berlanjut sampai UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi para ibu rumah tangga Kelurahan Sulaa.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp23.000.000.

The fish products from the Katapayi Sulaa Mandiri MSME have been well received by local consumers. Fuel Terminal Baubau identified it as an opportunity to empower the MSME as a solution to create job opportunities for housewives, particularly women who are heads of households or socioeconomically vulnerable women in Sulaa Ward, for those classified as living in extreme poverty.

Fuel Terminal Baubau aligned its goals by collaborating with organizations and business groups, aiming to address issues within its Ring 1 operational area. One such effort was an intervention targeting the high prevalence of stunting in Sulaa Ward through countermeasures programs.

Marine Resource-Based Stunting Reduction Program through Nutritious Food Processing Training for Stunted Toddlers. The training successfully increased the sales of smoked fish products in September by nearly 50% compared to the average monthly sales of 6 to 7 kilograms. Fuel Terminal Baubau's support for the Katapayi Sulaa Mandiri MSME will continue until the MSME is able to create as many job opportunities as possible for housewives in Kelurahan Sulaa.

Implementation Cost

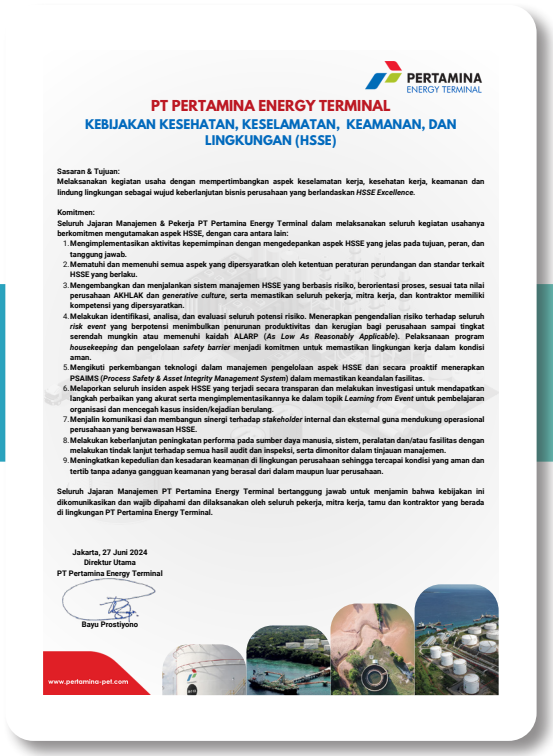
The allocated budget realized for this assistance was Rp23,000,000.



Tanggung Jawab Sosial Terhadap K3
Social Responsibility on OHS

Aspek ketenagakerjaan dan K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang keberlanjutan Perseroan. Untuk itu, Perseroan menempatkan aspek Ketenagakerjaan dan K3 menjadi salah satu tanggung jawab sosial Perseroan. Perseroan yakin bahwa praktik ketenagakerjaan dan K3 yang dikelola dengan baik akan mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompeten. Dalam bidang ketenagakerjaan, Perseroan merujuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Komitmen Direksi dituangkan di dalam Kebijakan *Health, Safety, Security & Environment* (HSSE) yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 27 Juni 2024. Setiap tahun Fungsi HSSE Perseroan merencanakan kegiatan implementasi aspek HSSE yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut tercermin dalam program-program kerja HSSE yang difokuskan pada upaya menuju *zero incident*.

Employment and OHS are critical aspects in supporting the sustainability of the Company. Therefore, the Company places Employment and OHS as part of its social responsibility. The Company believes that well-managed employment and OHS practices will contribute to the development of excellent and competent human resources. In terms of employment, the Company refers to Law No. 13 of 2003 on Manpower. The Board of Directors' commitment is outlined in the Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Policy, signed by the President Director on June 27, 2024. Annually, the Company's HSSE Function plans activities to improve the implementation of HSSE aspects. These efforts are reflected in HSSE work programs focused on achieving zero incidents.



PERTAMINA ENERGY TERMINAL

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN (HSSE)

Sasaran & Tujuan:
Melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, keamanan dan lindung lingkungan sebagai wujud keberlanjutan bisnis perusahaan yang berlandaskan *HSSE Excellence*.

Komitmen:
Seluruh Jajaran Manajemen & Pekerja PT Pertamina Energy Terminal dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya berkomitmen mengutamakan aspek HSSE, dengan cara antara lain:

1. Mengimplementasikan aktivitas kepemimpinan dengan mengedepankan aspek HSSE yang jelas pada tujuan, peran, dan tanggung jawab.
2. Mematuhi dan memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan dan standar terkait HSSE yang berlaku.
3. Mengembangkan dan menjalankan sistem manajemen HSSE yang berbasis risiko, berorientasi proses, sesuai tata nilai perusahaan AKHLAK dan *generative culture*, serta memastikan seluruh pekerja, mitra kerja, dan kontraktor memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
4. Melakukan identifikasi, analisa, dan evaluasi seluruh potensi risiko. Menerapkan pengendalian risiko terhadap seluruh *risk event* yang berpotensi menimbulkan penurunan produktivitas dan kerugian bagi perusahaan sampai tingkat serendah mungkin atau memenuhi kaidah ALARP (*As Low As Reasonably Applicable*). Pelaksanaan program *housekeeping* dan pengelolaan *safety barrier* menjadi komitmen untuk memastikan lingkungan kerja dalam kondisi aman.
5. Mengikuti perkembangan teknologi dalam manajemen pengelolaan aspek HSSE dan secara proaktif menerapkan PSAIMS (*Process Safety & Asset Integrity Management System*) dalam memastikan keandalan fasilitas.
6. Melaporkan seluruh insiden aspek HSSE yang terjadi secara transparan dan melakukan investigasi untuk mendapatkan langkah perbaikan yang akurat serta mengimplementasikannya ke dalam topik *Learning from Event* untuk pembelajaran organisasi dan mencegah kasus insiden/kejadian berulang.
7. Menjalin komunikasi dan membangun sinergi terhadap *stakeholder* internal dan eksternal guna mendukung operasional perusahaan yang berwawasan HSSE.
8. Melakukan keberlanjutan peningkatan performa pada sumber daya manusia, sistem, peralatan dan/atau fasilitas dengan melakukan tindak lanjut terhadap semua hasil audit dan inspeksi, serta dimonitor dalam tinjauan manajemen.
9. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran keamanan di lingkungan perusahaan sehingga tercapai kondisi yang aman dan tertib tanpa adanya gangguan keamanan yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

Seluruh Jajaran Manajemen PT Pertamina Energy Terminal bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja, mitra kerja, tamu dan kontraktor yang berada di lingkungan PT Pertamina Energy Terminal.

Jakarta, 27 Juni 2024
Direktur Utama
PT Pertamina Energy Terminal

Bayu Prostiyono

www.pertamina-pet.com

Pelaksanaan dan Kegiatan Ketenagakerjaan

1. Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja

Dalam menjalankan proses rekrutmen calon Pegawai, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada siapapun tanpa memandang aspek *gender*, perbedaan etnis, agama, ras, kelas, ataupun kondisi fisik tertentu. Perseroan berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip non-diskriminasi di dalam proses rekrutmen Pegawai dengan membuka kesempatan kerja yang sama bagi perempuan (*gender equity and equality*), sejauh memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Employment Implementation and Activities

1. Gender Equality and Equal Employment Opportunities

In the employee recruitment process, the Company consistently upholds the principles of Human Rights by providing equal employment opportunities for everyone regardless of gender, ethnicity, religion, race, social class, or physical condition. The Company is committed to applying non-discriminatory principles in the recruitment process by offering equal job opportunities for women (gender equity and equality), as long as the candidates meet the established requirements.

2. **Kesempatan Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan**
   Perseroan secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan SDM yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi setiap Pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. **Fasilitas Pendukung Kesejahteraan Pegawai**
   Perseroan telah menyediakan tempat/sarana ibadah yang bertujuan agar setiap Pegawai tetap dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. **Kesejahteraan Pegawai**
   Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas kesejahteraan seluruh Pegawainya dengan memberikan kompensasi dan manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan oleh setiap Pegawai terhadap Perseroan demi terciptanya level produktivitas kerja yang optimal. Setiap Pegawai juga memiliki jatah cuti.
5. **Kebebasan Berserikat**
   Seluruh hak dan kewajiban Pegawai telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pihak manajemen dan Serikat Pekerja. Perseroan bersikap terbuka terhadap setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan SDM.
6. **Remunerasi Pegawai**
   Sebagai wujud kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah menetapkan kebijakan pemberian Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/P) yang besarannya disesuaikan dengan wilayah kerja operasional masing-masing Pegawai.
7. **Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan**
   Apabila terjadi keluh kesah dan perselisihan terkait ketenagakerjaan, Pegawai dapat melakukan pengaduan. Pada tahun 2024, tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait ketenagakerjaan.

Program Bantuan Kebencanaan dan Pengembangan Pemuda Berbasis Sertifikasi

Pengembangan kapasitas pemuda melalui sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Umum BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan pemuda di dunia kerja, khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas. Sertifikasi K3 Umum BNSP memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan di berbagai sektor industri. Pemuda yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi ini akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan.

Program TJSL LPG Terminal Tanjung Sekong tidak hanya berfokus terhadap pengembangan kapasitas, tetapi juga fokus terhadap isu bencana alam. Program mitigasi bencana megathrust adalah inisiatif yang dilakukan oleh Perseroan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan dari bencana alam. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana serta memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi bencana di masa depan.

2. **Opportunities to Participate in Education and Training Programs**
   The Company continuously organizes human resource education and training programs aimed at fulfilling each employee's competency needs in their respective fields.

3. **Employee Welfare Support Facilities**
   The Company provides places/facilities for worship to ensure that every employee can carry out religious practices in accordance with their beliefs.

4. **Employee Welfare**
   The Company is committed to maintaining the welfare quality of all employees by providing compensation and benefits that reflect the contributions made by each employee to the Company, in order to achieve optimal work productivity. Each employee is also entitled to annual leave.

5. **Freedom of Association**
   All employee rights and obligations are stipulated in the Collective Labor Agreement (CLA) signed by both management and the Workers' Union. The Company remains open to any policy changes related to human resources.
6. **Employee Remuneration**
   As a form of compliance with applicable labor regulations, the Company has implemented a policy to provide Regional/Provincial Minimum Wages (UMR/UMP), with amounts adjusted according to the operational work location of each employee.
7. **Labor-Related Complaints**
   If there are any concerns or disputes related to employment, employees may file complaints. In 2024, there were no complaints submitted regarding labor issues.

Disaster Relief and Youth Development Program Based on Certification

Youth capacity development through BNSP (National Agency for Professional Certification) General OHS (Occupational Health and Safety) certification is a strategic step to enhance the competence and job readiness of young individuals, particularly in the field of occupational health and safety. The certification is expected to provide the necessary knowledge and skills to create a safe and healthy work environment, ultimately reducing workplace accidents and improving productivity. The BNSP General OHS Certification equips youth with essential knowledge and basic skills regarding occupational health and safety principles applicable across various industrial sectors. Youth who participate in the training and earn certification will be better prepared to face workplace challenges, especially those related to health and safety.

The CSER Program of the LPG Terminal Tanjung Sekong not only focuses on capacity development but also addresses the issue of natural disasters. The megathrust disaster mitigation program is a corporate initiative aimed at contributing positively to the community, particularly in disaster mitigation, preparedness, response, and recovery efforts. The program is designed to assist disaster-affected communities and strengthen their capacity in facing future disasters.

Biaya Pelaksanaan
Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp100.000.000.

Implementation Cost
The allocated and realized budget for the assistance program was Rp100,000,000.



Program Pengembangan Pemuda Berbasis Sertifikasi K3 Umum

Program Pemberdayaan Pemuda Berbasis Sertifikasi K3 Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Program CSR dari PT Pertamina Energy Terminal Fuel Terminal Baubau. Program ini merupakan program TJSL pada bidang peningkatan kapasitas (*capacity building*). Pelatihan K3 Umum ini merupakan salah satu upaya *Fuel Terminal* Baubau dalam mengurangi angka pengangguran dan permasalahan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Sulaa.

Program ini berlangsung selama tiga hari dengan pembagian dua hari pelatihan dan satu hari untuk ujian yang dilaksanakan pada tanggal 12–14 September 2024 bertempat di Meeting Room Fuel Terminal Baubau.

Tindak lanjut program adalah dibentuknya Komunitas Daya Karsa oleh para pemuda yang telah mengikuti pelatihan K3 Umum untuk melakukan monitoring jenjang karier serta sharing wawasan dan pengetahuan terkait K3 Umum kepada para pemuda lainnya di Kelurahan Sulaa.

Biaya Pelaksanaan
Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp125.000.000.

Youth Development Program Based on General OHS Certification

The Youth Empowerment Program Based on General OHS Certification is one of the CSR initiatives implemented by PT Pertamina Energy Terminal Fuel Terminal Baubau. The program is a part of the CSER initiative in the area of capacity building. The General OHS training serves as an effort by Fuel Terminal Baubau to reduce unemployment and address extreme poverty issues in Sulaa Ward.

The program was conducted over three days, consisting of two days of training and one day of examination, held from September 12-14, 2024, at the Meeting Room of Fuel Terminal Baubau.

As a follow-up to the program, a youth community named Daya Karsa Community was established by the training participants to monitor career progression and to share insights and knowledge related to General OHS with other youths in Sulaa Ward.

Implementation Cost
The total budget realized for this program amounted to Rp125,000,000.



Prosedur Tindak Lanjut Atas Keluhan Pelanggan

1. *Customer Fresh Water*/Terminal akan mengirimkan laporan *feedback* atas aspek-aspek teknis kepada PIC yang berada di titik operasional.
2. PIC yang berada di titik operasional akan akan menyampaikan kepada Fungsi *Commercial & Business Optimization*.
3. Fungsi *Commercial & Business Optimization* akan meneruskan dan memverifikasi data kepada Fungsi operasional (Fungsi *Fresh Water Supply* dan Fungsi *Terminal Optimization & Standard Assurance*).
4. Fungsi Operasional akan menindaklanjuti laporan tersebut.
   a. Jika laporan berkaitan dengan kelalaian SDM, maka Fungsi Operasional akan menindaklanjuti dan akan berkoordinasi dengan Fungsi *Business Support*.
   b. Jika laporan berkaitan dengan kerusakan asset operasional yang digunakan, maka Fungsi Operasional akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Fungsi *Commercial & Business Optimization* dan Fungsi *Engineering & Reability* jika diperlukan adanya investasi
5. Fungsi *Commercial & Business Optimization* akan berkoordinasi kepada customer bahwa akan dilakukannya tindak lanjut mengenai *feedback* yang diberikan.

Biaya Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

Pada tahun 2024, Perseroan belum menganggarkan biaya tanggung jawab sosial terhadap pelanggan secara khusus.

Customer Grievances Follow-Up Procedures

1. Fresh Water/Terminal customer submits a feedback report on technical aspects to the PIC at the operational point.
2. The PIC at the operational point relays it to the Commercial & Business Optimization function.
3. The Commercial & Business Optimization function forwards and verifies the data with the Operational function (Fresh Water Supply and Terminal Optimization & Standard Assurance).
4. The Operational function follows up on the report.
   a. If the report is related to human error, the Operational function will coordinate follow-up actions with the Business Support function.
   b. If the report is related to operational asset damage, the Operational function will coordinate with the Commercial & Business Optimization function and the Engineering & Reliability function, especially if investment is required.
5. The Commercial & Business Optimization function will coordinate with the customer to inform that follow-up actions will be taken based on the feedback provided.

Social Responsibility on Customers

In 2024, the Company had not specifically allocated a budget for customer social responsibility programs.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan
Social Responsibility on Customers

Pelayanan terbaik kepada pelanggan dilakukan Perseroan melalui berbagai kebijakan dan prosedur untuk menjaga kepuasan pelanggan. Perseroan memberikan perhatian terhadap faktor keamanan bagi pelanggan. Tanggung Jawab Sosial pelanggan antara lain: jaminan mutu produk, kualitas layanan, keselamatan dan kesehatan pelanggan, pengaduan dan penyelesaian keluhan pelanggan.

Komitmen dan Kebijakan

Peningkatan layanan kepada pelanggan Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Komitmen Perseroan untuk memberikan layanan terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui sikap dan respons profesionalis dari Perusahaan dan segenap jajaran dalam melayani pelanggan. Perseroan juga menjamin kualitas pelayanan kepada setiap pelanggan, baik dalam segmen usaha penyimpanan produk BBM/LPG, penyediaan *fresh water* dengan menjamin kualitas jasa yang diberikan melalui pengelolaan manajemen mutu.

Sementara itu, komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/jasa kepada pemasok, Perseroan memberi perlakuan yang sama kepada seluruh pemasok seperti melalui proses tender yang terbuka, memberi kesempatan untuk semua pihak bekerja sama tanpa ada proses birokrasi yang bermaksud mempersulit.

Program Peningkatan Layanan Kepada Pelanggan

Peningkatan layanan dan kemudahan menjadi kunci dalam keberlangsungan bisnis. Perseroan telah memiliki program *strategic initiative* untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Fungsi *Commercial & Business Optimization* menjaga kedekatan dalam melakukan identifikasi dan inovasi produk yang ditawarkan serta untuk menyediakan dukungan kepada pelanggan.

Saluran penyampaian keluhan

Salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap konsumen atau pelanggan adalah dengan memberikan hak yang seluas-luasnya bagi konsumen atau pelanggan untuk melakukan pengaduan terkait produk atau atau jasa. Perseroan menyediakan saluran pengaduan melalui:
Telepon : (0254) 601146-601147
Faksimili: (0254) 601148
Email: corsec.pet@pertamina.com
Website: https://pertamina-pet.com

The Company delivers the best possible service to customers through various policies and procedures aimed at maintaining customer satisfaction. The Company pays attention to customer safety factors. Social responsibility toward customers includes product quality assurance, service quality, customer health and safety, and customer complaints handling and resolution.

Commitment and Policy

The Company's efforts to improve customer service refer to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which defines consumers as individuals who use goods and/or services available in society, for personal, family, other people's, or other living beings' interests, and not for resale.

The Company's commitment to delivering the best and most beneficial service to every customer is manifested through the professional conduct and responsive attitude of the Company and all its personnel in serving customers. The Company also ensures service quality for all customers, whether in the fuel/LPG storage business segment or fresh water provision, by guaranteeing service quality through quality management practices.

In terms of product/service responsibility toward suppliers, the Company provides equal treatment to all suppliers through open tender processes, giving all parties the opportunity to collaborate without burdensome bureaucracy.

Customer Service Improvement Program

Service improvement and convenience are key to business continuity. The Company has established a strategic initiative program to improve customer service. The Commercial & Business Optimization function maintains close engagement in identifying and innovating offered products and in providing support to customers.

Grievances Submission Channels

One form of The Company's care for consumers or customers is by providing extensive rights to file grievances regarding products or services. The Company provides grievances channels through:

Phone: (0254) 601146-601147
Fax: (0254) 601148
Email: corsec.pet@pertamina.com
Website: https://pertamina-pet.com

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2024 PT Pertamina Energy Terminal

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Board of Commissioners' Statement of Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

We, the undersigned, declare that all information contained in the 2024 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal has been presented completely and are fully responsible for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

The statement is made truthfully and accurately.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Bambang Sujito
Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Nepos MT Pakpahan
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan 2024 PT Pertamina Energy Terminal

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

We, the undersigned, declare that all information contained in the 2024 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal has been presented completely and are fully responsible for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

The statement is made truthfully and accurately.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Bayu Prostiyono
Direktur Utama
President Director

Rangga Raditya
Direktur Operasi
Director of Operation

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2024/
31 DECEMBER 2024

PERTAMINA
ENERGY TERMINAL

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024

Atas nama Direksi, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Prostiyono
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.205, Tanjung Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta - 14360
Telepon : 021 – 601146
Jabatan : Direktur Utama

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pertamina Energy Terminal ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

On behalf of the Director, I, the undersigned:

Name : Bayu Prostiyono
Address : Jl. Yos Sudarso No.205, Tanjung Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta - 14360
Telephone : 021 – 601146
Position : President Director

declare that:

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Pertamina Energy Terminal (the "Company");*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
   b. *The Company's financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or facts; and*
4. *I am responsible for the Company's internal control systems.*

Thus, this statement is made truthfully.

For and on behalf of the Director.

Jakarta,
30 April 2025

Bayu Prostiyono
Direktur Utama/*President Director*

PT Pertamina Energy Terminal
Kantor Pusat
Jalan Raya Anyer Km 119, Ciwandan
Cilegon, Banten 42466

Kantor Bisnis
Jalan Yos Sudarso No, 205, Sunter
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14360

T (0254) 601146-601147 F 0254 601148
www.pertamina-pet.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pertamina Energy Terminal ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Pertamina Energy Terminal (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
30 April 2025

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0243

Pertamina Energy Terminal
00831/2.1457/AU.1/10/0243-1/1/IV/2025

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN | ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
31 DESEMBER 2024 | ***31 DECEMBER 2024***
(Disajikan dalam ribuan Rupiah) | *(Expressed in thousands of Rupiah)*

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	417,738,410	664,535,031	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha				*Trade receivables*
- Pihak ketiga	5	2,448,749	3,191,934	*Third parties -*
- Pihak berelasi	5, 21	24,590,223	70,986,611	*Related parties -*
Aset kontrak				*Contract assets*
- Pihak ketiga	6	4,657,843	3,663,605	*Third parties -*
- Pihak berelasi	6, 21	137,025,178	228,949,130	*Related parties -*
Persediaan		11,207	20,457	*Inventories*
Uang muka dan biaya dibayar dimuka		460,505	273,465	*Advances and prepayments*
Jumlah aset lancar		**586,932,115**	**971,620,233**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	7	7,583,720,797	6,828,196,678	*Fixed assets*
Aset hak-guna	12a	42,753,403	65,324,048	*Right-of-use assets*
Penyertaan saham	20	1,391,555	1,313,570	*Investment in shares*
Pajak dibayar dimuka				*Prepaid taxes*
- Pajak lain-lain	13a	237,293,063	96,665,234	*Other taxes -*
Aset pajak tangguhan	13e	40,105,282	47,293,181	*Deferred tax assets*
Taksiran pengembalian pajak				*Estimated claim for tax refund*
- Pajak penghasilan	13b	3,709,910	25,936,505	*Corporate income tax -*
Jumlah aset tidak lancar		**7,908,974,010**	**7,064,729,216**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**8,495,906,125**	**8,036,349,449**	***TOTAL ASSETS***

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of Rupiah, except share data)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
- Pihak ketiga	8	61,248,187	16,596,447	*Third parties -*
- Pihak berelasi	8, 20	320,445,089	117,339,255	*Related parties -*
Biaya masih harus dibayar	9	391,398,676	338,423,981	*Accrued expenses*
Utang pajak				*Taxes payables*
- Pajak lain-lain	13c	7,541,412	8,808,620	*Other taxes -*
Pinjaman pemegang saham	10	612,971,068	-	*Shareholder loan*
Bagian jangka pendek dari liabilitas sewa	12b	94,348,929	73,206,947	*Current portion of lease liabilities*
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja	11	1,096,844	1,422,922	*Current portion of post-employment benefit obligations*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**1,489,050,205**	**555,798,172**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	12b	38,322,144	54,994,989	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan pasca kerja	11	28,889,999	23,277,449	*Post-employment benefit obligations*
Pinjaman pemegang saham	10	-	543,135,276	*Shareholder loan*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**67,212,143**	**621,407,714**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**1,556,262,348**	**1,177,205,886**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal per saham Rp1.000, modal dasar 38.214.276 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 9.957.086 lembar saham	14	9,957,086,000	9,957,086,000	*Share capital - par Rp1,000 per shares, share capital authorised 38,214,276 shares, share capital issued and fully paid 9,957,086 shares*
Tambahan modal disetor	14	(3,241,595,356)	(3,241,595,356)	*Additional paid-in capital*
Rugi komprehensif lain		(2,325,467)	(2,884,576)	*Other comprehensive loss*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	15	78,321,821	10,220,812	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		148,156,779	136,316,683	*Unappropriated -*
JUMLAH EKUITAS		**6,939,643,777**	**6,859,143,563**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**8,495,906,125**	**8,036,349,449**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Pendapatan	16	1,029,475,252	953,536,263	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	17	(915,132,190)	(859,791,613)	*Cost of revenue*
Laba bruto		**114,343,062**	**93,744,650**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	18	(124,198,762)	(76,759,071)	*General and administrative expenses*
Pendapatan keuangan		20,877,227	5,738,039	*Finance income*
Beban keuangan		(4,343,035)	(6,970,466)	*Finance costs*
Lain-lain, bersih	19	124,482,065	75,458,611	*Others, net*
Laba sebelum pajak penghasilan		**131,160,557**	**91,211,763**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	13d	(51,219,452)	(23,110,754)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan		**79,941,105**	**68,101,009**	***Profit for the year***
Penghasilan komprehensif lain				***Other comprehensive income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	11	638,822	(1,347,953)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait	13e	(140,541)	296,549	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		77,985	119,357	*Changes in fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	13e	(17,157)	(26,259)	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**80,500,214**	**67,142,703**	***Total comprehensive income for the year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	(Rugi)/ pendapatan komprehensif lain/ *Other comprehensive (loss)/income*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah/ *Total*	
				Dicadangkan/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2023	9,957,086,000	(3,241,595,356)	(1,926,270)	10,220,812	68,215,674	6,792,000,860	***Balance as at 1 January 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	68,101,009	68,101,009	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak:							*Other comprehensive income, net of tax:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(1,051,404)	-	-	(1,051,404)	*Remeasurement of post - employment benefit liabilities*
- Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	93,098	-	-	93,098	*Changes in fair value of equity - instruments at fair value through other comprehensive income*
Saldo 31 Desember 2023	**9,957,086,000**	**(3,241,595,356)**	**(2,884,576)**	**10,220,812**	**136,316,683**	**6,859,143,563**	***Balance as at 31 December 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	79,941,105	79,941,105	*Profit for the year*
Pencadangan laba ditahan	-	-	-	68,101,009	(68,101,009)	-	*Other comprehensive income*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak:							*Other comprehensive income, net of tax:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	498,281	-	-	498,281	*Remeasurement of post - employment benefit liabilities*
- Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	60,828	-	-	60,828	*Changes in fair value of equity - instruments at fair value through other comprehensive income*
Saldo 31 Desember 2024	**9,957,086,000**	**(3,241,595,356)**	**(2,325,467)**	**78,321,821**	**148,156,779**	**6,939,643,777**	***Balance as at 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flows from operating activities***
Penerimaan kas dari pelanggan		1,168,159,171	893,734,941	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(594,409,514)	(743,853,138)	*Cash paid to suppliers and employees*
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan		20,877,227	5,738,039	*Cash receipts from finance income*
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(36,273,395)	(48,902,197)	*Payments of corporate income taxes*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		**558,353,489**	**106,717,645**	***Net cash flows provided from operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi				***Cash flows from investing activities***
Perolehan aset tetap		(940,771,070)	(515,906,551)	*Acquisition of fixed assets*
Kompensasi atas pembatalan aset dalam penyelesaian		138,915,942	-	*Compensation of cancellation of construction in progress*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(801,855,128)**	**(515,906,551)**	***Net cash flows used in investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan				***Cash flows from financing activities***
Penerimaan dari pinjaman pemegang saham	10	-	545,208,300	*Proceeds from shareholder loan*
Pembayaran liabilitas sewa	12b	(2,735,304)	(3,209,342)	*Repayments of lease liabilities*
Pembayaran beban bunga liabilitas sewa	12b	(559,678)	(410,843)	*Payments of interest expense of lease liabilities*
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		**(3,294,982)**	**541,588,115**	***Net cash flows (used in)/ provided from financing activities***
(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan setara kas		**(246,796,621)**	**132,399,209**	***Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	**4**	**664,535,031**	**532,135,822**	***Cash and cash equivalents at beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**4**	**417,738,410**	**664,535,031**	***Cash and cash equivalents at end of the year***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Energy Terminal, dahulu PT Peteka Karya Tirta, ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 69 oleh Ny. Yetty Taher, S.H., tanggal 21 Januari 1988 di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. 02-3306 HT.01.01.TH.89 tanggal 14 April 1989 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 69 tanggal 30 Maret 1989 dengan nama PT Peteka Karya Tirta. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Energy Terminal berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 28 November 2022 oleh Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0086649.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 37 tanggal 25 Juni 2024 dari Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0135894 tanggal 7 Juli 2024.

Sesuai dengan Akta No. 03 tanggal 19 Agustus 2021 oleh Notaris Anizar, S.H., M.KN., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0044880.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Penyediaan air untuk industri air kemasan dan air minum isi ulang;
b. Konstruksi jaringan irigasi dan drainase, konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, dan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas;
c. Perdagangan besar bahan dan barang kimia;
d. Angkutan melalui saluran pipa;
e. Pergudangan dan penyimpanan;
f. Penyimpanan minyak dan gas bumi;
g. Aktivitas penyimpanan B3; dan
h. Pergudangan dan penyimpanan lainnya.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Energy Terminal, formerly PT Peteka Karya Tirta, (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 69 by Ny. Yetty Taher, S.H., dated 21 January 1988 in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 02-3306 HT.01.01.TH.89 dated 14 April 1989 and was published in the State Gazette No. 69 dated 30 March 1989. under the name of PT Peteka Karya Tirta. The Company's name was changed to PT Pertamina Energy Terminal based on Notarial Deed No. 17 dated 28 November 2022, of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notary in West Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0086649.AH.01.02 Year 2022 dated 30 November 2022.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was made by Notarial Deed No. 37 dated 25 June 2024 of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn, Notary in West Jakarta, concerning changes in the Director of the Company. The amendment to the articles of association has been notified to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0135894 dated 7 July 2024.

In accordance with its Articles of Association under Notarial Deed No 03 dated 19 August 2021 of Anizar, S.H., M.KN., which was registered by the Minister of Law and Human Rights through its Letter No. AHU-0044880.AH.01.02. year 2021 dated 20 August 2021, the Company shall conduct the following main businesses:

a. Supply of water for the bottled water and refill drinking water industry;
b. Construction of irrigation and drainage networks, construction of clean water treatment civil buildings, and construction of civil buildings, infrastructure and facilities for solid, liquid and gas waste treatment systems;
c. Wholesale of chemical materials and goods;
d. Supply by pipeline;
e. Warehousing and storage;
f. Oil and gas storage;
g. B3 storage activities; and
h. Warehousing and other storage.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan) / *GENERAL INFORMATION (continued)*

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) / *Establishment and general information (continued)*

Perusahaan berdomisili di Cilegon, Banten dan memiliki 26 kantor cabang yang, antara lain, terletak di Batam, Teluk Kabung, Dumai, Tanjung Uban, Tanjung Panjang, Tanjung Priok, Balongan, Cirebon, Merak, Balikpapan, Pontianak, Pekanbaru, Belawan, Wayame, Plaju, Surabaya, Gresik, Tuban, Kupang, Maumere, Manggis, Cilacap, Tanjung Sekong, Kota Baru, Bau-Bau dan Sambu.

The Company is domiciled in Cilegon, Banten and has 26 branches located, among others, in Batam, Teluk Kabung, Dumai, Tanjung Uban, Tanjung Panjang, Tanjung Priok, Balongan, Cirebon, Merak, Balikpapan, Pontianak, Pekanbaru, Belawan, Wayame, Plaju, Surabaya, Gresik, Tuban, Kupang, Maumere, Manggis, Cilacap, Tanjung Sekong, Kota Baru, Bau-Bau and Sambu.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988.

The Company commenced its commercial operations in 1988.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Pertamina International Shipping, yang didirikan di Indonesia, sedangkan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero), yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia.

The Company's immediate parent company is PT Pertamina International Shipping, incorporated in Indonesia and its ultimate parent company is PT Pertamina (Persero), also incorporated and domiciled in Indonesia.

b. Dewan Komisaris dan Direksi / *Boards of Commissioner and Director*

Susunan Dewan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Commissioner and Director as at 31 December 2024 and 2023 was as follows:

	2024	2023	
Komisaris	Bambang Sujito	Hufron	*Commissioner*
Komisaris	Nepos MT Pakpahan	-	*Commissioner*
Direktur Utama	Bayu Prostiyono	Bayu Prostiyono	*President Director*
Direktur Operasi	Rangga Raditya	-	*Director of Operation*

c. Penyelesaian atas laporan keuangan / *Completion of the financial statements*

Laporan keuangan ini diotorisasi untuk ditertibkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2025.

These financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Director of the Company on 30 April 2025.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL / *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

The accounting policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 116 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts and using accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFASs and IFASs has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The adoption of these amended standards that are effective beginning 1 January 2024 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years

- *Amendement of SFAS 201 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants;*
- *Amendement of SFAS 116 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;*
- *Amendement of SFAS 207 "Statement of Cash Flows" and amendment SFAS 107 "Financial Instruments: Disclosures" about supplier finance arrangements.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontak Asuransi":
- Amendemen PSAK No. 117 Kontrak Asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – informasi komparatif;
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran";

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan Perusahaan dari penerapan standar baru dan amendemen ini, yang tidak diadopsi dini oleh Perusahaan.

b. Mata uang fungsional dan penyajian

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berasal dari pembayaran atas transaksi-transaksi tersebut dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (dalam satuan penuh):

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of the financial statements** (continued)*

***Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")** (continued)*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but early adoption is permitted, are as follows:

- *SFAS 117 "Insurance Contracts";*
- *Amendment of SFAS 117, "Insurance Contract" about initial application of SFAS 117 and SFAS 109 – comparative information;*
- *Amendement of SFAS 221 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability";*

As at the issuance date of these financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these new standards and amendments which have not been early adopted by the Company, on the Company's financial statements.

b. Functional and presentation currency

(i) Functional and presentation currency

Items included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

The exchange rates used as at 31 December 2024 and 2023 were as follows (in full amount):

	2024	2023	
1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")	16,157	15,439	*1 United States Dollar ("US Dollar")*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Transaksi pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

e. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

f. Aset kontrak

Perusahaan menetapkan saldo aset kontrak untuk setiap kontrak dengan pelanggan, bergantung pada hubungan antara kewajiban pelaksanaan Perusahaan dan pembayaran pelanggan untuk setiap kontrak.

Aset kontrak menunjukkan bahwa Perusahaan telah melakukan pemenuhan kewajiban kepada pelanggan sebelum pelanggan melakukan pembayaran atau pembayaran telah jatuh tempo.

g. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

d. Transactions with related parties

The Company has entered into transactions with related parties as defined in SFAS 224 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

e. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

f. Contract assets

The Company established contract asset balance for each of its customer contracts, depending on the relationship between the Company's performance obligation and the customer's payment for each individual contract.

Contract asset represents that the Company has performed the obligation to a customer before the customer has paid the consideration or payment is due.

g. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi.

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan asset lain dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***g. Fixed assets** (continued)*

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the profit or loss as incurred.

Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20-25	*Buildings*
Instalasi	20-25	*Installations*
Kapal	25	*Vessel*
Kendaraan dan alat berat	5-20	*Vehicles and heavy equipments*
Peralatan kantor	5	*Office equipments*

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss and in the period in which the asset is derecognised.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah terpulihkan.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

i. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

h. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognised in the profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

i. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Utang usaha (lanjutan)

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

j. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan sebagai penyewa

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Trade payables *(continued)*

Trade are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

j. Leases

Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Company as lessee

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Company.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:
- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- biaya langsung awal

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dan yang aset pendasarnya bernilai rendah

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Leases *(continued)*

The Company as lessee *(continued)*

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
- *the amount of the initial measurement of lease liability*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received*
- *any initial direct costs*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modifications

The Company accounts for a lease modifications as a separate leases if both the:
- *modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:
- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

k. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***j. Leases** (continued)*

***The Company as lessee** (continued)*

Lease modifications (continued)

For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Company:
- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

k. Borrowings

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the year of the borrowing, using the effective interest rate method.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pinjaman (lanjutan)

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Perusahaan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

l. Imbalan kerja

(i) Kewajiban pensiun

Perusahaan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 (“UU Cipta Kerja”) (sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja No. 2/2022) yang berlaku atau Kontrak Kerja Bersama (“KKB”) Perusahaan, mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan KKB adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Borrowings *(continued)*

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

l. Employee benefits

(i) Pension obligations

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with prevailing Job Creation Law No. 6/2023 (“the Law”) (previously Job Creation Law No. 2/2022) or the Company’s Collective Agreement (“CLA”), whichever is higher. Since the Law and CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the CLA represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Kewajiban pensiun (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja, diakui di laporan posisi keuangan berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

(iii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Perusahaan memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal atau ketika karyawan menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Employee benefits *(continued)*

(i) Pension obligations (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality Government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(ii) Other long-term employee benefits

Other long-term employee benefits, which consist of long service rewards, are recognised in the statements of financial position at the present value of the defined benefit obligation. The actuarial gains and losses and past service costs are recognised immediately in profit or loss.

(iii) Termination benefits

Termination benefits are payable when an employee's employment is terminated by the Company before the normal retirement age, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Imbalan kerja (lanjutan)

(iii) Pesangon pemutusan kontrak kerja (lanjutan)

Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perusahaan berkomitmen untuk memberhentikan kontrak kerja sesuai dengan rencana formal terinci tanpa ada kemungkinan untuk dibatalkan. Pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

m. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas (kecuali berasal dari kombinasi bisnis) dimana transaksinya tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Employee benefits *(continued)*

(iii) Termination benefits (continued)

The Company recognises termination benefits when it is demonstrably committed to a termination when the Company has a detailed formal plan to terminate the employment of current employees without possibility of withdrawal. Benefits falling due more than 12 months after the end of the reporting period are discounted to their present values.

m. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated based on tax laws enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability (other than in a business combination) when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted at the end of reporting date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas. Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

o. Aset keuangan

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar, (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi); dan
- aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengakuan dan pengukuran

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

n. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

o. Financial assets

Classification

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income ("FVOCI"), or through profit or loss ("FVTPL"); and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing financial assets and the contractual terms of cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded in the statement of profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at initial recognition to record the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

i. Biaya perolehan diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain.

Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada lain-lain, bersih, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

iii. Nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Financial assets *(continued)*

Recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

i. Amortised cost

Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.

ii. FVOCI

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the fair value are taken through other comprehensive income ("OCI"). Impairment losses, interest income and foreign exchange gains and losses are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses).

Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in others, net and impairment expenses are presented as a separate line item in the profit or loss.

iii. FVTPL

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

p. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

q. Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Perusahaan menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Catatan 3 merinci bagaimana Perusahaan menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Financial assets *(continued)*

Recognition and measurement *(continued)*

Equity instruments

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

p. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

q. Impairment of financial assets

The Company applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECLs") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without a significant financing component, the Company applies a general model to ensure ECLs.

The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. Note 3 details how the Company determines whether there has been a significant increase in credit risk.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

r. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each of the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling prices is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari jasa *storage* Bahan Bakar Minyak ("BBM") dan *Liquified Petroleum Gas* ("LPG") diakui sepanjang waktu berdasarkan kontrak dan jasa *throughput* BBM dan LPG diakui pada waktu tertentu saat pengendalian atas jasa diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan dari jasa penunjang penyediaan air diakui pada waktu tertentu saat jasa telah diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan bunga

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115 dan diakui sebagai beban dibayar dimuka. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Penerapan panduan praktis

Perusahaan menerapkan panduan praktis untuk biaya untuk memperoleh kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut kurang dari satu tahun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

Revenue from storage services fuel and Liquified Petroleum Gas ("LPG") are recognised overtime based on contract and throughput services fuel and LPG are recognised when at a point in time when control over the services is rendered to the customers.

Revenues from water supply support services are recognised at a point in time when services have been rendered to the customers.

Interest revenue

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortised cost is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses from contract with customers

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfil") or are incremental of obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalisation under SFAS 115 and recognised as prepayment. Such cost will be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Application of practical expedient

The Company applies the practical expedient for the cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset is less than one year.

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan interim disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai penggunaan.

Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi, harga jual (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the interim financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected transaction volumes, selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan melakukan penelaahan dan penyesuaian terhadap estimasi masa manfaat aset tetapnya. Lihat Catatan 7 untuk detail penyesuaian.

Imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya neto imbalan pasca kerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi- asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja yang terkait.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimating useful lives of fixed assets

The Company estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Company estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

At 1 January 2023, the Company conducted a review and adjustment of the estimated useful lives of its fixed assets. See Note 7 for details of the adjustments.

Post-employment benefit

The present value of post-employment obligations depends on several factors that are determined via an actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment benefit obligations.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Company considers the interest rates of Government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which have a time period similar to those of related employment benefits liability.

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pasca kerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 116, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Post-employment benefit (continued)

The key assumptions used for determining post-employment liabilities include current market conditions.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Company has various lease agreements where the Company acts as a lessee in respect of certain assets. The Company evaluates whether significant risk and reward of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 116, which requires the Company to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Company could not readily determine the implicit rate, management used the Company's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan pengurangan beban tertentu dalam mengestimasi provisi beban pajak penghasilan untuk Perusahaan. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

Income taxes

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for the Company. In particular, the calculation of the Company's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain, during the ordinary course of business.

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

The Company recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4. KAS DAN SETARA KAS / ***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS***

	2024	2023	
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	21,788	-	*Third party*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 20)			*Government-related entities (Note 20)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	362,777,881	86,124,105	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	3,071,365	1,724,443	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
	365,871,034	87,848,548	
Dolar AS			***US Dollar***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 20)			*Government-related entities (Note 20)*
Mandiri	47,367,376	572,186,483	*Mandiri*
	47,367,376	572,186,483	
Jumlah kas di bank	**413,238,410**	**660,035,031**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			***Rupiah***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 20)			*Government-related entity (Note 20)*
BNI	4,500,000	4,500,000	*BNI*
Jumlah deposito berjangka	**4,500,000**	**4,500,000**	***Total time deposits***
Jumlah kas dan setara kas	**417,738,410**	**664,535,031**	***Total cash and cash equivalents***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka berkisar antara 2,25%-3,38% pada 2024 dan 2023.

***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS** (continued)*

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

The annual interest rates of time deposits range from 2.25%-3.38% in 2024 and 2023, respectively.

5. PIUTANG USAHA / ***5. TRADE RECEIVABLES***

	2024	2023	
Pihak ketiga	2,547,584	3,311,509	*Third parties*
Provisi penurunan nilai	(98,835)	(119,575)	*Provision for impairment*
	2,448,749	3,191,934	
Pihak berelasi (Catatan 20)	25,003,695	71,896,343	*Related parties (Note 20)*
Provisi penurunan nilai	(413,472)	(909,732)	*Provision for impairment*
	24,590,223	70,986,611	
Jumlah piutang usaha, neto	**27,038,972**	**74,178,545**	***Total trade receivables, net***

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:

	2024	2023	
0 - 30 hari	16,682,628	62,664,794	*0 - 30 days*
30 - 90 hari	2,569,586	534,229	*30 - 90 days*
90 - 365 hari	29,623	4,027,446	*90 - 365 days*
Lebih dari 365 hari	8,269,442	7,981,383	*More than 365 days*
	27,551,279	75,207,852	
Provisi penurunan nilai	(512,307)	(1,029,307)	*Provision for impairment*
Jumlah	**27,038,972**	**74,178,545**	***Total***

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	1,029,307	932,573	*Beginning balance*
Penambahan	-	96,734	*Addition*
Pemulihan	(517,000)	-	*Recovery*
Saldo akhir	**512,307**	**1,029,307**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa provisi atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables.

6. ASET KONTRAK / *6. CONTRACT ASSETS*

	2024	2023	
Pihak ketiga	4,752,901	3,745,996	*Third parties*
Provisi penurunan nilai	(95,058)	(82,391)	*Provision for impairment*
	4,657,843	3,663,605	
Pihak berelasi (Catatan 20)	137,299,778	229,334,029	*Related parties (Note 20)*
Provisi penurunan nilai	(274,600)	(384,899)	*Provision for impairment*
	137,025,178	228,949,130	
Jumlah	**141,683,021**	**232,612,735**	***Total***

Mutasi saldo provisi penurunan nilai aset kontrak adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	467,290	274,588	*Beginning balance*
Penambahan	-	192,702	*Addition*
Pemulihan	(97,632)	-	*Recovery*
Saldo akhir	**369,658**	**467,290**	***Ending balance***

7. ASET TETAP / *7. FIXED ASSETS*

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	9,140,216	-	-	9,140,216	*Land*
Bangunan	1,114,208,945	56,928	-	1,114,265,873	*Buildings*
Kapal	478,624	-	-	478,624	*Vessel*
Kendaraan dan alat berat	168,132,235	-	-	168,132,235	*Vehicles and heavy equipments*
Instalasi	7,613,446,191	1,372,580	95,671,365	7,710,490,136	*Installation*
Peralatan kantor	21,846,964	-	22,141,207	43,988,171	*Office equipments*
	8,927,253,175	1,429,508	117,812,572	9,046,495,255	
Aset dalam penyelesaian	1,831,995,737	1,162,501,794	(117,812,572)	2,876,684,959	*Construction in progress*
	10,759,248,912	1,163,931,302	-	11,923,180,214	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	466,731,521	36,352,637	-	503,084,158	*Buildings*
Kapal	209,340	17,952	-	227,292	*Vessel*
Kendaraan dan alat berat	150,378,390	4,796,214	-	155,174,604	*Vehicles and heavy equipments*
Instalasi	3,276,764,890	302,793,101	2,257,592	3,581,815,583	*Installation*
Peralatan kantor	17,422,825	145,490	-	17,568,315	*Office equipments*
	3,911,506,966	344,105,394	2,257,592	4,257,869,952	
Penurunan nilai	19,545,268	64,301,789	(2,257,592)	81,589,465	*Impairment*
Nilai buku	**6,828,196,678**			**7,583,720,797**	***Net book value***

7. ASET TETAP (lanjutan) / ***7. FIXED ASSETS** (continued)*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah	9,140,216	-	-	9,140,216	*Land*
Bangunan	975,185,688	-	139,023,257	1,114,208,945	*Buildings*
Kapal	478,624	-	-	478,624	*Vessel*
Kendaraan dan alat berat	168,132,235	-	-	168,132,235	*Vehicles and heavy equipments*
Instalasi	7,594,251,425	-	19,194,766	7,613,446,191	*Installation*
Peralatan kantor	21,846,964	-	-	21,846,964	*Office equipments*
	8,769,035,152	-	158,218,023	8,927,253,175	
Aset dalam penyelesaian	1,264,824,900	725,388,860	(158,218,023)	1,831,995,737	*Construction in progress*
	10,033,860,052	725,388,860	-	10,759,248,912	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	428,006,359	38,725,162	-	466,731,521	*Buildings*
Kapal	191,388	17,952	-	209,340	*Vessel*
Kendaraan dan alat berat	147,869,201	2,509,189	-	150,378,390	*Vehicles and heavy equipments*
Instalasi	2,977,582,434	299,182,456	-	3,276,764,890	*Installation*
Peralatan kantor	14,827,554	2,595,271	-	17,422,825	*Office equipments*
	3,568,476,936	343,030,030	-	3,911,506,966	
Penurunan nilai	-	19,545,268	-	19,545,268	*Impairment*
Nilai buku	**6,465,383,116**			**6,828,196,678**	***Net book value***

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut: / *The allocation of depreciation expenses was as follows:*

	2024	**2023**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 17)	342,903,766	342,622,061	*Cost of revenue (Note 17)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 18)	1,201,628	407,969	*General and administrative expenses (Note 18)*
Jumlah	**344,105,394**	**343,030,030**	***Total***

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Cilegon dengan luas area seluas 23.614 meter persegi. Hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") atas nama Perusahaan. Jangka waktu HGB antara 20 dan 30 tahun, yakni akan berakhir sampai dengan tahun 2035 dan 2038 dan dapat diperpanjang.

The Company owned certain land which is located in Cilegon with a total area of 23,614 square meters. The certificates of ownership of the land are in the form of Hak Guna Bangunan ("HGB") under the name of the Company. The terms of HGB range from 20 to 30 years, which will expire in 2035 to 2038, and can be extended upon expiration.

7. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan melakukan penelaahan dan penyesuaian terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tetapnya berdasarkan laporan penilai dari KJPP Toto Suharto dan Rekan tertanggal 23 Mei 2023. Rincian dan perubahan masa manfaat sebagai berikut:

Perubahan estimasi sisa masa manfaat:

Aset/*Assets*	Sebelum perubahan/ *Before changes*	Setelah perubahan/ *After changes*
Bangunan/*Buildings*	1-22 Tahun/Years	1-25 Tahun/Years
Kapal/*Vessel*	12 Tahun/Years	16 Tahun/Years
Kendaraan dan alat berat/*Vehicles and heavy*	1-17 Tahun/Years	1-18 Tahun/Years
Instalasi/*Installation*	1-22 Tahun/Years	1-23 Tahun/Years
Peralatan kantor/*Office equipments*	1-4 Tahun/Years	1-5 Tahun/Years

Dampak dari perubahan estimasi sisa masa manfaat aset tetap ini mengurangi depresiasi tahun 2023 sejumlah Rp116.420.599.

Pada tahun 2023 manajemen menidentifikasi beberapa tangki bahan bakar di Terminal Bahan Bakar Minyak ("TBBM") Pulau Sambu yang sudah tidak dapat beroperasi. Atas tangki tersebut manajemen membukukan penurunan nilai sebesar Rp19.545.268. Metode penurunan nilai yang digunakan adalah nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan yang dihitung berdasarkan laporan penilai KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 25 April 2024. Asumsi utama yang digunakan dari nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah harga jual bersih besi tua sebesar Rp4.295-Rp4.850/kg (nilai penuh) dan berat tonase bersih tangki bahan bakar sebesar 1.465,36 ton.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan melakukan kajian lanjutan atas indikasi penurunan nilai aset tetap sesuai dengan PSAK 236 dan mengidentifikasi indikator penurunan nilai untuk unit penghasil kas ("UPK") tangki-tangki dan fasilitas penunjangnya di TBBM Pulau Sambu. Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024, nilai tercatat UPK tangki-tangki dan fasilitas penunjangnya di TBBM Pulau Sambu sebesar Rp64.301.789 lebih tinggi daripada nilai terpulihkannya. Oleh karena itu, Perusahaan mengakui tambahan kerugian penurunan nilai sebesar Rp64.301.789, yang terutama disebabkan oleh belum maksimalnya pelanggan yang memanfaatkan tangki-tangki dan fasilitas penunjangnya di TBBM Pulau Sambu, yang berdampak pada pendapatan dan pemanfaatan kapasitas penyimpanan.

***7. FIXED ASSETS** (continued)*

At 1 January 2023, the Company conducted a review and adjustment of the estimated remaining useful lives of its fixed assets based on an appraisal report from KJPP Toto Suharto dan Rekan dated 23 May 2023. The details and changes in estimated useful lives are as follows:

Changes in estimated remaining useful lives:

The impact of the change in the estimated remaining useful lives of the fixed assets reduced the depreciation for 2023 by Rp116,420,599.

In 2023, management identified several fuel tanks at the Fuel Terminal ("FT") Pulau Sambu that were no longer operational. For these tanks, management recorded an impairment loss of Rp19,545,268. The impairment method used was the fair value of the assets less cost to disposal, calculated based on the appraisal report by KJPP Toto Suharto and Partners dated 25 April 2024. The main assumptions used for the fair value as of 31 December 2023, were the net selling price of scrap metal ranging from Rp4,295-Rp4,850/kg (full value) and the net tonnage weight of the fuel tanks amounting to 1,465.36 tons..

As at 31 December 2024, the Company performed further impairment assessment on fixed assets in accordance with SFAS 236 and identified indicators of impairment in the the tanks and its supporting facilities in FT Pulau Sambu cash generating unit ("CGU"). Based on the impairment assessment performed as at 31 December 2024, the tanks and its supporting facilities in FT Pulau Sambu CGU's carrying amount of Rp64,301,789 was higher than its recoverable amount. Therefore, the Company recognised an additional impairment loss of Rp64,301,789, which was primarily due to the suboptimal utilisation of the tanks and its supporting facilities by customers at FT Pulau Sambu, which affects revenue and storage capacity utilisation.

7. ASET TETAP (lanjutan)

Pengukuran jumlah terpulihkan UPK tangki-tangki dan fasilitas penunjangnya di TBBM Pulau Sambu pada tanggal 31 Desember 2024 ditentukan berdasarkan "Nilai pakai" dengan menggunakan model arus kas yang didiskontokan. Asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai tangki-tangki TBBM Pulau Sambu adalah sebagai berikut:

***7. FIXED ASSETS** (continued)*

The measurement of recoverable amount of the tanks and its supporting facilities in FT Pulau Sambu as at 31 December 2024 was determined based on "Value in use" that used a discounted cash flow model. The key assumptions used in the impairment assessment for the tanks in FT Pulau Sambu were as follows:

	2024	
Storage fee	AS$/*US$*3.7-AS$/*US$*5.0	*Storage fee*
Throughput fee	AS$/*US$*0.74	*Throughput fee*
Tingkat inflasi	2.2%-2.3%	*Inflation rate*
Tingkat diskonto	8.14%	*Discount rate*

Sensitivitas dari nilai terpulihkan UPK tangki-tangki dan fasilitas penunjangnya di TBBM Pulau Sambu terhadap perubahan asumsi utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the recoverable amount of the tanks and its supporting facilities in FT Pulau Sambu to changes in the key assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Changes in assumptions*	**Dampak terhadap nilai terpulihkan/*Impact on recoverable amount***	
Storage fee	kenaikan/*increase by* 0,5%	naik/*increase by* Rp5,336,302	*Storage fee*
	penurunan/*decrease by* 0,5%	turun/*decrease by* Rp5,336,302	
Tingkat diskonto	kenaikan/increase by 0,5%	turun/decrease by Rp30,563,324	*Discount rate*
	penurunan/*decrease by* 0,5%	naik/*increase by* Rp32,159,361	

Bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp43.721.391 dan Rp1.226.376.

Interest capitalised as part of fixed assets for the year ended 31 December 2024 and 2023 was Rp43,721,391 and Rp1,226,376.

Aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.639.277.156 dan Rp8.255.356.812. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

The Company's fixed assets are insured against losses, accidents, fire and other risks with sum insured for year ended 31 December 2024 and 2023 were Rp8,639,277,156 and Rp8,255,356,812, respectively. Management believes that the sum insured are adequate to cover possible losses arising from such risks.

8. UTANG USAHA / ***8. TRADE PAYABLES***

	2024	**2023**	
Pihak ketiga	61,248,187	16,596,447	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 20)	320,445,089	117,339,255	*Related parties (Note 20)*
Jumlah	**381,693,276**	**133,935,702**	***Total***

9. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / ***9. ACCRUED EXPENSES***

	2024	**2023**	
Pembangunan aset tetap	284,958,050	250,254,886	*Construction of fixed assets*
Operasional terminal	60,471,960	72,584,425	*Terminal operations*
Biaya karyawan	45,968,666	15,584,670	*Employee expenses*
Jumlah	**391,398,676**	**338,423,981**	***Total***

10. PINJAMAN DARI PEMEGANG SAHAM / *10. SHAREHOLDER LOAN*

	2024	2023	
Pinjaman dari PT Pertamina International Shipping ("PIS")	612,971,068	543,135,276	*Loan from PT Pertamina International Shipping ("PIS")*
Bagian lancar	**(612,971,068)**	**-**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**-**	**543,135,276**	***Non-current portion***

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dana dengan PIS untuk jangka waktu 18 bulan dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar AS$75.000.000 (nilai penuh) dan suku bunga sebesar SOFR+0,82% per tahun. Selanjutnya, Perusahaan dalam proses memperpanjang perjanjian pinjaman dana dengan PIS.

On 15 December 2023, the Company signed a loan agreement with PIS for a period of 18 month with a maximum loan facility of US$75,000,000 (full amount) and an interest rate of SOFR+0.82% per annum. Subsequently, the Company is in the process to extend the loan agreement with PIS.

Beban bunga dari pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp43.721.391 dan Rp1.226.376 dan dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap.

Interest expense from this loan for the year ended 31 December 2024 and 2023 was Rp43,721,391 and Rp1,226,376. and capitalised as part of fixed assets.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Februari 2025, Perusahaan menerima pencairan pinjaman dari pemegang saham PIS sebesar setara AS$39.900.000 (setara Rp651.567.000).

Subsequently, on 7 February 2025, the Company received a loan disbursement from PIS shareholders amounting to the equivalent of US$39,900,000 (equivalent to Rp651,567,000).

11. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA / *11. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS*

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuari Steven & Mourits, sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 23 Januari 2025, menggunakan metode *projected unit credit*.

The actuarial valuation of employment benefits obligations is calculated by a registered actuarial consultant, Steven & Mourits Actuary Consultant Office as stated in its report dated 23 January 2025, using the projected unit credit method.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari Perusahaan sehubungan dengan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

	2024	2023	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	29,986,843	24,700,371	*Present value of benefit obligations*
Bagian lancar	**(1,096,844)**	**(1,422,922)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**28,889,999**	**23,277,449**	***Non-current portion***

11. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / ***11. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS*** *(continued)*

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *Amounts charged in the profit or loss and in respect of these post-employment benefits are as follows:*

	2024	2023	
Biaya jasa kini	9,044,197	8,355,315	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	215,238	*Past service cost*
Biaya bunga	700,610	671,067	*Interest cost*
Pengakuan keuntungan aktuaria untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya	(9,087)	(8,554)	*Recognition of actuarial income for Other Long-term Employee Benefit ("OLTEB")*
Jumlah	**9,735,720**	**9,233,066**	***Total***

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya (sebelum pajak) adalah sebagai berikut: / *Remeasurement of employee benefit obligation recognised as other comprehensive income (before tax) is as follows:*

	2024	2023	
Pengukuran kembali nilai kini liabilitas:			*Remeasurement of present value liabilities:*
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi keuangan	(466,252)	1,655,264	*(Gain)/loss on changes in financial assumptions*
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	(172,570)	(307,311)	*Gain on changes in experience adjustments*
Jumlah	**(638,822)**	**1,347,953**	***Total***

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut: / *The movement of present value of benefit obligations is as follows:*

	2024	2023	
Pada awal tahun	24,700,371	15,820,909	*Beginning of the year*
Biaya jasa kini	9,044,196	8,355,315	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	215,238	*Past service cost*
Biaya bunga	700,610	671,067	*Interest cost*
Keuntungan aktuaria untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya	(9,087)	(8,554)	*Recognition of actuarial income for OLTEB*
Pembayaran imbalan	(3,810,425)	(1,701,557)	*Benefits paid*
(Dikreditkan)/dibebankan pada pendapatan komprehensif lain	(638,822)	1,347,953	*(Credited)/charged to other comprehensive income*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	**29,986,843**	**24,700,371**	***Present value of benefit obligations at the end of the year***

Asumsi utama yang digunakan pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: / *The key assumptions used in 2024 and 2023 are as follows:*

	2024	2023	
Tingkat diskonto	7.1%	6.6%-6.8%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.3%	8.2%	*Annual salary increase*
Tingkat mortalita	TMI IV – 2019	TMI IV – 2019	*Mortality rate*
Usia pensiun normal	56	56	*Normal retirement age*

11. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Melalui program imbalan pasti yang dimiliki oleh Perusahaan, maka Perusahaan terekspos beberapa risiko berikut:

a. Risiko suku bunga. Kewajiban imbalan pasti yang dihitung berdasarkan PSAK 219 menggunakan tingkat diskonto obligasi. Jika tingkat diskonto tersebut turun, maka kewajiban imbalan pasti akan cenderung mengalami kenaikan.

b. Risiko kenaikan gaji. Kenaikan aktual gaji dibandingkan dengan tingkat estimasi kenaikan gaji akan membuat kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

11. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS *(continued)*

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of risks, which are detailed below:

a. Interest rate risk. The defined benefit obligation calculated under SFAS 219 uses a discount rate on bond yields. If bond yields fall, the defined benefit will tend to increase.

b. Salary increase risk. Higher actual increase in expected salary will increase the defined benefit obligation.

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal assumption is as follows:

Asumsi utama	Kenaikan/ (penurunan)/ *Increase/(decrease)*	(Penurunan)/kenaikan liabilitas imbalan pascakerja/ *(Decrease)/increase in the post-employment benefit obligations*	*Key assumptions*
Tingkat diskonto	1%	(Rp9,342,546)/Rp10,978,592	*Discount rate*
Kenaikan gaji	1%	Rp11,051,710/(Rp9,268,938)	*Salary increase*

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan pasti adalah 17.32 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 17,32 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2024 is presented below:

	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	5 sampai 10 tahun/ *Between 5 and 10 years*	Lebih dari 10 tahun/ *Over 10 years*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas imbalan pasca kerja	1,096,844	3,936,379	3,024,452	107,229,528	115,287,203	*Post-employment benefit obligations*

12. SEWA

12. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use-assets

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposal*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Acquisition costs***
Hak atas tanah	106,662,323	-	-	106,662,323	*Land rights*
Kendaraan	15,770,541	3,421,084	(4,947,526)	14,244,099	*Vehicles*
Jumlah	**122,432,864**	**3,421,084**	**(4,947,526)**	**120,906,422**	***Total***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Hak atas tanah	49,775,751	21,332,465	-	71,108,216	*Land rights*
Kendaraan	7,333,065	4,659,264	(4,947,526)	7,044,803	*Vehicles*
Jumlah	**57,108,816**	**25,991,729**	**(4,947,526)**	**78,153,019**	***Total***
Nilai tercatat	**65,324,048**			**42,753,403**	***Net carrying value***

12. SEWA (lanjutan) / ***12. LEASES** (continued)*

a. Aset hak-guna (lanjutan) / ***a. Right-of-use-assets** (continued)*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan					***Acquisition costs***
Hak atas tanah	189,082,399	-	(82,420,076)	106,662,323	*Land rights*
Kendaraan	4,947,526	10,823,015	-	15,770,541	*Vehicles*
Jumlah	**194,029,925**	**10,823,015**	**(82,420,076)**	**122,432,864**	***Total***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Hak atas tanah	30,548,336	21,332,465	(2,105,050)	49,775,751	*Land rights*
Kendaraan	3,796,048	3,537,017	-	7,333,065	*Vehicles*
Jumlah	**34,344,384**	**24,869,482**	**(2,105,050)**	**57,108,816**	***Total***
Nilai tercatat	**159,685,541**			**65,324,048**	***Net carrying value***

Seluruh beban penyusutan aset hak-guna dicatat ke akun beban pokok pendapatan (Catatan 17).

All depreciation expenses of right-of-use assets were recorded as cost of revenue (Note 17).

b. Liabilitas sewa / ***b. Lease liabilities***

	2024	**2023**	
Saldo awal	128,201,936	198,614,647	*Beginning balance*
Penambahan	3,421,084	10,823,015	*Additions*
Penyesuaian	-	(84,586,006)	*Adjustment*
Beban bunga	4,343,035	6,970,465	*Interest expense*
Pembayaran	(3,294,982)	(3,620,185)	*Payments*
	132,671,073	128,201,936	
Bagian lancar	**94,348,929**	**73,206,947**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**38,322,144**	**54,994,989**	***Non-current portion***

Laporan arus kas menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The statement of cash flows shows the following amounts related to leases:

	2024	**2023**	
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Pembayaran liabilitas sewa	2,735,304	3,209,342	*Repayments of lease liabilities*
Pembayaran beban bunga liabilitas sewa	559,678	410,843	*Payments of interest expense of lease liabilities*
Jumlah	**3,294,982**	**3,620,185**	***Total***

12. SEWA (lanjutan)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	2024	2023	
Beban bunga	4,343,035	6,970,465	*Interest expense*
Beban terkait sewa jangka pendek	4,332,287	5,551,855	*Expenses related to short-term lease*
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	1,909,295	3,104,046	*Expenses related to lease of low value assets*

Jumlah yang terkait dengan sewa jangka pendek, sewa atas aset bernilai rendah, dan sewa variabel tidak dimasukkan sebagai liabilitas sewa berdasarkan sifatnya sebagaimana dibahas pada Catatan 2j.

***12. LEASES** (continued)*

***b. Lease liabilities** (continued)*

The statement of profit or loss show the following amounts related to leases:

Amounts related to short-term leases, leases of low-value assets and variable leases are not required to be included as lease liabilities based on their nature as discussed in Note 2j.

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2024	2023	
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	237,293,063	96,665,234	*Value Added Tax ("VAT")*
Jumlah	**237,293,063**	**96,665,234**	***Total***

b. Taksiran pengembalian pajak

b. Estimated claim for tax refund

	2024	2023	
Lebih bayar pajak penghasilan			*Overpayment of corporate income tax*
- 2024	3,709,910	-	*2024 -*
- 2023	-	16,900,470	*2023 -*
- 2021	-	9,036,035	*2021 -*
Jumlah	**3,709,910**	**25,936,505**	***Total***

c. Utang pajak

c. Taxes payables

	2024	2023	
Pajak lain-lain			*Other taxes*
- Pasal 21	5,591,613	3,395,688	*Article 21 -*
- Pasal 23	397,034	255,350	*Article 23 -*
- Pasal 25	729,649	820,124	*Article 25 -*
- Pasal 4(2)	823,116	4,337,458	*Article 4(2) -*
Jumlah	**7,541,412**	**8,808,620**	***Total***

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	2024	2023	
Kini	32,563,485	5,129,049	*Current*
Tangguhan	7,030,201	15,684,881	*Deferred*
Penyesuaian tahun lalu	11,625,766	2,296,824	*Prior year adjustment*
Jumlah	**51,219,452**	**23,110,754**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***13. TAXATION*** *(continued)*

d. Beban pajak penghasilan / ***d. Income tax expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the years ended 31 December 2024 and 2023, are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	131,160,557	91,211,763	*Profit before income tax*
Koreksi fiskal:			***Fiscal corrections:***
Liabilitas imbalan pasca kerja	5,925,294	7,531,494	*Post-employment benefit obligations*
Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak	(614,633)	289,435	*Provision for impairment of trade receivables and contract assets*
Aset tetap	(69,213,374)	(122,609,893)	*Fixed asset*
Penurunan nilai aset tetap	64,301,789	19,545,268	*Impairment of fixed asset*
Sewa	27,090,661	23,948,783	*Leases*
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	10,242,774	9,198,947	*Non-deductible expenses*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(20,877,227)	(5,801,939)	*Income subject to final tax*
Estimasi laba kena pajak	**148,015,841**	**23,313,858**	***Estimated taxable income***
Beban pajak kini	**32,563,485**	**5,129,049**	***Current tax expenses***
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			*Less prepaid income taxes*
- Pasal 23	27,155,710	14,648,404	*Article 23 -*
- Pasal 25	9,117,685	7,381,115	*Article 25 -*
	36,273,395	22,029,519	
Lebih bayar pajak penghasilan	**(3,709,910)**	**(16,900,470)**	***Overpayment of corporate income tax***

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika SPT disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the SPT is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***13. TAXATION*** *(continued)*

d. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan) / ***d. Income tax expense/(benefit)*** *(continued)*

Pajak atas laba Perusahaan sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas dalam jumlah sebagai berikut:

The tax on the Company's profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the entity is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	131,160,557	91,211,763	*Profit before income tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	28,855,323	20,066,588	*Income tax calculated at applicable tax rate*
Dampak pajak penghasilan atas:			*Tax effects of:*
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	2,253,410	2,023,768	*Non-deductible expense*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(4,592,990)	(1,276,426)	*Income subject to final tax*
Penyesuaian aset pajak tangguhan	6,004,746	-	*Deferred tax asset adjustment*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dari penurunan nilai aset tetap	7,073,197	-	*Deferred tax asset that unrecognised from impairment of fixed asset*
Penyesuaian tahun lalu	11,625,766	2,296,824	*Prior year adjustment*
Beban pajak penghasilan	**51,219,452**	**23,110,754**	***Income tax expense***

e. Aset pajak tangguhan / ***e. Deferred tax assets***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss***	**Dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Charged to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Liabilitas imbalan pasca kerja	5,434,077	1,303,565	(140,541)	6,597,101	*Post-employment benefit obligations*
Provisi penurunan piutang usaha dan kontrak aset	329,253	(135,219)	-	194,034	*Provision for impairment of receivables and contract assets*
Penurunan nilai aset tetap	4,299,959	7,073,197	-	11,373,156	*Impairment of fixed asset*
Aset tetap	23,678,200	(21,231,689)	-	2,446,511	*Fixed assets*
Aset hak guna	(14,371,291)	4,965,542	-	(9,405,749)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	28,211,969	994,403	-	29,206,372	*Lease liabilities*
Penyertaan saham	(288,986)	-	(17,157)	(306,143)	*Investment in shares*
Jumlah	**47,293,181**	**(7,030,201)**	**(157,698)**	**40,105,282**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

***13. TAXATION** (continued)*

***e. Deferred tax assets** (continued)*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan pada laba rugi/ *(Charged) credited to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Liabilitas imbalan pasca kerja	3,480,599	1,656,929	296,549	5,434,077	*Post-employment benefit obligations*
Provisi penurunan piutang usaha dan kontrak aset	265,577	63,676	-	329,253	*Provision for impairment of receivables and contract assets*
Penurunan nilai aset tetap	-	4,299,959	-	4,299,959	*Impairment of fixed asset*
Aset tetap	50,652,377	(26,974,177)	-	23,678,200	*Fixed assets*
Aset hak guna	(35,130,819)	20,759,528	-	(14,371,291)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	43,702,765	(15,490,796)	-	28,211,969	*Lease liabilities*
Penyertaan saham	(262,727)	-	(26,259)	(288,986)	*Investment in shares*
Jumlah	**62,707,772**	**(15,684,881)**	**270,290**	**47,293,181**	***Total***

f. Administrasi

Berdasarkan undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, companies which domiciled in Indonesia calculate and pay taxes based on self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years by the time the tax becomes due.

g. Surat ketetapan pajak

Pajak penghasilan badan

Tahun pajak 2021

Pada bulan Juli 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 0001/206/21/051/21 atas pajak penghasilan badan tahun 2021 senilai Rp9.036.035 yang telah dibayarkan pada bulan Agustus 2023. Atas SKPKB tersebut Perusahaan mengajukan keberatan pada bulan Oktober 2023.

Pada tanggal September 2024, Perusahaan telah menerima hasil keberatan tersebut yang mengabulkan sebagian dari koreksi pajak yang diajukan oleh Perusahan. Atas hasil keberatan tersebut, Perusahaan telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak badan periode 2021 sebesar Rp1.931.758 dan membebankan Rp7.104.277 sebagai beban tahun 2024.

g. Tax assessment letter

Corporate income taxes

Fiscal year 2021

In July 2023, the Company received Tax Assessment Letters (SKPKB) No. 0001/206/21/051/21 for underpayment of corporate income tax 2021 of Rp9,036,035 which was paid in August 2023. The Company filed an objection letter to the SKPKB in October 2023.

In September 2024 the Company received an objection result for that the tax audit which partially granted the tax corrections proposed by the Company. Based on the objection results, the Company received a refund of the overpayment of corporate tax for the 2021 period amounting to Rp1,931,758 and charged Rp7,104,277 as an expense in 2024.

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2019

Pada bulan Agustus 2024, Perusahaan menerima SKPKB No. 00012/206/21/051/21 atas pajak penghasilan badan tahun 2019 senilai Rp1.804.695 yang telah dibayarkan pada bulan September 2024. Perusahaan menerima kurang bayar tersebut dan tidak negajukan keberatan sebagai beban tahun 2024.

Tahun pajak 2018

Pada bulan Desember 2023, Perusahaan menerima SKPKB No. 00046/206/18/051/23 atas pajak penghasilan badan tahun 2019 senilai Rp1.720.504 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2024. Perusahaan menerima kurang bayar tersebut dan tidak negajukan keberatan sebagai beban tahun 2024.

***13. TAXATION** (continued)*

***g. Tax assessment letter** (continued)*

Fiscal year 2019

In August 2024, the Company received SKPKB No. 00012/206/21/051/21 for underpayment of corporate income tax 2019 of Rp1,804,695 which was paid in September 2024. The Company accepted the underpayment and did not file an objection letter and recognizing it as an expense for the year 2024.

Fiscal year 2018

In December 2023, the Company received SKPKB No. 00046/206/18/051/23 for underpayment of corporate income tax 2019 of Rp Rp1,720,504 *which was paid in January 2024. The Company accepted the underpayment and did not file an objection letter and recognizing it as an expense for the year 2024.*

14. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

14. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Modal saham

Modal saham ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

Share capital

The composition of issued and fully paid share capital, was as follows:

Nama pemegang saham/ *Shareholders' name*	2024 dan/*and* 2023		
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Modal saham/ *Share capital*	Persentasi kepemilikan/ *Percentage of ownership*
PIS	9,955,394	9,955,394,000	99.98301%
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")	1,691	1,691,000	0.01698%
PT Pertamina Port and Logistics ("PPL")	1	1,000	0.00001%
Jumlah	**9,957,086**	**9,957,086,000**	**100%**

Tambahan modal disetor

Additional paid-in capital

	2024	2023	
Tambahan modal disetor	3,241,595,356	3,241,595,356	*Additional paid-in capital*

Tambahan modal disetor berasal dari penerbitan saham di tahun 2021 untuk pengalihan enam terminal milik Pertamina. Nilai wajar dari saham yang diterbitkan sebesar Rp9.551.877.000. Selisih antara nilai wajar sebesar Rp9.551.877.000 dan nilai buku aset yang dialihkan di tahun 2021 sebesar Rp6.310.281.644, sebesar Rp3.241.595.356 dicatat pada akun tambahan modal disetor sesuai penerapan PSAK 338 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Additional paid-in capital is derived from issued shares in 2021 for the transfer of six ports owned by Pertamina. The fair value of the shares issued was Rp9,551,877,000. The difference between the fair value of Rp9,551,877,000 and the book value of transferred assets in 2021 of Rp6,310,281,644, amounting to Rp3,241,595,356, was recorded as additional paid-in capital, following SFAS 338 (Revised 2012), "Business Combinations on Entity under Common Control".

15. SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA / *15. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS*

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan dari laba neto setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut dilakukan sampai dengan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Perusahaan belum memenuhi jumlah minimum cadangan umum ini sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas. Tidak ada batasan waktu untuk pembentukan cadangan.

Based on Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund should be provided until at minimum 20% of the issued and paid-up capital. The Company has not fulfilled the minimum amount of this general reserved in accordance with the Limited Liability Company Law. There is no time limit on the establishment of the reserve.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 19 Juni 2024 dari Shahreza Annaz S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menetapkan cadangan wajib sebesar Rp68.101.009.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders Deed No. 5 dated 20 June 2024, by Shahreza Annaz S.H., M.Kn., shareholders of the Company agreed to set up statutory reserves amounting to Rp68,101,009.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp78.321.821 dan Rp10.220.812.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company has appropriated an amount of Rp78,321,821 *and Rp10,220,812 respectively as the general reserves.*

16. PENDAPATAN / *16. REVENUE*

	2024	2023	
Jasa penyimpanan	952,801,250	885,255,683	*Storage services*
Penyediaan air bersih	67,278,002	68,280,580	*Clean water supply*
Pemulihan lahan	9,396,000	-	*Waste management*
Jumlah	**1,029,475,252**	**953,536,263**	***Total***

Perusahaan mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak terkait pendapatan berikut ini:

The Company has recognised contract assets and contract liabilities related to the following revenues:

	2024	2023	
Aset kontrak yang berkaitan dengan kontrak:			*Contract assets relating to contract:*
- Jasa penyimpanan	107,018,631	211,264,072	*Storage services -*
- Penyediaan air bersih	25,268,390	21,348,663	*Clean water supply -*
- Pemulihan lahan	9,396,000	-	*Waste management -*
Jumlah	**141,683,021**	**232,612,735**	***Total***

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 20 for related party transactions and balances.

17. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *17. COST OF REVENUE*

	2024	2023	
Penyusutan (Catatan 7 dan 12a)	368,895,497	367,491,543	*Depreciation (Notes 7 and 12a)*
Jasa penunjang penyimpanan	349,055,790	371,857,422	*Storage support services*
Gaji dan tunjangan	79,562,628	49,035,090	*Salaries and allowances*
Penurunan nilai aset tetap	64,301,790	19,545,268	*Impairment of fixed assets*
Penyediaan air bersih	49,631,072	42,943,603	*Clean water supply*
Lain-lain	3,685,413	8,918,687	*Others*
Jumlah	**915,132,190**	**859,791,613**	***Total***

Lihat Catatan 20 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 20 for related party transactions and balances.

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *18. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2024	2023	
Gaji dan tunjangan	76,823,585	68,437,026	*Salaries and allowances*
Jasa penunjang penyimpanan	37,587,134	5,017,985	*Storage support services*
Penyusutan (Catatan 7)	1,201,628	407,969	*Depreciation (Note 7)*
Lain-lain	8,586,415	2,896,091	*Others*
Jumlah	**124,198,762**	**76,759,071**	***Total***

19. LAIN-LAIN, BERSIH / *19. OTHERS, NET*

	2024	2023	
Keuntungan dari pemutusan kontrak (Catatan 21)	138,915,942	85,471,747	*Gain from termination of contract (Note 21)*
Rugi selisih kurs, neto	(14,497,067)	(15,241,490)	*Foreign exchange loss, net*
Penyisihan piutang tak tertagih	(614,633)	(289,436)	*Bad debt expense*
Penyesuaian liabilitas sewa	-	4,270,982	*Lease liability adjustment*
Lain-lain	677,823	1,246,808	*Others*
Jumlah	**124,482,065**	**75,458,611**	***Total***

20. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH / *20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES*

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/*Related parties and government-related entities*	**Sifat hubungan/ *Nature of relationships***	**Saldo dan sifat transaksi/ *Balances and nature of transactions***
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pemegang saham utama/ *Ultimate shareholder*	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha/ *Revenue, cost of revenue, trade receivables and trade payables*
PIS	Pemegang saham mayoritas/ *Majority shareholder*	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha dan pinjaman dari pemegang saham/ *Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and loan from shareholder*

20. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES *(continued)*

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The nature of relationships with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/*Related parties and government-related entities*	**Sifat hubungan/ *Nature of relationships***	**Saldo dan sifat transaksi/ *Balances and nature of transactions***
PTK	Pemegang saham/*Shareholder*	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha/ *Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables*
PPL	Pemegang saham/*Shareholder*	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha/ *Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables*
PT Pertamina Patra Niaga (“PPN”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha/ *Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables*
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (“PHKT”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pendapatan dan aset kontrak/ *Revenue and contract assets*
PT Pertamina Marine Solutions (“PMSol”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha/ *Revenue, cost of revenue, trade receivables contract assets and trade payables*
PT Pertamina Marine Engineering (“PME”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan, aset kontrak, penyertaan saham dan utang usaha/ *Cost of revenue, contract assets, investment in shares and trade payables*
PT Kilang Pertamina Internasional (“KPI”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Pertamina Training & Consulting (“PTC”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Pertamina Drilling Contractor (“PDC”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Prima Armada Raya (“PAR”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Pertamina Bina Medika (“PBM”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Patra Jasa (“Patra Jasa”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha/ *Cost of revenue, trade receivables and trade payables*
PT Elnusa Petrofin (“Elnusa”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Mitra Tours & Travel (“MTT”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Pertamina Power Indonesia (“PPI”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (“ATPI”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan/ *Cost of revenue*
PT Pertamina Maintenance & Construction (“PMC”)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ *Cost of revenue and trade payables*

20. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES *(continued)*

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The nature of relationships with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/*Related parties and government-related entities*	**Sifat hubungan/*Nature of relationships***	**Saldo dan sifat transaksi/*Balances and nature of transactions***
PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/*Cost of revenue and trade payables*
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Pendapatan dan aset kontrak/*Revenue and contract assets*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Wika")	Entitas sepengendali/*Entity under common control*	Utang usaha/*trade payables*
Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/*Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/*Placement of cash and cash equivalents*
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/*Government-related entity*	Penempatan kas dan setara kas/*Placement of cash and cash equivalents*

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah, yang terafiliasi dengan Perusahaan melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak- pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Company entered into trade and other transactions with related parties and Government-related entities which are affiliated with the Company through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase prices among related parties and Government-related entities are made based on forms agreed by the parties and may not be the same as those of transactions between third parties.

Saldo-saldo dan transaksi signifikan dengan pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Significant balances and transactions with related parties and Government-related entities are as follows:

Kas dan setara kas (Catatan 4) / ***Cash and cash equivalents (Note 4)***

	2024	**2023**	
Kas di Bank	413,216,622	660,035,031	*Cash in banks*
Deposito berjangka	4,500,000	4,500,000	*Time deposit*
Jumlah	**417,716,622**	**664,535,031**	***Total***

Piutang usaha (Catatan 5) / ***Trade receivables (Note 5)***

	2024	**2023**	
PPN	10,687,785	56,869,912	*PPN*
PIS	7,603,720	11,098,397	*PIS*
PTK	2,797,898	2,280,758	*PTK*
PHE OSES	2,731,643	-	*PHE OSES*
Pertamina	-	1,084,168	*Pertamina*
Lain-lain	1,182,649	563,108	*Others*
	25,003,695	71,896,343	
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(413,472)	(909,732)	*Provision for impairment of related parties*
Jumlah	**24,590,223**	**70,986,611**	***Total***

20. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES *(continued)*

Aset kontrak (Catatan 6) / ***Contract assets (Note 6)***

	2024	2023	
PPN	105,205,178	211,117,647	*PPN*
PIS	16,711,950	12,529,931	*PIS*
Pertamina	9,396,000	-	*Pertamina*
PTK	4,312,579	2,857,383	*PTK*
PHKT	732,729	1,164,895	*PHKT*
PHE OSES	330,285	1,456,298	*PHE OSES*
Lain-lain	611,057	207,875	*Others*
	137,299,778	229,334,029	
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(274,600)	(384,899)	*Provision for impairment of related parties*
Jumlah	**137,025,178**	**228,949,130**	***Total***

Penyertaan saham / ***Investment in shares***

	Kepemilikan/ *Ownership (%)*	2024	2023	
PME	0,83%	1,391,555	1,313,570	*PME*

Utang usaha (Catatan 8) / ***Trade payables (Note 8)***

	2024	2023	
Wika	202,801,558	-	*Wika*
PMSol	29,864,850	20,454,584	*PMsol*
PTC	17,955,557	14,999,178	*PTC*
ATPI	16,773,555	3,795,751	*ATPI*
PME	15,881,000	16,528,753	*PME*
PPL	12,392,767	1,827,662	*PPL*
PBM	8,967,352	5,487,153	*PBM*
PAR	3,723,108	1,457,576	*PAR*
PMC	3,129,523	1,801,190	*PMC*
PPN	2,553,537	41,206,312	*PPN*
Pertamina	1,520,733	3,710,457	*Pertamina*
PPI	1,374,816	771,801	*PPI*
KPI	862,724	4,274,328	*KPI*
PTK	589,052	634,508	*PTK*
Lain-lain	2,054,957	390,002	*Others*
Jumlah	**320,445,089**	**117,339,255**	***Total***

Pinjaman dari pemegang saham (Catatan 10) / ***Shareholders loan (Note 10)***

	2024	2023	
PIS	612,971,068	543,135,276	*PIS*

Pendapatan / ***Revenue***

	2024	2023	
PPN	930,688,383	863,233,060	*PPN*
PIS	20,578,982	18,424,990	*PIS*
PTK	7,705,333	6,207,591	*PTK*
PHKT	4,638,920	6,682,261	*PHKT*
PHE OSES	1,605,637	1,456,293	*PHE OSES*
Lain-lain	1,051,343	1,156,741	*Others*
Jumlah	**966,268,598**	**897,160,936**	**Total**

20. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES *(continued)*

Beban pokok pendapatan / ***Cost of revenue***

	2024	2023	
PTC	64,849,591	69,139,548	*PTC*
PMSol	47,717,465	40,589,447	*PMSol*
ATPI	46,759,528	7,273,135	*ATPI*
PIS	43,721,391	1,226,376	*PIS*
PME	17,698,644	44,546,321	*PME*
PPL	10,305,790	2,217,102	*PPL*
PPN	6,642,226	40,666,912	*PPN*
PAR	6,278,889	4,882,501	*PAR*
PMC	4,266,390	1,707,284	*PMC*
KPI	3,786,805	5,817,269	*KPI*
PBM	3,673,131	2,612,305	*PBM*
PPI	2,305,328	2,028,052	*PPI*
PGAS	1,629,993	-	*PGAS*
Pertamina	1,594,230	3,172,730	*Pertamina*
Patra Jasa	1,247,269	907,309	*Patra Jasa*
PTK	833,000	797,388	*PTK*
Lain-lain	288,471	885,084	*Others*
Jumlah	**263,598,141**	**228,468,763**	***Total***

Kompensasi manajemen kunci / ***Key management compensation***

Manajemen kunci adalah Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key management includes Director and Boards of Commissioner of the Company. The compensation paid or payables to key management are as below:

	2024	2023	
Gaji dan imbalan lainnya	**3,157,232**	**2,391,031**	***Salaries and other benefits***

Manajemen kunci juga menerima kompensasi lain yang dibayarkan oleh PIS, induk perusahaan.

Key management also received other benefits which were paid by PIS, the parent company.

21. PERIKATAN PENTING DAN KOMITMEN

21. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Perikatan penting dengan pelanggan

Significant commitment with customer

Perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM dan LPG dengan Patra Niaga

Service agreement for receiving, storage and distribution of fuel and LPG with Patra Niaga

Perusahaan bersama dengan Patra Niaga mengadakan perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM dan LPG pada 30 Desember 2021 untuk TBBM Tanjung Uban, Bau-Bau, Tanjung Sekong, Pulau Sambu dan Kota Baru. Estimasi kontrak total adalah sebesar Rp6.465.662.510.838 (setara AS$106.706.774), dengan *thruput fee* berkisar dari AS$1,12/KL sampai AS$6,61/KL.

The Company together with Patra Niaga, entered into service agreement for receiving, storage and distribution of fuel and LPG on 30 December 2021 for FT Tanjung Uban, Bau-Bau, Tanjung Sekong, Pulau Sambu dan Kota Baru. The total contract estimate is Rp6,465,662,510,838 (equivalent to US$106,706,774), with throughput fee ranging from US$1.12/KL to US$6.61/KL.

Pada tanggal 16 Desember 2024, Perusahaan dan Patra Niaga menandatangani berita acara klarifikasi dan negosiasi amandemen perjanjian untuk TBBM Pulau Sambu untuk menetapkan nilai *storage fee* menjadi AS$5/KL dan *thruput fee* menjadi AS$0.74/KL

On 16 December 2024, the Company and Patra Niaga signed a Clarification and Negotiation Amendment Agreement for TBBM Pulau Sambu to set the storage fee at USD 5/KL and the throughput fee at USD 0.74/KL.

21. PERIKATAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

Perikatan penting dengan pelanggan (lanjutan)

Perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM dan LPG dengan Patra Niaga (lanjutan)

Basis volume thruput yang digunakan untuk perhitungan pendapatan adalah sesuai dengan volume aktual penyerahan BBM dan LPG yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2021 – 31 Agustus 2031.

Perjanjian kemitraan pengembangan dan pemanfaatan TBBM Pulau Sambu antara Pertamina dan Freepoint Commodities Singapore Pte., Ltd., ("Freepoint")

Pada tanggal 3 Mei 2019, Pertamina menandatangani perjanjian dengan Freepoint dengan nomor perjanjian SP-020/R00000/2019-S0. Perjanjian tersebut terkait dengan kemitraan antara Pertamina dan Freepoint untuk pengembangan dan pemanfaatan TBBM Pulau Sambu, jual beli Bottom Product. Berkaitan dengan pengalihan bisnis terminal dari Pertamina ke Perusahaan, kemitraan antara Freepoint dengan Pertamina tersebut beralih ke Perusahaan.

Berkaitan dengan kemitraan ini, Perusahaan mencatat liabilitas kontrak sebesar AS$22.000.000 atas pendapatan diterima dimuka yang dibayarkan Freepoint ke Pertamina sebelum akuisisi bisnis terminal dari Pertamina ke Perusahaan.

Pada tanggal 17 April 2023, telah dilakukan kesepakatan novasi *Terminal Lease Agreement* ("TLA") antara Freepoint, Pertamina, dan Perusahaan. Selanjutnya, TLA tersebut telah dilakukan terminasi dan Perusahaan telah membayar kepada Freepoint sejumlah AS$16.214.327 sebagai pengembalian dari uang muka. Sisa uang muka sejumlah AS$5.785.673 atau setara dengan Rp85.471.747 yang tidak perlu dikembalikan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

21. SIGNIFICANT COMMITMENTS *(continued)*

Significant commitment with customer *(continued)*

Service agreement for receiving, storage and distribution of fuel and LPG with Patra Niaga *(continued)*

The throughput volume used for the calculation of revenue is the actual throughput volume agreed by both parties. The agreement is valid for 10 years from 1 September 2021 – 31 August 2031.

Agreement for the development and utilisation of Sambu Island TBBM between Pertamina and Freepoint Commodities Singapore Pte., Ltd., ("Freepoint")

On 3 May 2019, Pertamina signed an agreement with Freepoint with agreement number SP-020/R00000/2019-S0. The agreement is related to the partnership between Pertamina and Freepoint for the development and utilisation of Sambu Island TBBM, selling and buying Bottom Product. In connection with the transfer of the terminal business from Pertamina to the Company, the partnership between Freepoint and Pertamina was transferred to the Company.

In connection with this partnership, the Company recorded a contract liability of US$22,000,000 for the unearned revenues paid by Freepoint to Pertamina prior to the acquisition of the terminal business from Pertamina to the Company.

On 17 April 2023, signed a novation of Terminal Lease Agreement ("TLA") among Freepoint, Pertamina and the Company. Subsequently, this TLA was terminated and the Company paid US$16,214,327 to Freepoint as a refund of Freepoint's advance payment. The remaining advance of US$5,785,673 or equivalent to Rp85,471,747 that forfeited is recorded as other income.

21. PERIKATAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

Perikatan penting lainnya

Perjanjian Pembangunan Terminal LPG *Refrigerated* Jawa Timur (Tahap 2) Lingkup Terminal Sisi Darat dan *Jetty*

Pada tanggal 30 Juni 2021, Pertamina menandatangani perjanjian dengan Konsorsium Hutama Karya (Persero) – China Petrolium Pipeline engineering Company Limited dengan nomor perjanjian KTR_239PTMC&T/PPN40000/2021-SO. Perjanjian tersebut terkait Pembangunan tahap 2 Lingkup Sisi Darat dan Jetty Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Pada tanggal 23 Desember 2021, telah dilakukan kesepakatan novasi kontrak antara Konsorsium Hutama Karya (Persero) - China Petrolium Pipeline engineering Company Limited, Pertamina, dan Perusahaan.

Pada tanggal 22 September 2022 dilakukan pemutusan kontrak melaui surat No 346/PKT0000/202-S5, dikarenakan pihak Hutama Karya (Persero) – China Petrolium Pipeline engineering Company Limited tidak dapat melanjukan konstruksi sesuai kontrak. Pada tahun 2024 Perusahan menerima pencairan bank garansi atas pemutusan kontrak ini sebesar Rp138,915,942 dan dicatat pada pendapatan lain-lain

21. SIGNIFICANT COMMITMENTS *(continued)*

Significant commitment other

Agreement for the Construction of the Refrigerated LPG Terminal in East Java (Phase 2) Scope of the Land Terminal and Jetty.

On 30 June 2021, Pertamina signed an agreement with the Consortium of Hutama Karya (Persero) – China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited with agreement number KTR_239PTMC&T/PPN40000/2021-SO. The agreement is related to the Phase 2 Construction Scope of the Land Terminal and Jetty of the Refrigerated LPG Terminal in East Java. On 23 December 2021, a contract novation agreement was made between the Consortium of Hutama Karya (Persero) - China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited, Pertamina, and the Company.

On 22 September 2022, the contract was terminated through letter No. 346/PKT0000/202-S5, due to Hutama Karya (Persero) – China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited being unable to continue construction pursuant to the contract. In 2024, the Company received a bank guarantee disbursement for this contract termination amounting to Rp138,915,942, which was recorded under other income.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga). Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko pelanggan atau pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah maksimal eksposur dari risiko kredit adalah Rp587.158.468 (2023: Rp971.326.311).

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha dan aset kontrak. Perusahaan juga telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik untuk transaksi kas dan bank serta deposito berjangka, terlihat dengan sebagian besar bank tersebut berperingkat "Baa2" dari lembaga pemeringkat *Moody's*.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, liquidity risk, and market risk (including the effects of foreign currency exchange rates risk, and interest rates risk). The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor, and manage basic risks in order to safeguard the Company's long term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

a. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company. As at 31 December 2024, the total maximum exposure to credit risk was Rp587,158,468 (2023: Rp971,326,311)

Credit risk arises from cash in bank, time deposits, trade receivables and contract assets. The Company has placed its bank balances and time deposit in banks that have good credit for cash and bank and time deposit, quality as evidenced by most of the banks being rated "Baa2" based on Moody's.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk kontrak penjualan, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah. Kebijakan umum Perusahaan untuk pelanggan yang baru dan pelanggan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

- Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
- Menerima pelanggan baru yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Perusahaan.

***22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Company has clear policies on the selection of customers, where the Company has legally binding agreements for its sales contracts, and historically low levels of bad debts. The Company has also established general policies to new and existing customers, as follows:

- *Selection of customers with strong financial conditions and good reputations.*
- *Acceptance of new customers is approved by the authorised personnel according to the Company's delegation of authority policy.*

b. Risiko likuiditas

Untuk mengatur risiko likuiditas, Perusahaan melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Perusahaan dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan berdasarkan jatuh temponya yang relevan berdasarkan periode sisa hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

b. Liquidity risk

To manage its liquidity risk, the Company monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Company's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flows. The Company's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including loans payable maturity profiles and continuously assesses the financial markets or opportunities to raise funds.

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity `ings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2024				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1 sampai 2 tahun/ *Between 1 and 2 years***	**2 sampai 3 tahun/ *Between 2 and 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	381,693,276	-	-	381,693,276	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	345,430,010	-	-	345,430,010	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	87,297,069	48,127,791	383,837	135,808,697	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**814,420,355**	**48,127,791**	**383,837**	**862,931,983**	***Total financial liabilities***

	2023				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1 sampai 2 tahun/ *Between 1 and 2 years***	**2 sampai 3 tahun/ *Between 2 and 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	133,935,702	-	-	133,935,702	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	322,839,311	-	-	322,839,311	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	85,054,328	49,666,973	1,084,837	135,806,138	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**541,829,341**	**49,666,973**	**1,084,837**	**592,581,151**	***Total financial liabilities***

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko likuiditas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mengalami modal kerja negatif sebesar Rp969.330.233. Namun, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak terpapar risiko likuiditas yang signifikan karena Perusahaan telah memperoleh surat dukungan keuangan dari entitas induk yang menegaskan komitmen entitas induk untuk memberikan dukungan keuangan kepada Perusahaan setidaknya selama satu tahun sejak tanggal laporan keuangan agar Perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya saat jatuh tempo dalam rangka kegiatan usaha normal.

c. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar ditentukan menggunakan diskonto arus kas masa depan pada suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini untuk instrumen dengan jangka waktu dan jatuh tempo yang sama.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

d. Manajemen risiko permodalan

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya.

Direksi secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direktur juga mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

b. Liquidity risk *(continued)*

As at 31 December 2024, the Company had a negative working capital of Rp969,330,233. However, management believes the Company is not significantly exposed to significant liquidity risk since the Company has obtained a letter of financial support from its parent entity confirming the commitment from the parent entity to provide financial support to the Company for at least one year from the reporting date to enable the Company to meet its obligations as they become due in the normal course of business.

c. Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The fair value is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms and remaining maturities.

Management considers that the carrying amounts of interest bearing financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values.

d. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern, in addition to maximising the profits of the shareholders through the optimisation of the balance of debt and equity. The capital structure of the Company consists of cash and cash equivalents and equity attributable to equity holders of the parent, comprising issued capital, retained earnings and other equity components.

The Company's Directors periodically review the capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko pasar

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham dalam mata uang Dollar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp5.635.118.

ii. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS. Risiko tingkat suku bunga dari kas tidak signifikan.

Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Perusahaan terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dengan risiko suku bunga nilai wajar.

Jika suku bunga pinjaman naik atau turun sebesar 1% dibandingkan dengan suku bunga pinjaman pada tanggal 31 Desember 2024 (dengan semua variabel lainnya dianggap tidak berubah), maka laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 masing-masing akan turun atau naik sekitar Rp5.736.994.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

e. Market risk

i. Foreign exchange risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash in banks and shareholder loan in US Dollar currency.

As at 31 December 2024, had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, profit before income tax for the year ended 31 December 2024 would have been higher/lower Rp5,635,118.

ii. Interest rate risk

The Company's interest rate risk mainly arises from long-term borrowings denominated in US Dollars. The interest rate risk from cash is not significant.

Borrowing issued at variable rate exposes the Company to cash flow interest risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company to fair value interest risk.

If loan interest rates increase or decrease by 1% compared to the loan interest rate on 31 December 2024 (assuming all other variables remain unchanged), the profit before income tax of the Perusahaan for the year ended 31 December 2024 will decrease or increase by Rp5,736,994.

23. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset kontrak sejumlah Rp586.460.402 (2023: Rp971.326.311) sebagai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, dan mengklasifikasikan penyertaan saham senilai Rp1.391.555 (2023: Rp1.313.570) sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

23. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2024, the Company classified it's cash and cash equivalents, trade receivables, loan to related party and contract assets totaling Rp586,460,402 (2023: Rp971,326,311) as financial assets measured at amortised cost, and classified its investment in shares amounting to Rp1,391,555 (2023: Rp1,313,570) as fair value through other comprehensive income.

23. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN *(continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, biaya masih harus dibayar, liabilitas kontrak, liabilitas sewa, dan pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp1.910.132.764 (2023: Rp1.143.252.599) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

23. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

As at 31 December 2024, the Company classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, lease liabilities and shareholder loan totaling Rp1,910,132,764 (2023: Rp1,143,252,599) as financial liabilities measured at amortised cost.

24. INFORMASI ARUS KAS / *24. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

	2024	2023	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	3,421,084	10,823,015	*Addition of right-of-use asset through lease liabilities*
Penambahan aset tetap melalui akrual dan utang usaha	(470,828,784)	(247,668,552)	*Acquisition of fixed assets through accruals and trade payables*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statements are as follows:

	1 Januari/ *January 2024*	Arus kas/ *Cash flow*	Efek perubahan lainnya/ *Other adjustment effect*	31 Desember/ *December 2024*	
Liabilitas sewa	128,201,936	(3,294,982)	7,764,119	132,671,073	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	543,135,276	-	69,835,792	612,971,068	*Shareholder loan*

	1 Januari/ *January 2023*	Arus kas/ *Cash flow*	Efek perubahan lainnya/ *Other adjustment effect*	31 Desember/ *December 2023*	
Liabilitas sewa	198,614,647	(3,620,185)	(66,792,526)	128,201,936	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	-	545,208,300	(2,073,024)	543,135,276	*Shareholder loan*

Business Office:
Jl. Yos Sudarso No.205,
Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360

Kantor Pusat:
Jl. Raya Anyer Km. 119, Kepuh,
Kec. Ciwandan, Kota Cilegon, Banten 42446